



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

Buku XVII
RPIW Provinsi Banten



Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2025-2034 **Banten**





**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut RPIW Tahun 2025-2034.

KEDUA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. RPIW Provinsi Aceh;
2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;

3. RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
 4. RPIW Provinsi Sumatera Barat;
 5. RPIW Provinsi Bengkulu;
 6. RPIW Provinsi Riau;
 7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
 8. RPIW Provinsi Jambi;
 9. RPIW Provinsi Lampung;
 10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
 11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
 12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
 13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
 14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
 15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
 16. RPIW Provinsi Banten;
 17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
 18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
 19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
 20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
 22. RPIW Provinsi Bali;
 23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 25. RPIW Provinsi Gorontalo;
 26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
 27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
 28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
 29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
 30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
 31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
 32. RPIW Provinsi Maluku;
 33. RPIW Provinsi Papua;
 34. RPIW Provinsi Papua Barat;
 35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
 36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
 37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
 38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,
- disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
1. pendahuluan;
 2. arah kebijakan;
 3. profil wilayah dan potensi daerah;
 4. profil dan kinerja infrastruktur;
 5. permasalahan dan isu strategis;
 6. skenario pengembangan wilayah;
 7. analisis kebutuhan infrastruktur;
 8. rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
 9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

- KEEMPAT : RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034.
- KETUJUH : Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:

1. Buku I: RPIW Provinsi Aceh
2. Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;
3. Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;
6. Buku VI: RPIW Provinsi Riau;
7. Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;
9. Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;
10. Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;
17. Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;
23. Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;
26. Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;
33. Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;
34. Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
35. Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;

- 37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
- 38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menuntaskan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PU.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan pengembangan wilayah 10 tahun ke depan melalui dukungan infrastruktur PU. Dalam penyusunannya, saya mengarahkan RPIW melanjutkan arahan pembangunan yang telah dicapai dari RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU 2025 - 2029 dengan memperhatikan keberlanjutan manfaat infrastruktur PU terbangun.



Dody Hanggodo
Menteri Pekerjaan Umum

Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis. Pertama, RPIW merupakan *platform* sinergi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PU. Kedua, RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PU. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PU dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PU berbasis kewilayahan.

Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur PU bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.

Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, Desember 2025
Menteri Pekerjaan Umum

Dody Hanggodo

SAMBUATAN

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Bob Arthur Lombogia
Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur telah menjadi bagian penting pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2029. Peran ini masih menjadi salah satu prioritas pada periode-periode selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bersama dengan pembangunan sektor lainnya. Demikian pula dengan infrastruktur PU yang memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air, mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis nasional seperti pariwisata dan industri dalam rangka pengembangan wilayah.

Menyongsong RPJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur PU dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis Kementerian PU. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PU periode mendatang serta memorandum program infrastruktur PU yang akan dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPM 38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PU diharapkan dapat melanjutkan kebermanfaatan infrastruktur PU terbangun serta lebih memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan pengembangan wilayah.

Jakarta, Desember 2025

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Bob Arthur Lombogia



Tim Pengarah:

Bob Arthur Lombogia
Airlangga Mardjono
Yudha Mediawan
Rachman Arief Dienaputra
Melva Eryani Marpaung
Kuswardono

Tim Penyusun:

Bernadi Haryawan
Entatarina Simanjuntak
Dina Rachmayati
Raymond Tirtoadi
Veranita Hadyanti Utami
Maulida Fitri
Andika Era Yulianto
Rivina Yukeiko
Luthfiawati Bahman
Ulfa Fara Aqila
Putra Galuh Firmansyah
Rifan Rifandy

Tim Peninjau:

Anggar Lugastama



Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum
Gedung G BPIW – Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12110
www.bpiw.pu.go.id

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR PETA.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan dalam Kebijakan	2
1.3. Urgensi Penyusunan.....	4
1.4. Muatan RPIW.....	4
1.5. Manfaat RPIW.....	5
1.6. Kerangka Pikir Penyusunan RPIW.....	6
BAB 2 ARAH KEBIJAKAN	8
2.1. Kebijakan Penataan Ruang.....	8
2.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	8
2.1.2. Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali	9
2.1.3. RTRWP Banten	11
2.2. Kebijakan Sektor	13
2.2.1. Visi Indonesia 2045.....	13
2.2.2. Asta Cita.....	14
2.2.3. RPJMN Tahun 2025-2029.....	15
2.2.4. Proyek Strategis Nasional (PSN).....	19
2.2.5. RIPIN Tahun 2015 – 2035	19
2.2.6. RIPPARNAS Tahun 2010-2025	20
2.2.7. Perpres No. 26 Tahun 2012.....	21
2.2.8. RPJMD Provinsi Banten	21
2.2.9. Visium PUPR 2030	23
2.2.10. Sasaran Utama Kementerian PU 608	24
2.2.11. Rencana Strategis Kementerian PU	25
2.3. Agenda Global	27
2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur.....	28
2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	28
2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur Prioritas.....	34
BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH	37
3.1. Profil Fisik dan Kebencanaan.....	37
3.1.1. Profil Administrasi	37
3.1.2. Profil Topografi.....	39
3.1.3. Profil Geologi.....	39
3.1.4. Profil Klimatologi	42
3.1.5. Profil Hidrologi.....	42
3.1.6. Jasa Ekosistem	45
3.1.7. Tutupan Lahan.....	47
3.1.8. Kerawanan Bencana	47
3.2. Profil Demografi	53
3.2.1. Profil Kependudukan	53
3.2.2. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	56
3.2.3. Pengangguran.....	57
3.2.4. Kemiskinan.....	58
3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia.....	59
3.3. Profil Ekonomi.....	59
3.3.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).....	59
3.3.2. Pendapatan Per Kapita	60
3.3.1. Sektor Industri.....	62
3.3.2. Sektor Pertanian.....	63
3.3.3. Sektor Pariwisata	67
3.3.4. Perkembangan Investasi	69
3.3.5. Kapasitas Fiskal Daerah.....	71

3.4.	Profil Sosial Budaya.....	72
3.5.	Profil Interaksi Kawasan.....	74
BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR		76
4.1.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	76
4.1.1.	Infrastruktur Penyediaan Air Baku.....	76
4.1.2.	Infrastruktur Penyediaan Irigasi.....	79
4.1.3.	Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	81
4.1.4.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas	85
4.2.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	86
4.2.1.	Infrastruktur Jaringan Jalan	86
4.2.2.	Infrastruktur Jembatan	87
4.2.3.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas	89
4.3.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman.....	91
4.3.1.	Infrastruktur Air Minum.....	91
4.3.2.	Infrastruktur Sanitasi	94
4.4.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Prasarana Strategis	99
4.4.1.	Infrastruktur Sarana Pendidikan	99
4.4.2.	Infrastruktur Dukungan Perekonomian	101
4.4.3.	Infrastruktur Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	102
4.5.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Non - PU.....	105
4.5.1.	Infrastruktur Perumahan	105
4.5.2.	Penanganan Kumuh Kawasan	107
4.5.3.	Infrastruktur Perhubungan	108
4.5.4.	Infrastruktur Jaringan Energi.....	108
4.5.5.	Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi.....	108
BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		109
BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH		130
6.1.	Proyeksi Pertumbuhan	130
6.1.1.	Proyeksi Demografi.....	130
6.1.2.	Proyeksi Ekonomi.....	132
6.1.3.	Keberlanjutan Lingkungan.....	133
6.2.	Visi dan Strategi	135
6.2.1.	Perumusan Visi Wilayah	135
6.2.2.	Penyusunan Strategi Fokus Perkotaan	135
6.2.3.	Penyusunan Strategi Fokus Industri	141
6.2.4.	Penyusunan Strategi Fokus Pariwisata	147
6.2.5.	Penyusunan Strategi Fokus Pertanian	153
6.2.6.	Penyusunan Strategi Fokus Kawasan Afirmasi	159
6.3.	Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan).....	165
6.3.1.	Penentuan Kawasan Prioritas	165
6.3.2.	Daftar Kawasan Prioritas di Banten	170
6.3.3.	Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas	170
BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		174
7.1.	Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah	174
7.1.1.	Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi Banten.....	174
7.1.2.	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Perkotaan	182
7.1.3.	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Industri.....	198
7.1.4.	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata	205
7.1.5.	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pertanian.....	222
7.1.6.	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Afirmasi	227
7.1.7.	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Kawasan Rawan Bencana	241
7.2.	Analisis Keterpaduan Infrastruktur.....	246
7.2.1.	Matriks Keterpaduan Infrastruktur Prioritas	248
BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR		253
8.1.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Bidang PU	253
8.1.1.	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	253
8.1.2.	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	280
8.1.3.	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman	301
8.1.4.	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Prasarana Strategis	317
8.2.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur	318

8.2.1.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PU dan Non PU Fokus Perkotaan	320
8.2.2.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PU dan Non PU Fokus Industri... ..	323
8.2.3.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PU dan Non PU Fokus Pariwisata	327
8.2.4.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PU dan Non PU Kawasan Afirmasi	332
8.2.5.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PU dan Non PU Kawasan Pertanian	336
BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW		341
9.1.	Latar Belakang	341
9.2.	Tujuan.....	342
9.3.	Jenis Pemantauan dan Evaluasi.....	342

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Provinsi Banten.....	21
Tabel 2.2 Kegiatan Utama Kementerian PU.....	25
Tabel 2.3 <i>Highlight Intervensi</i> Kementerian PU di Kawasan Prioritas.....	26
Tabel 2.4 Agenda Global	27
Tabel 2.5 Rumusan Arah Kebijakan di Provinsi Banten.....	30
Tabel 2.6 Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur PU Prioritas	36
Tabel 3.1 Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Banten	47
Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Banten 2024.....	55
Tabel 3.3 PDRB Per Kapita Provinsi Banten.....	61
Tabel 3.4 Produksi Padi Provinsi Banten 2024.....	64
Tabel 3.5 Jarak DTW Provinsi Banten Dari Jakarta.....	69
Tabel 3.6 Cagar Budaya di Provinsi Banten.....	73
Tabel 3.7 Matriks <i>Origin-Destination</i> (OD) Provinsi Banten.....	75
Tabel 4.1 Profil Wilayah Sungai di Provinsi Banten.....	77
Tabel 4.2 Profil Bendungan di Provinsi Banten.....	78
Tabel 4.3 Profil Embung di Provinsi Banten	78
Tabel 4.4 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat di Provinsi Banten	79
Tabel 4.5 Daerah Irigasi Kewenangan Daerah di Provinsi Banten	79
Tabel 4.6 IKS di Provinsi Banten.....	80
Tabel 4.7 Luasan LSD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	80
Tabel 4.8 Luasan LP2B per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	81
Tabel 4.9 Infrastruktur Pengaman Pantai di Provinsi Banten	81
Tabel 4.10 Kegiatan Penanganan Sungai di Provinsi Banten.....	82
Tabel 4.11 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air.....	85
Tabel 4.12 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	89
Tabel 4.13 Infrastruktur SPAM di Banten.....	91
Tabel 4.14 Akses Air Minum Layak dan Perpipaan di Banten	93
Tabel 4.15 Kinerja PDAM Provinsi Banten.....	93
Tabel 4.16 Profil TPA Provinsi Banten	95
Tabel 4.17 Timbulan Sampah Provinsi Banten.....	95
Tabel 4.18 Sanitasi Layak & Aman Provinsi Banten	96
Tabel 4.19 Jumlah Unit Sekolah di Provinsi Banten.....	99
Tabel 4.20 Nama Madrasah per Kabupaten.....	100
Tabel 4.21 RTLH Provinsi Banten Tahun 2022.....	105
Tabel 4.22 <i>Backlog</i> Perumahan Provinsi Banten.....	105
Tabel 4.23 Rumah Khusus Provinsi Banten.....	106
Tabel 4.24 Rumah Susun Provinsi Banten.....	106
Tabel 4.25 Luasan Kawasan Kumuh Provinsi Banten	107
Tabel 5.1 Isu Strategis Fokus Perkotaan	112
Tabel 5.2 Isu Strategis Fokus Industri	117
Tabel 5.3 Isu Strategis Fokus Pertanian	121
Tabel 5.4 Isu Strategis Fokus Pariwisata.....	125
Tabel 5.5 Isu Strategis Fokus Afirmasi.....	128
Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Banten.....	130
Tabel 6.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Banten	131
Tabel 6.3 Proyeksi Wisatawan Provinsi Banten.....	131
Tabel 6.4 Proyeksi Tenaga Kerja Provinsi Banten	132
Tabel 6.5 Proyeksi PDRB Provinsi Banten.....	132
Tabel 6.6 Proyeksi Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahun 2029.....	133
Tabel 6.7 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Kawasan Perkotaan	136
Tabel 6.8 Analisis <i>Five Forces</i> (Meso) Fokus Kawasan Perkotaan	137
Tabel 6.9 Analisis SWOT Fokus Perkotaan	138
Tabel 6.10 Skor <i>Strengths</i> dan <i>Weaknesses</i> Fokus Perkotaan.....	139
Tabel 6.11 Skor <i>Opportunities</i> dan <i>Threats</i> Fokus Perkotaan.....	140
Tabel 6.12 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Industri.....	142
Tabel 6.13 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Industri.....	143
Tabel 6.14 Analisis SWOT Fokus Industri.....	144
Tabel 6.15 Skoring <i>Strength</i> dan <i>Weakness</i> Fokus industri.....	145
Tabel 6.16 Skoring <i>Opportunity</i> dan <i>Threat</i> Fokus industri.....	145
Tabel 6.17 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pariwisata	148
Tabel 6.18 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pariwisata	149
Tabel 6.19 Analisis SWOT Fokus Pariwisata.....	150
Tabel 6.20 Skoring <i>Strength</i> dan <i>Weakness</i> Fokus Pariwisata.....	151

Tabel 6.21 Skoring <i>Opportunity</i> dan <i>Threat</i> Fokus Pariwisata.....	152
Tabel 6.22 Analisis Pestle (Makro) Fokus Pertanian	154
Tabel 6.23 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pertanian	155
Tabel 6.24 Analisis SWOT Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Pertanian.....	155
Tabel 6.25 Skoring <i>Strength</i> dan <i>Weakness</i> Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Pertanian	156
Tabel 6.26 Skoring <i>Opportunity</i> dan <i>Threat</i> Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Pertanian	157
Tabel 6.27 Analisis Pestle (Makro) Fokus Kawasan Afirmasi.....	160
Tabel 6.28 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Kawasan Afirmasi	161
Tabel 6.29 Analisis SWOT Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Afirmasi	161
Tabel 6.30 Skoring <i>Strength</i> dan <i>Weakness</i> Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Afirmasi	162
Tabel 6.31 Skoring <i>Opportunity</i> dan <i>Threat</i> Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Afirmasi	164
Tabel 6.32 Parameter Penilaian Fokus Perkotaan.....	166
Tabel 6.33 Penilaian Kawasan Fokus Perkotaan	166
Tabel 6.36 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata	168
Tabel 6.37 Penilaian Kawasan Fokus Pariwisata	168
Tabel 6.38 Parameter Penilaian Fokus Pertanian	168
Tabel 6.39 Penilaian Kawasan Fokus Pertanian.....	169
Tabel 6.41 Penilaian Kawasan Fokus Afirmasi	169
Tabel 6.42 Fokus Intervensi Kawasan Afirmasi Kab. Lebak	169
Tabel 6.43 Daftar Kawasan Prioritas di Banten	170
Tabel 6.44 Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas di Banten.....	171
Tabel 7.1 Bendungan Eksisting dan Kontruksi	175
Tabel 7.2 Waktu Tempuh Lintas Utama Banten	176
Tabel 7.3 Waktu Tempuh Perkotaan Banten	176
Tabel 7.4 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Perkotaan di Provinsi Banten	178
Tabel 7.5 Proyeksi Penyediaan Air Bersih Perkotaan di Provinsi Banten	178
Tabel 7.6 Proyeksi Timbulan Air Limbah di Provinsi Banten	179
Tabel 7.7 Proyeksi Penyediaan Air Limbah di Provinsi Banten	180
Tabel 7.8 Proyeksi Timbulan Persampahan.....	181
Tabel 7.9 Proyeksi Timbulan Sampah di Provinsi Banten	181
Tabel 7.10 Luas Kawasan Kerawanan Banjir di Cilegon - Serang	184
Tabel 7.11 Luas Kawasan Kerawanan Tsunami di Cilegon - Serang	185
Tabel 7.12 Proyeksi Jumlah Penduduk Alami Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang.....	186
Tabel 7.13 Proyeksi Jumlah ABK dan Pekerja Pelabuhan Ciwandan	187
Tabel 7.14 Proyeksi Jumlah ABK dan Pekerja Pelabuhan Ciwandan.....	188
Tabel 7.15 Potensi Sumber Air Baku Kota Serang - Cilegon	188
Tabel 7.16 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang	190
Tabel 7.17 Proyeksi Jumlah Kendaraan Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang	192
Tabel 7.18 Proyeksi LHRT Jalan Nasional Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang	193
Tabel 7.19 Kinerja Jaringan Jalan Nasional Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang	194
Tabel 7.20 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik dan Non Domestik Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang.....	195
Tabel 7.21 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang	196
Tabel 7.22 Timbulan Air Limbah di Perkotaan Cilegon - Serang.....	197
Tabel 7.23 Luas Kawasan Industri di Cilegon - Serang	198
Tabel 7.24 Proyeksi Okupansi KI Prioritas.....	199
Tabel 7.25 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik dan Non Domestik.....	203
Tabel 7.26 Timbulan Sampah di Kecamatan KI Prioritas Provinsi Banten	204
Tabel 7.27 Timbulan Air Limbah di Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	205
Tabel 7.28 Pengaman Pantai di Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung.....	209
Tabel 7.29 Proyeksi Jumlah Penduduk Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung.....	209
Tabel 7.30 Jumlah Wisatawan Kawasan Labuan - Tj. Lesung	210
Tabel 7.31 Proyeksi Jumlah Wisatawan Kawasan Labuan - Tj. Lesung.....	210
Tabel 7.32 Proyeksi Jumlah Penduduk di KPPN Serang-Banten Lama.....	210
Tabel 7.33 Potensi Air Baku di Labuan - Tj. Lesung	211
Tabel 7.34 Proyeksi Jumlah Wisatawan Kawasan Labuan - Tj. Lesung	214
Tabel 7.35 Proyeksi Bangkitan Pergerakan Kawasan Labuan - Tj. Lesung	214
Tabel 7.36 Proyeksi LHR dan VCR di Jalan Nasional	215
Tabel 7.37 Proyeksi Bangkitan Pergerakan KPPN Serang-Banten Lama	215

Tabel 7.38 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Labuan - Tj. Lesung	216
Tabel 7.39 GAP Kebutuhan Air Minum Kecamatan Panimbang (SPAM Tj Lesung dan KPSPAMS Tanjung Jaya)	216
Tabel 7.40 GAP Kebutuhan Air Minum Kecamatan Labuan (SPAM Sukamaju, Cipanggitik, Citaman, dan Cipicung)	217
Tabel 7.41 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KPPN Serang-Banten Lama	218
Tabel 7.42 GAP Kebutuhan Air Minum KPPN Serang-Banten Lama	218
Tabel 7.43 Proyeksi Timbulan Sampah Labuan - Tj. Lesung	219
Tabel 7.44 Kapasitas TPA di wilayah Kab. Pandeglang	219
Tabel 7.45 Timbulan Sampah di KPPN Serang-Banten Lama	220
Tabel 7.46 Timbulan Air Limbah Domestik Labuan - Tj. Lesung	220
Tabel 7.47 Timbulan Air Limbah Pariwisata Labuan - Tj. Lesung	221
Tabel 7.48 Proyeksi Timbulan Air Limbah KPPN Serang-Banten Lama	221
Tabel 7.49 Data Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	222
Tabel 7.50 Luas Daerah Irigasi	223
Tabel 7.50 Kinerja Jaringan Irigasi	226
Tabel 7.50 Proyeksi Volume Kebutuhan Air Baku Irigasi	226
Tabel 7.53 Proyeksi Wisatawan Kawasan Banten Selatan	229
Tabel 7.54 Proyeksi Penduduk Kawasan Banten Selatan	229
Tabel 7.55 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Banten Selatan	231
Tabel 7.56 Proyeksi Bangkitan Pergerakan Kawasan Pantai Selatan	232
Tabel 7.57 Proyeksi Bangkitan Pergerakan Kawasan Baduy	233
Tabel 7.58 Proyeksi Bangkitan Pergerakan di Jalan Nasional	233
Tabel 7.59 Proyeksi Jalan Nasional	234
Tabel 7.60 Proyeksi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten	235
Tabel 7.61 Proyeksi Air Minum Perpipaan Kawasan Banten Selatan di Pantai Selatan	237
Tabel 7.62 Proyeksi Air Minum Perpipaan Kawasan Banten Selatan di Baduy	237
Tabel 7.63 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Banten Selatan	238
Tabel 7.64 Proyeksi Air Limbah	240
Tabel 7.65 Matriks Keterpaduan Infrastruktur Prioritas	248
Tabel 8.1 Rencana Aksi Infrastruktur SDA Provinsi Banten	254
Tabel 8.2 Rencana Aksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Banten	280
Tabel 8.3 Rencana Aksi Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten	301
Tabel 8.4 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Kawasan Perkotaan	320
Tabel 8.5 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Sektor Industri	323
Tabel 8.6 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Sektor Pariwisata	327
Tabel 8.7 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Kawasan Afirmasi	333
Tabel 8.8 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Kawasan Afirmasi	336

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.....	3
Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4
Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	7
Gambar 2.1 <i>Timeline</i> Pemerataan Pembangunan Daerah	14
Gambar 2.2 Visium PUPR 2030.....	24
Gambar 3.1 Jasa Ekosistem Provinsi Banten.....	45
Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2014-2024.....	53
Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2024	54
Gambar 3.4 Piramida Penduduk Povinsi Banten.....	55
Gambar 3.5 Kepadatan Penduduk <i>Bruto</i> dan <i>Netto</i>	56
Gambar 3.6 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Banten 2020-2024.....	57
Gambar 3.7 TPT Banten Tahun 2019-2023.....	58
Gambar 3.8 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Banten 2020-2024.....	58
Gambar 3.9 Pertumbuhan PDRB per Kabupaten 5 tahun terakhir.....	60
Gambar 3.10 PDRB ADHK Lapangan Usaha Provinsi Banten.....	60
Gambar 3.11 Persebaran PDRB per Kapita dan Sektor Unggulan	61
Gambar 3.12 Distribusi PDRB Sektor Industri Provinsi Banten	63
Gambar 3.13 Pergerakan Komoditas Unggulan Pertanian.....	65
Gambar 3.14 Kontribusi Sektor Pariwisata Provinsi Banten.....	68
Gambar 3.15 Persebaran DTW Provinsi Banten	69
Gambar 3.16 Perkembangan Penanaman Modal Banten 2020-2024	70
Gambar 3.17 Capaian Investasi di Provinsi Banten Tahun 2024.....	70
Gambar 3.18 Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Tahun 2024	71
Gambar 3.19 Kapasitas Fiskal Banten Tahun 2024	72
Gambar 3.20 Desa Adat, Peninggalan Bersejarah dan Warisan Budaya.....	74
Gambar 4.1 Peta Origin-Destination (OD) Provinsi Banten	75
Gambar 4.1 WS dan Indeks Penggunaan Air Provinsi Banten.....	78
Gambar 4.2 Infrastruktur Ketahanan Bencana Provinsi Banten.....	83
Gambar 4.3 Akses Air Minum Aman Provinsi Banten.....	94
Gambar 4.4 Timbulan Sampah Provinsi Banten	96
Gambar 4.5 Akses Sanitasi Aman Provinsi Banten.....	97
Gambar 4.6 Jumlah Unit Sekolah per Kabupaten Provinsi Banten.....	100
Gambar 4.7 Peta Sebaran Madrasah di Provinsi Banten	101
Gambar 4.8 Infografis Pasar di Provinsi Banten	102
Gambar 4.9 Infografis Sarana Olahraga di Provinsi Banten.....	103
Gambar 6.1 Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi Banten.....	131
Gambar 6.2 Kemampuan Lahan Provinsi Banten.....	134
Gambar 6.3 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Perkotaan	141
Gambar 6.4 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Industri	147
Gambar 6.5 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata	153
Gambar 6.6 <i>Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pertanian</i>	159
Gambar 6.7 <i>Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Afirmasi</i>	165
Gambar 6.8 Skenario Pengembangan Wilayah Provinsi Banten.....	172
Gambar 7.1 Peta Administrasi Perkotaan Cilegon - Serang.....	183
Gambar 7.2 Peta Kerawanan Bencana Kota Cilegon - Serang	185
Gambar 7.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Perkotaan Cilegon - Serang	187
Gambar 7.4 Jenis Kendaraan Kota Serang	191
Gambar 7.5 Jenis Kendaraan Kota Cilegon	191
Gambar 7.6 Sebaran Kawasan Industri Prioritas Banten.....	199
Gambar 7.7 Kondisi Layanan Jalan di Kawasan Cilegon - Serang.....	202
Gambar 7.8 Proyeksi Penduduk dan Pekerja Industri	203
Gambar 7.9 Peta Sebaran DTW di Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	207
Gambar 7.10 Peta Sebaran DTW di KPPN Serang-Banten Lama.....	207

Gambar 7.11 Peta Sebaran DTW di Kawasan Labuan.....	208
Gambar 7.12 Proyeksi Jumlah Wisatawan Labuan - Tj. Lesung.....	210
Gambar 7.13 Proyeksi Jumlah Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara) di KPPN Serang-Banten Lama.....	211
Gambar 7.14 Akses Menuju Kawasan Labuan-Tanjung Lesung.....	213
Gambar 7.15 Akses Menuju KPPN Serang-Banten Lama.....	213
Gambar 7.16 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten.....	223
Gambar 7.17 Sebaran LP2B dan Daerah Irigasinya.....	225
Gambar 7.18 Delineasi Kawasan Banten Selatan.....	228
Gambar 7.19 Proyeksi Kebutuhan Air Kawasan Banten Selatan.....	232
Gambar 7.20 Relevant Road Menuju Kawasan Banten Selatan di Baduy.....	235
Gambar 7.21 Relevant Road Menuju Kawasan Banten Selatan di Pantai Selatan.....	236
Gambar 7.22 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Banten Selatan.....	239
Gambar 7.23 Proyeksi Air Limbah Kawasan Banten Selatan.....	240
Gambar 7.24 Kondisi rawan bencana ekstrem dan tsunami (sumber: www.inarisk.bnpb.go.id).....	246
Gambar 8.1 Rangkuman Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur.....	319

DAFTAR PETA

Peta 2.1 Sintesis Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Banten	33
Peta 3.1 Profil Wilayah Administrasi Provinsi Banten	38
Peta 3.2 Profil Topografi dan Geologi Provinsi Banten	41
Peta 3.3 Profil Hidrologi Provinsi Banten.....	44
Peta 3.4 Profil Jasa Ekosistem Provinsi Banten	46
Peta 3.5 Tutupan Lahan Provinsi Banten Tahun 2011	50
Peta 3.6 Tutupan Lahan Provinsi Banten Tahun 2019	51
Peta 3.7 Kerawanan Bencana Provinsi Banten.....	52
Peta 3.8 Profil LP2B Provinsi Banten	66
Peta 4.1 Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Banten.....	84
Peta 4.2 Profil Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Banten.....	88
Peta 4.3 Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten	98
Peta 4.4 Profil Infrastruktur Prasarana Strategis Provinsi Banten.....	104
Peta 7.1 Kondisi rawan bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang	242
Peta 7.2 Kondisi rawan bencana tsunami di Kabupaten Lebak.....	243
Peta 7.3 Kondisi rawan bencana tsunami di Kabupaten Serang	244
Peta 7.4 Kondisi rawan bencana tsunami di Kota Cilegon	245

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan pokok-pokok yang melatarbelakangi penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah (RPIW) pada setiap wilayah perencanaan. Bab ini memuat sekurangnya penjelasan tentang latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, serta kerangka pikir penyusunan RPIW.

1.1. Latar Belakang

Provinsi Banten memiliki keunggulan geostrategis karena berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI 1) dan penyeberangan laut Jawa – Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan (Pelabuhan Cilegon), Merak, Bojonegara, dan Cigading. Hal ini berarti bahwa Provinsi Banten memiliki kekuatan dalam hal lalu lintas transportasi dan logistik laut. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan kedekatan dengan WM Jabodetabek menjadikan Provinsi Banten salah satu satelit bagi pergerakan penumpang dan barang yang tentunya berdampak pada *multiplier effect* ekonomi.

Selain keunggulan komparatif konteks regional, Provinsi Banten juga memiliki kekuatan ekonomi dan sosial yang cukup berpengaruh secara Nasional. Pada tahun 2024, Provinsi Banten menyumbang 3,97% PDRB Nasional, dengan sektor unggulan industri pengolahan. Sektor industri Provinsi Banten memberikan kontribusi 7% terhadap industri nasional dan 30,25% terhadap PDRB Provinsi Banten atau sebesar 178,4 miliar rupiah. Sub sektor industri yang menjadi unggulan adalah industri pengolahan petrokimia dan smelter baja, dengan kontribusi masing-masing 78% dan 39% nasional. Terkait sektor pertanian, Provinsi Banten menempati posisi ke-9 nasional dengan produksi sebesar 1.550.623 ton. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 2,52 juta, naik 30% dibandingkan tahun 2023. Sedangkan jumlah perjalanan wisatawan ke Provinsi Banten pada tahun 2024 mencapai 4,8 juta wisatawan nusantara per tahun atau berada pada peringkat ke 5 tertinggi nasional.

Di samping peran penting secara ekonomi, Provinsi Banten juga memiliki kekuatan dalam hal demografi. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Banten sebanyak 12.431.390 jiwa (4% nasional atau tertinggi ke 5 nasional), dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata (CAGR 2010-2020) sebesar 1,16%, dengan rata-rata nasional sebesar 1,11%. Provinsi Banten memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.248 jiwa/km², atau terpadat ketiga nasional. Tingkat migrasi masuk Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 18,77% dan menempati posisi ke 8 terbesar secara nasional.

Secara sosial budaya, Provinsi Banten memiliki keunikan berupa Budaya Baduy yang sampai saat ini masih lestari dan menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Suku Baduy merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy tinggal di kawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 ha di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Dengan keunikan ini menjadikan Provinsi Banten memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Pengembangan wilayah Provinsi Banten dihadapkan pada berbagai kendala yaitu ketergantungan ekonomi terhadap wilayah Jabodetabek yang dapat menyebabkan tarikan ekonomi lebih mengarah ke Jabodetabek daripada di dalam Provinsi Banten, disparitas wilayah yang masih tinggi di wilayah utara-selatan dikarenakan aktivitas ekonomi terkonsentrasi di wilayah utara sebesar 97%. Selain itu, lokasi Provinsi Banten juga berada pada kawasan rawan letusan gunung berapi (Anak Gunung Krakatau) yang menyebabkan Provinsi Banten rentan pada bencana gempa bumi dan tsunami, serta wilayah selatan yang masih sulit untuk didorong pertumbuhan ekonomi karena keterbatasan geografis.

Potensi kewilayahan mencakup sosial, ekonomi, dan juga tantangan geografis telah menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan nasional di wilayah Provinsi Banten. Hal ini dapat dilihat pada RPJMN Tahun 2025-2029, yang memfokuskan pengembangan wilayah Banten di sektor industri dan pariwisata, dengan memperhatikan kebijakan afirmasi dan tantangan fisik geografis di Banten Selatan. Dalam RPJMN tersebut juga telah dirumuskan indikasi program pengembangan wilayah.

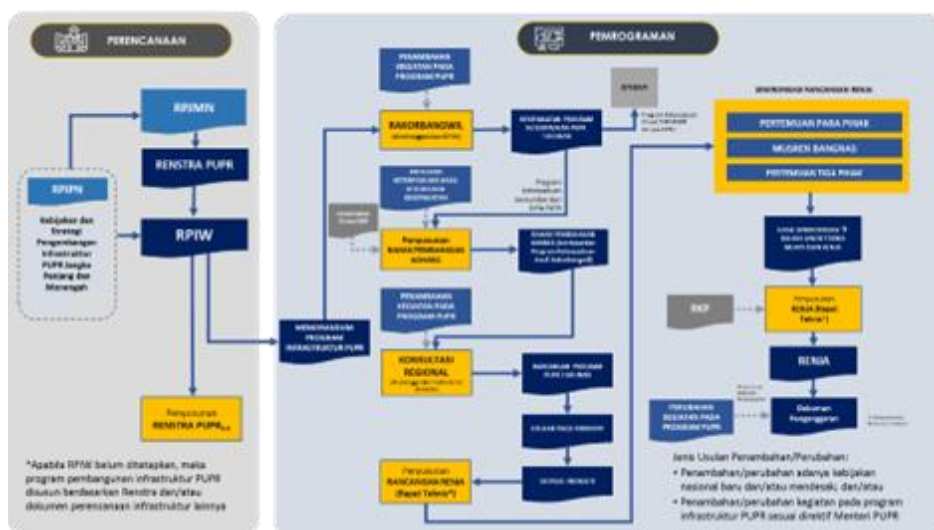
Dengan memahami kapasitas ekonomi dan sosial Provinsi Banten yang kuat, namun masih terdapat berbagai kendala dalam pengembangan wilayah, serta arah kebijakan nasional di Provinsi Banten, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan infrastruktur terintegrasi yang menjadi acuan bagi *multi-stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan wilayah Provinsi Banten. Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) ini dapat menjadi dokumen acuan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu di Provinsi Banten.

1.2. Kedudukan dalam Kebijakan

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dalam Peraturan Menteri PUPR No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPIW diberikan tugas untuk menyusun dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Muatan dokumen RPIW Provinsi Banten terdiri atas Arah Kebijakan, Profil Wilayah dan Potensi Daerah, Profil dan Kinerja Infrastruktur, Permasalahan dan Isu Strategis, Skenario Pengembangan Wilayah, Analisis Kebutuhan Infrastruktur, dan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur. Dokumen RPIW telah disusun dengan melibatkan unsur dari kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Unit Organisasi di Kementerian PU, sehingga diharapkan dokumen RPIW akan menjadi masukan Rencana Strategis PU periode mendatang dan memorandum program infrastruktur PU yang akan dibahas dalam Forum Rakorbangwil. Dokumen ini akan dilakukan peninjauan dengan memperhatikan dinamika kebijakan dan lingkungan strategis.

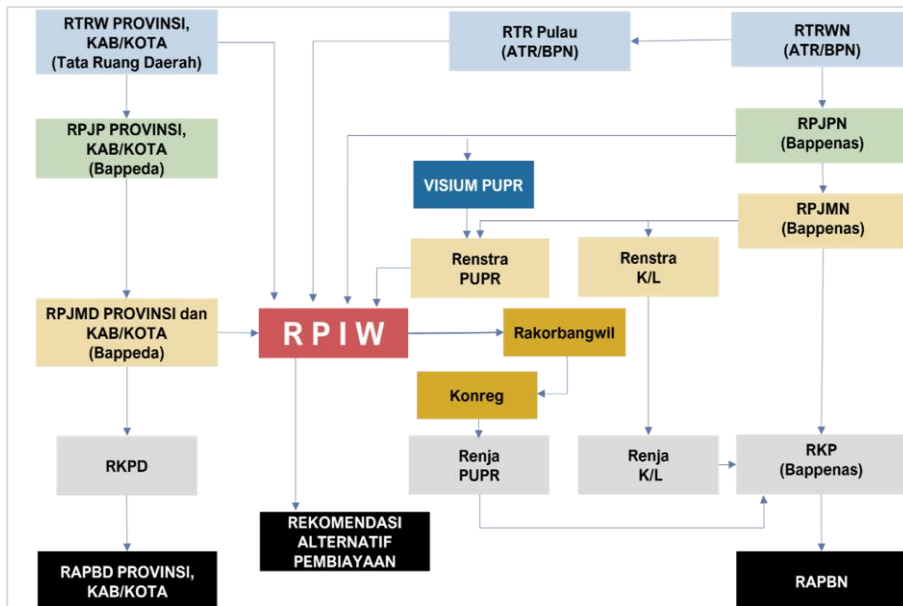
Dokumen RPIW Provinsi Banten merupakan input bagi penyusunan Renstra Kementerian PU dan acuan dalam perumusan Memorandum Program Infrastruktur PU yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) setiap tahunnya. Memorandum Program Rakorbangwil kemudian dibahas dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PU yang menghasilkan rancangan program tahunan Kementerian PU.



Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

Dalam penyusunan RPIW Provinsi Banten Tahun 2025-2034, kebijakan dan strategi pada dokumen perencanaan nasional dan daerah menjadi acuan dasar dalam menentukan arah pengembangan wilayah. Kebijakan tersebut mencakup arahan terkait aspek spasial dan sektoral baik jangka panjang maupun jangka menengah.



Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

1.3. Urgensi Penyusunan

Pembangunan infrastruktur PU harus dapat mendorong dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dukungan ini dapat diwujudkan dengan **pembangunan infrastruktur yang sinergi dan terpadu secara internal PU dan lintas sektor**. Dokumen RPIW Provinsi Banten merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi dan program pembangunan infrastruktur PU yang terpadu lintas sektor pada tingkat nasional dan daerah.

Selain sebagai acuan pembangunan infrastruktur yang terpadu, dokumen RPIW Provinsi Banten juga dapat menjadi alat untuk memprioritaskan penanganan kawasan dan dukungan program infrastruktur di Provinsi Banten. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi salah satu solusi dalam menghadapi keterbatasan pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

1.4. Muatan RPIW

Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah memuat 9 bab dengan rincian sebagai berikut.

1. **Pendahuluan**, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW;

2. **Arah Kebijakan**, meliputi sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang serta agenda global;
3. **Profil Wilayah dan Potensi Daerah**, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
4. **Profil dan Kinerja Infrastruktur**, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur permukiman dan perumahan. Bagian ini juga memuat profil dan kinerja infrastruktur non-PU;
5. **Permasalahan dan Isu Strategis**, meliputi potensi yang berupa keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup);
6. **Skenario Pengembangan Wilayah**, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritasasi);
7. **Analisis Kebutuhan Infrastruktur**, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
8. **Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur**, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PU tahunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan
9. **Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW**, memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

1.5. Manfaat RPIW

RPIW Provinsi Banten disusun dengan manfaat sebagai berikut:

1. Memadukan kebijakan lintas sektor di tingkat nasional dan daerah untuk merumuskan strategi dan program pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien;
2. Memadukan proses perencanaan dan pemrograman sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian PU; dan
3. Menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN, Renstra Kementerian PU, dan dokumen perencanaan lainnya.

1.6. Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

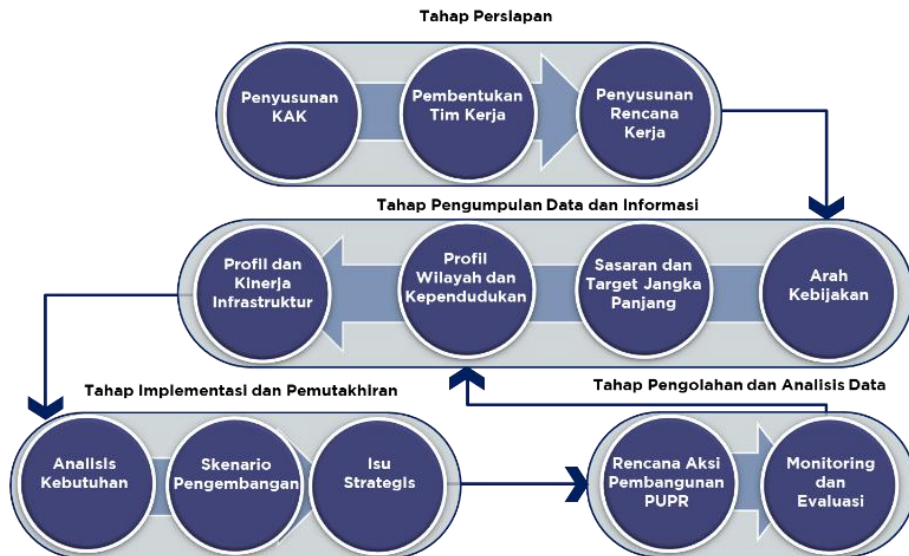
Tahapan utama dalam penyusunan RPIW terdiri dari 5 tahapan, yaitu: persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan skenario pengembangan, dan penyusunan rencana aksi.

Pada tahap persiapan, dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), pembentukan tim kerja, dan penyusunan rencana kerja. Tahap pengumpulan data dan informasi dimulai dengan perumusan arah kebijakan berdasarkan tinjauan terhadap berbagai dokumen kebijakan baik secara spasial dan sektoral. Perumusan arah kebijakan akan menghasilkan fokus perencanaan dan sasaran jangka panjang pengembangan wilayah Provinsi Banten. Setelah perumusan arah kebijakan, akan disusun profil wilayah dan profil infrastruktur yang sesuai dengan fokus perencanaan.

Tahapan selanjutnya, yaitu proses pengolahan dan analisis data yang dimulai dari perumusan permasalahan dan isu strategis berdasarkan arah kebijakan, kondisi eksisting wilayah, dan potensi pengembangan di masa mendatang. Berikutnya adalah penyusunan skenario pengembangan wilayah yang menghasilkan *grand strategy* masing-masing fokus perencanaan untuk menjawab isu permasalahan dan mewujudkan sasaran jangka panjang. Analisa penyusunan *grand strategy* yang digunakan adalah analisa PESTLE & 5 FORCES dan IFAS EFAS. Dalam penyusunan skenario juga dilakukan penentuan kawasan prioritas dengan metode *multi criteria analysis* (MCA) sesuai dengan fokus perencanaan yang akan diprioritaskan sampai dengan tahun 2034. Pada kawasan prioritas terpilih kemudian dilakukan perhitungan terkait kebutuhan infrastruktur berdasarkan strategi yang telah dihasilkan.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah penyusunan rencana aksi pembangunan infrastruktur dan monitoring-evaluasi pelaksanaan. *Grand strategy* yang dihasilkan dari skenario pengembangan wilayah akan diturunkan ke dalam program-program yang memuat rencana aksi yang terpadu antar sektor. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pelaksanaan rencana aksi dan mendapatkan umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya.

Secara sistematis, kerangka pikir penyusunan RPIW dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

BAB 2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan diperlukan sebagai panduan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam bab ini dijelaskan arah kebijakan yang memuat sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Selain itu, arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang serta agenda global. Kebijakan spasial dan sektoral baik tingkat nasional maupun tingkat daerah juga menjadi acuan perumusan sintesis kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Banten. Arah kebijakan inilah yang menjadi landasan dalam perumusan skenario pengembangan wilayah (Bab 6).

2.1. Kebijakan Penataan Ruang

Subbab ini berisi poin penting Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017), Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten (Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023).

2.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi Banten, yaitu sistem perkotaan, penguatan konektivitas dan logistik, wilayah sungai, kawasan lindung, kawasan andalan, dan kawasan strategis nasional.

Terkait sistem perkotaan, dalam RTRWN ini terdapat 2 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 2 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Banten. Kedua PKN tersebut merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Wilayah yang ditetapkan sebagai PKN di Provinsi Banten, yaitu PKN Serang dan PKN Cilegon. Sementara itu, kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKW adalah PKW Pandeglang dan PKW Rangkasbitung. Kedua PKW tersebut merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan skala provinsi atau melayani beberapa kabupaten/kota.

Untuk penguatan konektivitas dan logistik, RTRWN menetapkan rencana pengembangan jaringan Jalan Bebas Hambatan (JBH) dan simpul transportasi. Terdapat 4 ruas JBH di Banten, yaitu Ruas Tangerang–Merak, Cilegon–Bojonegara, Serpong–Balaraja, dan Ruas Tol Jabodetabek. Simpul transportasi terdiri dari pelabuhan dan bandar udara. Pelabuhan Ciwandan di Cilegon ditetapkan sebagai pelabuhan

utama dengan 3 pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Cigading, Pelabuhan Bojonegara, dan Pelabuhan Karangantu. Sedangkan untuk melayani angkutan penyeberangan, terdapat Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Margarigi. Simpul transportasi udara terdiri dari Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai bandar udara pengumpul primer.

Terkait pengelolaan sumber daya air, terdapat 2 wilayah sungai (WS) yang ditetapkan RTRWN dimana 1 diantaranya merupakan WS Lintas Provinsi (WS Ciliwung-Cisadane) dan 1 merupakan WS Strategis Nasional (WS Cidanau-Ciujung-Cidurian). Dalam rangka melestarikan sumber daya alam, RTRWN menetapkan kawasan lindung sebagai wilayah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. Kawasan lindung nasional di Provinsi Banten termasuk dalam kawasan konservasi yang terdiri atas kawasan suaka alam (3 kawasan cagar alam) dan kawasan pelestarian alam (2 taman nasional, 1 taman hutan rakyat, 2 taman wisata alam). Dari 8 kawasan lindung nasional di Provinsi Banten, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Wisata Alam Laut dan Pulau Sangiang, serta Taman Nasional Gunung Halimun - Salak merupakan kawasan lindung yang paling dikenal.

RTRWN juga menetapkan 2 kawasan andalan yang memiliki nilai strategis nasional di Provinsi Banten, yaitu Kawasan Laut Krakatau dsk dan Kawasan Bojonegara-Merak-Cilegon. Selain itu, terdapat 3 Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang mempunyai sudut kepentingan ekonomi (Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur) dan sudut kepentingan lingkungan hidup (Kawasan Selat Sunda dan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **arahan kebijakan RTRWN terhadap pengembangan wilayah Provinsi Banten** mencakup peningkatan akses pelayanan perkotaan dan **pengembangan kawasan strategis** berbasis **industri dan pariwisata** yang didukung oleh penguatan **konektivitas** dan **simpul transportasi** dengan tetap mempertahankan **fungsi kawasan lindung**.

2.1.2. Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi Banten, yaitu tujuan tata ruang Pulau Jawa-Bali yang berkaitan dengan Provinsi Banten, konektivitas dan sistem transportasi, jaringan sumber daya air, serta jaringan energi.

Dalam RTR Pulau Jawa-Bali penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Pulau Jawa-Bali menjadi: lumbung pangan utama nasional; kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan; pemanfaatan potensi sumber daya mineral, minyak dan gas

bumi, serta panas bumi secara berkelanjutan; pemanfaatan potensi perikanan, perkebunan, dan kehutanan secara berkelanjutan; pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional; pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE); kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan; Pulau Jawa bagian selatan yang berkembang dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana; dan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing.

Terkait sistem pusat permukiman, yang merupakan Pusat Kegiatan Utama (PKU) Provinsi Banten adalah Tangerang sebagai bagian dari kawasan perkotaan Jabodetabek. Sementara itu, Kawasan Perkotaan Cilegon, Kawasan Perkotaan Serang, Kawasan Perkotaan Pandeglang, dan Kawasan Perkotaan Rangkas Bitung di Provinsi Banten ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Pendukung (PKP).

Dalam RTR Pulau Jawa-Bali juga diatur mengenai pengembangan jalur lintas Pulau Jawa, yang mana di Provinsi Banten terdapat lintas utara dan lintas selatan. Lintas utara menghubungkan Merak – Jakarta – Karawang – Cirebon – Brebes – Batang – Semarang – Pati – Tuban – Lamongan – Gresik – Surabaya – Probolinggo – Banyuwangi. Lintas selatan menghubungkan Labuan-Bayah-Pelabuhan ratu – Pangandaran – Cilacap – Kebumen – Purworejo – Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek – Tulungagung – Blitar – Lumajang – Jember – Banyuwangi. Selain itu, ditetapkan juga jalur *feeder* utara – selatan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Hal lain yang ditekankan dalam RTR Pulau Jawa-Bali adalah terkait keterpaduan antar moda darat, laut, dan udara. Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api antarkota, jalur kereta api perkotaan, dan pelabuhan penyeberangan, serta menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara.

Untuk memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Banten, ditetapkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Labuan Maringgai – Bojonegara – Cilegon – Anyer – Cikande (melayani PKN Cilegon dan PKN Serang) serta jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang – Cilegon – Cikampek – Bandung (melayani PKN Serang dan PKN Cilegon).

Terkait sistem jaringan sumber daya air, di Provinsi Banten diatur mengenai pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya, yaitu 2 WS dan 5 daerah irigasi (DI). Untuk memastikan

keberlanjutan lingkungan hidup, di Provinsi Banten ditetapkan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana di 8 kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam RTR Pulau Jawa-Bali dapat disimpulkan bahwa arahan pengembangan wilayah Jawa-Bali untuk Provinsi Banten adalah sebagai pusat **pengembangan industri** berteknologi tinggi, padat modal, dan ramah lingkungan serta **kawasan pariwisata** cagar budaya dan bahari yang didukung dengan **konektivitas** ke kawasan perkotaan nasional, pelabuhan, dan bandara dengan memperhatikan **mitigasi dan adaptasi** terhadap bencana.

2.1.3. RTRWP Banten

RTRW Provinsi Banten menekankan pembangunan berbasis 3 wilayah kerja pembangunan (WKP), yaitu WKP I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan), WKP II (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon), dan WKP III (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak).

Berdasarkan 3 WKP tersebut, Pemerintah Provinsi Banten mengatur pengembangan sektor unggulan, sistem transportasi darat, dan infrastruktur dasar. Terkait pengembangan sektor unggulan masing-masing WKP dapat dirinci sebagai berikut:

1. WKP I dengan sektor unggulan: industri, jasa, perdagangan, pertanian, kelautan, perikanan, permukiman atau perumahan, dan pendidikan.
2. WKP II dengan sektor unggulan: pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, kelautan, perikanan, jasa, perdagangan, dan pertambangan.
3. WKP III dengan sektor unggulan: kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri, dan perkebunan.

Terkait penyediaan transportasi dan infrastruktur dasar berbasis WKP, pemerintah provinsi mengatur jalur lalu lintas angkutan bus perkotaan, jaringan kereta api perkotaan, dan *dryport*. Sistem transportasi perkotaan tersebut kemudian dihubungkan dengan sistem transportasi regional antar moda, sehingga terdapat penguatan konektivitas yang utuh untuk Provinsi Banten. Sementara itu, penyediaan infrastruktur dasar terdiri dari tempat pemrosesan akhir (TPA) regional dan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional beserta prasarana pendukungnya.

RTRW Provinsi juga mengatur terkait kawasan lindung, yang terdiri dari badan air seluas 5.187 ha (tersebar diseluruh daerah); kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) berupa hutan lindung seluas 8.775 ha (Kabupaten Pandeglang,

Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon); kawasan perlindungan setempat (PS) yang terdiri sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan situ, danau, embung, dan waduk seluas 17.820 ha; kawasan konservasi (KS) yang terdiri dari kawasan cagar alam, kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya, kawasan taman wisata alam, dan kawasan konservasi maritim seluas 150.948 ha; kawasan pencadangan konservasi laut (KPL) seluas 16.653 ha di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang; kawasan cagar budaya (CB) seluas 5.310 ha yang berada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Serang; dan kawasan ekosistem mangrove (EM) seluas 479 ha yang berada di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

RTRW Provinsi Banten mengarahkan pengembangan strategis Provinsi, yaitu (1) Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) yang diarahkan di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dengan mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perumahan, pemerintahan, pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa serta infrastruktur dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan. (2) Kawasan Serang Utara Terpadu yang diarahkan di Kabupaten Serang dan Kota Serang dengan mewujudkan kawasan strategis Serang Utara sebagai pusat kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antar bagian kawasan yang berkelanjutan. (3) Kawasan Pantai Selatan Terpadu yang diarahkan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perumahan, pemerintahan, pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa, serta infrastruktur dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan. (4) Kawasan Koridor Pantai Barat Banten yang meliputi wilayah barat di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang dengan mewujudkan optimasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir barat Banten berbasis mitigasi bencana.

Dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Provinsi dilakukan pengendalian luasan kawasan pertanian pangan paling sedikit 380.398 ha meliputi: Kabupaten Pandeglang; Kabupaten Lebak; Kabupaten Tangerang; Kabupaten Serang; Kota Cilegon; dan Kota Serang, selain itu ditetapkan KP2B seluas kurang lebih 123.216 Ha. Sedangkan dalam perencanaan sektor industri, diarahkan Kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas kurang lebih 60.762 ha, tersebar di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Dalam RTRWP Banten juga mengarahkan Kawasan Pariwisata seluas 31.155 ha.

Selain itu terdapat pengembangan kawasan strategis yang berdasarkan kepentingan sosial dan budaya, yaitu (1) Kawasan Banten Lama yang diarahkan di Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan bertujuan mewujudkan kawasan strategis Provinsi Kawasan Banten Lama dan penyangga adat Baduy sebagai kawasan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, agama, dan atau kebudayaan berbasis kegiatan sosial dan budaya yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan (2) Kawasan Penyangga Adat Baduy yang diarahkan di Kabupaten Lebak yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan strategis provinsi kawasan penyangga adat baduy sebagai kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal berbasis kegiatan sosial dan budaya yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa RTRW Provinsi Banten mengarahkan **pembangunan ekonomi berbasis 3 Wilayah Kerja Pembangunan (WKP)** dengan sektor unggulan **industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan perikanan.**

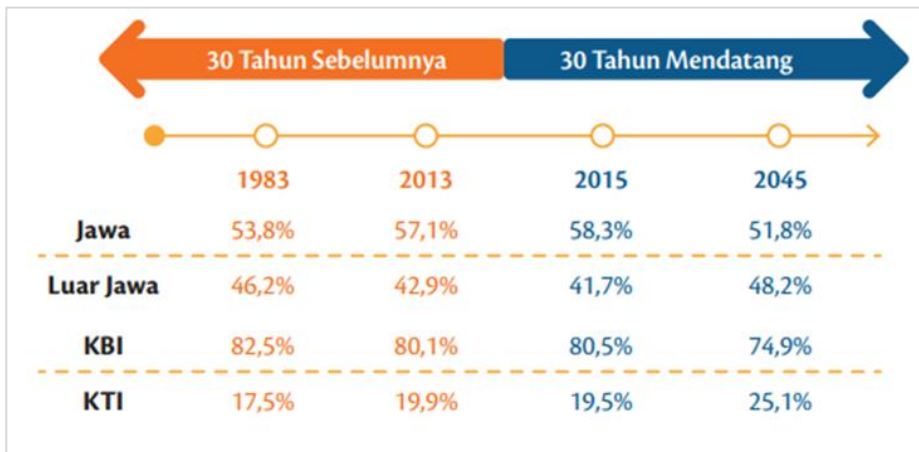
2.2. Kebijakan Sektor

Kebijakan sektor yang dibahas dalam paragraf di bawah ini adalah terkait Visi Indonesia 2045, Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Proyek Strategis Nasional, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 - 2035, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 - 2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023 - 2026, Sasaran Utama Kementerian PU 608 dan Rencana Strategis Kementerian PU.

2.2.1. Visi Indonesia 2045

Terdapat 4 pilar untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Infrastruktur menjadi salah satu *prime mover* pencapaian 4 pilar tersebut. Dukungan infrastruktur untuk Pilar 1 berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; untuk Pilar 2 berupa penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan *ease of doing business/investment*; untuk Pilar 3 berupa penyediaan infrastruktur dalam upaya mengurangi ketimpangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Luar Kawasan Barat Indonesia (KBI), serta Wilayah Jawa dan Wilayah Luar Jawa; dan untuk Pilar 4 berupa reformasi birokrasi pada seluruh instansi (kementerian/lembaga pemerintah).

Terkait Pilar 3, disparitas Wilayah Jawa dan Luar Jawa menurun dari 7,6% pada tahun 1983 menjadi 3,6% pada tahun 2045. Demikian juga dengan disparitas antara KBI dan KTI akan menurun dari 65% pada tahun 1983 menjadi 49,8% pada tahun 2045, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Timeline Pemerataan Pembangunan Daerah

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Arahan Visi Indonesia 2045 adalah **pengembangan infrastruktur** mendukung **pendidikan, pertumbuhan ekonomi** berkelanjutan dan **kemudahan investasi**, serta **pengurangan disparitas** Jawa-Luar Jawa dan KBI-KTI.

2.2.2. Asta Cita

Dalam tahapan jangka menengah pertama menuju Visi Indonesia 2045 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, pemerintah saat ini menetapkan 8 misi untuk mewujudkan visi tersebut. Delapan misi yang disebut Asta Cita memuat hal – hal sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mendukung visi misi pemerintah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025 – 2029 memiliki fokus perencanaan yang selaras dengan Asta Cita, meliputi: 1) Swasembada pangan, air, dan energi; 2) Hilirisasi dan industrilisasi; 3) Pemerataan Wilayah; 4) Perkotaan; 5) Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; dan 6) infrastruktur berketahanan iklim.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa arahan Asta Cita terhadap pengembangan wilayah Provinsi Banten berfokus pada penguatan hilirisasi industri, pembangunan dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di wilayah selatan, melanjutkan pengembangan infrastruktur, serta penguatan pariwisata.

2.2.3. RPJMN Tahun 2025-2029

Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029 berfokus pada penguatan fondasi transformasi mencapai Indonesia Emas 2045, yaitu: 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi, 3) transformasi tata kelola, 4) supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, 5) ketahanan sosial budaya dan ekologi, 6) pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta 7) kesinambungan pembangunan. Sedangkan dalam RPJMN juga mengatur arah pembangunan wilayah masing – masing provinsi, setiap provinsi mempunyai tema yang berbeda. Tema pembangunan wilayah Jawa adalah megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selanjutnya tema wilayah Pulau Jawa ini diturunkan menjadi tema provinsi “Penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional”. Sedangkan tema pembangunan Provinsi Banten adalah “Gerbang Integrasi Ekonomi Jawa-Sumatra dan Penyangga Ketahanan Rantai Nilai Industri Nasional”.

Pengembangan wilayah di Provinsi Banten mengacu pada arah kebijakan prioritas nasional 2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, 3 (Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,

mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi), 5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri), dan 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan).

Pada PN 2, sasaran utama yaitu meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air; terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif; meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman; meningkat dan terjaganya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan; meningkatnya pasokan air berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air; meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air; terwujudnya kuantitas air secara berkelanjutan melalui peningkatan tutupan hutan di DAS; meningkatnya kualitas ekosistem perairan darat; meningkatnya jumlah dan kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir; meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SPALD; meningkatnya keberfungsian dan kualitas infrastruktur SPALD; meningkatnya kualitas perencanaan air minum dan sanitasi (air limbah domestik); meningkatnya kualitas penyelenggaraan air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang aman dan berkelanjutan; tersedianya landasan regulasi dan pedoman penyelenggaraan air minum dan air limbah domestik; berkembangnya ekosistem air minum dan sanitasi berbasis inovasi; meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di Pesisir Utara Jawa; meningkatnya layanan air minum dan sanitasi di Pesisir Utara Jawa; menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR. Hal ini juga selaras pada PN 3, dengan sasaran utama diantaranya pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda, pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Sasaran utama pada PN 5 yaitu terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global melalui penurunan biaya logistik. Isu yang mempengaruhi tercapainya sasaran tersebut yaitu belum optimalnya infrastruktur dan layanan konektivitas, serta adanya keterbatasan infrastruktur. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang dirumuskan yaitu a) optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan logistik nasional; b) peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global. Intervensi kebijakan terkait sektor PU, yaitu aglomerasi kawasan industri / kawasan ekonomi khusus sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan sarana dan prasarana di dalam dan di luar

kawasan sesuai masterplan. Melalui pembangunan infrastruktur jalan/jembatan, dukungan jalan tol, jalan nasional, dan jalan daerah sebagai penguatan konektivitas melalui backbone dan logistik.

Prioritas Nasional 6 yang terkait dengan pengembangan provinsi Banten yaitu terkait tercapainya sasaran meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; terciptanya ekosistem perumahan yang mendukung terjadinya hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan; dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa. Isu terkait hal ini yaitu belum optimalnya integrasi antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru. Arah kebijakan yang dirumuskan yaitu percepatan penyediaan perumahan dan permukiman. Selain itu, sasaran yang perlu diwujudkan yaitu mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui peningkatan jumlah persentase desa mandiri yang meningkat dari 22,85% pada tahun 2024 menjadi 25,79% pada tahun 2029. Isu terkait perdesaan yaitu secara agregat kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan dengan layanan perkotaan, sehingga dirumuskan arah kebijakan berupa peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. Intervensi kebijakan pada prioritas nasional 6 adalah peningkatan infrastruktur dan layanan dasar, permukiman, perumahan, dan sanitasi.

Adapun target yang harus dicapai Provinsi Banten pada tahun 2029 adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 7,9%, Indeks Modal Manusia (IMM) 0,59, tingkat kemiskinan 2,42 – 3,42%, Gini Ratio 0,326 – 0,330, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,39 – 6,82%. Untuk mencapai target-target tersebut diperlukan beberapa transformasi baik dalam bidang sosial, ekonomi, tata kelola, dan sosial budaya.

Kawasan prioritas penanganan di Provinsi Banten meliputi: 1) kawasan pertumbuhan (Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang, Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung, Kawasan Perkotaan Tangerang Raya (bagian dari Kawasan Aglomerasi Jakarta)); 2) kawasan swasembada pangan, air, dan energi yaitu Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang; 3) kawasan afirmasi Banten Selatan yaitu pesisir selatan Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan; serta 4) kawasan konservasi di TN Ujung Kulon dan TN Halimun-Salak.

Adapun indikasi intervensi mendukung kawasan tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang, Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang dan Jakarta-Tangerang *International Business Corridor*: Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan RTH, serta penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan; a) Pengembangan koridor industri sektor prioritas seperti industri kimia, industri makanan dan minuman, dan industri logam, besi dan baja; b) Pengembangan KIT Wilmar (kelapa sawit), dan KI Krakatau Industrial Estate Cilegon (kimia dan logam dasar); c) Pembangunan TPST Regional Serang-Cilegon; d) Pelebaran Jalan Merak-Batas Kota Cilegon; e) Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja; f) Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja;

2) Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung: a) Peningkatan 6A Pariwisata di KEK Tanjung Lesung dan *urban renewal* Labuan; b) Preservasi jalan ruas Panimbang-Labuan, Panimbang-Tanjung Lesung, dan Panimbang-Sumur-Ujungkulon (via pesisir); serta c) Pembangunan Jalan Tol Serang-Rangkasbitung-Panimbang.

3) Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi: a) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat DI Cisadane, DI Ciujung, dan DI Cidurian; b) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura; c) Konservasi SDA melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama di DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian-Cimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh-Cipuntanegung-Cibama; d) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama di DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian-Cimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh-Cipuntanegung-Cibama; e) Pembangunan Bendungan Karian; f) Pembangunan Bendungan Cidanau; g) Pembangunan Interbasin Transfer System Banten; h) Pembangunan SPAM Regional Karian Barat; i) Pembangunan SPAM Regional Karian Timur; j) Pembangunan SPAM Regional Sindangheula.

4) Kawasan Afirmasi Banten Selatan (percepatan pengentasan kemiskinan): a) Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan; b) Peningkatan ketahanan bencana; c) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Malingping; d) Peningkatan 6A pariwisata di Sawarna dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy (Baduy Luar); e) Peningkatan/pembangunan jalan ruas Panimbang-Muarabinuangeun, Muarabinuangeun-Malingping-Bayah-Sawarna-Palabuhanratu, Cikulur-Ciboleger.

5) Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Banten: Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman *megathrust* dan tsunami di Kawasan Perkotaan Cilegon dan Pesisir Barat Banten (*megathrust* Selat Sunda);

6) Tersebar di Provinsi Banten: Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas

2.2.4. Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat 14 program PSN yaitu: 1) makan bergizi gratis, 2) revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah, 3) peningkatan layanan irigasi pendukung lumbung pangan nasional, 4) program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, nikel, timah bauksit, dan tembaga, 5) pengembangan industri kimia melalui pembangunan *Neu Ethylene Project*, 6) pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, 7) Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran, 8) Jalan Tol Serpong-Cinere, 9) Jalan Tol Serpong-Balaraja, 10) pengembangan Kawasan Industri Wilmar Serang, 11) pembangunan Bendungan Karian, 12) pembangunan *Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa*, 13) pembangunan Jakarta MRT Koridor Timur-Barat, serta 14) pembangunan tiga juta rumah.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan di Provinsi Banten berfokus pada **percepatan pertumbuhan dan pemerataan** pembangunan di Provinsi Banten melalui **pembangunan infrastruktur** jalan bebas hambatan, transportasi massal perkotaan, kawasan industri, air minum perkotaan, dan pengaman pantai untuk mendukung **aktivitas ekonomi dan perkotaan**.

2.2.5. RIPIN Tahun 2015 - 2035

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 disusun dengan tujuan untuk mendorong industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI) salah satunya adalah WPI Jawa termasuk di dalamnya Provinsi Banten. WPI sendiri terdiri atas beberapa Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI di Banten adalah Cilegon - Serang - Tangerang. WPPI Provinsi Banten

dikembangkan dengan target pertumbuhan sektor industri hingga 2 (dua) digit guna mencapai kontribusi industri hingga 30% pada tahun 2035. Industri di Provinsi Banten diarahkan melalui pengembangan Industri Petrokimia, Industri Smelter dan Baja, Industri Alas Kaki, Industri Elektronika dan Telematika, serta Industri Tekstil.

Di dalam WPPI tersebut, terdapat 13 kawasan industri yang tersebar yaitu Modern Cikande Industrial Estate, Kawasan Pergudangan dan Industri Kosambi Permai, Kawasan Industri Nikomas Gemilang, Kawasan Industri SBS, Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Millenium Industrial Estate, Kawasan Industri Pasar Kemis, Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas, Griya Idola Industrial Park, Kawasan Industri Sumber Rezeki, Krakatau Industrial Estate Cilegon, Kawasan Industri Pancapuri, dan Kawasan Industri dan Pergudangan Taman Tekno BSD.

Program pengembangan untuk mendukung WPPI Periode 2020-2035 adalah (1) pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara), (2) pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI, (3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM, (4) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi, (5) penguatan kerjasama antar WPPI, (6) promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI, (7) pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa, dan (8) penguatan konektivitas antar WPPI.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan industri di Provinsi Banten terkonsentrasi di wilayah utara dan berfokus pada **industri logam, kimia, hulu agro, tekstil dan sepatu, serta industri makanan berbasis teknologi** dengan dukungan **infrastruktur yang ramah lingkungan** dan manajemen industri yang handal.

2.2.6. RIPPARNAS Tahun 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS Tahun 2010-2025 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010-2025.

Prinsip dalam pembangunan kepariwisataan nasional adalah (1) pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, (2) orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, (3) tata kelola yang baik, (4) secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku, serta (5) mendorong kemitraan sektor publik dan privat. Sementara itu, fokus pengembangan manajemen kepariwisataan adalah pemasaran, industri, dan kelembagaan.

Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat satu atau lebih Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Beberapa KPPN ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Terdapat 1 DPN, 4 KPPN, dan 2 KSPN di Provinsi Banten sebagaimana dituliskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Provinsi Banten

DPN	KSPN/KPPN
Krakatau-Ujungkulon dsk	KPPN Carita dsk.
	KPPN Ujung Kulon dsk.
	KPPN Serang-Banten Lama dsk.
	KPPN Lebak-Baduy dsk.
	KSPN Ujung Kulon-Tj. Lesung dsk.
	KSPN Krakatau dsk.

Sumber: RIPPARNAS, 2010

Berdasarkan uraian RIPPARNAS di atas, pemantapan sektor pariwisata Provinsi Banten ditekankan pada aspek **kepariwisataan berkelanjutan** serta **peningkatan ekonomi masyarakat** melalui penguatan aspek **manajemen industri kepariwisataan**.

2.2.7. Perpres No. 26 Tahun 2012

KEK Tanjung Lesung telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung diajukan oleh PT. Banten West Java Tourism Development Corporation sebagai badan usaha pengusul dan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung seluas 1.500 ha terletak dalam wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. KEK Tanjung Lesung merupakan KEK pariwisata pertama dan telah diresmikan beroperasi pada Februari 2015. KEK Tanjung Lesung memiliki potensi pariwisata yang beragam, antara lain keindahan alam pantai, keragaman flora dan fauna serta kekayaan budaya yang eksotis.

2.2.8. RPJMD Provinsi Banten

Visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2017 - 2022 adalah **"Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"**. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu: (1) mewujudkan masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat, dan cerdas (2) mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan (3) mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang lestari dan (4) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, berdasarkan kebijakan 2 (dua) kebijakan tersebut tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Banten adalah ***Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata.***

Terdapat beberapa prioritas unggulan dalam RPJMD Provinsi Banten, yaitu membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Tujuan dari program prioritas unggulan membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur adalah guna meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang, dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah yang memiliki beberapa strategi, diantaranya:

- Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan;
- Meningkatkan kualitas infrastruktur jembatan;
- Meningkatkan kualitas perencanaan penataan ruang dan pemanfaatan ruang;
- Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman;
- Meningkatkan sistem tata air terpadu;
- Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat;
- Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pengendali banjir;
- Pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan tampungan dan penyediaan air baku;
- Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan irigasi; dan
- Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.

Selain itu tujuan dari program prioritas unggulan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah guna meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan yang memiliki beberapa strategi, diantaranya:

- Meningkatkan iklim investasi, dan meningkatkan promosi potensi investasi;

- Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat;
- Meningkatkan pengembangan sektor industri;
- Memperluas pangsa ekspor dan luar daerah;
- Meningkatkan daya saing produk berbasis keunggulan lokal;
- Meningkatkan produksi, nilai tambah daya saing produk kelautan dan perikanan;
- Meningkatkan ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan ketersediaan pangan, mengoptimalkan sumberdaya pangan, cadangan pangan dan distribusi pangan serta kestabilan harga pangan;
- Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, air tanah, mineral, dan batubara;
- Mengurangi jumlah afirmasi;
- Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup;
- Meningkatkan fungsi hutan dan kawasan lindung; dan
- Meningkatkan konservasi daerah aliran sungai.

Berdasarkan uraian di atas, RPJMD Tahun 2017-2022 menekankan pada **penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**, peningkatan **ketahanan pangan, pengembangan industri, pengembangan pariwisata**, peningkatan **daya saing daerah**, dan **pemerataan kawasan tertinggal**.

2.2.9. Visium PUPR 2030

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu: bendungan multifungsi dengan kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun; kemantapan jalan mencapai 99% dengan integrasi antar moda, memanfaatkan sebanyak banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*; serta 100% *smart living* (hunian cerdas) yang didukung infrastruktur dasar yang memadai. Secara detail sasaran visium tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.

	SUMBER DAYA AIR	BINA MARGA	CIPTA KARYA	PENYEDIAAN PERUMAHAN
RENSTRA PUPR 2015 - 2019	Kapasitas Tampung 50 m³/c/th (baseline 2014) Anggaran Rp.316 T	Jalan Mantap 98% Jalan Tol 1000 Km Jalan Baru 2850 Km Jembatan Baru/ FO 29.859 M Anggaran Rp.278 T	100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.128 T	5,4 jt Backlog MBR Pembangunan 4,47 juta unit Anggaran Rp.186 T
GAP 2017 - 2019	Kapasitas Tampung 57,75 m³/c/th Anggaran Rp.306 T	Jalan Mantap 94% Jalan Tol 824 Km Jalan Baru 1.320 Km Jembatan Baru/FO 39.000 M Anggaran Rp.183 T Investasi Rp.202 T	78% Air Minum 27.000 ha Kumuh 75% Sanitasi Anggaran Rp.45 T	5,4 jt Backlog MBR Pembangunan 2,76 juta unit Anggaran Rp.414 T 10% APBN/APBD 90% Masyarakat
VISIUM 2020- 2024	Kapasitas Tampung 68,11 m³/c/th Anggaran Rp.577 T	Jalan Mantap 97% Jalan Tol 1.500 Km Jalan Baru 2.500 Km Jembatan Baru/FO 60.000 M Anggaran Rp.330 T Investasi Rp.243 T	88% Air Minum 17.000 ha Kumuh 85% Sanitasi Anggaran Rp.128 T	5 jt Backlog MBR Pembangunan 3,9 juta unit Anggaran Rp.780 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat
VISIUM 2030	Kapasitas Tampung 120 m³/c/th Anggaran Rp.1.423 T	Jalan Mantap 99% Jalan Tol 2.000 Km Jalan Baru 3.000 Km Jembatan Baru/FO 70.000 M Anggaran Rp.448 T Investasi Rp.390 T	100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.170 T	3 jt Backlog MBR Pembangunan 4,88 juta unit Anggaran Rp.1.220 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat

Gambar 2.2 Visium PUPR 2030

Sumber: Renstra Kementerian PUPR, 2022

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **Visium PUPR 2030** memfokuskan pada penyediaan **infrastruktur tampungan air**, peningkatan **kemantapan jalan**, pembangunan **jalan dan jembatan** baru, penyediaan **air minum**, pengurangan **kawasan kumuh**, penyediaan **infrastruktur sanitasi**, dan **penyediaan perumahan**.

2.2.10.Sasaran Utama Kementerian PU 608

Kementerian PU mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur mendukung investasi di sektor produktif sehingga terjadi efisiensi investasi dengan ICOR <6, kemiskinan 0%, dan pertumbuhan ekonomi 8%. Target guna mencapai efisiensi investasi melalui a) optimalisasi biaya yaitu persentase keterpaduan infrastruktur perkotaan pada kawasan prioritas dari 0 menjadi 10 kota, Tingkat pemenuhan pembiayaan kreatif terhadap *funding* gap infrastruktur dari 0% menjadi 100%; b) Optimalisasi aset terdiri dari rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya dari 35% menjadi 45%, jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola dari 78,78 m³/dt menjadi 93,79 m³/dt, Utilisasi IPA, IPAL & TPA/TPST dari 0% menjadi 80%, tingkat ketersediaan pembiayaan kreatif terhadap penyediaan layanan infrastruktur dari 0% menjadi 100%; c) Kemudahan investasi yaitu kapasitas tampungan air dari 59,67 m³/kap menjadi 63,54 m³/kap, persentase proyek pembiayaan kreatif yang mencapai tahap transaksi dari 0% menjadi 100%.

Target pengentasan kemiskinan melalui a) percepatan penyediaan akses infrastruktur dasar menjadi 100%, akses air minum jaringan

perpipaan dari 30,12% menjadi 38,07%, rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari 12% menjadi 30%, timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dari 21,1% menjadi 38%, pembangunan atau rehab prasarana strategis menjadi 100%; b) penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi.

Target pendorong pertumbuhan ekonomi melalui a) penguatan dukungan kawasan prioritas yaitu persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi daya rusak air dari 37,2% menjadi 100%, kawasan pariwisata prioritas dengan standar internasional berakar budaya lokal menjadi 100%, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dari 22,5% menjadi 34,52%; b) perwujudan swasembada pangan yaitu persentase luas baku sawah fungsional beririgasi dari 61,55% menjadi 63,12%, rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk dari 15,60% menjadi 16,57%, efisiensi pemanfaatan air irigasi dari 0,31 USD/m³ menjadi 0,43 USD/m³, c) peningkatan konektivitas yaitu waktu tempuh lintas utama jaringan jalan nasional dari 1,9 jam/100 km menjadi 1,7 jam/100 km, kemantapan jalan nasional dari 93,88% menjadi 98%, kemantapan jalan provinsi dari 69,9% menjadi 76%, kemantapan jalan kabupaten dari 52,84% menjadi 66%, kemantapan jalan kota dari 81,39% menjadi 85%, tingkat aksesibilitas koridor utama pada daerah tertinggal dan perbatasan dari 2,17 km/100 km² menjadi 2,31 km/100 km².

2.2.11. Rencana Strategis Kementerian PU

Target pengembangan infrastruktur pekerjaan umum hingga tahun 2029 ditetapkan dalam Renstra Kementerian PU Tahun 2025-2029. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka kontribusi terhadap pencapaian visi nasional, yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Sasaran strategis yang akan dicapai yaitu meningkatnya ketahanan air nasional, menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan, menguatnya akses infrastruktur keciptakarya yang andal dan berkelanjutan, Menguatnya kontribusi pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai penugasan kepada Kementerian PU, Meningkatkan pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi, serta Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya.

Tabel 2.2 Kegiatan Utama Kementerian PU

No.	Kegiatan	Target Capaian
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air	- Kapasitas tampung sebesar 63,54 m3 per kapita - Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk sebesar 56,18%

No.	Kegiatan	Target Capaian
		- Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi sebesar 62,37% - Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk sebesar 16,57% - Efisiensi pemanfaatan air irigasi sebesar 0,45 USD per m3 - Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air sebesar 100%
2.	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan	Waktu tempuh lintas utama jaringan jalan nasional atau pada koridor <i>Asian Highways</i> sebesar 1,7 jam per 100 km
3.	Peningkatan pelayanan dasar keciptakaryaan	- 51,36% rumah tangga perkotaan dengan akses air siap minum perpipaan - 43% persentase rumah tangga dengan akses air minum aman - 30% rumah tangga dengan akses sanitasi aman - 38% timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
4.	Penguatan kontribusi pembangunan sarana prasarana strategis mendukung penguatan perekonomian, Pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial-budaya, dan kesehatan	- Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sebesar 100% - Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang kualitasnya ditingkatkan sebesar 100% - Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional sebesar 45,60% - Skor IKB (Indeks Kota Berkelanjutan) rerata wilayah metropolitan sebesar 45,61% - Proporsi kontribusi PDRB perkotaan non-wilayah metropolitan terhadap PDB nasional sebesar 8,13% - Skor IKB (Indeks Kota Berkelanjutan) rerata Perkotaan non-wilayah metropolitan sebesar 49,86%

Sumber: Renstra Kementerian PU, 2025

Highlight intervensi kawasan-kawasan prioritas di Provinsi Banten yang diarahkan untuk dikembangkan oleh Kementerian PU, adalah:

Tabel 2.3 Highlight Intervensi Kementerian PU di Kawasan Prioritas

Kawasan	Indikasi <i>Highlight Intervensi</i>
Perkotaan Non Wilayah Metropolitan Cilegon - Serang	- Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu - Pemenuhan layanan dasar air minum - Pemenuhan layanan dasar penanganan limbah
Pengembangan industri Cilegon - Serang - Tangerang	Pengembangan koridor industri dengan sektor prioritas industri kimia, makanan dan minuman, logam, besi, dan baja
Swasembada pangan, energi, dan air Banten (Serang, Tangerang, Lebak, dan Pandeglang)	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat DI Cikeusik - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura - Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi: peningkatan infrastruktur konektivitas dan digital bagi petani
Afirmasi (pengentasan kemiskinan) di Lebak dan Pandeglang	Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi)
Rawan bencana tsunami (Pandeglang, Tangerang, Lebak, dan Serang)	- Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik - Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami

Sumber: Renstra Kementerian PU, 2025

2.3. Agenda Global

Agenda global berisi tentang poin penting arahan kebijakan internasional yang mendukung pengembangan wilayah Provinsi Banten. Adapun agenda global yang diacu meliputi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), *New Urban Agenda* (NUA), *Paris Agreement*, dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030.

Tabel 2.4 Agenda Global

No	Kebijakan Global	Arahan
1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	Komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dengan diterbitkannya Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB/SDGs sebagai landasan hukum pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024.
2	<i>New Urban Agenda</i> (NUA)	NUA menjawab Tujuan 11 SDGs dengan menyusun poin-poin tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan. NUA mengakui adanya keragaman budaya dan dampak negatif perubahan iklim dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Indonesia New Urban Agenda dirumuskan sebagai respon dari NUA untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Agenda perkotaan yang dibahas adalah: Kependudukan, Pertanahan dan Perencanaan Kota, Lingkungan dan Urbanisasi, Tata Kelola Pemerintah dan Legislatif, Ekonomi Perkotaan, Perumahan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar
3	<i>Paris Agreement</i>	Berisi kesepakatan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pasca Tahun 2020. Paris Agreement merupakan pengganti kesepakatan Protocol Kyoto. Poin penting kebijakan adalah menetapkan batas aman kenaikan suhu bumi dibawah 2°C dan berupaya menekan hingga 1,5 °C di atas suhu bumi pada masa pra-industri. Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016. Komitmen Indonesia: menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% terhadap skenario bisnis seperti biasa pada Tahun 2030, dan 41% dengan bantuan internasional.
4	<i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i> 2015-2030	Hasil yang diharapkan: Sampai dengan 15 tahun terdapat pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana. Tujuan: 1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko 2. Mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan 3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan Target: 1. Mengurangi kematian rata-rata per-100K 2. Mengurangi orang terdampak rata-rata per-100K

No	Kebijakan Global	Arahan
		3. Mengurangi kerugian ekonomi/ GDP 4. Mengurangi kerusakan infrastruktur kunci 5. Meningkatkan jumlah negara dengan strategi dan rencana PRB 6. Meningkatkan kerjasama internasional 7. Meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS Tindakan Prioritas: 1. Memahami risiko bencana 2. Penguatan tata Kelola risiko 3. Investasi PRB untuk resiliensi 4. Meningkatkan manajemen risiko

Sumber: BPS, diolah BPIW (2023)

Berdasarkan **arahan kebijakan secara global**, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah harus memperhatikan **kesejahteraan penduduk** dan **pembangunan berkelanjutan** dengan tetap memperhatikan **pelestarian lingkungan** dan aspek **kebencanaan**.

2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan infrastruktur memuat arah kebijakan pengembangan wilayah dan arah kebijakan pemanfaatan infrastruktur.

2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian arah kebijakan di atas, dirumuskan fokus dan lokus kebijakan penataan ruang, kebijakan sektor, dan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, serta agenda global.

Kebijakan penataan ruang berfokus pada pengembangan kawasan industri, pariwisata, kawasan perkotaan, pertanian, perdagangan dan jasa, dan ketahanan bencana. Kebijakan sektor berfokus pada pengembangan industri, pariwisata dan ketahanan bencana. Agenda global berfokus pada pengembangan pariwisata dan konservasi.

Setelah dilakukan iterasi terhadap seluruh fokus kebijakan, dihasilkan **lima konteks perencanaan dan kawasan prioritas. Kelima konteks perencanaan tersebut, meliputi perkotaan, pertanian, industri, pariwisata, dan afirmasi.**

Masing-masing fokus utama tersebut mempunyai kawasan prioritas yang diperoleh melalui sintesa kebijakan. Wilayah dengan fokus industri cenderung berada di Jalur Pantura Serang - Cilegon. Kawasan prioritas perkotaan berada di Kota Serang dan Cilegon. Fokus pariwisata terdapat di Labuan – Tanjung Lesung. Fokus pertanian berada pada Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak. Kawasan afirmasi berada di Kabupaten Lebak. Secara spasial masing-masing arahan kebijakan dituangkan dalam Peta Sintesis Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Banten sesuai dengan konteks perencanaan masing-masing

kawasan prioritas. Rangkuman sintesis arah kebijakan secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan peta berikut.

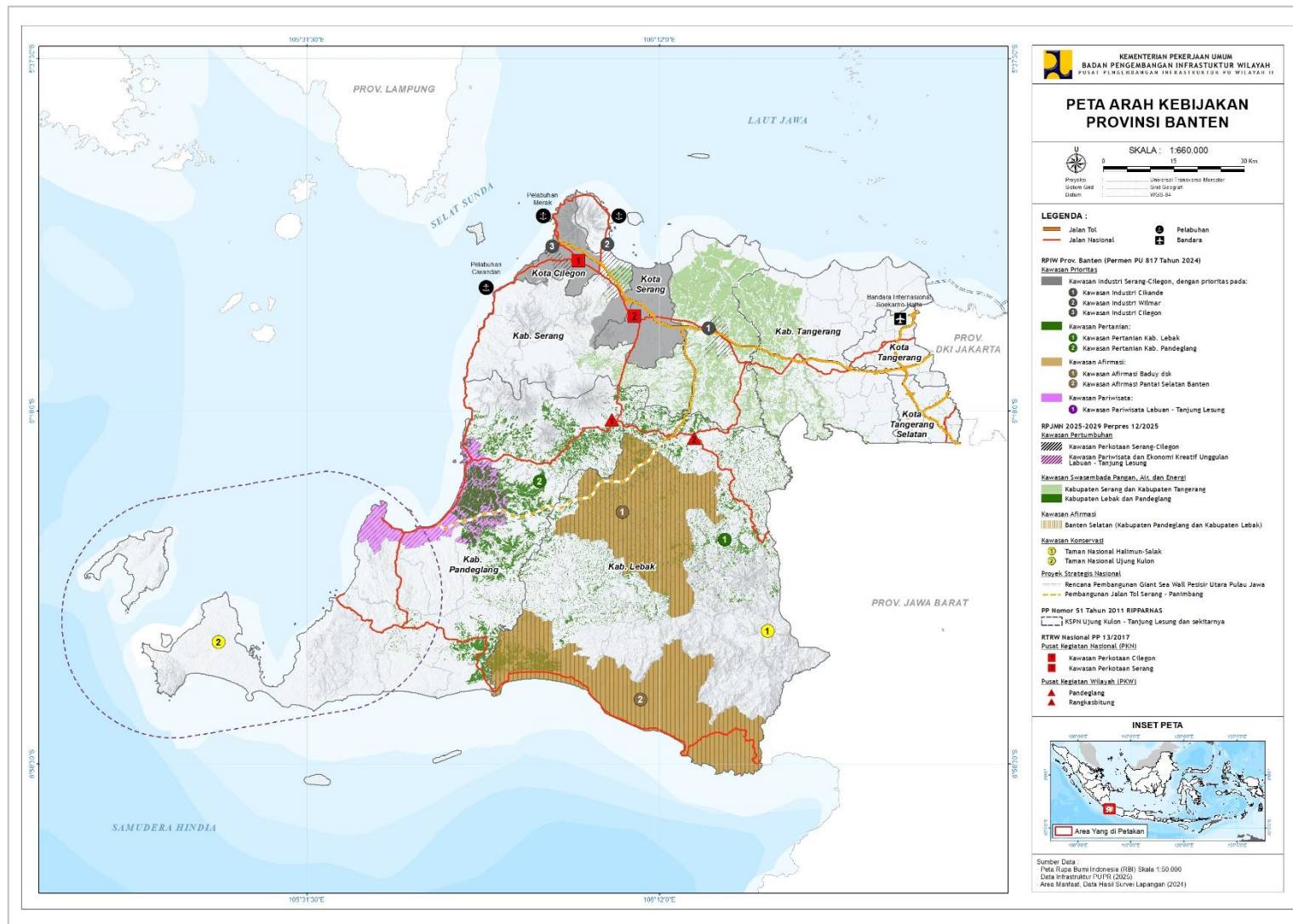
Tabel 2.5 Rumusan Arah Kebijakan di Provinsi Banten

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
Kebijakan Penataan Ruang	RTRW Nasional PP 13/2017	Banten: Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pengembangan kawasan strategis berbasis industri dan pariwisata yang didukung oleh penguatan konektivitas dan simpul transportasi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung	• Industri • Pariwisata • Jasa dan Perdagangan • Perkebunan • Pertanian • Ketahanan Bencana	Kawasan Perkotaan: - PKN Cilegon - PKN Serang - PKW Rangkasbitung - PKW Pandeglang - Tangerang Raya (bagian dari Aglomerasi Jakarta) Industri: - KPI Cilegon-Serang-Tangerang - KIT Wilmar - KI Krakatau <i>Industrial Estate</i> - KEK BSD - KI Cilegon - KI Cikande - KI Chandra Asri - KI Pancapuri - KI Nikomas Gemilang - KI Taman Tekno BSD - KI Sumber Rezeki - KI Griya Idola Park - KI Purat Kencana Alam - KI Cikupas - KI Pasar Kemis - KI Sumber Bina Sukses - Millenium Industrial Estate Pariwisata:
	RTR Jawa-Bali Perpres 28/2012	Jawa-Bali: Pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan sebagai lumbung pangan utama nasional, kawasan perkotaan, industri/ perdagangan, dan pariwisata yang berdaya saing internasional, yang didukung oleh konektivitas lintas utara-tengah-selatan, sistem jaringan energi, dan sumber daya air dengan memperhatikan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.		
	RTRW Provinsi Banten Perda 5/2017	Banten: Pembangunan 3 Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) dengan sektor unggulan industri, pariwisata, jasa, perdagangan, pertanian, dan perkebunan.		
Kebijakan sektor	Visi Indonesia 2045	Indonesia: Pemerataan Pembangunan Indonesia (konektivitas, prasarana dasar, kebencanaan, dan sektor unggulan)	• Perkotaan • Industri • Infrastruktur Pelayanan Dasar Perdesaan • Pariwisata • Swasembada Pangan, Air, dan Energi • Ketahanan Bencana • Penanganan ketimpangan Pansela (Kawasan Afirmasi)	
	Asta Cita	Banten: penguatan hilirisasi industri, pembangunan dalam rangka pemerataan ekonomi di wilayah selatan, melanjutkan pengembangan infrastruktur, serta penguatan pariwisata		
	RPJMN 2025-2029 Perpres 12/2025	Banten: Tema pembangunan Provinsi Banten adalah "Gerbang Integrasi Ekonomi Jawa-Sumatra dan Penyangga Ketahanan Rantai Nilai Industri Nasional. Kawasan prioritas pertumbuhan adalah kawasan perkotaan Cilegon-Serang, kawasan pengembangan industri Cilegon-Serang-Tangerang, kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Labuan-Tanjung Lesung, kawasan perkotaan Tangerang Raya. Kawasan swasembada pangan, air, energi, di Banten yaitu Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak, dan Kab. Pandeglang. Kawasan afirmasi Banten Selatan yaitu pesisir selatan Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang. Kawasan konservasi TN Ujung Kulon dan Halimun-Salak.		
	PSN pada RPJMN Tahun 2025-2029	Banten: Sektor SDA yaitu pembangunan Bendungan Karian, pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan dukungan irigasi untuk pengembangan lumbung pangan nasional. Pada sektor bina marga, terdapat empat lokasi pembangunan jalan tol yaitu Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran, Jalan Tol Serpong-Cinere, serta Jalan Tol Serpong-Balaraja.		
	RIPIN 2015-2035 PP 14/2015	Banten: Pengembangan WPPI Cilegon-Serang-Tangerang		

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
	RIPPARNAS 2010-2025 PP 50/2011	Banten: Pemantapan kawasan pariwisata (2 KSPN dan 4 KPPN) sebagai destinasi pariwisata nasional dan internasional.		- Kawasan Parekraf Unggulan Labuan-Tanjung Lesung - KEK Tanjung Lesung - <i>Urban renewal</i> Labuan - KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung - KSPN Krakatau dsk - KPPN Carita dsk - KPPN Ujung Kulon dsk - KPPN Serang - Banten Lama Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi: - Kab. Pandeglang - Kab. Serang - Kab. Lebak - Kab. Tangerang Kawasan Afirmasi: - Kab. Lebak - Kab. Pandeglang
	Visium PUPR 2030	Indonesia: Penyediaan infrastruktur tampungan air, peningkatan konektivitas, pemenuhan air minum, pengurangan kawasan kumuh, penanganan sanitasi, penurunan <i>backlog</i> dan penyediaan rumah swadaya		
	Target Kementerian PU 608	Indonesia: efisiensi investasi ICOR <6 melalui optimalisasi biaya, optimalisasi aset, dan kemudahan investasi, pengentasan kemiskinan melalui percepatan penyediaan akses infrastruktur dasar dan penyerapan tenaga kerja, serta pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan dukungan kawasan prioritas, perwujudan swasembada pangan, dan peningkatan konektivitas.		
	Renstra PU 2025 - 2029	Indonesia: Meningkatkan ketahanan air nasional, menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan, menguatnya akses infrastruktur keciptakarya yang andal dan berkelanjutan, Menguatnya kontribusi pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai penugasan kepada Kementerian PU, Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi, serta Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya		
	PP 26/2012	KEK Tj Lesung: Pengembangan KEK Tj Lesung sebagai pariwisata yang berdaya saing nasional maupun internasional dengan potensi pariwisata yang beragam.		
	RTR Jabodetabekpunjur Perpres60/2020	Jabodetabek: Mewujudkan Kawasan Perkotaan Tangerang, Kawasan Perkotaan Balaraja, Kawasan Perkotaan Tigaraksa, dan Kawasan Perkotaan Ciputat sebagai pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan		
Agenda Global	SDGs	Indonesia: Peningkatan kesejahteraan penduduk	• Pariwisata • Konservasi Lingkungan • Ketahanan Bencana	
	New Urban Agenda	Indonesia: Optimalisasi pembangunan berkelanjutan terkait <i>Climate Change</i>		
	Paris Agreement	Indonesia: Penurunan tingkat emisi gas buang		
	Sendai Framework	Banten: Pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana		

Sumber: Berbagai Kebijakan diolah BPIW, 2025

Berdasarkan sintesa kebijakan, terdapat 5 fokus utama pengembangan wilayah di Banten, yaitu perkotaan, industri, pariwisata, afirmasi, serta swasembada pangan, air, dan energi. Namun dalam 5 fokus tersebut, terdapat lokus yang sama, yaitu fokus perkotaan Serang-Cilegon dan fokus industri Serang-Cilegon. Untuk menghindari duplikasi data dan analisis pada lokus yang sama, maka dilakukan pemilihan fokus. Dengan demikian, pengembangan wilayah Provinsi Banten difokuskan pada industri (Serang-Cilegon), pertanian (Pandeglang-Serang-Lebak), afirmasi (Lebak-Pandeglang), dan pariwisata (Labuan-Tanjung Lesung-Banten Lama). Secara spasial masing-masing arahan kebijakan dituangkan dalam Peta Arah Kebijakan Banten sesuai dengan konteks perencanaan masing-masing kawasan prioritas.



Peta 2.1 Sintesis Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Banten

2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur Prioritas

Kementerian PU bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mendukung target-target nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project RPJMN 2025-2029, sesuai dengan peraturan pemerintah. Infrastruktur PU meliputi sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan prasarana strategis, yang dibangun di kawasan prioritas seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), kawasan pertanian (swasembada pangan dan air), dan kawasan afirmasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi yang dapat mendorong lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PU adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Jika infrastruktur yang terbangun belum termanfaatkan secara maksimal. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan dana publik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- **Menurunnya kualitas infrastruktur.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dan lebih parah. Hal ini dapat mengurangi fungsi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di masa depan.
- **Menyebabkan ketimpangan pembangunan.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- **Mengurangi daya saing dan produktivitas ekonomi.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menghambat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat distribusi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik, penurunan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait, serta pengurangan nilai tambah perekonomian rakyat.
- **Mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penurunan kualitas sumber daya air, serta peningkatan risiko

bencana alam. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur PU yang telah terbangun, seperti meningkatkan konektivitas antarinfrastruktur, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta menjadwalkan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin kelangsungan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PU yang telah terbangun diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, berikut adalah lima poin arah kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PU prioritas dalam 10 tahun ke depan:

- **Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat saling mendukung dan memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan.
- **Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur PU.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat beroperasi dengan baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- **Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur PU.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan partisipasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur.
- **Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PU.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh berbagai pihak. Hal ini juga meliputi peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan mekanisme terkait infrastruktur.
- **Meningkatkan inovasi dan adaptasi infrastruktur PU terhadap perubahan lingkungan dan tantangan masa depan.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, bencana alam, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Hal ini juga meliputi peningkatan

kapabilitas dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi situasi darurat dan krisis.

Tabel 2.6 Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur PU Prioritas

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PU	Provinsi	Kab/ Kota	Dasar Hukum
1.	Sumber Daya Air	Bendungan Sindangheula	Banten	Kabupaten Serang	<i>Major Project</i>
2.	Sumber Daya Air	<i>Giant Sea Wall</i> Pantai Utara Jawa	Banten	Kab. Cilegon, Kab. Serang, Kab. Tangerang	Indikasi PSN pada RPJMN
3.	Jalan dan Jembatan	Jalan Pansela Provinsi Banten (Ruas Simpang Labuhan - Batas Provinsi Jawa Barat)	Banten	Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	-
4.	Sumber Daya Air	Bendungan Karian	Banten	Kabupaten Lebak	<i>Major Project & PSN</i>
5.	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Serang - Panimbang	Banten	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang	PSN
6.	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Banten	Kabupaten Tangerang	PSN
7.	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Serpong - Cinere	Banten, Jawa Barat	Kota Tangerang Selatan	PSN
8.	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Serpong - Balaraja	Banten	Kota Tangerang Selatan	PSN

Sumber: Berbagai Kebijakan diolah BPIW, 2025

BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH

Bab ini berisikan kondisi eksisting dan potensi wilayah yang akan digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis, yang terdiri dari profil fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan.

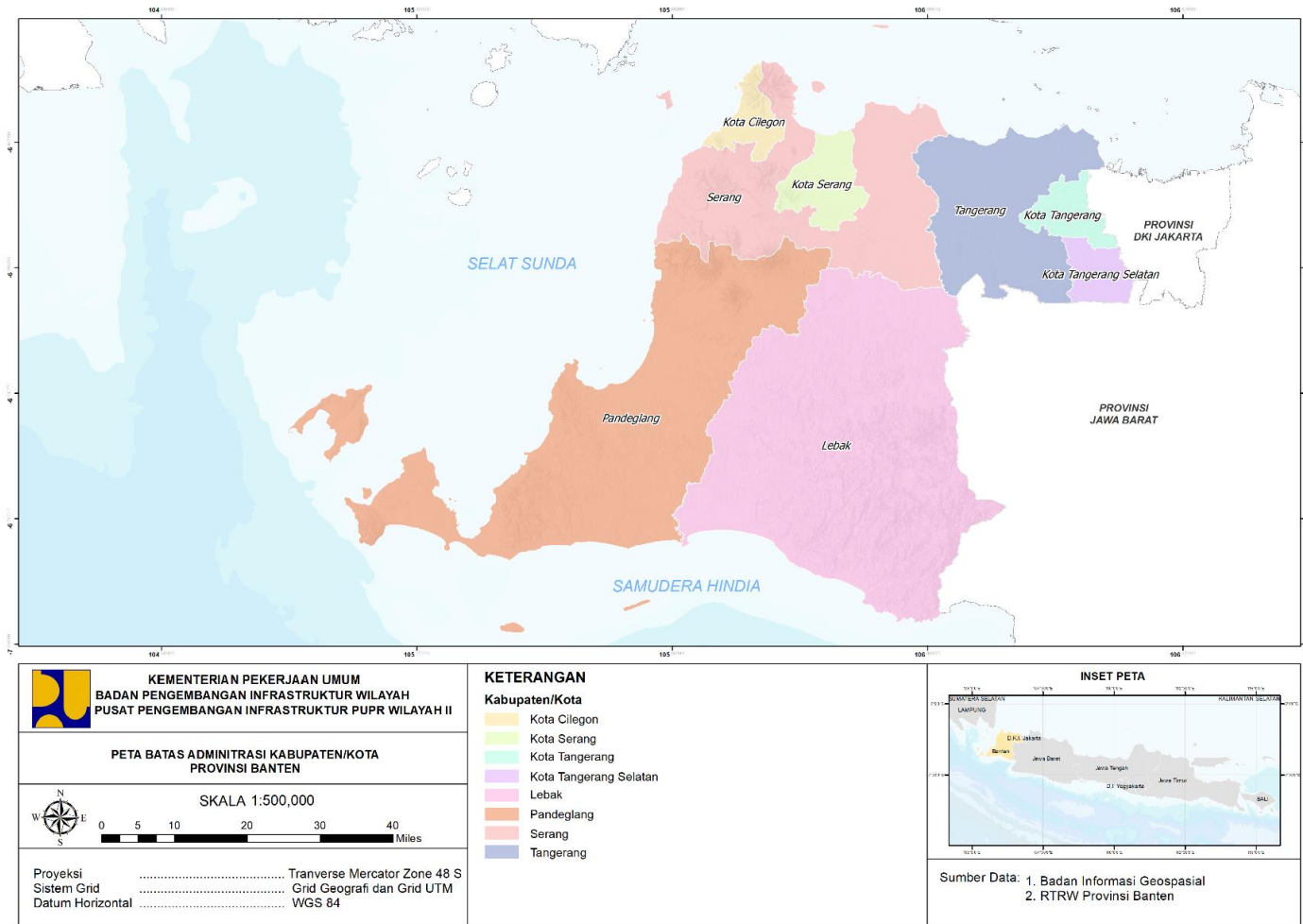
3.1. Profil Fisik dan Kebencanaan

Kondisi alam Provinsi Banten terkenal dengan keindahannya terutama di wilayah barat dan selatan, namun di balik itu juga memiliki potensi bencana alam. Untuk itu, profil fisik dan kebencanaan di Provinsi Banten penting untuk diketahui sebagai pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur. Profil fisik dan kebencanaan menjelaskan tentang kondisi administrasi, topografi, geologi, klimatologi, hidrologi, jasa ekosistem, sebaran tutupan lahan, dan kerawanan bencana seperti: gunung berapi, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, banjir, longsor, dan kekeringan.

3.1.1. Profil Administrasi

Provinsi Banten merupakan salah satu dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Secara geografis Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 9.662,92 km² (7,14% luas P. Jawa). Secara administratif, letak wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan; Selat Sunda di sebelah barat; Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat di sebelah timur, dan; Laut Jawa di sebelah utara.

Provinsi Banten merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000, yang terdiri dari 4 kabupaten (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang) dan 4 kota (Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan), 155 kecamatan, 1.238 desa dan 313 kelurahan. Wilayah terluas adalah Kabupaten Lebak (3.426,56 km²) yang terdiri dari 28 kecamatan, sementara itu, Kota Tangerang Selatan menjadi wilayah dengan luas terkecil (164,8 km²) dengan 7 kecamatan. Secara lengkap profil administrasi Provinsi Banten dapat dilihat pada Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten di bawah ini.



Peta 3.1 Profil Wilayah Administrasi Provinsi Banten

3.1.2. Profil Topografi

Provinsi Banten memiliki tingkat ketinggian beraneka ragam, yaitu dataran rendah di wilayah utara serta dataran tinggi di wilayah tengah. Secara topografi wilayah daratan Banten dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu:

1. Ketinggian 0-200 mdpl terdapat di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang;
2. Ketinggian 200-500 mdpl terdapat di sebagian kecil Kabupaten Pandeglang dan daerah Lebak Tengah;
3. Ketinggian 500-2.000 mdpl terdapat di daerah Lebak Timur yang ditunjang oleh adanya puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Secara umum, morfologi wilayah Provinsi Banten dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama ialah morfologi dataran rendah yang pada umumnya dapat ditemukan di daerah bagian utara dan bagian selatan. Wilayah dataran dapat didefinisikan sebagai wilayah dengan ketinggian kurang dari 50 mdpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang memiliki ketinggian 0-1 mdpl.

Selanjutnya kelompok kedua ialah morfologi perbukitan bergelombang rendah - sedang yang sebagian besar dapat ditemukan di daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan dapat didefinisikan sebagai wilayah dengan ketinggian minimum 50 mdpl. Di Provinsi Banten bagian utara, tepatnya di Kota Cilegon, dapat ditemukan wilayah puncak Gunung Gede dengan ketinggian maksimum 553 mdpl, sedangkan pada wilayah di Kabupaten Serang daerah perbukitan dapat ditemukan di wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung. Wilayah perbukitan juga dapat ditemukan di Kabupaten Pandeglang serta Kabupaten Lebak lebih tepatnya di wilayah timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi.

Kelompok terakhir merupakan morfologi perbukitan terjal yang dapat ditemukan di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.

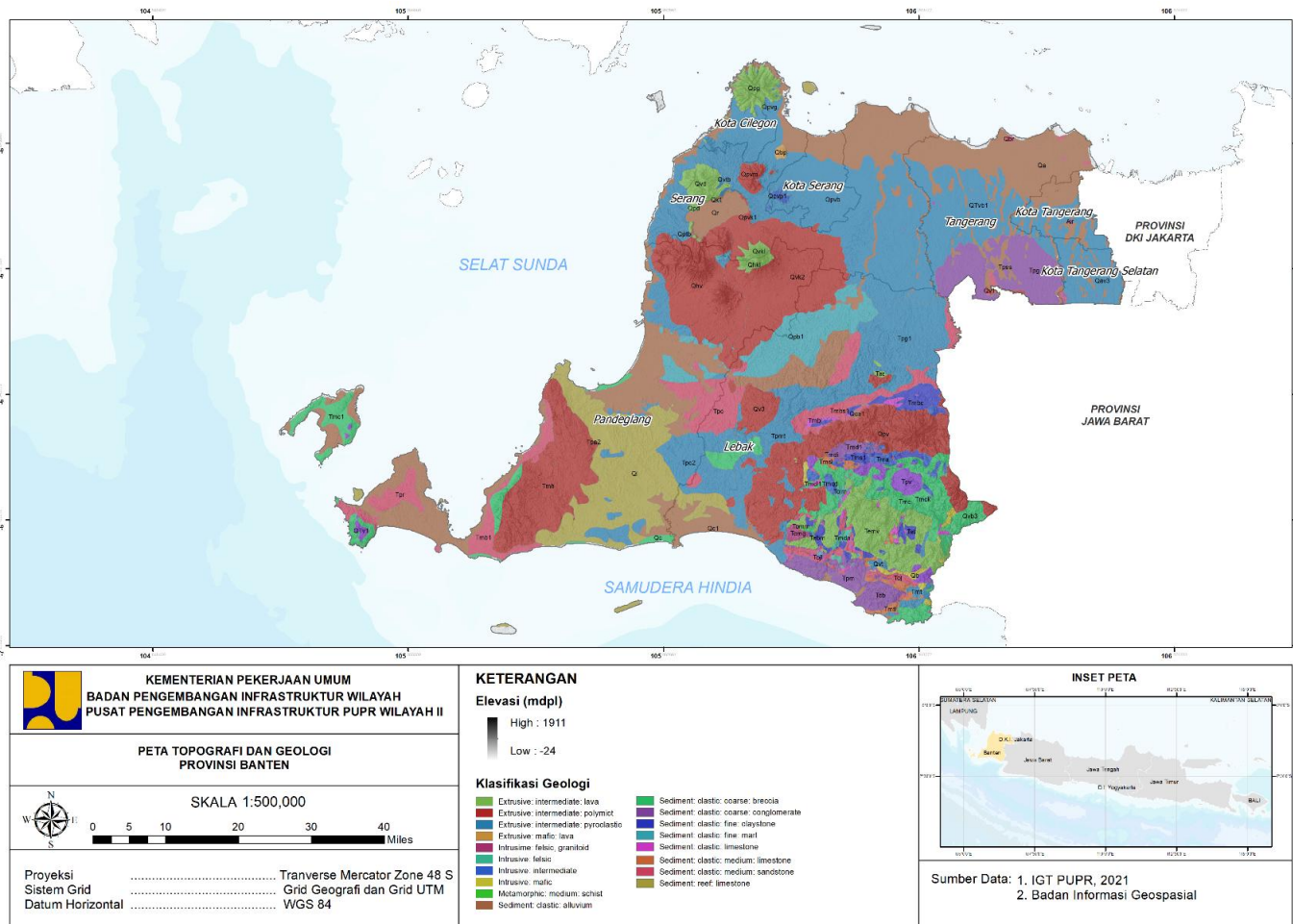
3.1.3. Profil Geologi

Struktur geologi Provinsi Banten terdiri dari formasi batuan dengan perkiraan tebal lebih dari 3.500 m, di mana tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200-800 m. Secara umum Provinsi Banten terbagi menjadi 12 (dua belas) formasi batuan, yaitu formasi bojongmanik, cipacar, bojong, bayah, cicaruruep, cijengkol, citarate, cimampang, sareweh, baduy, cimancuri, dan cikotok.

Jenis tanah yang ada di wilayah Banten meliputi aluvial pantai dan sungai, latosol, podsolik merah kuning, regosol, andosol, brown forest, dan glei yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Kondisi geologi regional Banten merupakan bagian dari jalur magmatik berumur tersier-kuarter yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai Nusa Tenggara yang dikenal sebagai Busur Magmatik Sunda-Banda (Sunda-Banda Magmatic Arc – Hamilton, 1976). Di daerah Banten busur ini membentuk kubah, pematang dan kerucut gunung api yang aktif. Terdapat 3 (tiga) gunung berapi di Banten, 1 gunung berstatus aktif yaitu Gunung Anak Krakatau (Selat Sunda), dan 2 gunung non-aktif yaitu Gunung Karang (Kab. Pandeglang) dan Gunung Pulosari (Kab. Pandeglang). Gunung berapi di Banten rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus, terutama Gunung Anak Krakatau.

Kondisi geologi seperti tersebut menghasilkan potensi sumber daya mineral dan geowisata yang cukup melimpah. Daerah berbatuan gunung api tua yang diterobos oleh batuan intrusif yang lebih muda, merupakan tempat kedudukan mineralisasi logam mulia dan logam dasar emas dan timbal. Sedangkan daerah berbatuan gunung api lebih muda merupakan daerah prospek untuk bahan galian industri seperti batu pasir kuarsa, batu gunung, bentonit, zeolit, lempung, toseki dan tras juga bahan galian lain.



Peta 3.2 Profil Topografi dan Geologi Provinsi Banten

3.1.4. Profil Klimatologi

Dari sisi iklim, wilayah Provinsi Banten sangat dipengaruhi oleh gelombang La Nina atau El Nino serta Angin Monson (*Monsoon Trade*). Seperti sebagian besar wilayah Indonesia, Banten memiliki iklim tropis dengan dua musim (musim hujan dan kemarau). Pada saat musim penghujan (November - Maret) cuaca di Banten umumnya didominasi oleh angin barat (berhembus dari Sumatera, Samudera Hindia sebelah selatan India) yang juga bergabung dengan angin dari Asia yakni melewati Laut Cina Selatan. Sedangkan pada Bulan Agustus, umumnya cuaca didominasi oleh angin timur yang menyebabkan kekeringan yang keras (terlebih lagi apabila sedang berlangsung El Nino) terutama di wilayah bagian pantai utara Banten.

Dari segi temperatur, di daerah pantai dan perbukitan memiliki suhu antara 22° C-32° C, sedangkan suhu di daerah pegunungan (ketinggian antara 400-1.350 mdpl) mencapai antara 18° C-29° C.

Rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 2.483,22 mm dengan hari hujan sebanyak 160 hari. Pada musim penghujan (Bulan September-Mei), curah hujan tertinggi sebesar 2.712-3.670 mm yang mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebelah barat. Sedangkan pada bulan yang sama tercatat bahwa curah 335- 453 mm mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Sedangkan pada musim kemarau (Bulan April-Desember), curah hujan tertinggi sebesar 615-833 mm mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Sementara curah hujan terendah pada musim kemarau tercatat sebesar 360-486 mm pada Bulan Juni-September dengan luas cakupan sebesar 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah selatan dan 15% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Tenggara.

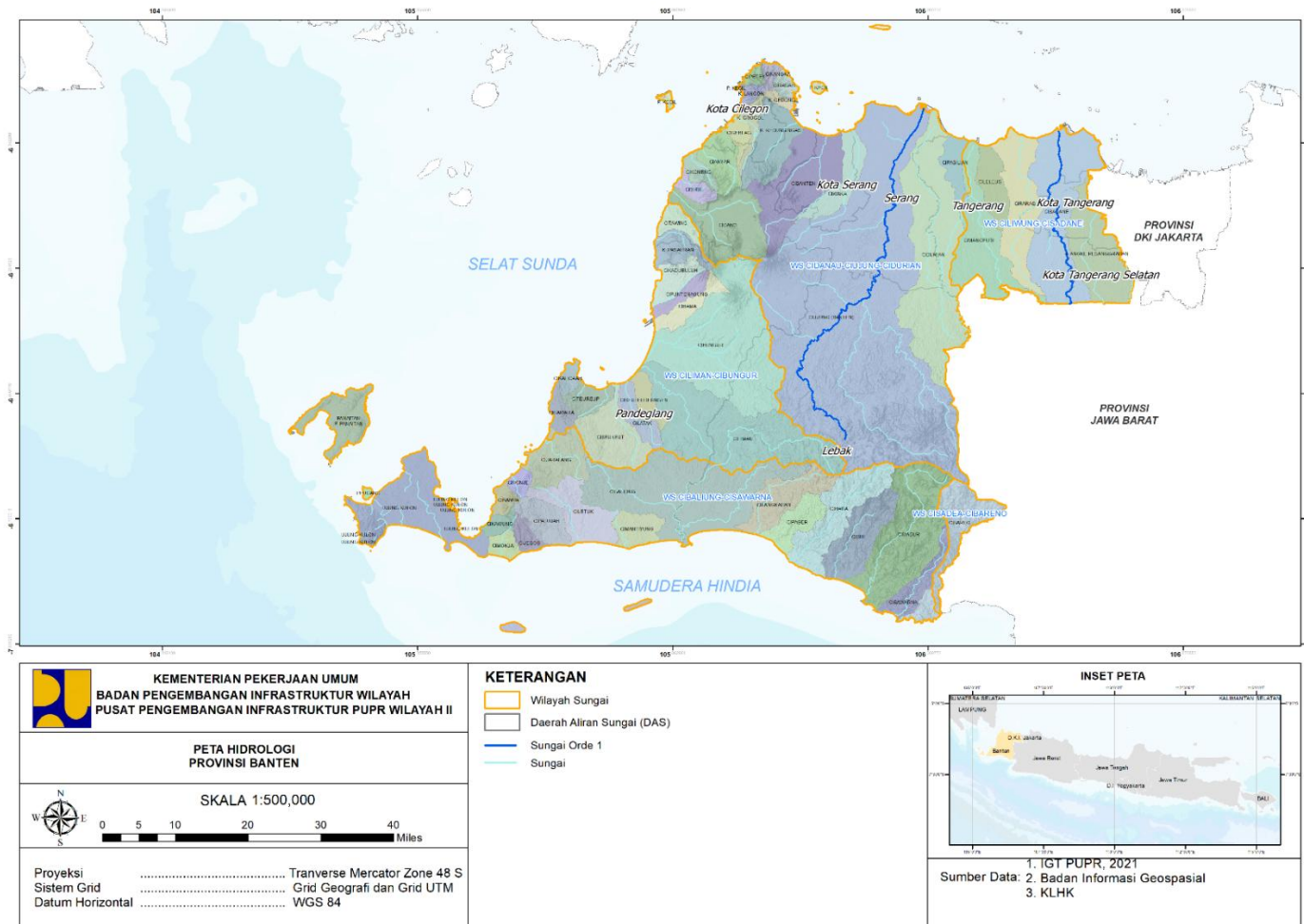
3.1.5. Profil Hidrologi

Terdapat 5 wilayah sungai (WS) di Provinsi Banten (2 WS kewenangan nasional yaitu Cidanau-Ciujung-Cidurian dan Ciliwung-Cisadane dan 3 WS kewenangan daerah) yang menjadi sumber air baku untuk kegiatan pertanian, permukiman, dan industri. Keberadaan sungai besar dan anak-anak sungai pada WS yang tersebar di wilayah utara dan selatan dapat memberikan sumber air baku yang memadai untuk kegiatan pertanian, industri dan permukiman, dimana diperlukan pengelolaan secara lebih optimal untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun. Didalam delineasi 5 wilayah sungai, terdapat 151 DAS (Daerah Aliran Sungai), yang mana 49 diantaranya berada pada wilayah sungai kewenangan nasional. Meskipun memiliki banyak potensi air baku dari

wilayah sungai, belum terkelolanya air baku dengan baik mengakibatkan wilayah utara masih mengalami defisit air baku.

Provinsi Banten memiliki potensi air permukaan sebesar 10,3 miliar m³/tahun dengan penggunaan air sudah mencapai 8,1 miliar m³/tahun. Sebesar 301 ribu ha wilayah Banten atau 31,81% wilayah sudah terlampaui penggunaan airnya. Sumber air permukaan di Banten diperoleh dari 151 daerah aliran sungai, 27 danau, 47 mata air, 28 situ, 6 embung, dan 4 bendungan. Selain itu, Banten juga memiliki panjang pantai sebesar 499,62 km yang berhadapan dengan Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia.

Tata air untuk wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air, khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas kabupaten maupun kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malingping dan lintas provinsi, meliputi CABT Serang - Tangerang dan CABT Jakarta. Secara keseluruhan profil hidrologi Provinsi Banten dapat dilihat pada peta di bawah ini.

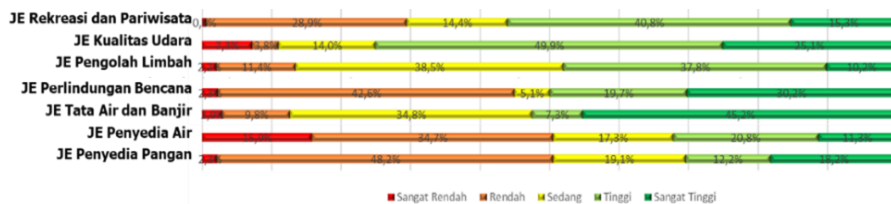


Peta 3.3 Profil Hidrologi Provinsi Banten

3.1.6. Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem (JE) menjadi dasar dalam menentukan batasan pengembangan, terutama untuk mendukung penyediaan sumber daya secara berkelanjutan, yang terdiri atas:

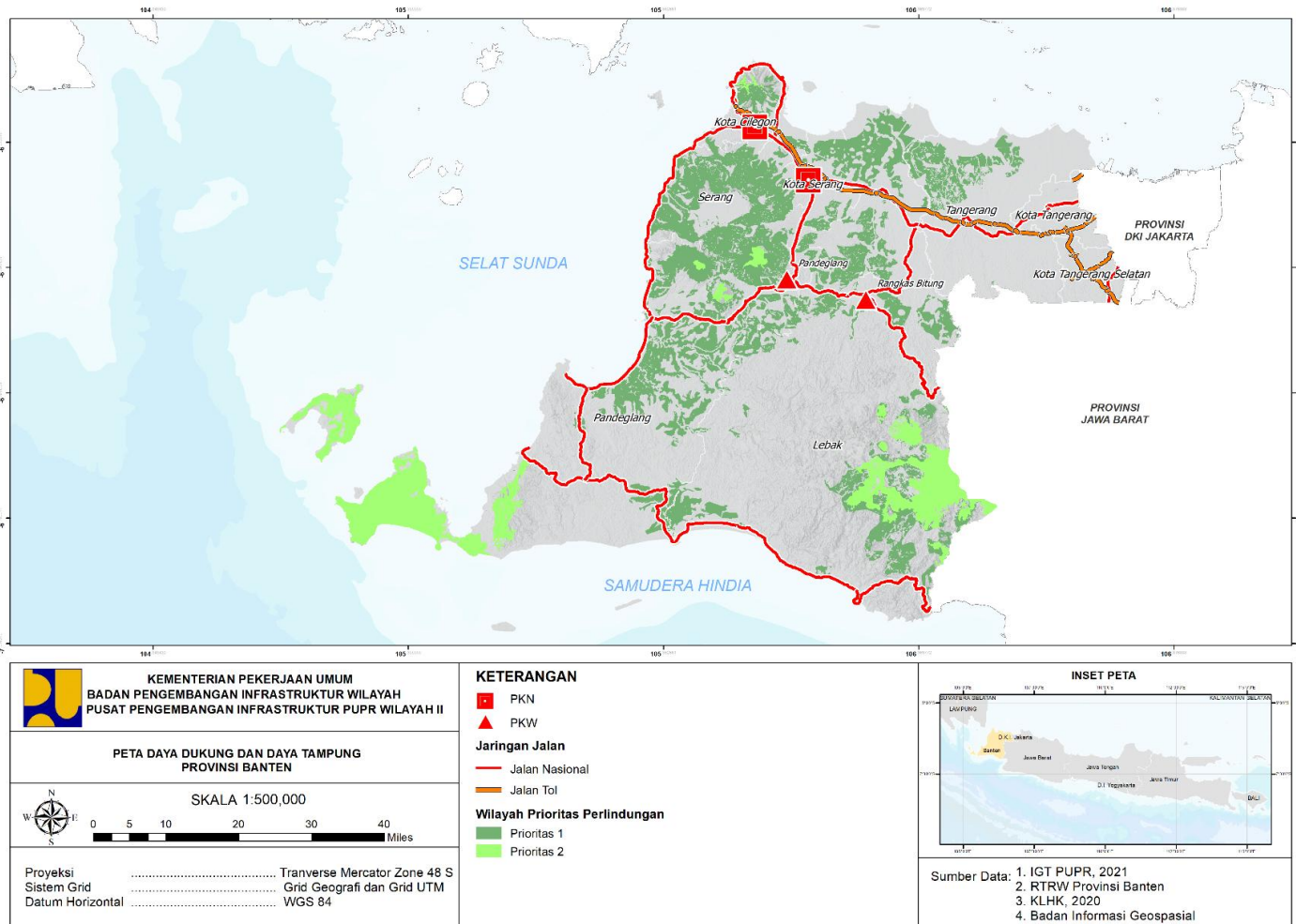
1. JE Penyedia, terdiri dari penyediaan pangan, air, energi, serat, dan genetik;
2. JE Pengaturan, terdiri dari pengaturan iklim, tata air dan banjir, bencana alam, pemurnian air, penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan, dan pengendalian hama;
3. JE Budaya, terdiri dari tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan ekowisata, serta estetika; dan
4. JE Pendukung, terdiri dari pembentuk lapisan tanah dan kesuburan, siklus hara, produksi primer, serta perlindungan plasma nutfah.



Gambar 3.1 Jasa Ekosistem Provinsi Banten

Sumber: KLHK diolah BPIW, 2023

Kondisi lingkungan Banten masih memungkinkan untuk memberikan dukungan sumber daya bagi pengembangan kegiatan industri dan pariwisata. Hal itu ditunjukkan dengan wilayah dengan JE penyedia air tinggi sebesar 32% dari luas wilayah, JE pengolah limbah tinggi sebesar 48%, JE kualitas udara tinggi sebesar 75%, JE rekreasi dan pariwisata tinggi sebesar 56,1%, serta JE penyedia pangan tinggi sebesar 30,4%. Salah satu kendala dalam pengembangan Banten adalah bencana. Kondisi lingkungan sendiri masih memungkinkan untuk mengurangi resiko bencana secara alami dengan keberadaan wilayah dengan JE perlindungan bencana yang cukup tinggi sebesar 50% dan JE tata air dan banjir sebesar 52%. Luasan wilayah dengan JE tinggi dalam mengendalikan bencana harus dipertahankan terutama di wilayah dengan kepadatan dan mobilitas tinggi. Wilayah dengan daya dukung sangat tinggi dan tinggi ditetapkan menjadi Wilayah Prioritas Perlindungan (WPP) untuk mempertahankan daya dukung lahan dalam menampung segala aktivitas ekonomi dan sosial yang terus berkembang, serta menjaga keseimbangan ekosistem baik untuk ketahanan bencana, penyedia pangan, maupun kawasan budi daya.



Peta 3.4 Profil Jasa Ekosistem Provinsi Banten

Daya dukung lahan untuk kawasan permukiman dihitung berdasarkan kemampuan lahan menampung kehidupan menggunakan metode MCA. Lahan yang memiliki daya tampung tinggi sebagai kawasan perkotaan adalah 11% dari total wilayah atau sebesar 4.205 km².

Luas WPP 1 dengan JE sangat tinggi sebesar 724 km² dan WPP 2 dengan JE tinggi 1.458 km² atau 22% dari total luasan yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Banten. WPP tersebar di seluruh Banten, dengan wilayah terbesar di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang.

3.1.7. Tutupan Lahan

Tutupan lahan Banten didominasi oleh lahan pertanian (52% atau 505.834 ha) yang sebagian besar berupa pertanian lahan kering campur seluas 225.527 ha dan sawah seluas 223.447 ha. Sebaran lahan pertanian mayoritas di utara dan tengah Banten (Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak).

Tutupan lahan pada tahun 2019 hampir sama dengan tahun 2011, namun terjadi peningkatan luasan yang signifikan pada perkebunan (peningkatan 313%) dan permukiman (peningkatan 32% dari 69.636 ha menjadi 91.968 ha).

Tabel 3.1 Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Banten

Penggunaan Lahan	2011	2019
Hutan Lahan Kering Primer	7.493	7.358
Hutan Lahan Kering Sekunder	64.066	96.632
Hutan Mangrove Sekunder	2.517	2.492
Hutan Tanaman	81.083	70.781
Perkebunan	38.166	157.760
Permukiman	69.636	91.968
Pertanian Lahan Kering	90.256	56.860
Pertanian Lahan Kering Campur	282.923	225.527
Sawah	255.429	223.447
Belukar	21.527	16.370
Tambak	14.957	14.292
Tanah Terbuka	13.356	3.313
Total	941.409	966.800

Sumber: KLHK diolah BPIW, 2023

3.1.8. Kerawanan Bencana

Provinsi Banten merupakan provinsi dengan kerawanan bencana yang cukup tinggi. Hal ini berkaitan dengan posisinya yang berada di dekat patahan Indo-Australia dan sesar aktif, serta memiliki gunung berapi aktif. Selain itu, keberadaan 151 sungai yang belum terkelola secara optimal sering menimbulkan banjir terutama di wilayah dataran rendah. Beberapa sungai yang meluap saat intensitas hujan tinggi, diantaranya Cibanten, Cidurian, Cimanceuri, Cisadane, Ciujung, dan Cidanau.

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI), pada tahun 2023 Provinsi Banten memiliki indeks sebesar 132.21 dengan kategori sedang (tertinggi di Pulau Jawa). Wilayah dengan IRBI tertinggi adalah Kabupaten Lebak (172.98), disusul Kabupaten Pandeglang (169.21), dan Kabupaten Tangerang (141.43).

a. Rawan Bencana Gunung Berapi

Di Banten terdapat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Anak Krakatau, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda merupakan gunung yang sangat aktif yang terakhir erupsi pada tahun 2022. Sedangkan Gunung Karang dan Gunung Pulosari di Kabupaten Pandeglang berstatus istirahat dan terakhir erupsi 600 tahun yang lalu.

Keberadaan gunung berapi aktif membuat kawasan di sekitarnya menjadi rawan terhadap bencana, yaitu kawasan di sekitar puncak gunung yang rawan terhadap bahaya primer (lelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun) dan bahaya sekunder (aliran lahar hujan, banjir bandang, dan longsor material vulkanik). Pada Gunung Anak Krakatau, kawasan rawan bencana berada di pesisir barat Banten yang berhadapan langsung, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon.

b. Rawan Gempa Bumi dan Tsunami

Kawasan rawan gempa bumi tinggi di Banten meliputi wilayah barat dan selatan yang relatif lebih dekat dengan Patahan Indo-Australia. Patahan tersebut termasuk aktif dan sering menimbulkan gempa yang merusak. Luasan bahaya gempa bumi di Provinsi Banten sebesar 767.356 ha yang dapat menimbulkan tingkat kerentanan bahaya gempa bumi dengan kategori sedang-tinggi di Provinsi Banten. Dua kabupaten yang memiliki tingkat gempa bumi tinggi berada di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan rata-rata luasan gempa bumi di dua kabupaten tersebut sebesar 261.234 ha dan 269.447 ha. Selain itu, terdapat sebaran sesar aktif yang berada di sekitar Banten, yaitu sesar Cimandiri di perbatasan Provinsi Jawa Barat serta sesar Sumatera yang berada di Samudra Hindia dekat dengan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Adanya patahan dan sesar di Samudra Hindia juga menyebabkan rawan terjadinya tsunami terutama di kawasan pesisir barat dan selatan Provinsi Banten yang memiliki tingkat kerawanan bencana tsunami dengan tingkat sedang - tinggi.

Pada tanggal 22 Desember 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda yang menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Bencana alam tsunami tersebut menyebabkan sekitar 400 rumah di Kabupaten Pandeglang yang terletak di pesisir pantai roboh atau rusak berat akibat tsunami. Selain itu, 9 hotel di Kabupaten Pandeglang juga mengalami rusak berat serta

jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Serang dengan Kabupaten Pandeglang terputus.

c. Rawan Gerakan Tanah dan Longsor

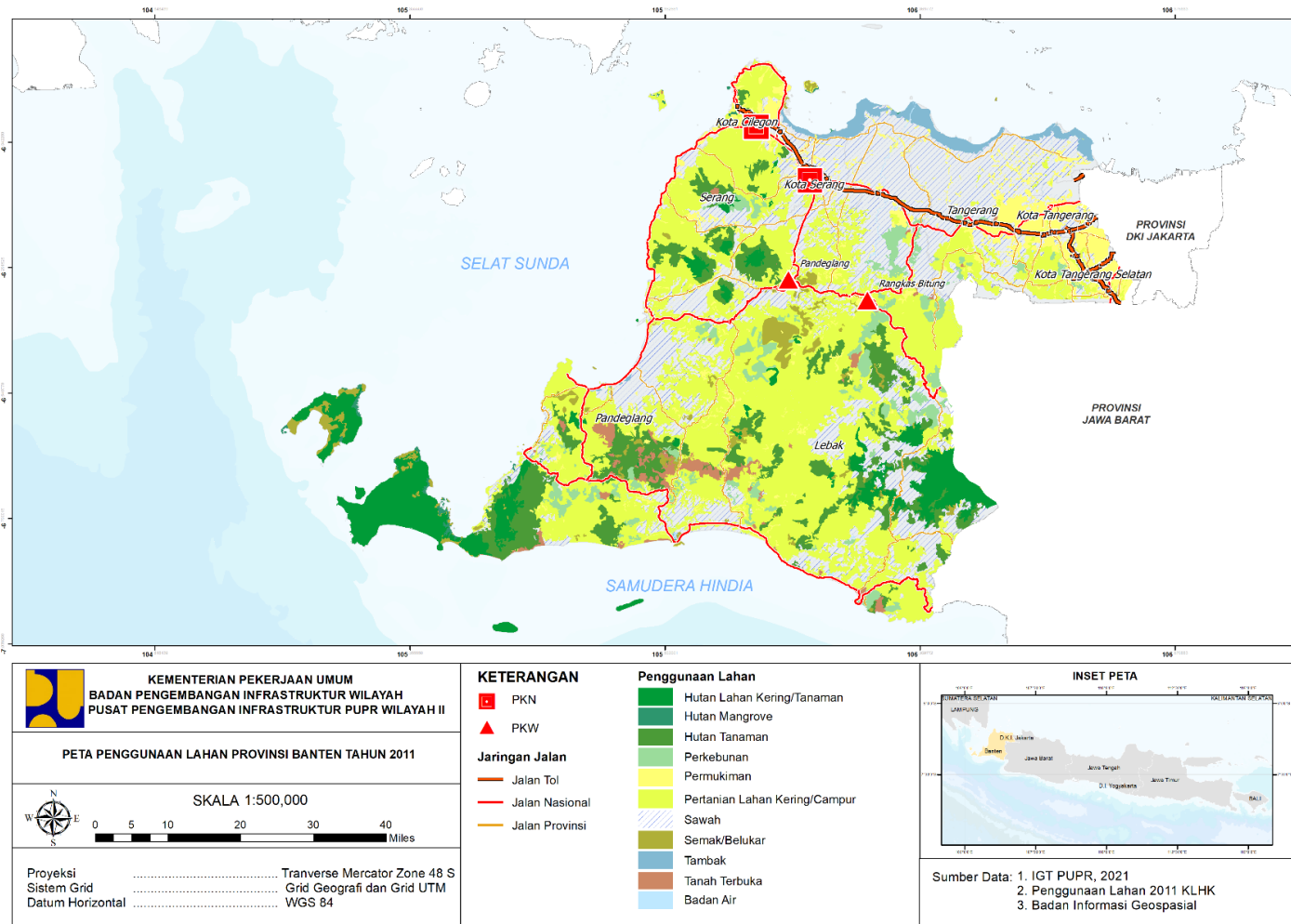
Provinsi Banten memiliki tingkat kerawanan bencana longsor yang diakibatkan oleh gerakan tanah dengan berbagai tingkatan risiko. Wilayah utara Provinsi Banten memiliki kontur landai, sehingga tingkat risiko gerakan tanah sangat rendah. Sedangkan, pada wilayah barat dan selatan memiliki kontur berbukit dan kelerengan yang curam, sehingga menyebabkan tingginya risiko gerakan tanah dan dapat memicu terjadinya longsor. Selain itu, wilayah timur dan barat Provinsi Banten memiliki tingkat kerawanan longsor menengah hingga tinggi dikarenakan kontur yang bervariasi.

d. Rawan Bencana Banjir

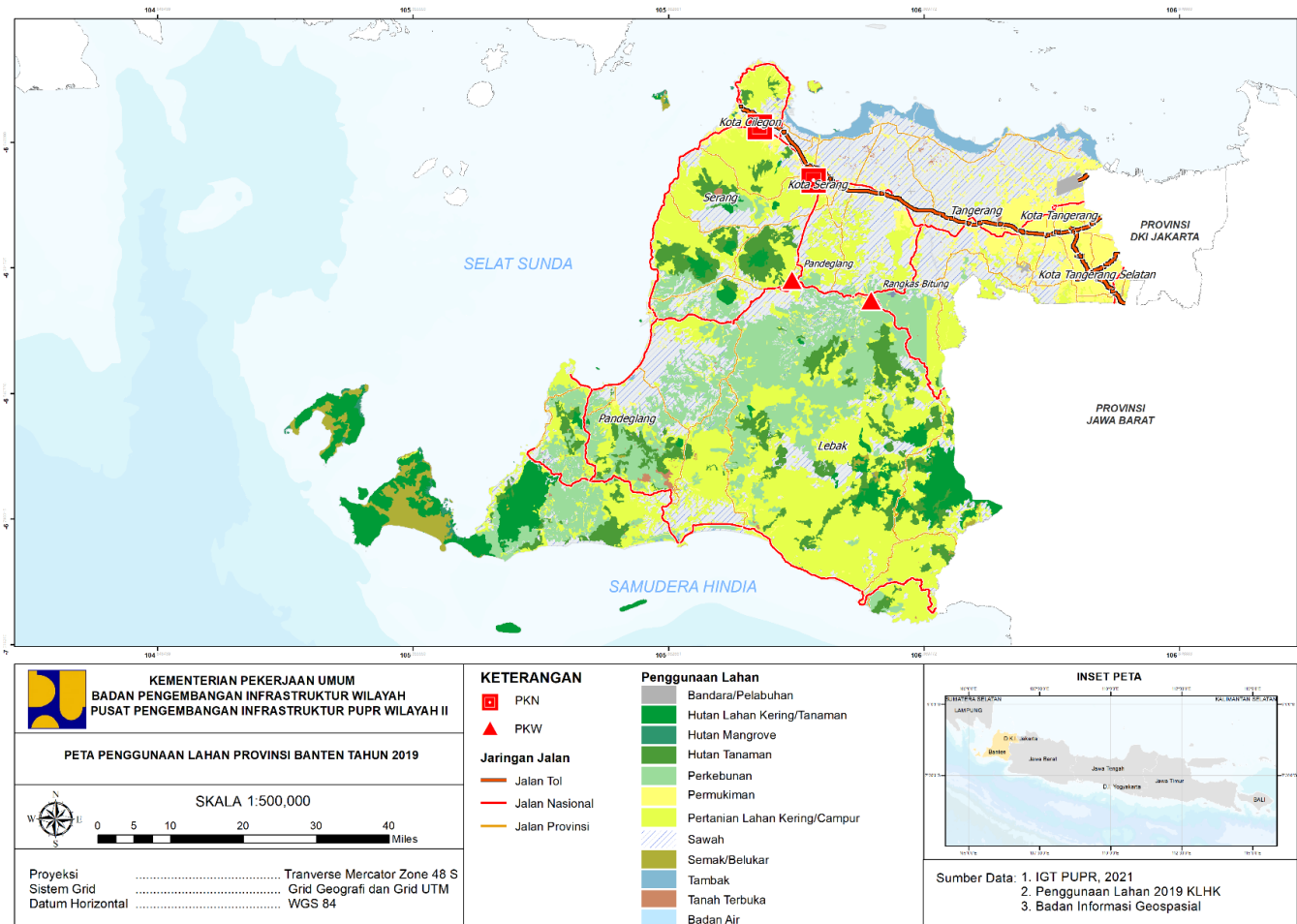
Provinsi Banten memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi khususnya di wilayah utara terutama di hilir Sungai Cisadane, Sungai Ciujung, Sungai Cidanau, dan Sungai Cidurian. Luasan potensi banjir di Provinsi Banten berdasarkan kajian inaRISK adalah 267.980, dengan kategori rendah sampai tinggi. Total luasan dengan resiko tinggi adalah 135.876 hektar, terluas berada di Kabupaten Serang yaitu 74.896 hektar, disusul Kabupaten Tangerang seluas 67.327 hektar. Kepadatan penduduk yang tinggi di sepanjang DAS sungai juga mengakibatkan tingginya penduduk yang berisiko terdampak banjir, yaitu sebanyak 5,7 juta orang.

e. Rawan Kekeringan

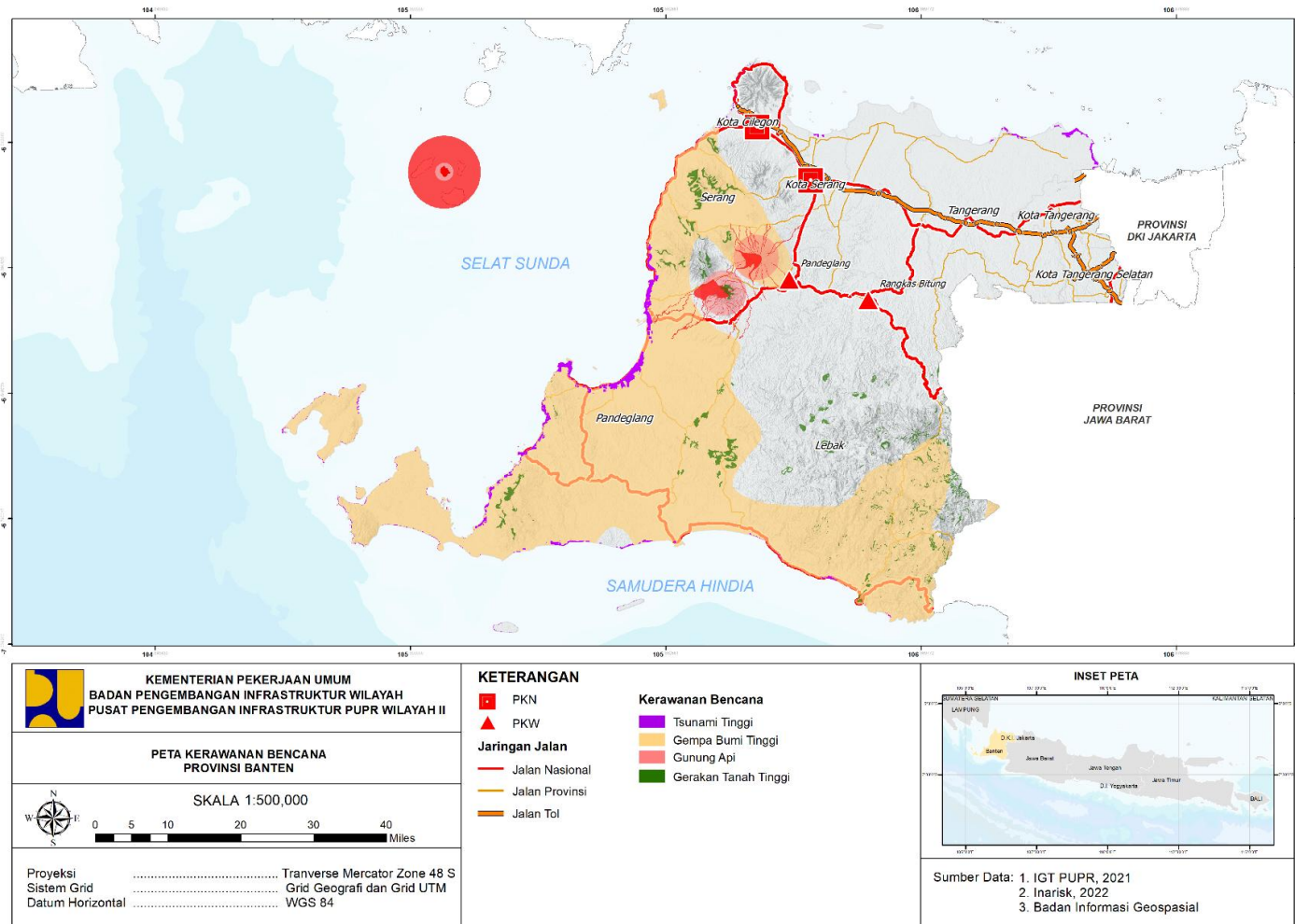
Kawasan rawan kekeringan diindikasikan dengan ketersediaan air yang rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau. Di Provinsi Banten wilayah yang rawan terhadap kekeringan meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Berdasarkan data inaRISK BNPB, Provinsi Banten termasuk daerah yang mempunyai resiko bencana kekeringan sedang hingga tinggi, dengan luasan 169.480 hektar resiko tinggi dari total luasan resiko 966.292 hektar. Kabupaten dengan luas potensi kekeringan tertinggi di Kabupaten Pandeglang seluas 125.674 hektar.



Peta 3.5 Tutupan Lahan Provinsi Banten Tahun 2011



Peta 3.6 Tutupan Lahan Provinsi Banten Tahun 2019



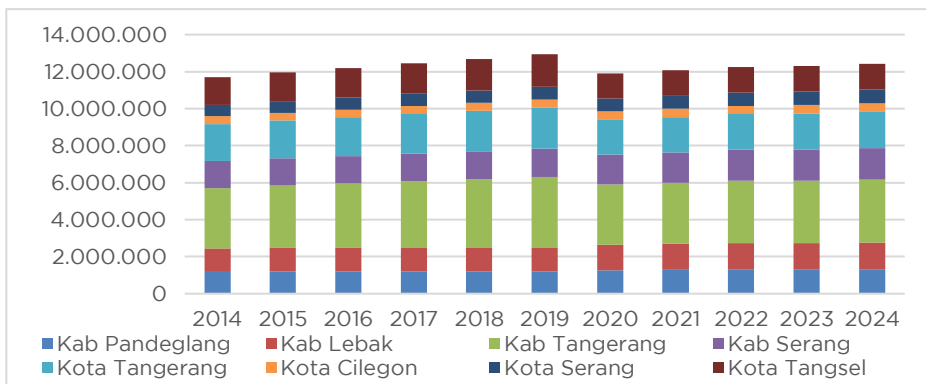
Peta 3.7 Kerawanan Bencana Provinsi Banten

3.2. Profil Demografi

Dinamika kependudukan, karakteristik dari populasi penduduk, dapat diketahui dari demografi suatu daerah, oleh karena itu profil demografi tidak lepas dari dokumen ini karena dapat mendeskripsikan kondisi demografi wilayah perencanaan 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk menyusun analisis perhitungan perencanaan kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum. Pembahasan profil demografi di Banten antara lain mengenai kondisi kependudukan, penduduk menurut jenis pekerjaan, pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia.

3.2.1. Profil Kependudukan

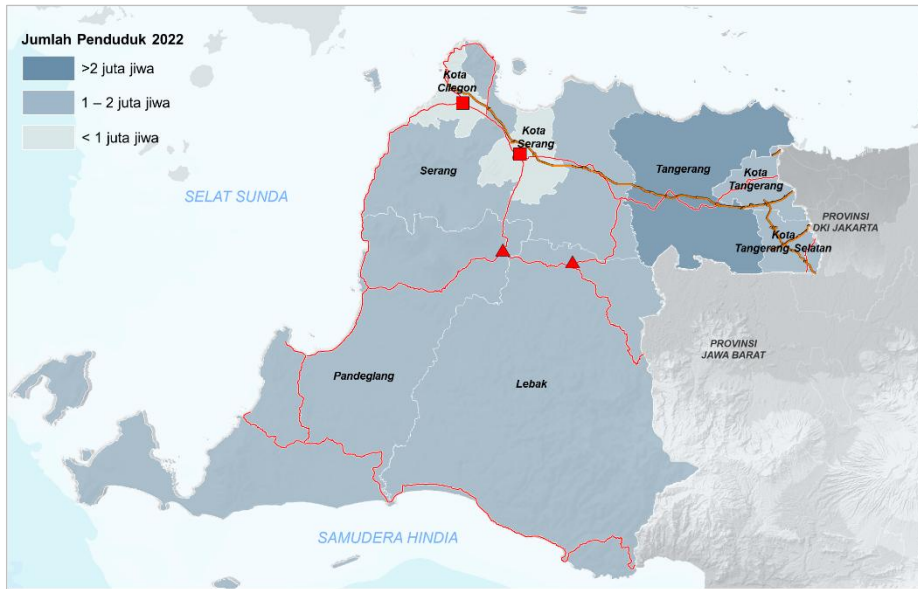
Jumlah penduduk Provinsi Banten pada tahun 2024 sebanyak 12.431.390 jiwa atau 4,4% jumlah penduduk Indonesia dan 8 % penduduk Pulau Jawa. Jumlah penduduk terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,16%. Rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,44, dengan penduduk laki-laki sebanyak 6.320.850 jiwa dan perempuan 6.045.000 jiwa. Tingginya laju pertumbuhan penduduk salah satunya disebabkan oleh angka kelahiran di Provinsi Banten cukup tinggi, yaitu 2% pada tahun 2024.



Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2014-2024

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

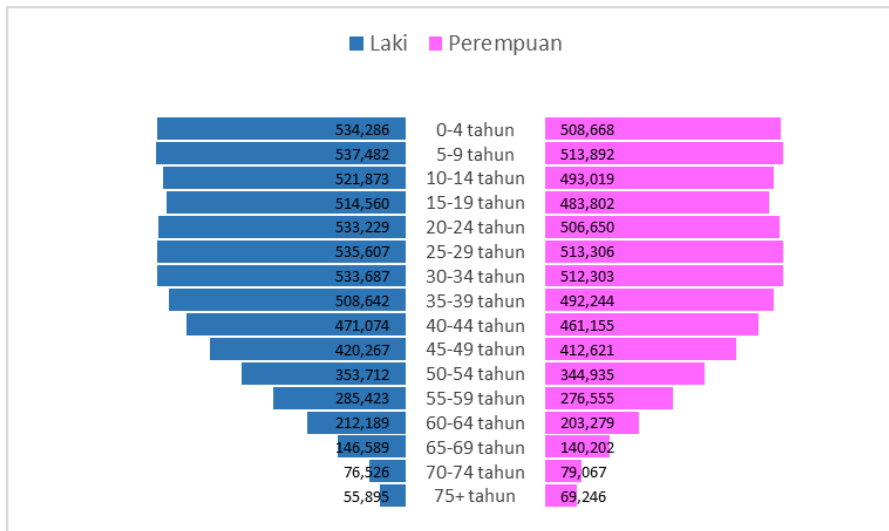
Dari segi persebaran, jumlah penduduk terbesar ada di Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 3.400.490 jiwa dan terendah di Kota Cilegon sebanyak 455.620 jiwa. Peta persebaran penduduk Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

Dari segi kelompok usia, lebih dari setengah penduduk Provinsi Banten adalah generasi *millenial* dan *gen-z* yang berumur 8-39 tahun, artinya sebagian besar penduduk Banten merupakan usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia non-produktif, sehingga *dependency ratio* atau angka ketergantungan di Provinsi Banten cukup rendah. Jika digambarkan dalam piramida penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia akan membentuk struktur piramida terbalik, yang merupakan tanda adanya bonus demografi. Kelompok umur terbesar adalah kelompok umur 25-29 tahun dan kelompok umur 30-34 tahun. Sedangkan kelompok umur dengan populasi terendah yaitu kelompok umur 75 tahun ke atas. Bonus demografi tentu dapat menjadi kesempatan dan tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Secara lengkap, piramida penduduk Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.4 Piramida Penduduk Povinsi Banten

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dibedakan menjadi kepadatan penduduk *gross* dan *netto*. Kepadatan *gross* merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Sedangkan kepadatan *netto* merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas kawasan budidaya. Kepadatan penduduk *netto* Banten sebesar 1.341 jiwa/km² dengan kepadatan terbesar di Kota Tangerang (12.753 jiwa/ km²) dan kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Lebak (423 jiwa/ km²). Kepadatan penduduk masing-masing wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

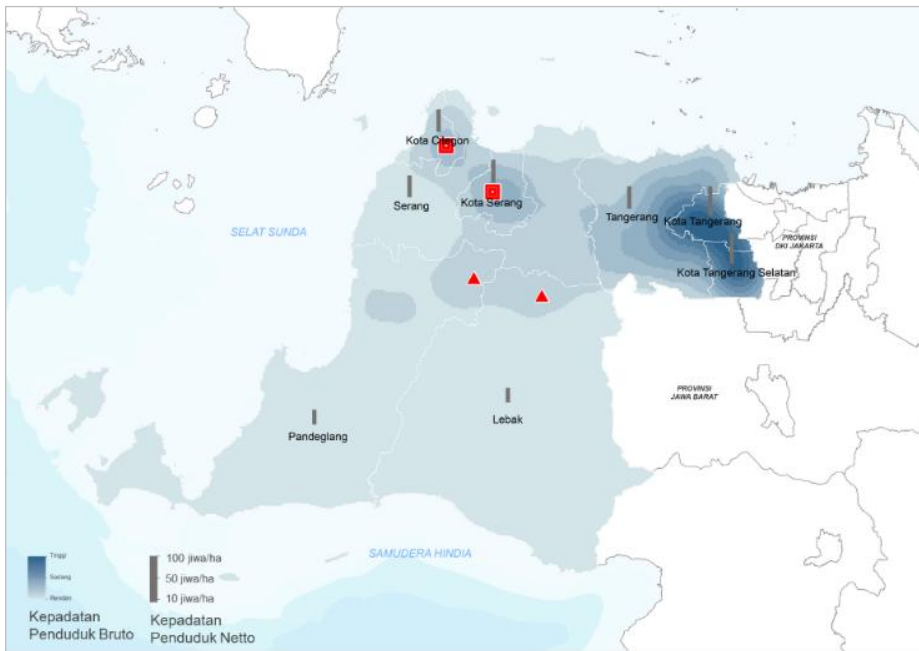
Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Banten 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
			Bruto	Netto
Kab. Pandeglang	1.325.950	2.747	479	483
Kab. Lebak	1.449.210	3.427	438	423
Kab. Tangerang	3.400.490	1.012	3.308	3.360
Kab. Serang	1.701.800	1.734	1.158	981
Kota Tangerang	1.963.970	154	11.034	12.753
Kota Cilegon	455.620	176	2.795	2.589
Kota Serang	734.870	267	2.763	2.752
Kota Tangsel	1.399.500	147	8.482	9.520
Total	12.431.410	9.663	30.455	32.862

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

Berdasarkan kepadatan bruto yang dilihat dari total luasan wilayah masing-masing kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Berdasarkan kepadatan netto yang dilihat dari luasan kawasan budi daya terhadap total jumlah penduduk, Kota Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan juga menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk *netto* tertinggi.

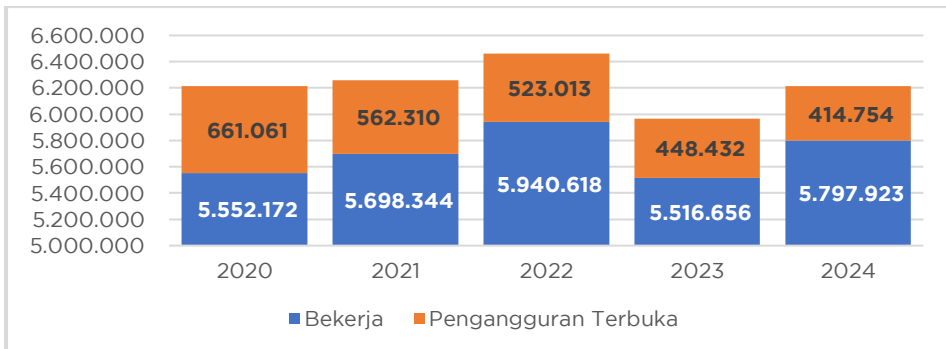


Gambar 3.5 Kepadatan Penduduk *Bruto* dan *Netto*

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

3.2.2. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Pada tahun 2024, angkatan kerja di Banten sebanyak 6.212.677 jiwa, yang terdiri dari 5.797.923 jiwa penduduk bekerja dan 414.754 jiwa merupakan pengangguran. Angkatan kerja didominasi oleh laki-laki sebesar 64,7%, sedangkan angkatan kerja berjenis kelamin perempuan sebesar 35,3%. Angkatan kerja terbanyak ada di Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 1.691.017 jiwa sedangkan paling rendah di Kota Cilegon yaitu sebanyak 207.167 jiwa. Banyaknya angkatan kerja di Banten dapat menjadi potensi dalam ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing, yang perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain. Secara lengkap, persebaran angkatan kerja di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



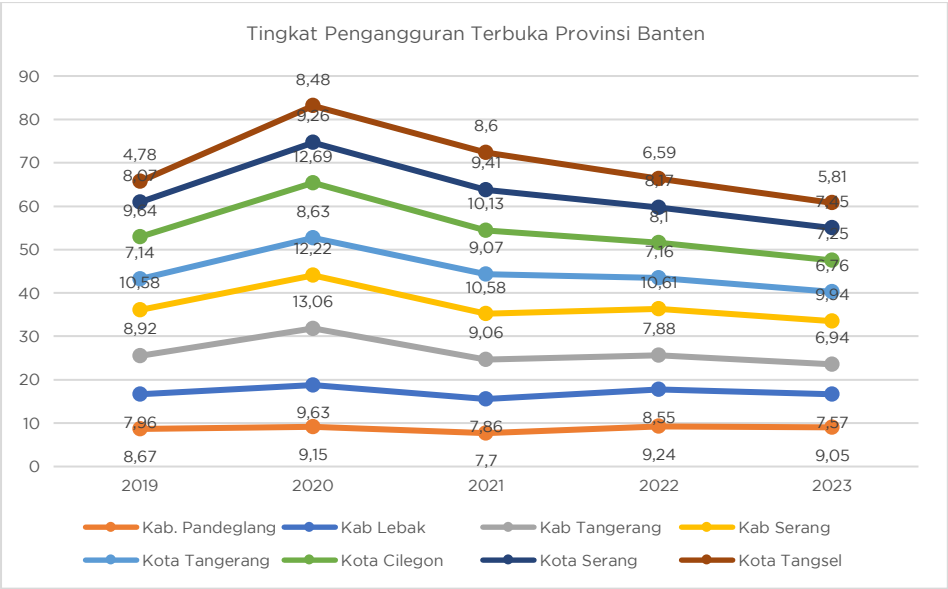
Gambar 3.6 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Banten 2020-2024

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

Lapangan pekerjaan utama di Provinsi Banten berasal dari sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda sebanyak 1.186.369 jiwa (21,5%), industri pengolahan sebanyak 1.158.479 (20,99%), pertanian dan kehutanan sebanyak 662.474 jiwa (12%), penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 479.502 jiwa (8,69%), dan transportasi dan pergudangan sebanyak 361.655 jiwa (6,55%).

3.2.3. Pengangguran

Jumlah pengangguran Banten pada tahun 2023 sebanyak 424.690 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten sebesar 7,52% dimana nilai ini lebih tinggi dari TPT nasional yaitu sebesar 4,91%. Tingkat pengangguran ini cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19. Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat pengangguran terbuka terkecil yaitu 5,81%, sebaliknya Kabupaten Serang memiliki tingkat pengangguran terbuka terbesar yaitu sebesar 9,94%.

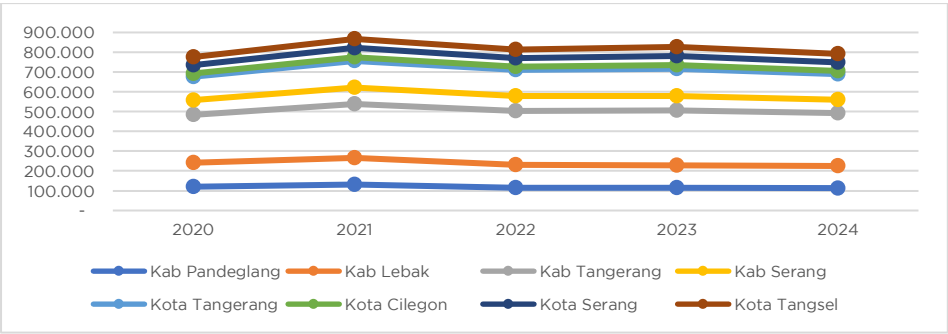


Gambar 3.7 TPT Banten Tahun 2019-2023

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

3.2.4. Kemiskinan

Presentase penduduk miskin Provinsi Banten tahun 2024 sebesar 5,84% (di bawah nasional 8,57%) dengan jumlah penduduk miskin sebesar 791.610 jiwa. Dengan angka tersebut, Banten menjadi provinsi dengan presentase penduduk miskin terendah kedua di Pulau Jawa (setelah Provinsi DKI Jakarta). Dilihat dari tren per tahun jumlah penduduk miskin semakin turun, akan tetapi naik kembali pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid 19. Berdasarkan distribusinya, persentase penduduk miskin terbesar ada di Kab. Pandeglang dan terendah di Kota Cilegon. Jumlah penduduk miskin masing-masing wilayah di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.8 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Banten 2020-2024

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau menentukan level pembangunan suatu wilayah. Pada tahun 2024, nilai IPM rata-rata Banten adalah 74,48, berada di atas rata-rata nasional yaitu 74.20. IPM Provinsi Banten tertinggi ke-9 nasional dan ke-3 di Pulau Jawa. Nilai IPM tertinggi ada di Kota Tangerang Selatan yaitu 82,89, sedangkan nilai IPM terendah di Kabupaten Lebak yaitu 65,86.

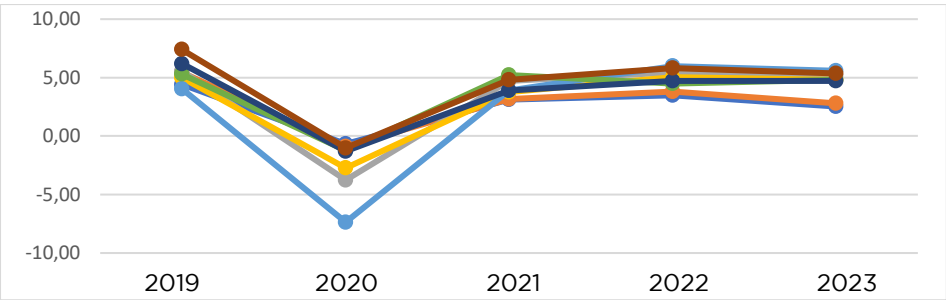
Terdapat 4 sub-indikator IPM, yaitu Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Banten mencapai 76,35 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Banten rata rata 13,10 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 9,23 tahun, dan pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan sebesar Rp.13.097.000.

3.3. Profil Ekonomi

Profil ekonomi menjelaskan terkait profil ekonomi Provinsi Banten, diantaranya PDRB, pendapatan per kapita, sektor unggulan wilayah, perkembangan investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). Kondisi ekonomi memperlihatkan potensi ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan dan kemampuan daerah dalam mendukung pembangunan di Provinsi Banten.

3.3.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB yang digunakan dalam sub bab ini adalah PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 531,74 triliun rupiah, dengan kontribusi sebesar 6,9% terhadap PDRB Pulau Jawa dan 3,97% terhadap PDB nasional. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Banten adalah industri pengolahan (30,35% PDRB dan 4,24% industri pengolahan nasional), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (12,38% PDRB dan 2,4% perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor nasional), dan konstruksi (11,69% PDRB dan 2,5% sektor konstruksi nasional). Secara lengkap, laju pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.9 Pertumbuhan PDRB per Kabupaten 5 tahun terakhir

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

Berdasarkan distribusi kewilayahannya, wilayah dengan PDRB tertinggi adalah Kota Tangerang sebesar 119.060 triliun rupiah dengan sektor unggulan industri pengolahan, dan Kabupaten Tangerang sebesar 108,570 triliun rupiah dengan sektor unggulan industri pengolahan. Sedangkan PDRB terendah di Banten terdapat di Kabupaten Pandeglang sebesar 21.341 triliun rupiah dengan sektor unggulan pertanian, dan Kabupaten Lebak sebesar 22.706 triliun rupiah dengan sektor unggulan pertanian. Persebaran PDRB per wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.10 PDRB ADHK Lapangan Usaha Provinsi Banten

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

3.3.2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita Provinsi Banten Tahun 2023 sebesar 41,23 juta rupiah (di bawah pendapatan per kapita nasional 44,14 juta dan tertinggi ke-3 di Pulau Jawa). Wilayah dengan pendapatan per kapita tertinggi adalah Kota Cilegon (187,65 juta rupiah), Kota Tangerang (61,04 juta

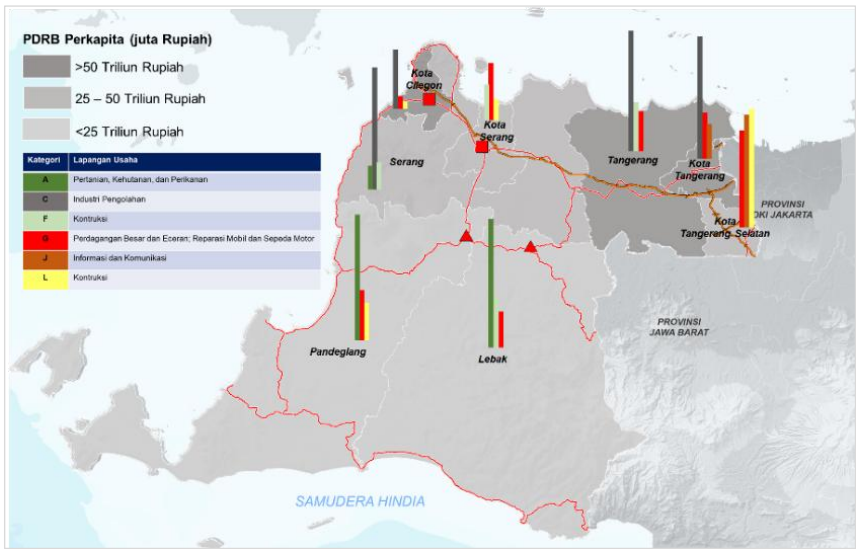
rupiah), dan Kota Tangerang Selatan (49,99 juta rupiah). Sementara pendapatan per kapita terendah berada di Kabupaten Lebak (15,84 juta rupiah) dan Kabupaten Pandeglang (16,26 juta rupiah). PDRB per kapita masing-masing wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 PDRB Per Kapita Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita (ribu)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Pandeglang	15.659,54	16.025,89	16.256,58
Kabupaten Lebak	15.192,06	15.583,84	15.837,92
Kabupaten Tangerang	29.840,83	31.075,21	32.287,60
Kabupaten Serang	33.439,51	34.674,38	35.889,29
Kota Tangerang	55.654,98	58.385,70	61.038,43
Kota Cilegon	175.579,69	181.208,05	187.649,79
Kota Serang	33.373,11	34.383,54	35.446,00
Kota Tangerang Selatan	45.696,16	47.886,87	49.985,51
Banten	38.339,42	39.790,39	41.228,33

Sumber: BPS diolah BPIW, 2024

Secara spasial, persebaran PDRB per kapita beserta sektor unggulan untuk masing-masing wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.11 Persebaran PDRB per Kapita dan Sektor Unggulan

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

3.3. Sektor Ekonomi Unggulan

Sektor ekonomi unggulan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perkembangan perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB dan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor tersebut, sektor ekonomi unggulan di Provinsi Banten yaitu sektor industri, sektor pariwisata, dan sektor pertanian.

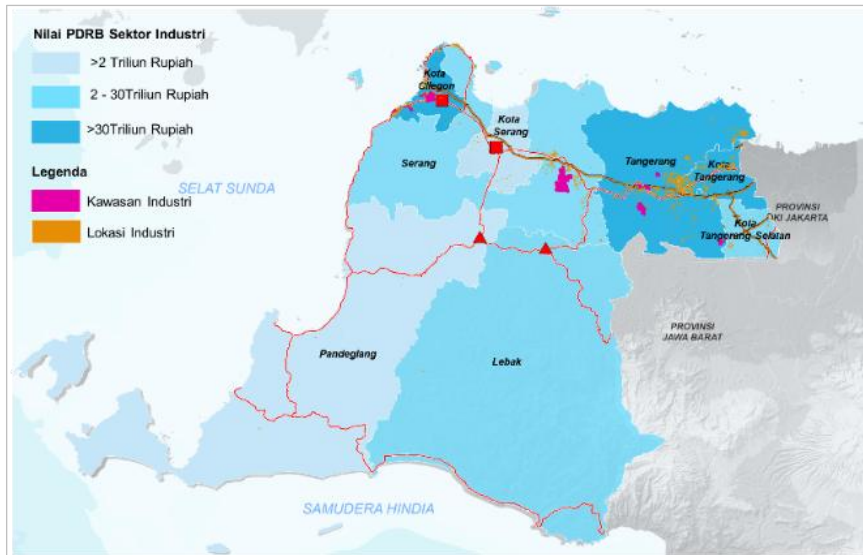
3.3.1. Sektor Industri

Sektor industri Banten pada tahun 2024, memberikan kontribusi sebesar 7% terhadap industri nasional serta menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Banten, yaitu sebesar 30,25%. Industri pengolahan petrokimia dan smelter Banten merupakan yang terbesar di Indonesia dengan kontribusi masing-masing sebesar 78% dan 39% nasional.

Ekspor Banten berada di peringkat 8 nasional dengan nilai sebesar US\$12,14 miliar pada tahun 2024 dengan pertumbuhan 1,69% dari tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan pada tahun 2022 memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Provinsi Banten, yaitu sebesar US\$13,79 miliar (97,81%), sektor migas US\$158,55 juta (1,12%), sektor pertanian US\$148,97 juta (1,05%), serta sektor pertambangan dan lainnya US\$0,85 juta (0,01%).

Industri Banten didukung oleh hub internasional Tanjung Priok, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading dan Bandara Soekarno Hatta sebagai *outlet* dan jaringan jalan tol antarprovinsi dan jalan Pantura. Kegiatan ekspor sebagian besar dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok (38%), Pelabuhan Ciwandan (29%) dan Pelabuhan Cigading yang melayani KI Cilegon/Krakatau Steel (19%).

Secara distribusi kewilayahan, kegiatan industri lebih terkonsentrasi di Pantura Banten (97%) antara lain di koridor Serang-Cilegon. Kontribusi sektor industri di Kawasan Serang – Cilegon sebesar 48,23% terhadap industri Provinsi Banten, dengan industri terbesar berada di Kota Cilegon dengan volume *output* sebesar Rp. 47 triliun. Saat ini terdapat 5 (lima) industri petrokimia besar eksisting maupun rencana di Kota Cilegon yang memiliki kapasitas sebesar 7.130 KTA dengan nilai investasi sebesar 8,8 triliun.



Gambar 3.12 Distribusi PDRB Sektor Industri Provinsi Banten

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Meskipun komoditas petrokimia dan smelter menjadi yang terbesar di Indonesia, namun perkembangan industri tersebut di Banten masih belum optimal. Hal itu dikarenakan produk hasil industri sebagian besar hanya berupa produk setengah jadi, sementara untuk bahan baku dan bahan penolong untuk hilirisasi masih bergantung pada impor. Hal itu dapat dilihat pada nilai impor Provinsi Banten tahun 2023 sebesar US\$10,37 miliar, naik 12,63% dibandingkan dengan nilai impor selama lima tahun terakhir. Sebagian besar impor tersebut berupa bahan baku dan bahan penolong yaitu sebesar US\$9,96 miliar (96,09%).

Komoditas ekspor Banten didominasi oleh komoditas sepatu (43%), besi dan baja (21%), plastik dan barang dari plastik (20%), dan bahan kimia organik (16%). Sementara komoditas impor didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral (52%), bahan kimia organik (24%), besi dan baja (15%), dan gandum (9%).

3.3.2. Sektor Pertanian

Pada tahun 2024, Banten menempati posisi ke-9 nasional sebagai provinsi penghasil padi terbesar, dengan produksi padi mencapai 1,55 juta ton GKG dan luas panen sebesar 300 ribu ha. Meskipun menjadi penghasil padi nasional, produktivitas lahan sawah masih di bawah produktivitas nasional, yaitu hanya sebesar 51,84 (nasional 52,90). Sektor pertanian menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ke-6 terhadap PDRB Banten, yaitu sebesar Rp. 25,4 miliar atau 6% dengan distribusi terbesar berada di wilayah selatan.

Wilayah penghasil padi terbesar di Banten yaitu Kabupaten Pandeglang (produksi 414.576 ton; luas panen 77.466 ha); Kabupaten Serang (produksi 409.150 ton; luas panen 75.987 ha); dan Kabupaten Lebak (produksi 357.013 ton; luas panen 74.016 ha). Jika dijumlahkan, produksi padi di wilayah selatan berkontribusi sebesar 74% terhadap produksi padi Banten.

Tabel 3.4 Produksi Padi Provinsi Banten 2024

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)	Produksi Padi (ton)	Produktivitas Padi (Kw/Ha)
Kabupaten Pandeglang	77.466	414.576	53,52
Kabupaten Lebak	74.016	357.013	48,23
Kabupaten Tangerang	58.366	298.678	51,17
Kabupaten Serang	75.987	409.150	53,84
Kota Tangerang	436	2.708	62,11
Kota Cilegon	1.809	9.600	53,07
Kota Serang	11.010	58.899	53,50
Total	299.091	1.550.623	53,63

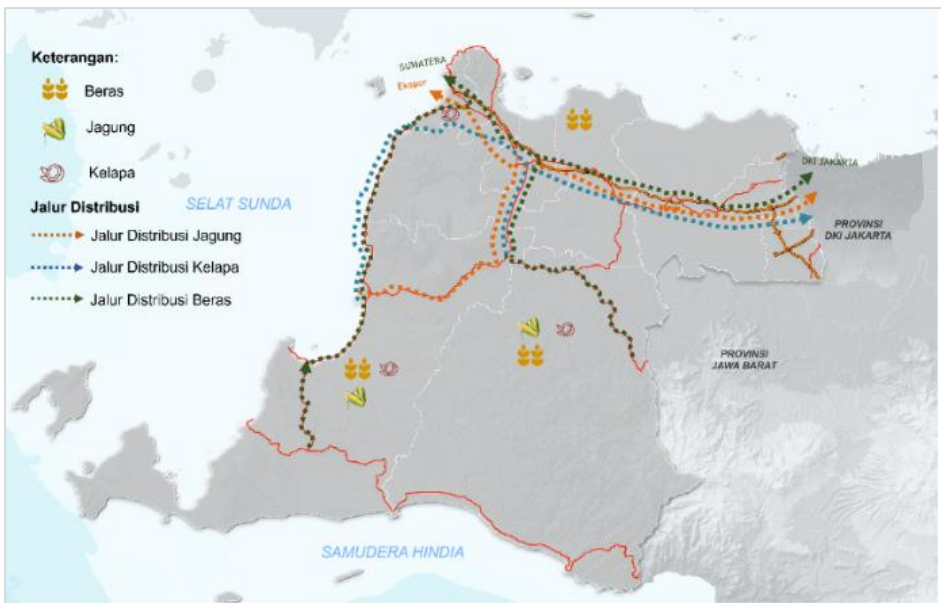
Sumber: BPS, 2024

Dari total lahan pertanian di Banten, 60% nya merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan dalam upaya ketahanan pangan. Luas LP2B Banten adalah 190.973,85 ha dengan 52% atau 100.470,96 ha sudah terairi irigasi teknis. Wilayah dengan luasan panen terbesar adalah Kabupaten Pandeglang (85 ribu ha), Kabupaten Serang (79 ribu ha), dan Kabupaten Lebak (75 ribu ha) yang menyumbang 75% dari total panen Banten dan 1,2 juta ton produksi beras per tahun (74% produksi beras Banten). Secara lengkap terkait LP2B dapat dilihat pada Peta 3.8.

Lahan pertanian Banten menjadi bagian dari daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pusat (total luasan 52 ribu ha, yaitu DI Cisadane, DI Cibaliung, DI Ciliman, DI Cidurian, dan DI Ciujung), DI kewenangan provinsi sebesar 18.294 ha dan DI kewenangan kabupaten/kota dengan luasan sebesar 11.106 ha.

Meskipun sebagai salah satu lumbung pangan utama nasional, ancaman alih fungsi lahan pertanian Banten cukup tinggi. Terdapat penurunan luasan lahan pertanian padi sebesar 77.463 hektar selama 10 tahun terakhir (2011-2021) atau sebesar 7.746 hektar per tahun. Penurunan ini terutama terjadi di wilayah utara yang memiliki perkembangan kawasan permukiman sangat tinggi akibat adanya aglomerasi kawasan perkotaan Jabodetabek dan perkembangan kawasan industri. Selain padi, Banten juga memiliki komoditas unggulan perkebunan yaitu kelapa (Kabupaten Pandeglang), karet (Kabupaten Lebak), dan aren (Kabupaten Pandeglang) dengan luas 59.358 ha. Masing-masing komoditas memiliki produksi sebesar: kelapa (48,28 ton), karet (6,14 ton) dan aren (4,04 ton). Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak merupakan penghasil kelapa dan karet tertinggi Provinsi Banten. Sebaran

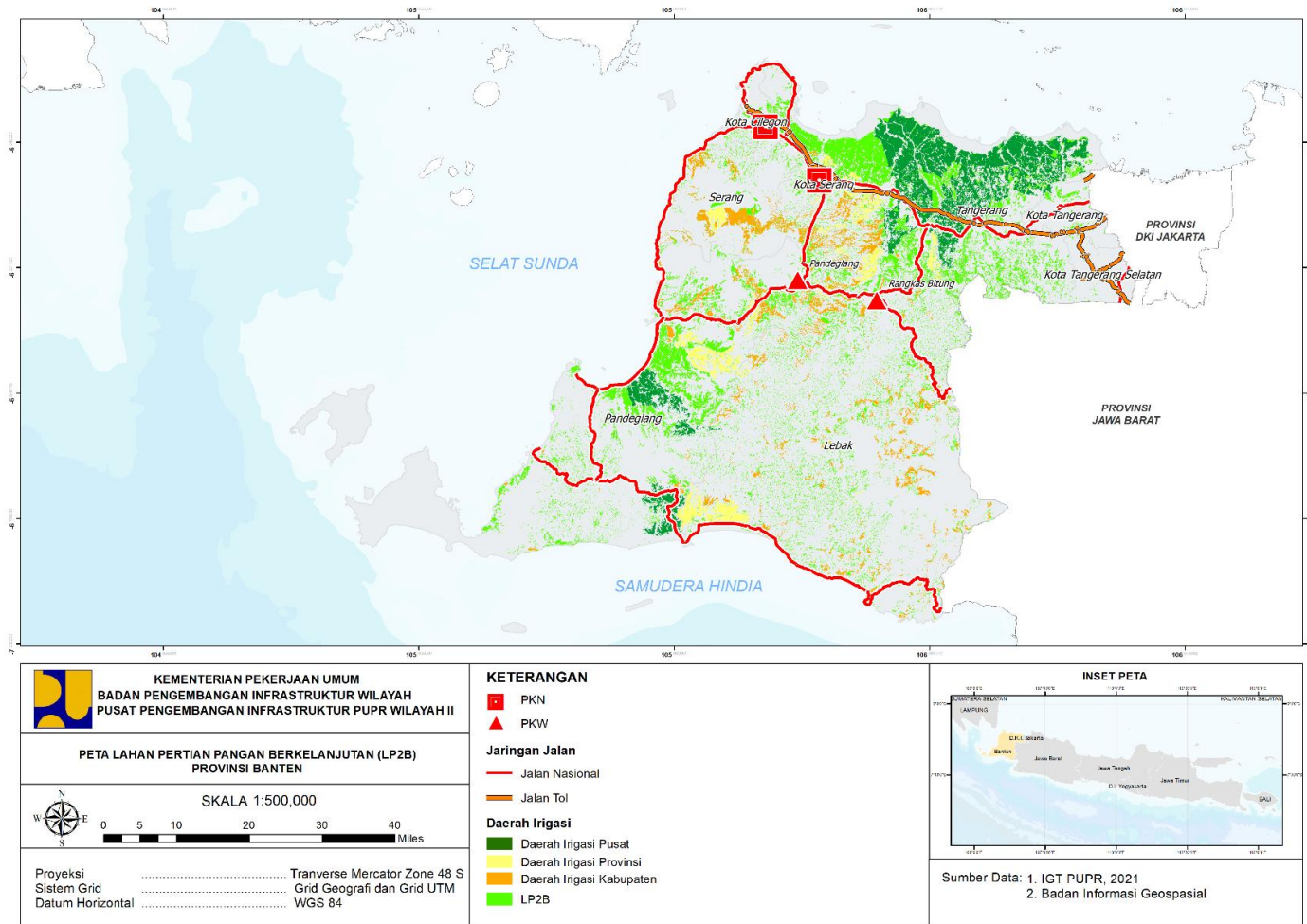
komoditas perkebunan Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.13 Pergerakan Komoditas Unggulan Pertanian

Sumber: Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN), 2021

Dari segi rantai pasok, hasil pertanian dan perkebunan dari pusat produksi sebagian besar didistribusikan ke pusat industri pengolahan di utara untuk diolah lebih lanjut, serta ke pusat perkotaan untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan. Berdasarkan hasil survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN), selain untuk konsumsi dalam daerah, produk pertanian dan perkebunan juga didistribusikan ke provinsi lain, diantaranya produksi CPO ke DKI Jakarta (73 ribu ton) dan Jawa Barat (145 ribu ton), produksi karet ke DKI Jakarta (179 ribu ton) dan Jawa Barat (333 ribu ton), serta produksi beras ke DKI Jakarta (167 ribu ton) dan Jawa Barat (459 ribu ton). Pasar terbesar dan terdekat hasil pertanian dan perkebunan Banten adalah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang didistribusikan umumnya menggunakan jalan tol Jakarta-Merak. Selain itu jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan berada di utara, sedangkan hasil pertanian dan perkebunan di selatan bersifat lokal dan sebagian kecil didistribusikan di Jawa Barat melalui jalan Pansela menuju Sukabumi.



Peta 3.8 Profil LP2B Provinsi Banten

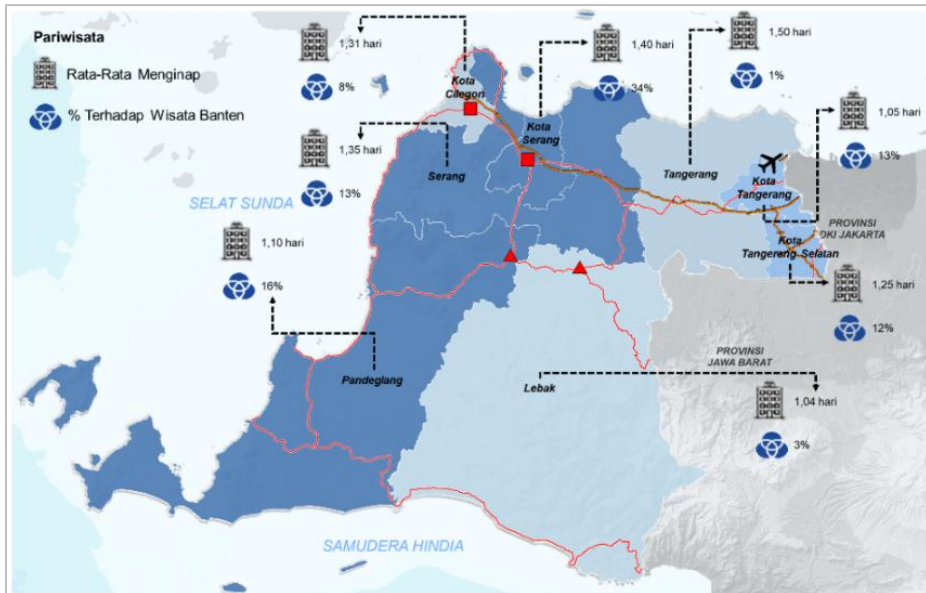
3.3.3. Sektor Pariwisata

Provinsi Banten merupakan provinsi dengan pergerakan wisatawan nusantara tertinggi ke-5 nasional, dengan jumlah perjalanan wisata sebesar 4,8 juta wisatawan per tahun atau sebesar 6% dari total pergerakan wisatawan nasional. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 2,52 juta, naik 30% dibandingkan tahun 2023. Terdapat 3 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) yang terdiri dari 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banten dengan daya tarik utama wisata alam bentang alam, wisata pantai/bahari, taman nasional laut, dan kawasan olahraga.

Tingginya pergerakan wisatawan di Banten juga disebabkan oleh dukungan hub transportasi internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara (wisman). Tercatat bahwa sebesar 8% wisman yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, 5% diantaranya menuju ke Provinsi Banten. Selain itu, Banten juga menjadi *hinterland* bagi WM Jabodetabekpunjur sehingga wisata Banten menjadi alternatif tujuan wisatawan nusantara dari Jakarta dan sekitarnya.

Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Provinsi Banten, yaitu sebesar 16%. Dalam struktur PDRB, sektor pariwisata tidak berdiri sendiri, sehingga kontribusi sektor pariwisata diukur pada sektor lain yang terkait, yaitu sektor akomodasi, transportasi, informasi & komunikasi, jasa kesehatan, dan jasa perusahaan. Kontribusi sektor pariwisata tertinggi ada di Kota Serang, Kab. Serang, dan Kab. Pandeglang. Kota Serang, Kab. Serang, dan Kab. Pandeglang menjadi kontributor tertinggi karena destinasi-destinasi pariwisata unggulan sebagian besar berlokasi di wilayah ini, seperti Wisata Banten Lama, KEK Tanjung Lesung, Taman Nasional Ujung Kulon, dan juga pantai-pantai di pesisir barat Banten yang sudah dikenal dengan baik oleh wisatawan, termasuk di Kecamatan Labuan.

Meskipun kontribusi sektor pariwisata cukup tinggi, namun lama wisatawan tinggal masih rendah, yaitu masih di bawah 2 hari serta tingkat penghunian kamar (TPK) juga masih rendah, yaitu masih di bawah 50%.



Gambar 3.14 Kontribusi Sektor Pariwisata Provinsi Banten

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Dari segi atraksi, pariwisata Banten memiliki daya tarik yang beragam, diantaranya yang cukup dikenal Ujung Kulon (ekowisata), Cikadu dan Baduy (budaya), Sumur dan Krakatau (bahari). Di Banten terdapat 204 obyek daerah tujuan wisata (ODTW) yang terdiri dari 84 obyek wisata alam, 34 obyek wisata sejarah dan budaya, 24 obyek wisata buatan, 9 obyek wisata *living culture*, dan 48 obyek wisata atraksi kesenian.

Pola pengembangan pariwisata Provinsi Banten meliputi 18 kawasan diantaranya Kawasan Pantai Barat, Kawasan Wisata Pantai Selatan dan Utara, Kawasan Wisata Ziarah, Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) serta Anak Gunung Krakatau dll.

Daerah yang menjadi tujuan utama wisatawan adalah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dengan kontribusi masing-masing sebesar 46,7% dan 17,31%. Dimana hal ini menunjukkan bahwa daya tarik utama wisata ada pada wisata bahari di pesisir barat Banten. Persebaran DTW eksisting di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.15 Persebaran DTW Provinsi Banten

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Mayoritas wisatawan domestik berasal dari Banten (2,4 juta), Jawa Barat (1,55 juta), dan DKI Jakarta (1,1 juta). Sementara itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbesar berada di Kota Tangerang sebesar 298.776 orang yang didukung dengan keberadaan Bandara Soekarno-Hatta sebagai gerbang internasional.

Tabel 3.5 Jarak DTW Provinsi Banten Dari Jakarta

No.	DTW	Jarak (km)	Waktu Tempuh
1.	Pantai Utara Banten	58	1,5 jam
2.	Kawasan Banten Lama	93	2 jam
3.	Desa Baduy	137	3,25 jam
4.	Labuan - Tanjung Lesung	184	4 jam
5.	Pantai Selatan Banten	175	4 jam

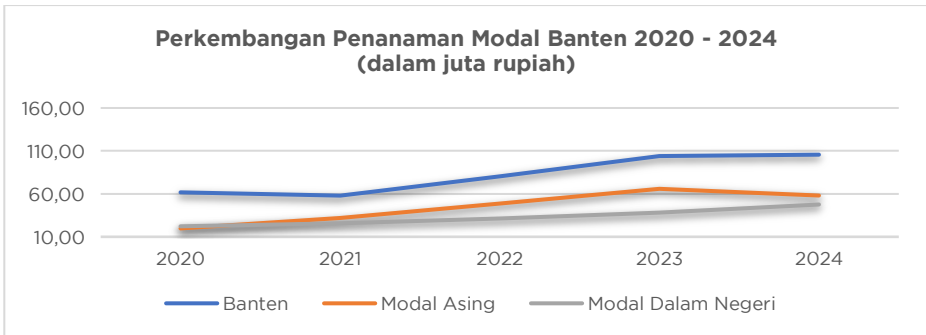
Sumber: Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN), diolah BPIW, 2023

Salah satu tantangan dalam pengembangan pariwisata Banten adalah posisinya yang berada pada kawasan rawan bencana alam. Kawasan Labuan - Tanjung Lesung yang menjadi DTW andalan berada di kawasan rawan bencana alam berupa letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor. Selain itu beberapa DTW juga berstatus sebagai taman nasional, sehingga dalam pengembangannya perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan.

3.3.4. Perkembangan Investasi

Capaian realisasi penanaman modal di Banten menjadi yang tertinggi ke-6 secara nasional dengan nilai mencapai 105,628 triliun rupiah pada

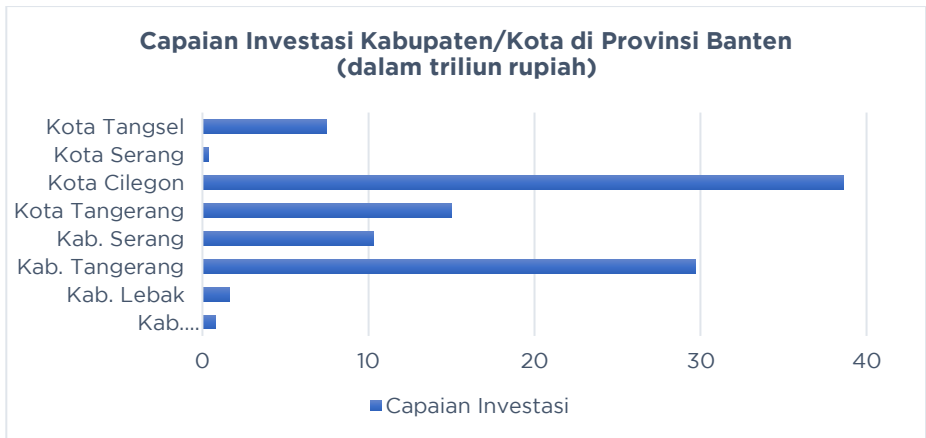
tahun 2024. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2023 sebesar 103,85 triliun rupiah atau naik 5% dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 3.16 Perkembangan Penanaman Modal Banten 2020-2024

Sumber: BPS diolah BPIW, 2024

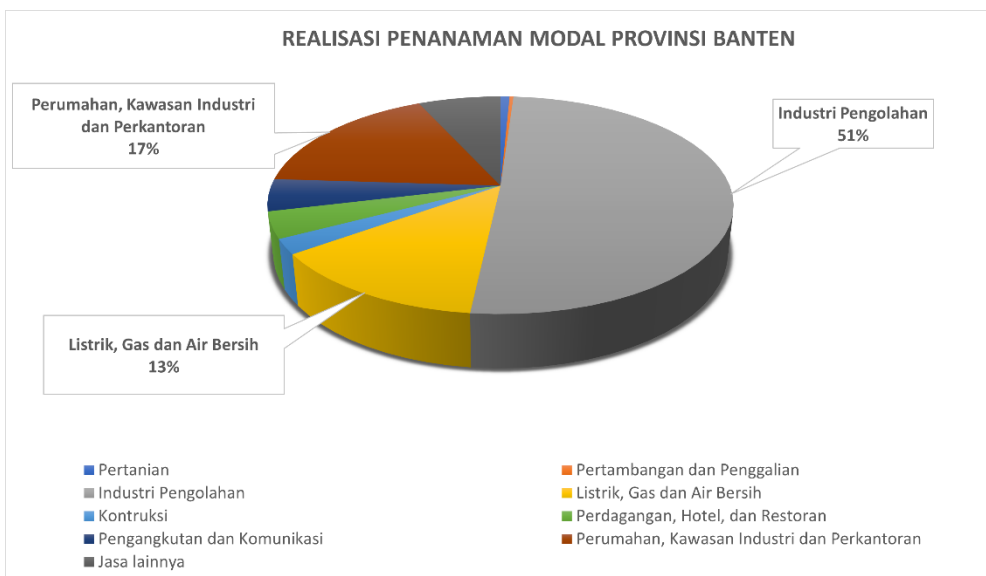
Pada tahun 2024 penanaman modal asing dan dalam negeri terbesar berada di Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.



Gambar 3.17 Capaian Investasi di Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: BPS diolah BPIW, 2024

Sementara jika dilihat dari sektornya, penanaman modal terbesar berada pada sektor kimia dasar, barang kimia dan farmasi mencapai 31,92 triliun, selanjutnya terdapat sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 18,49 triliun rupiah dan sektor usaha listrik, gas dan air sebesar 9,12 triliun rupiah. Secara sektoral, realisasi penanaman modal didominasi dari sektor industri pengolahan (51%), sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (17%), serta sektor listrik, gas, dan air bersih (13%). Tingginya realisasi penanaman modal sektor industri menandakan perkembangan sektor industri di Banten semakin bergerak ke arah positif.



Gambar 3.18 Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Tahun 2024

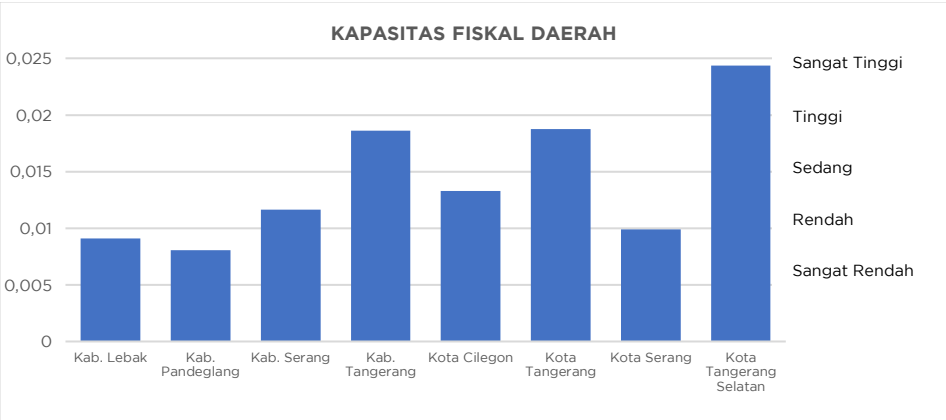
Sumber: BPS diolah BPIW, 2024

3.3.5. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Kapasitas tersebut kemudian dipetakan untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Peta kapasitas fiskal daerah dapat digunakan untuk: a. pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; c. pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah; d. pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/atau e. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rasio kapasitas fiskal Provinsi Banten berada di peringkat ke-6 nasional dengan nilai 2,289 (kategori tinggi). Sementara untuk skala kabupaten/kota, sebagian besar memiliki kategori rendah dan sedang, dan terdapat tiga wilayah dengan kategori sangat tinggi, yaitu Kota Tangerang Selatan (2,434), Kota Tangerang (1,874), dan Kab. Tangerang (1,861).



Gambar 3.19 Kapasitas Fiskal Banten Tahun 2024

Sumber: Kementerian Keuangan diolah BPIW, 2024

3.4. Profil Sosial Budaya

Di Provinsi Banten terdapat beberapa suku, yaitu suku Sunda, Jawa, dan Baduy. Suku Sunda merupakan penduduk asli Provinsi Banten, yang mendiami wilayah Banten sejak masa kerajaan Tarumanegara. Suku Sunda kebanyakan memeluk agama Islam, dan menggunakan bahasa tradisional bahasa Sunda. Dialek bahasa Sunda di Banten memiliki kekhasan dibanding bahasa Sunda di Jawa Barat. Suku Jawa datang ke Banten, seiring dengan pendirian kesultanan Banten pada sekitar 1527 Masehi. Suku Jawa di Banten menggunakan bahasa Sunda dari dialek Banten, yang mirip dengan bahasa Jawa di wilayah Cirebon dan sekitarnya di Jawa Barat.

Di Provinsi Banten juga terdapat Suku Baduy. Suku Baduy Dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy-Rawayan tinggal di kawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektare di daerah Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang, yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik dan tidak boleh dirusak.

Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten berbicara menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda Kuno. Dialek tersebut dikelompokkan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern, yang memiliki beberapa tingkatan dari tingkat halus sampai tingkat kasar (informal), yang pertama tercipta pada masa Kesultanan Mataram menguasai Priangan (bagian tenggara Provinsi Jawa Barat). Namun demikian, di Banten Selatan Seperti Lebak dan Pandeglang

menggunakan Bahasa Sunda Campuran, Sunda Kuno, Sunda Modern dan Bahasa Indonesia, di Serang dan Cilegon, bahasa Jawa Banten digunakan oleh etnik Jawa. Di bagian utara Kota Tangerang, bahasa Indonesia dengan dialek Betawi juga digunakan oleh pendatang beretnis Betawi. Di samping bahasa Sunda, bahasa Jawa dan dialek Betawi, bahasa Indonesia juga digunakan terutama oleh pendatang dari daerah lain di Indonesia.

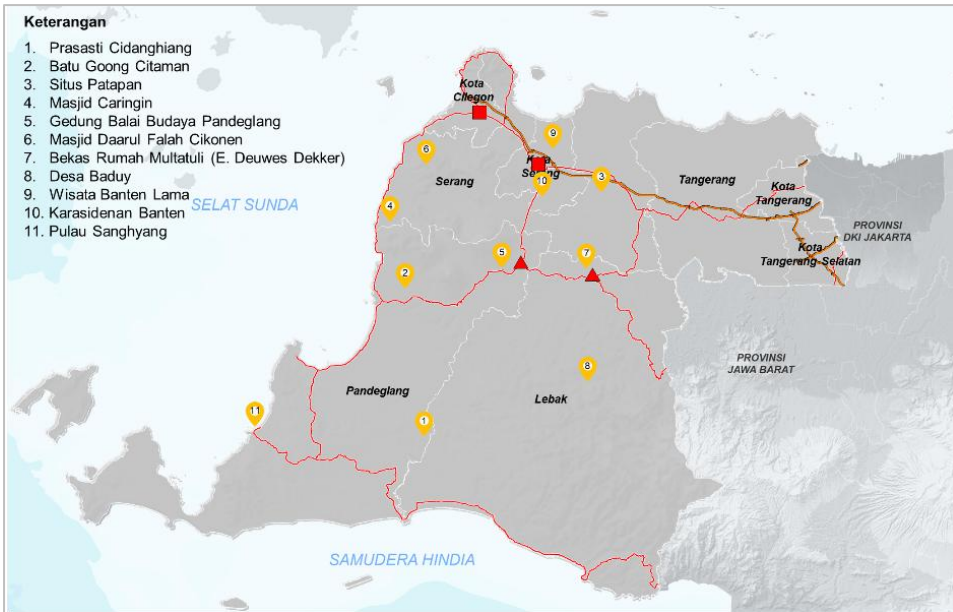
Keberadaan suku dan masyarakat adat menghasilkan berbagai macam produk seni budaya. Potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten antara lain seni bela diri pencak silat, debus, rudad, umbruk, tari saman, tari topeng, tari cokek, dog-dog, palingtung, dan lojor.

Selain itu, di Provinsi Banten terdapat 19 cagar budaya peringkat nasional yang perlu dilestarikan. Cagar budaya peringkat nasional merupakan cagar budaya yang setidaknya memenuhi salah satu kriteria pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya, salah satunya yaitu merupakan wujud kesatuan dan persatuan bangsa serta karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaran cagar budaya peringkat nasional di Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Cagar Budaya di Provinsi Banten

CAGAR BUDAYA	
1. Prasasti Cidanghiang	11. Menara Air
2. Karesidenan Banten	12. Masjid Caringin
3. Batu Goong Citaman	13. Rumah Benjol
4. Situs Patapan	14. Kantor Yayasan Maulana Hasanuddin Cilegon
5. Gedung BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kab. Serang	15. Gedung Balai Budaya Pandeglang
6. Gedung Juang 45	16. Gedung DPRD Kabupaten Lebak
7. Pulau Sanghyang	17. Masjid Daarul Falah Cikoneng
8. Stasiun Kereta Api Serang	18. Bekas Rumah Multatuli (E. Deuwes Dekker)
9. Pendopo Kabupaten Pandeglang	19. Mapolres Serang
10. Kantor Bupati DATI II Serang	

Sumber: Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, 2022



Gambar 3.20 Desa Adat, Peninggalan Bersejarah dan Warisan Budaya

Sumber: Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, 2022

3.5. Profil Interaksi Kawasan

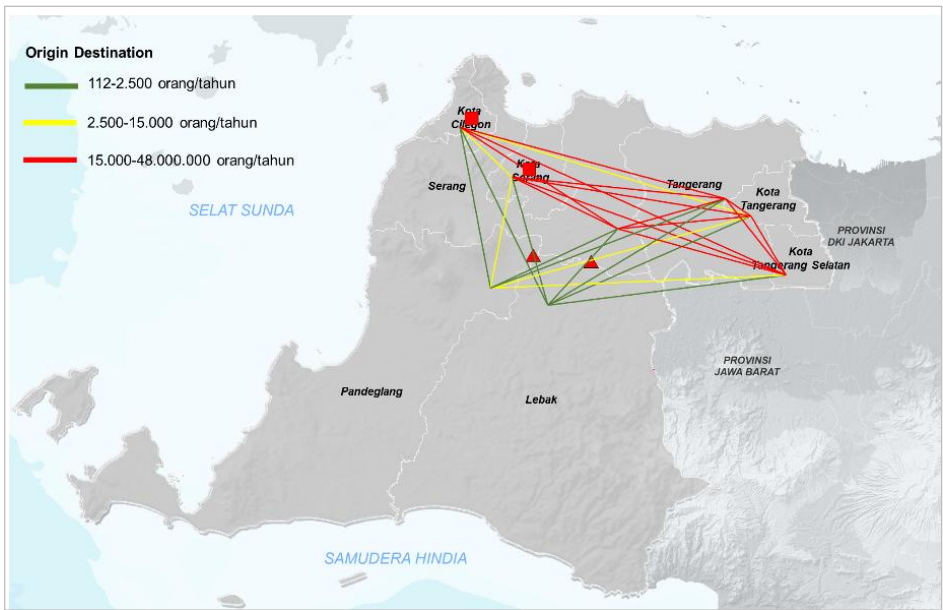
Berdasarkan data survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN) dan potensi sektor unggulan, pergerakan terbesar terjadi pada koridor Jakarta-Merak yang merupakan koridor logistik dengan keberadaan pusat kegiatan, kawasan industri, serta *outlet* pelabuhan dan bandara. Pergerakan terbesar di Provinsi Banten terjadi diantara Kota Tangerang – Kota Tangerang Selatan dengan total pergerakan 47.021.598 pergerakan/tahun. Sedangkan pergerakan terkecil berada dari Kabupaten Pandeglang menuju Kota Cilegon dengan total pergerakan 113 pergerakan/tahun. Sementara itu pergerakan antara Provinsi Banten dengan DKI Jakarta sebanyak 571 ribu pergerakan per tahun dengan pergerakan terbesar terjadi diantara Kabupaten Tangerang dengan DKI Jakarta sebanyak 288 ribu pergerakan per tahun. Jalur distribusi utama umumnya menggunakan jalan tol Jakarta-Merak. Selain itu jalur distribusi hasil lainnya berada di utara, sedangkan untuk hasil pertanian dan perkebunan di selatan bersifat lokal dan sebagian kecil didistribusikan di Jawa Barat melalui jalan Pansela menuju Sukabumi. Secara lengkap, pergerakan di Provinsi Banten dapat dilihat pada matriks *origin-destination* (OD) di bawah ini.

Tabel 3.7 Matriks *Origin-Destination* (OD) Provinsi Banten

Menuju Asal	Kota Serang	Kota Cilegon	Kota Tangerang	Kota Tangerang Selatan	Kabupaten Serang	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Lebak	Kabupaten Pandeglang
Kota Serang		5.025	765.202	285.032	121.658	65.291	1.133	13.456
Kota Cilegon	5.287		6.027	115.063	6.479.940	177.352	210	123
Kota Tangerang	790.021	6.141		101.108	640.952	24.926	863	10.158
Kota Tangerang Selatan	299.433	110.460	102.789		7.014.183	47.021.598	1.950	8.019
Kabupaten Serang	125.839	6.389.59	640.711	7.154.437		22.109.979	493	2.370
Kabupaten Tangerang	73.966	174.873	24.994	44.124.404	21.966.208		1.612	1.558
Kabupaten Lebak	1.404	141	914	1.917	557	1.554		n/a
Kabupaten Pandeglang	14.620	113	10.878	8.082	2.483	1.650	n/a	

Sumber: ATTN diolah BPIW, 2023

Interaksi kawasan di Provinsi Banten didominasi oleh interaksi pada kegiatan logistik, diantaranya pergerakan dari kawasan industri dan sentra pertanian sebagai pusat ekonomi menuju hub (pelabuhan dan bandara) sebagai *outlet* ekspor impor menuju daerah/negara lain. Secara spasial, interaksi kawasan di Provinsi Banten dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.21 Peta *Origin-Destination* (OD) Provinsi Banten

Sumber: ATTN diolah BPIW, 2023

BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR

Profil dan kinerja infrastruktur menjelaskan tentang kondisi infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan non Pekerjaan Umum di Provinsi Banten. Pembahasan profil dan kinerja infrastruktur Bidang PU terdiri dari infrastruktur sumber daya air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. Sedangkan dalam pembahasan infrastruktur Bidang non PU terdiri dari infrastruktur perhubungan, energi, dan jaringan telekomunikasi. Profil dan kinerja infrastruktur ini nantinya akan menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis dan analisis kebutuhan infrastruktur.

4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

Provinsi Banten memiliki 4 wilayah sungai (WS) dengan total potensi ketersediaan air permukaan sebesar 343 m³/detik atau 10,82 miliar m³/tahun, sedangkan kebutuhan air baku untuk irigasi, permukiman dan industri sebesar 273,10 m³/detik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah dibangun infrastruktur dengan kapasitas tampung sebesar 749 juta m³ yang terdiri dari 3 bendungan operasi, 1 bendungan *on-going*, 1 embung dan 61 situ.

Kebutuhan air baku irigasi digunakan untuk mengairi 1.353 daerah irigasi (DI) permukaan seluas 169.147 ha yang 5 diantaranya merupakan DI permukaan kewenangan nasional dengan luas 62.209 ha.

Bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air di Banten terdiri dari abrasi dan banjir. Abrasi pantai mayoritas terjadi di pesisir barat dan timur Banten, sedangkan banjir terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

4.1.1. Infrastruktur Penyediaan Air Baku

Di Provinsi Banten terdapat 4 wilayah sungai (WS) yang terdiri 2 WS kewenangan pusat dan 2 WS kewenangan provinsi. WS kewenangan nasional di Banten yaitu WS Cidanau-Ciujung-Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane. WS Cidanau-Ciujung-Cidurian memiliki luas 412.518 ha yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kab. Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kota Cilegon (di Provinsi Banten), dan Kabupaten Bogor (di Provinsi Jawa Barat). Sedangkan WS Ciliwung-Cisadane memiliki luas 528.719 ha yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (di Provinsi Banten), seluruh kota di Provinsi DKI Jakarta, dan sebagian

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan WS kewenangan provinsi yaitu WS Ciliman-Cibungur yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang, serta WS Cibaliung-Cisawarna yang masuk ke dalam administrasi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

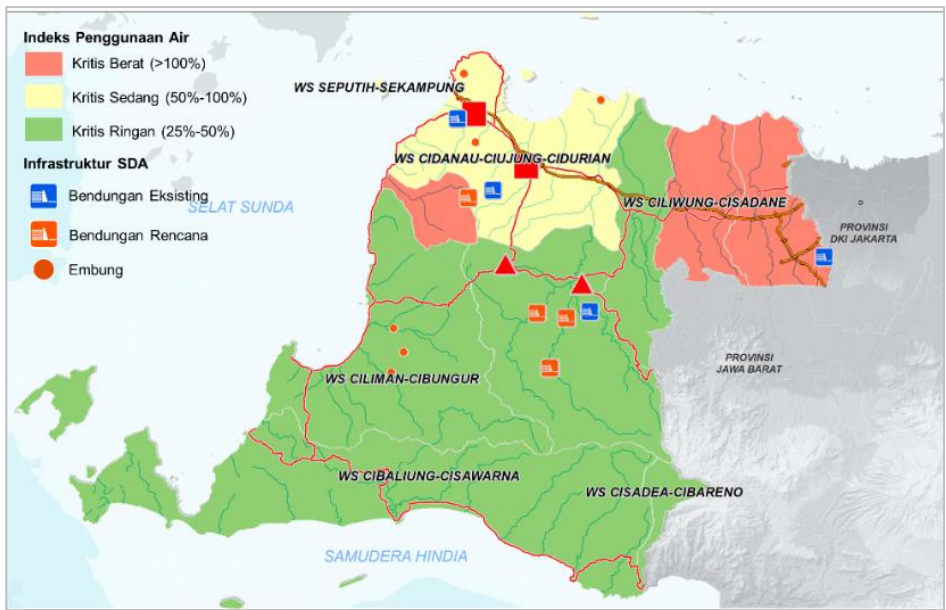
Total potensi ketersediaan air permukaan di semua WS sebesar 343 m³/detik atau 10,82 miliar m³/tahun. Ketersediaan air pada masing-masing wilayah sungai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Profil Wilayah Sungai di Provinsi Banten

No.	Wilayah Sungai	Kewenangan	Ketersediaan Air	
			m ³ /detik	miliar m ³ /tahun
1.	Cidanau-Ciujung-Cidurian	Nasional	175	5,5
2.	Ciliwung-Cisadane	Nasional	83	2,62
3.	Ciliman-Cibungur	Provinsi	52	1,64
4.	Cibaliung-Cisawarna	Provinsi	33	1,04

Sumber: SIGI PU diolah BPIW, 2023

Kebutuhan air baku di Provinsi Banten mencapai 273,10 m³/detik, dan jika dibandingkan dengan ketersediaan air, neraca air di Provinsi Banten masih surplus sebesar 69,9 m³/detik. Meskipun secara total provinsi mengalami surplus, di beberapa wilayah *water district* (WD) dengan jumlah penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi signifikan, terdapat tingkat penggunaan air kritis. Wilayah dengan penggunaan air kritis terutama berada di Kabupaten Serang dengan tingkat penggunaan air sebanyak 280%, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dengan tingkat penggunaan air sebanyak 171%; dan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel dengan tingkat penggunaan air sebanyak 101%. Secara lengkap, persebaran indeks penggunaan air untuk masing-masing wilayah di Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 WS dan Indeks Penggunaan Air Provinsi Banten

Sumber: SIGI PU diolah BPIW, 2023

Untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk irigasi, permukiman dan industri, telah dibangun infrastruktur sumber daya air dengan kapasitas tampung sebesar 749 juta m³. Infrastruktur tersebut terdiri dari 3 bendungan operasi, 1 bendungan *on-going*, 1 embung dan 61 situ.

Tabel 4.2 Profil Bendungan di Provinsi Banten

No.	Nama Bendungan	Kabupaten /Kota	Volume Tampungan (juta m ³)	Volume Efektif (juta m ³)	Irigasi (ha)	RKI (m ³ /detik)	Status
1.	Sindangheula	Serang	9,3	6,98	891	0,8	Operasi
2.	Gintung	Tangerang Selatan	0,72	0,07	700	0	Operasi
3.	Krenceng	Cilegon	3,472		0	0,12	Operasi
4.	Karian	Lebak	314,7	207,50	21.545	9.10*	Operasi, namun JDU IPA ke SPAM belum terbangun

Sumber: SISDA PU, 2022

Selain bendungan, terdapat 1 embung yang sudah beroperasi dan 5 embung rencana. Profil dan kondisi embung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Profil Embung di Provinsi Banten

No.	Nama Embung	Nama DAS	Kabupaten /Kota	Volume (m ³)	Irigasi (ha)	RKI (m ³ /detik)	Status
1.	Lontar	Cibunar	Kab. Serang	180.000	150	-	Operasi

Sumber: SISDA PU, 2022

Selain itu juga terdapat 61 situ yang tersebar di seluruh Provinsi Banten dengan volume tampungan total sebesar 7,03 juta m³. Situ yang terbesar adalah Situ Terate (1.944.000 m³), Situ Cikedal (1.200.000 m³), Situ Cicupang Sadang (660.000 m³), Situ Sinar Galih (450.000 m³), dan Situ R. Enang (262.500 m³).

4.1.2. Infrastruktur Penyediaan Irigasi

Penyediaan air baku untuk irigasi didukung oleh daerah irigasi (DI) dan jaringan irigasi. Provinsi Banten terdapat 198.368 ha DI permukaan yang terdiri dari 5 DI kewenangan nasional seluas 62.209 ha, 21 DI kewenangan provinsi seluas 29.221 ha, dan 1.327 DI kewenangan kabupaten/kota seluas 106.938 ha. Selain irigasi permukaan, DI kewenangan daerah juga terdiri dari irigasi pompa (11 DI dengan luas 1.283 Hektar), dan irigasi tambak (55 DI dengan luas 12.644 hektar).

Daerah irigasi kewenangan pusat dengan cakupan layanan terbesar di Banten adalah DI Cisadane dan DI Ciujung, dimana sumber air baku berasal dari Sungai Cisadane dan Sungai Ciujung. DI Cisadane mengairi lahan sawah di Kabupaten Tangerang (21.007 ha), Kabupaten Serang (484 ha), dan Kota Tangerang (950 ha), sedangkan DI Ciujung mengairi lahan sawah di Kabupaten Serang (21.091 ha) dan Kota Cilegon (259 ha). Luas masing – masing DI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat di Provinsi Banten

Kabupaten /Kota	Luas Daerah Irigasi	Daerah Irigasi Kewenangan Pusat di Banten	
Nasional	62.209		
1. DI Cisadane	22.441		
2. DI Ciujung	21.350		
3. DI Ciliman	5.423		
4. DI Cibaliung	4.288		
5. DI Cidurian	8.707		

1. D.I. Ciujung

- Lokasi : Kab. Serang, Kota Cilegon
- Sumber Air : Sungai Ciujung (Bendung Pamarayan)
- Debit Pengambilan : Intake kin = 27,61 m³/dt (P. Barat 8.854,64 ha; P. Utara = 4.182,15 ha)
- Luasan : Intake kanan = 7,45 m³/dt (P. Timur = 4.003,49 ha); 16.680,28 ha (IGT th 2024)
- Panjang Saluran : Primer 96,27 km; Sekunder 68,19 km; Tersier 71,20 km
- Kelembagaan : P3A 50 Kelompok
- Indeks Pertanian : 207
- Manajemen : OP SDA BBWS C3
- Pengelolaan : 207
- Kemandirian Infrastruktur : KSI = 74,85%
- Rehabilitasi : Rehab belum tuntas

3. D.I. Ciliman

- Lokasi : Kab. Lebak, Kab. Pandeglang
- Sumber Air : Sungai Ciliman (Bendung Ciliman)
- Debit Pengambilan : 6,95 m³/dt
- Luasan : 5.007 ha (IGT th 2024)
- Panjang Saluran : Primer 30,80 km; Sekunder 31,44 km; Tersier 18,90 km
- Kelembagaan : P3A 44 Kel.; IP3A 1 Kel.; GP3A 4 Kel.; 200
- Indeks Pertanian : 200
- Manajemen : OP SDA BBWS C3
- Pengelolaan : 200
- Kemandirian Infrastruktur : KSI = 61,79%
- Rehabilitasi : PHO tanggal 20 Mei 2022

2. D.I. Cidurian

- Lokasi : Kab. Tangerang
- Sumber Air : Sungai Cidurian (Bendung Ranca Sumur)
- Debit Pengambilan : 10,38 m³/dt
- Luasan : 5.315,69 ha (IGT th 2024)
- Panjang Saluran : Primer 29,12 km; Sekunder 54,79 km; Tersier 32,62 km
- Kelembagaan : P3A 55 Kelompok
- Indeks Pertanian : 173,64
- Manajemen : TPOD Provinsi Banten
- Pengelolaan : 173,64
- Kemandirian Infrastruktur : KSI = 52,59%
- Rehabilitasi : Usulan Program

4. D.I. Cibaliung

- Lokasi : Kab. Pandeglang
- Sumber Air : Sungai Cibaliung (Bendung Cibaliung)
- Debit Pengambilan : Intake kanan: 3,764 m³/dt (1810 ha); Intake kiri: 2,733 m³/dt (1810 ha)
- Luasan : 2.493 ha
- Panjang Saluran : Primer 44,59 km; Sekunder 17,51 km; Tersier 1,43 km
- Kelembagaan : P3A 12 Kelompok
- Indeks Pertanian : 144,12
- Manajemen : TPOD Provinsi Banten
- Pengelolaan : 144,12
- Kemandirian Infrastruktur : KSI = 54,82%
- Rehabilitasi : Rehab belum tuntas

Sumber: Permen PUPR No.14/PRT/M/2015, 2021

Tabel 4.5 Daerah Irigasi Kewenangan Daerah di Provinsi Banten

Kabupaten/ Kota	Irigasi Permukaan		Irigasi Pompa		Irigasi Tambak		Total	
	DI	Luas (ha)	DI	Luas (ha)	DI	Luas (ha)	DI	Luas (ha)
Provinsi	21	29.221	-	-	1	1.635	22	30.856
Kabupaten/ Kota	1.327	106.938	11	1.283	54	12.644	1.392	120.865

Sumber: Permen PUPR No.14/PRT/M/2015, 2021

Kondisi irigasi dilihat dari keberfungsian dan kerusakan melalui IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi). IKSI digunakan untuk mengukur kondisi aset irigasi termasuk bangunan utama, saluran, dan fasilitas pendukungnya, menilai kinerja sistim irigasi, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Secara rata-rata, kondisi infrastruktur irigasi di Provinsi Banten dalam kondisi kurang dan perlu perhatian dengan IKSI 61,30, yang terdiri dari jaringan utama 64,94, dan jaringan tersier 46,74. IKSI detil per daerah irigasi tercantum dalam tabel 4.5.

Tabel 4.6 IKSI di Provinsi Banten

Daerah Irigasi	Panjang (Km)	Nilai IKSI (persentase)			Kinerja Sistem Irigasi			Keterangan
		Utama	Tersier	Gabungan	Utama	Tersier	Gabungan	
Cisadane	24,3	71,91	61,08	69,74	Baik	Baik	Baik	-
Ciujung	237,66	67,24	43,16	62,43	Baik	Kurang dan Perlu Perhatian	Baik	Akan ditangani 2026
Ciliman	358,34	64,11	43,12	59,91	Baik	Kurang dan Perlu Perhatian	Kurang dan Perlu Perhatian	Selesai penanganan 2024
Cidurian	116,512	47,36	29,52	43,79	Jelek dan Perlu Penanganan	Kurang dan Perlu Perhatian	Kurang dan Perlu Perhatian	Selesai penanganan 2025
Cibaliung	63,53	53,69	29,00	48,75	Kurang dan Perlu Perhatian	Kurang dan Perlu Perhatian	Kurang dan Perlu Perhatian	Akan ditangani 2026

Sumber: Dit. Bina OP Ditjen SDA, 2025

Luas sawah Banten sebesar 197.071 ha atau 20,39% dari luas wilayah, yang mana 190.983 ha diantaranya merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain LP2B, juga terdapat Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang merupakan lahan sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional dan telah ditetapkan dalam Kepmen ATR/BPN No. 1589 Tahun 2021.

Tabel 4.7 Luasan LSD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Luas LSD (Ha)
Kab. Pandeglang	49.295,42
Kab. Lebak	49.542,76
Kab. Tangerang	35.997,87
Kab. Serang	41.313,65
Kota Tangerang	270,72
Kota Cilegon	1.367,55
Kota Serang	7.595,56
Kota Tangsel	0
Total LSD: 185.383,53 Ha	

Sumber: Kepmen ATR/BPN no: 1589/SK HK.02.01/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Peta LSD yang Dilindungi

Sedangkan sebaran luasan LP2B di masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8 Luasan LP2B per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Luas LP2B (ha)	Luas DI (ha)
Kab. Pandeglang	47.124	18.063
Kab. Lebak	40.147	25.773
Kab. Tangerang	42.520	29.714
Kab. Serang	49.907	38.264
Kota Tangerang	1.310	950
Kota Cilegon	1.965	259
Kota Serang	7.834	3.009
Kota Tangsel	176	0
Total LP2B: 190.983 ha		
Total Daerah Irigasi: 116.032 ha		

Sumber: Pusdatin PUPR diolah BPIW, 2023

Meskipun memiliki LP2B yang cukup luas, namun tidak semua LP2B di Banten dilayani oleh daerah irigasi (DI) teknis. Berdasarkan wilayah administrasi, lahan yang beririgasi teknis hanya sebesar 60,76% (116.032 ha), yang terbagi menjadi daerah irigasi pusat seluas 62.209 ha (53,61%), daerah irigasi provinsi sebesar 25.867 ha (22,29%), dan daerah irigasi kabupaten/kota sebesar 27.956 ha (24,09%).

4.1.3. Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Di Provinsi Banten, bencana yang terjadi akibat daya rusak air adalah tsunami, abrasi, dan banjir.

Provinsi Banten khususnya pesisir barat dan selatan merupakan kawasan rawan bencana tsunami tinggi karena berada pada jalur *Mega Thrust* Patahan Sunda dan Gunung Api Anak Krakatau. Selain rawan terhadap tsunami, kawasan ini juga rawan terjadi abrasi karena lokasi pantai yang langsung berhadapan dengan laut. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dibangun 47 pengaman pantai yang lokasi sebagian besar berada di pesisir barat Provinsi Banten.

Tabel 4.9 Infrastruktur Pengaman Pantai di Provinsi Banten

No	Pengaman Pantai	Panjang (m)
Kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cijung Cidurian		
1	Cipakis	10
2	Bulkan	20
3	Lebakbuah	100
4	Ciawis	124
5	Cikubang 2	150
6	Cilurah	150
7	Muara Cilurah	159
8	Anyer (mercusuar)	160
9	Cipanon	160
10	Teluk	160
11	Karang Bolong	172
12	Pondok Waru	172
13	Cikuya	173

No	Pengaman Pantai	Panjang (m)
14	Todachi	175
15	Sangiang (Lucia)	187
16	Laba	218
17	Kelapa Gading	224
18	Binuangeun	240
19	Ciheru	280
20	Taman Jaya	298
21	Citeureup	300
22	Katapang	300
23	Palm	300
24	Karang Meungpeuk	331
25	Florida	360
26	Cangkudu	375
27	Muara Sungai Ciujung	387
28	Cinangka	400
29	Cigorondong	425
30	Karang Kitri	427
31	Muara Sungai Cidurian	492
32	Caringin	550
33	Neglasari	600
34	Laba Lentok	666
35	Pasir Putih	705
36	Pinang	775
37	Cidatu	856
38	Sumur	916
39	Tirtayasa	950
40	KEK Tanjung Lesung	1.100
41	Palm Pasauran	1.243
42	Lontar	1.581
43	Kemuning	1.750
44	Jongor Spot 2	2.495
45	Jongor Spot 1	2.770
Kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane		
46	Tanjung Kait	180
47	Tanjung Pasir	500

Sumber: SIGI, 2025

Provinsi Banten juga memiliki risiko banjir dari rendah hingga tinggi. Area banjir dengan kategori tinggi di Provinsi Banten tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Terdapat 1 pengendali sedimen sungai sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi banjir. Selain itu, dalam upaya penanganan banjir juga dilakukan beberapa kegiatan seperti normalisasi sungai dan pembuatan saluran banjir. Kegiatan penanganan banjir di Banten dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

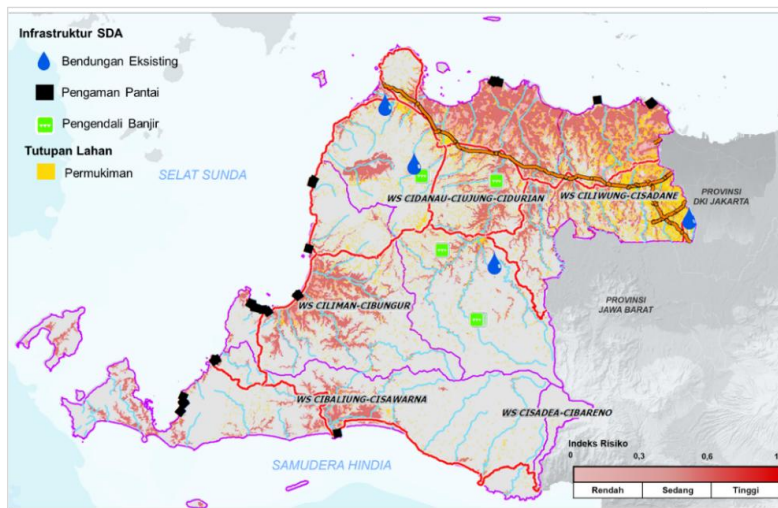
Tabel 4.10 Kegiatan Penanganan Sungai di Provinsi Banten

No	Tahun	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	2024	Pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen Sungai Cidurian Wilayah Hulu	Kab. Serang	1,2 km

No	Tahun	Kegiatan	Lokasi	Volume
2		Pengendalian Banjir dan Sedimen Sungai Cidurian	Kab. Serang	0,2 km
3	2023	Pengendalian Banjir Sungai Cibanten Hilir	Kota Serang	0,5 km
4		Penanganan Muara Sungai Ciujung	Kab. Serang	0,001 km
5		Pengendalian Banjir Kali Cibenda	Kota Tangerang	0,1 km
6	2022	Pengendalian Banjir Kali Cisadane Hilir	Kab. Tangerang	0,1 km
7		Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Cidurian Lama	Kab. Serang	0,2 km
8	2021	Pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen Sungai Ciberang	Kab. Lebak	0.3 km
9		Pengendalian Banjir Kali Cisadane (Lanjutan)	Kota Tangerang	0.50 km
10	2020	Pengendalian Banjir Kali Pesanggrahan dan Kali Angke	Kota Tangerang	0.5 km
11		Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Ciberang Kec. Lebak Gedong	Kab. Lebak	0,7 km

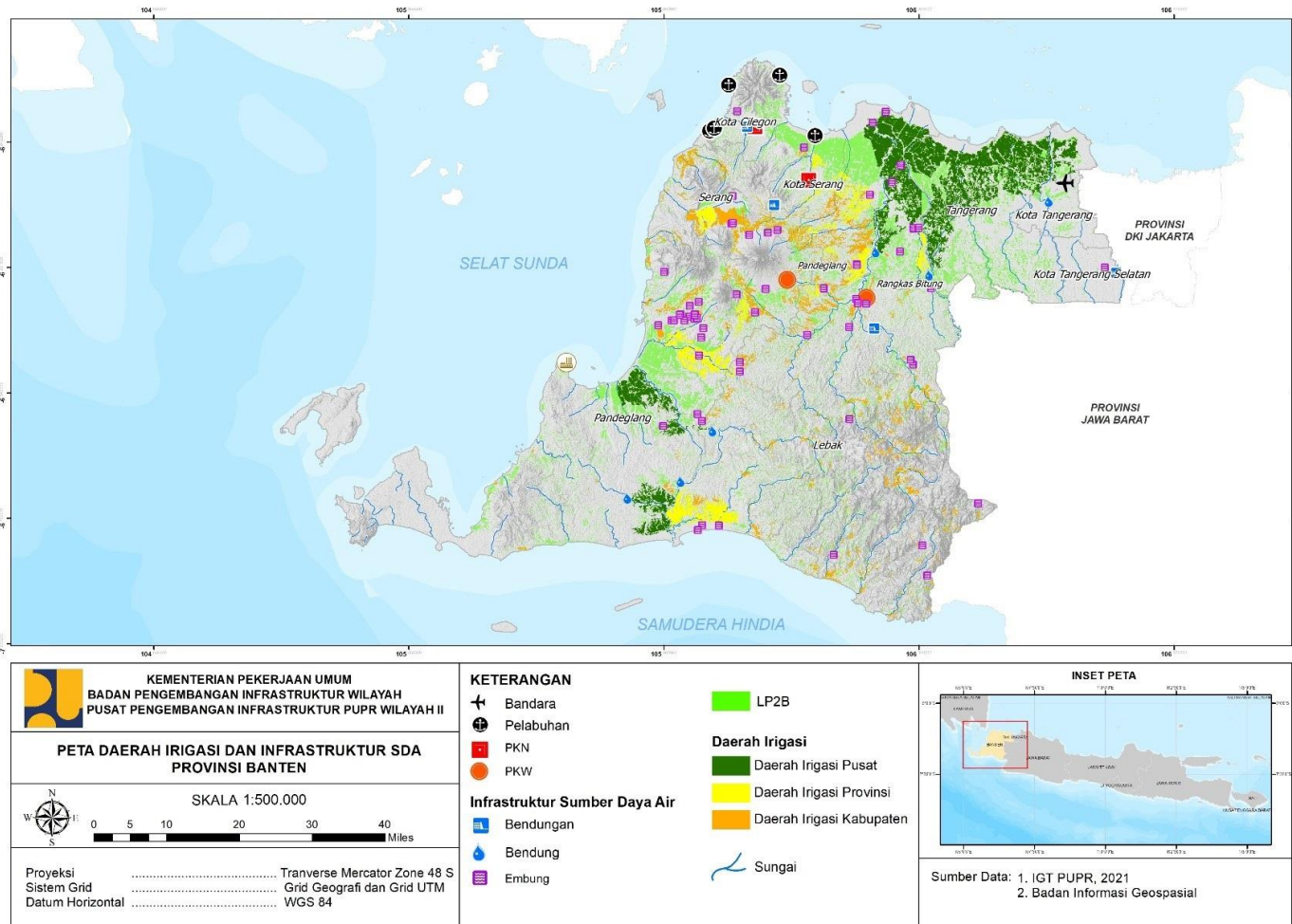
Sumber: Emonitoring PU, 2025

Secara spasial, persebaran infrastruktur pengendali daya rusak air dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Infrastruktur Ketahanan Bencana Provinsi Banten

Sumber: BNPB diolah BPIW, 2023



Peta 4.1 Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Banten

4.1.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas

Dalam profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air prioritas di Provinsi Banten terdapat 2 infrastruktur, yaitu Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian. Kedua infrastruktur tersebut sudah terbangun namun pemanfaatan kedua bendungan tersebut belum maksimal. Penjelasan infrastruktur sumber daya air prioritas dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

Tabel 4.11 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

Infrastruktur	Status	Volume		Fungsi		Permasalahan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
Bendungan Sindangheula	Terbangun (2019)	9,2 juta m ³	9,2 juta m ³	DI: 1.280 Ha Air Baku: 0,8 m ³ /detik Banjir: 51,53 m ³ /detik Energi: PLTMH 0,4 MW	DI: 885 Ha Air Baku: - Banjir: 51,53 m ³ /detik Energi: -	- Pelayanan irigasi tidak maksimal dikarenakan luasan DI Cibanten baru sebesar 885 Ha - Pelayanan air baku tidak ada dikarenakan belum terbangunnya jaringan distribusi SPAM Sindang. Saat ini sudah terdapat WTP Sindang Heula 800 lt/detik - Pada saat ini belum dimanfaatkan sebagai sumber energi dikarenakan belum dibangunnya fasilitas generator listrik - Pada saat ini masih terdapat kejadian banjir di Kota Serang dikarenakan belum maksimalnya pengembangan drainase Kota Serang
Bendungan Karian	Terbangun (2024)	3,14 juta m ³	3,14 juta m ³	DI: 2.020 Ha Air Baku: 14,6 m ³ /detik Banjir: sebesar 60,8 m ³ /detik Energi: PLMTH 1,8 MW	DI: 1.740 Ha Air Baku: 13,9 m ³ /dtk	

Sumber: Berbagai Kebijakan diolah BPIW, 2024

4.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Keterhubungan suatu daerah tak pernah lepas dengan daerah lainnya, sehingga keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memiliki kondisi prima menjadi hal yang penting dalam pengembangan wilayah. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Sedangkan jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi menghubungkan kedua ruas jalan yang terputus oleh adanya suatu rintangan yang permukaannya lebih rendah.

Jalan lintas utara Provinsi Banten yang menghubungkan antara PKN Jabodetabekpunjur dengan PKN Serang dan PKN Cilegon merupakan salah satu lintas yang memiliki kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan lintas utara menghubungkan pergerakan orang dan barang ke Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading, dan Bandara Soekarno-Hatta serta Kawasan Industri Cikande, Kawasan Industri Cilegon, dan Kawasan Industri Wilmar.

Jalan lintas selatan Provinsi Banten menghubungkan PKN Serang dengan PKW Rangkasbitung dan PKW Pandeglang, Labuan – Tanjung Lesung dan rencana pengembangan industri Serang-Panimbang (KI Cileles, KI Rangkasbitung, dan KI Cikande). Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan sirip dari jalan nasional mendukung pengembangan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan pariwisata di kawasan selatan Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) yang dapat mendukung pengembangan kawasan tertinggal di wilayah selatan yang terletak pada 4 desa di Kabupaten Pandeglang dan 11 desa di Kabupaten Lebak.

4.2.1. Infrastruktur Jaringan Jalan

Panjang jalan di Provinsi Banten adalah 6.536,74 km yang terdiri dari 567,90 km jalan nasional, 762,03 km jalan provinsi, dan 5.206,81 km jalan kabupaten/kota. Jalan nasional terdiri dari jalan arteri primer sepanjang 154,47 km, jalan kolektor primer sepanjang 154,47 km dan jalan strategis nasional sepanjang 321,98 km.

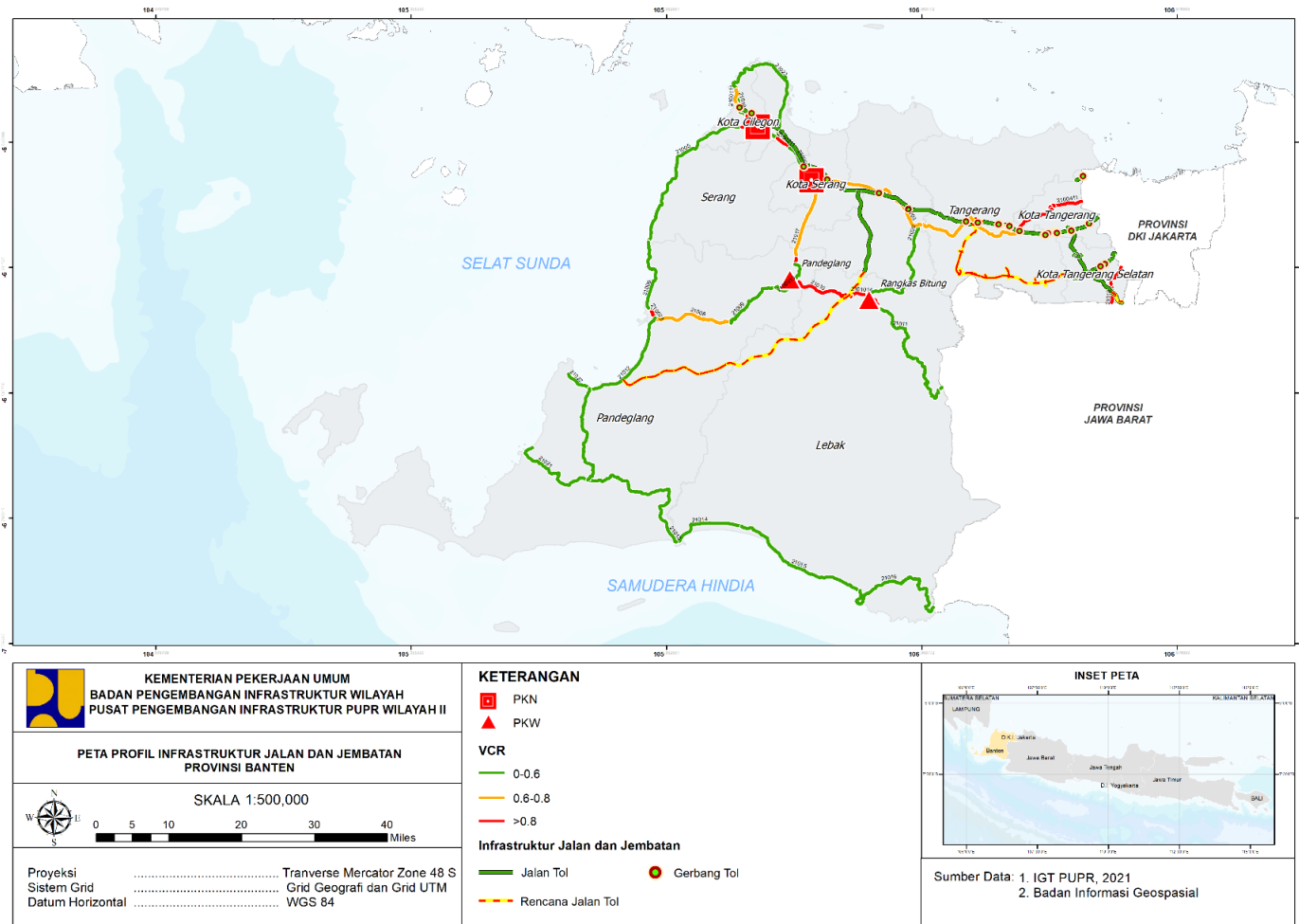
Pada tahun 2022, kuantitas jalan nasional di Provinsi Banten sebesar 92,87%, dan masih terdapat 40,27 km jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat. Dari segi kinerja jalan, rata – rata VCR sebesar 0,77 dengan VCR tertinggi berada di ruas Jln. Raya Serang (Tangerang) sebesar 1,67. Jalan Nasional dengan VCR lebih dari 0,85 adalah sepanjang 23,96 km (4,22%), yang tersebar di beberapa ruas terutama

di bagian utara Banten. Ruas dengan VCR > 0,85 yaitu: BTS. Kota Pandeglang - BTS. Kota Rangkasbitung, Jl. Raya Cipanas (Rangkasbitung), Jl. Abdul Hadi (Serang), Jl. KH. Abdul Fatah Hasan (Serang), Jl. Otista (Tangerang), Jl. KS. Tubun (Tangerang), Jl. Raya Serang (Cilegon), Jl. Raya Anyer (Cilegon), Jl. Rambutan (Ciputat), Jl. Otista (Ciputat), Jl. BY Pass Rangkasbitung (Jl. Soekarno), Jl. Raya Serang (Pandeglang), Labuhan - SP. Labuhan, BTS. DKI/Banten - Gandaria/BTS. Depok/Tangerang (Ciputat-Bogor), Jl. Letnan Jidun (Serang), Jl. Raya Cilegon (Serang), Jl. Daan Mogot (Tangerang-BTS. DKI), Jl. TB. .Suwandi (Serang), Jl. Sudirman (Serang), dan Jl. Raya Serang, Tangerang).

Jalan bebas hambatan di Provinsi Banten yang telah beroperasi sepanjang 162,65 km. Jalan tol di Provinsi Banten adalah Jalan Tol Jakarta - Tangerang yang menjadi penghubung Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dengan panjang 33,00 km, Jalan Tol Tangerang - Merak dengan panjang jalan 73,00 km yang merupakan pendukung kegiatan logistik dan industri menuju Pelabuhan Merak serta Pelabuhan Ciwandan, dan Jalan Tol Serang-Panimbang untuk membantu konektivitas di wilayah selatan Banten.

4.2.2. Infrastruktur Jembatan

Di Provinsi Banten, terdapat 200 unit jembatan yang membentang di sepanjang jalan nasional dengan panjang total 5.957,2 m dengan lebar rata - rata 9,85 m. Selain jembatan nasional, juga terdapat 50 unit jembatan gantung dan 29 jembatan tol.



Peta 4.2 Profil Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Banten

4.2.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas

Dalam profil dan kinerja infrastruktur jalan dan jembatan prioritas di Provinsi Banten terdapat 5 infrastruktur, yaitu Jalan Pansela, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Jalan Tol Serpong-Cinere, dan Jalan Tol Serpong-Balaraja. Kelima infrastruktur tersebut sudah terbangun dan ada juga yang masih *on progress*. Penjelasan infrastruktur jalan dan jembatan prioritas dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

Tabel 4.12 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Infrastruktur	Status	Volume		Fungsi		Permasalahan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
Jalan Pansela Provinsi Banten (Ruas Simpang Labuhan - Batas Provinsi Jawa Barat)	Terbangun	170,09 dengan lebar standar jalan nasional 7 m	Volume rata-rata jalan nasional 8 meter dengan di beberapa titik terdapat lokasi bottleneck dengan lebar jalan efektif 6 meter	Memberikan akses bagi pusat pertumbuhan wilayah Selatan Banten dengan tingkat pelayanan jalan 1,9 jam /100 kilometer atau 52 km/jam	Mendukung Kawasan Labuan - Tanjung Lesung, KPPN Sawarna, Industri Semen Bayah, serta akses logistik hasil produksi pertanian dan perkebunan	- Di beberapa titik yaitu labuan dan panimbang terdapat hambatan samping berupa pasar dimana badan jalan digunakan sebagai parkir dan tempat pedagang. Beberapa titik mengalami genangan banjir ketika hujan sehingga diperkirakan akan terjadi kerusakan secara berkala apabila tidak ditangani.
Jalan Tol Serang - Panimbang	Beroperasi Seksi 1 (2018 - November 2021) Konstruksi (Seksi 2) Persiapan konstruksi (Seksi 3)	Seksi 1 (Serang - Rangkasbitung) sepanjang 26.5 Km, Seksi 2 (Rangkasbitung - Cileles) sepanjang 24.17 Km dan Seksi 3 (Cileles - Panimbang) sepanjang 33 Km	26.5 Km (Seksi 1)	Beroperasinya seksi 1-3 dan berfungsi untuk peningkatan kawasan	Jalan tol yang sudah beroperasi masih seksi 1 yang terdiri dari exit tol Cikeusal, exit tol petir dan exit tol Rangkasbitung.	- Sejak terbangun Tol Serang - Panimbang seksi 1 terjadi penambahan harga tanah dan rencana pembangunan perumahan disekitar pintu tol - Volume lalu lintas (LHR) rencana 8.339 kendaraan (2022) dan 9.340 (2023). Realisasi LHR 2022 sekitar 5.600 kendaraan atau baru tercapai 67% dari target rencana dan LHR 2023 menurun menjadi 5.235 kendaraan atau baru tercapai 56% dari target rencana.
Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Beroperasi (2021)	14,19 km	14,19 km	Alternatif pengguna jalan wilayah Jabodetabek khususnya dari	Alternatif pengguna jalan wilayah Jabodetabek	- Terjadi bencana banjir akibat dampak dari pembangunan Jalan Tol Cengkareng - Batu

Infrastruktur	Status	Volume		Fungsi		Permasalahan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
				Tangerang Raya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta	khususnya dari Tangerang Raya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta	Ceper – Kunciran di wilayah Benda Kota Tangerang
Jalan Tol Serpong - Cinere	Beroperasi Seksi 1 (2021) Telah terbangun 100% dan Persiapan operasi Seksi 2 (2023)	10,14 km (Seksi 1 6,5 km, Seksi 2 3,64 Km)	Seksi 1 6,5 km Seksi 2 3,64 km	Mempercepat perjalanan masyarakat dari dan menuju wilayah Cinere, Pamulang, Serpong dan sekitarnya, termasuk hingga Bandara Soekarno-Hatta	Mempercepat perjalanan masyarakat dari dan menuju wilayah Cinere, Pamulang, Serpong dan sekitarnya, termasuk hingga Bandara Soekarno-Hatta	- Masih terhambat adanya pembebasan lahan di luar jalur utama (main road) yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur penghubung tol Serpong – Cinere dan jalan tol Cinere – Jagorawi
Jalan Tol Serpong - Balaraja	Operasi Seksi 1A (2022), Konstruksi Seksi 1B, Rencana Seksi 2 dan 3	39,9 Km (Seksi 1A: Simpang Susun (SS) Rawa Buntu - SS CBD sepanjang 5,15 Km, Seksi 1B: SS CBD - SS Legok sepanjang 4,70 Km; Seksi 2: SS Legok - SS Pasir Barat sepanjang 11,54 Km; serta Seksi 3: SS Pasir Barat - Junction Balaraja sepanjang 18,57 Km	Seksi 1A 5,15 km (2022)	Merupakan sambungan dari Jalan Tol Ulujami-Serpong dan merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 3. Jalan tol ini menghubungkan Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang	Baru beroperasi seksi 1A	

Sumber: Berbagai Kebijakan diolah BPIW, 2023

4.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman

Pembangunan infrastruktur permukiman dilaksanakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan dasar dalam mendukung perwujudan permukiman yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Saat ini Provinsi Banten telah terlayani oleh layanan air minum perpipaan, pengolahan sanitasi, dan pengelolaan persampahan. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman juga termasuk diantaranya penuntasan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan-kawasan strategis.

Capaian akses air minum layak di Provinsi Banten mencapai 91,16% tetapi akses perpipaan baru mencapai 12,07%. Tingkat layanan persampahan Provinsi Banten sebesar 44,51% atau tertangani 1.355.707 ton/tahun. Akses sanitasi layak Provinsi Banten mencapai 81,72% sedangkan sanitasi aman baru mencapai 10,73%. Luas kawasan permukiman kumuh di Provinsi Banten mencapai 3.512,12 ha dimana 1.724,77 ha atau 49,11% merupakan kewenangan pusat.

4.3.1. Infrastruktur Air Minum

Di Provinsi Banten terdapat 67 SPAM baik berupa SPAM IKK ataupun SPAM perdesaan dengan kapasitas total 1.426 liter/detik. Selain SPAM, layanan air minum Banten juga dilayani oleh 6 PDAM dengan kapasitas produksi total 8.798 liter/detik dan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 2.141.471 jiwa atau 21,7% dari total penduduk Banten.

Tabel 4.13 Infrastruktur SPAM di Banten

Kabupaten/ Kota	Nama SPAM	Kecamatan	Kapasitas Produksi (lt/dt)
Kab. Pandeglang	IKK Ciwasiat	Ciwasiat	20
	IKK Sumur	Sumur	20
	Kawasan Rawan Air Desa Kaungcaang	Cadasari	2
	Kawasan Rawa Desa Kertamukti	Sumur	20
	KSPN Tanjung Lesung	Panimbang	100
	Desa Cibungur	Sukaresmi	3
	Desa Cikiruh Wetan	Cikeusik	2
	Desa Cimanggu	Cimanggu	2
	Desa Juhut	Karang Tanjung	2
	Desa Koranji	Pulosari	2
	Desa Pari	Mandalawangi	3
	Desa Pasir Awi	Banjar	3
	Desa Taman Jaya	Sumur	2
	Desa Tangkil Sari	Cimanggu	2
	Desa Tunggal Jaya	Sumur	2
Kab. Lebak	IKK Cibadak	Cibadak	40
	IKK Cijaku	Cijaku	20
	IKK Muncang	Muncang	20
	IKK Wanasalam	Wanasalam	50
	IKK Warung Gunung	Warung Gunung	20
	Desa Calungbungur	Sajira	2
	Desa Cibeber	Cibeber	2
	Desa Cikaret	Cigemblong	2

Kabupaten/ Kota	Nama SPAM	Kecamatan	Kapasitas Produksi (lt/dt)
	Desa Siketug	Ciomas	2
	Desa Cikotok	Cibeber	2
	Desa Cimayang	Bojongmanik	2
	Desa Darmasari	Bayah	2
	Desa Girilaya	Cipanas	2
	Desa pasirrahayu	Bojongmanik	2
	Desa Kanekes	Leuwi Damar	2
	Desa Lebak Gedong	Lebakgedong	2
	Desa Lebak Keusik	Banjarsari	3
	Desa Lebak Sangka	Lebakgedong	2
	Desa Leuwi Coo	Muncang	2
	Desa Mekarsari	Rangkasbitung	2
	Desa Sobang Cisimeut	Leuwi Damar	2
	Desa Sogong	Panggarangan	3
	Desa Sukamanah	Malingping	2
Kab. Serang	Desa Tanjungwangi	Muncang	2
	IKK Bandung	Bandung	40
	IKK Binuang	Binuang	20
	IKK Carenang Serang	Carenang	50
	IKK Cikeusal	Cikeusal	20
	IKK Cikeusal Petir	Cikeusal	40
	IKK Ciruas	Ciruas	40
	IKK Kopo	Kopo	40
	IKK Kramatwatu	Kramatwatu	20
	IKK Lebak Wangi	Lebak Wangi	40
	IKK Leuwi Damar	Leuwi Damar	50
	IKK Pamarayan	Pamarayan	40
	IKK Tirtayasa	Tirtayasa	10
	IKK Tunjung Teja	Tunjung Teja	20
	IKK Waringin Kurung	Waringin Kurung	20
	Kec. Anyar	Anyar	20
	Desa Barugbug	Padarincang	2
	Desa Cikolelet	Cinangka	3
	Desa Cisit	Ciomas	2
	Desa Kosambi Ronyok	Anyar	2
	Desa Payaungan Jaya	Ciomas	2
	Desa Sukadana	Ciomas	4
	Desa Sukarena	Ciomas	2
	Desa Talaga Warna	Pabuaran	2
Kab. Tangerang	Desa Ciserehan	Tigaraksa	2
	Kawasan Khusus RSUD Balaraja	Balaraja	5
Kota Serang	Banten Lama Kota Serang	Kasemen	25
Kota Tangerang	Kawasan Kumuh Pinang	Pinang	30
	Sitanala	Neglasari	500
Total			1.426

Sumber: Cipta Karya Kementerian PUPR, 2021

Dari segi kinerja, saat ini akses air minum layak di Provinsi Banten sudah mencapai 91,16% tetapi akses perpipaan baru mencapai 12,07%. Wilayah dengan akses air minum layak tertinggi adalah Kota Serang (99,10%) sementara akses terendah adalah di Kabupaten Lebak (73,49%).

Layanan perpipaan di masing-masing kabupaten/kota belum ada yang mencapai target nasional yaitu 30% terlayani perpipaan. Akses perpipaan tertinggi adalah Kota Cilegon (19,64%) sedangkan terendah adalah Kota Tangerang Selatan (0,10%). Akses perpipaan di Kota Tangerang Selatan kecil dikarenakan akses perpipaan yang dihitung

hanya akses berupa layanan air dari pemerintah (PDAM, SPAM), sedangkan layanan air oleh pengembang swasta belum dihitung. Capaian akses air perpipaan dan akses air minum layak pada tiap kabupaten/kota di Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14 Akses Air Minum Layak dan Perpipaan di Banten

Kabupaten/Kota	Akses Aman/Persentase Pelayanan Perpipaan (%)	Akses Air Layak (%)
Kota Cilegon	19,64	94,98
Kota Serang	1,86	99,10
Kota Tangerang	19,19	98,37
Kota Tangsel	0,10	99,08
Kabupaten Lebak	9,94	73,49
Kabupaten Pandeglang	15,15	75,83
Kabupaten Tangerang	15,06	98,48
Kabupaten Serang	15,65	89,95
	12,07	91,16

Sumber: Cipta Karya Kementerian PUPR, 2021

Kapasitas terpasang dari semua PDAM/SPAM di Provinsi Banten sebesar 8.798 liter/detik tetapi baru diproduksi sebesar 7.054 liter/detik sehingga masih terdapat *idle* sebesar 1.744 liter/detik. PDAM yang memiliki *idle* tertinggi berada di PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak, PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, dan Perumdam Tirta Albantani Kab. Serang sehingga wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri seperti Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang perlu menyiapkan air baku guna mendukung kegiatan industri tersebut. Saat ini, pemerintah telah membangun Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan IPA untuk menambah pasokan air baku di pusat – pusat kegiatan ini. Kondisi eksisting Bendungan Karian menghasilkan 14,6 m³/detik air baku untuk melayani Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan serta 9,1 m³/detik air baku untuk Provinsi DKI Jakarta. Bendungan Sindangheula direncanakan akan menghasilkan 0,8 m³/detik air baku untuk melayani Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.

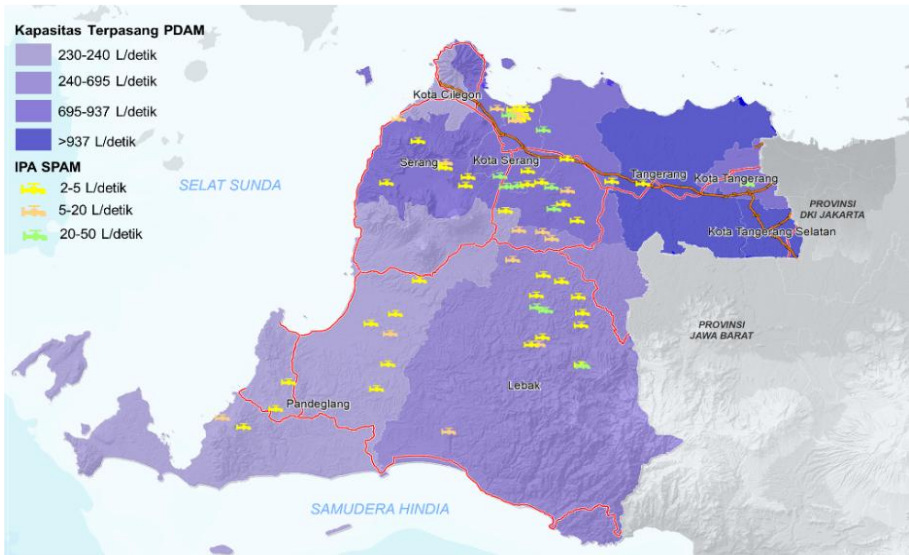
Tabel 4.15 Kinerja PDAM Provinsi Banten

No.	PDAM	Volume Produksi (L/dt)	Kapasitas Terpasang (L/dt)	Jumlah Pelanggan (Unit SL)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)	Tingkat Kebocoran (%)	Idle Capacity (L/dt)
1.	PDAM Tirta Berkah Kab. Pandeglang	220	240	22.357	1.272.687	91.557	21,50	20
2.	PDAM Tirta Multatuli Kab. Lebak	213	695	44.180	1.386.793	132.436	26,14	482
3.	Tirta Kerta Raharja Kab. Tangerang	5.250	5.796	181.179	3.245.619	1.400.512	17,15	546
4.	Perumdam Tirta Albantani Kab. Serang	273	937	58.206	1.622.630	199.260	25,12	664
5.	PDAM Tirta Benteng	876	900	68.196	1.895.486	237.934	28,36	24

No.	PDAM	Volume Produksi (L/dt)	Kapasitas Terpasang (L/dt)	Jumlah Pelanggan (Unit SL)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)	Tingkat Kebocoran (%)	Idle Capacity (L/dt)
	Kota Tangerang							
6.	PDAM Cilegon Mandiri Kota Cilegon	222	230	24.850	434.896	79.772	27,82	8

Sumber: PDAM Provinsi Banten, 2022

Secara spasial, akses air minum aman untuk masing-masing kabupaten/kota di Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.3 Akses Air Minum Aman Provinsi Banten

Sumber: Kinerja PDAM diolah BPIW, 2023

4.3.2. Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi terdiri dari infrastruktur persampahan dan infrastruktur pengolahan sanitasi.

1) Persampahan

Penanganan sampah di Provinsi Banten dilayani oleh 11 TPA yang terdiri dari 9 TPA aktif dan 2 TPA non aktif. TPA tersebut berlokasi di hampir semua kabupaten/kota di Banten, kecuali Kabupaten Serang yang dilayani oleh Cilowong di Kota Serang. TPA dengan kapasitas tertinggi di Provinsi Banten adalah TPA Cipeucang di Kota Tangerang Selatan dengan kapasitas 284.700 m³/tahun.

Tabel 4.16 Profil TPA Provinsi Banten

No.	Nama TPA	Luas (ha)	Kapasitas (m3/tahun)	Sampah masuk (ton/tahun)	Tertangani landfill	Cara Pengelolaan	Kondisi
Kab. Pandeglang							
1.	TPA Bangkonol	10,00	1.266.000	56.013	55.648	Sanitary Landfill	Aktif
2.	TPA Bojong Canar	2,00	202.000	8.030	7.847	Sanitary Landfill	Aktif
3.	TPA Lingsuh	2,00	202.000	-	-	-	Non Aktif
4.	TPA Cigeulis	0,00	n/a	-	-	Open Dumping	Non Aktif
Kab. Lebak							
5.	TPA Dengung	8,00	123.320	28.835	28.378	Sanitary Landfill	Aktif
6.	TPA Cihara	3,00	328.000	14.600	14.235	Sanitary Landfill	Aktif
Kab/Kota Tangerang							
7.	TPA Jatiwaringin	20	262.800	498.590	498.590	Sanitary Landfill	Aktif
8.	TPA Rawa Kucing	35,00	145.110	386.535	386.535	Sanitary Landfill	Aktif
Kota Serang							
9.	TPA Cilowong	12,00	155.928	128.782	89.205	Control Landfill	Aktif
Kota Cilegon							
10.	TPA Bagendung	7,8	91.000	81.395	70.080	Sanitary Landfill	Aktif
Kota Tangerang Selatan							
11.	TPA Cipeucang	10,6	284.700	154.176	154.176	Sanitary Landfill	Aktif

Sumber: SIPSN, 2024

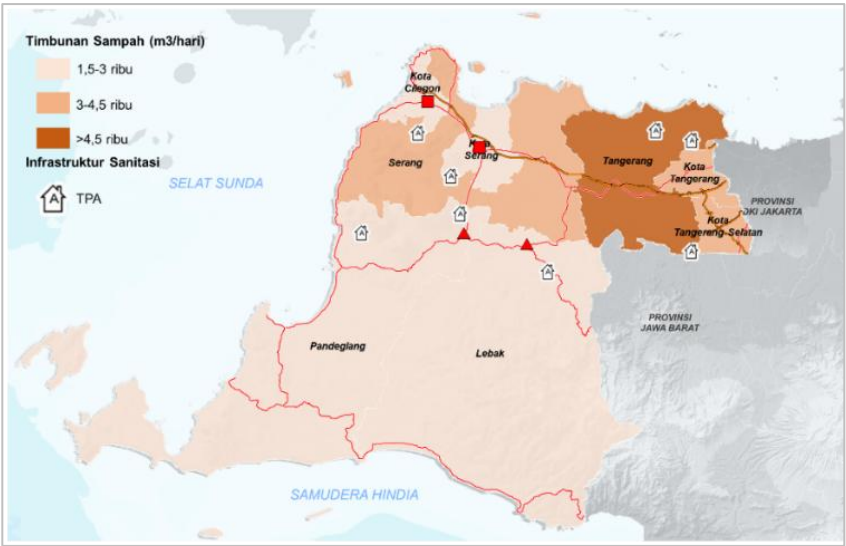
Produksi sampah di Provinsi Banten sebesar 2.879.467 ton/tahun dan tertangani 1.244.528 ton/tahun. Sehingga tingkat layanan persampahan provinsi Banten sebesar 50,44%. Timbulan sampah terbesar dihasilkan Kabupaten Tangerang (841.497 ton/tahun), Kota Tangerang (514.478 ton/tahun), dan Kabupaten Serang (428.962 ton/tahun). Kota Tangerang merupakan kota dengan tingkat layanan persampahan tertinggi sebesar 99.69%, diikuti oleh Kota Tangerang Selatan (96.83%) dan Kota Cilegon (79.73%). Rincian timbulan sampah masing - masing kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.17 Timbulan Sampah Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Timbulan (ton/tahun)	Tertangani (ton/tahun)	Persentase Terlayani
1.	Kabupaten Tangerang	841.497	49.748	23.04%
2.	Kabupaten Pandeglang	185.812	11.680	6,62%
3.	Kabupaten Lebak	218.266	54.370	24.72%
4.	Kabupaten Serang	428.962	13.842	3.16%
5.	Kota Serang	219.503	157.065	69.71%
6.	Kota Cilegon	101.772	83.496	79.73%
7.	Kota Tangerang	514.478	512.883	99.69%
8.	Kota Tangerang Selatan	369.177	361.444	96.83%
	Total	2.879.467	1.244.528	50,44%

Sumber: SIPSN, 2023

Secara spasial, timbunan sampah masing – masing kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.4 Timbunan Sampah Provinsi Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Timbunan sampah tersebut sebagian besar ditangani di TPA dengan jumlah yang cukup besar. Rata-rata TPA sudah memiliki kapasitas di atas 60% dan diperkirakan akan penuh dalam 3-5 tahun lagi.

2) Sanitasi

Akses sanitasi layak Provinsi Banten sudah mencapai 81,72% sedangkan sanitasi aman baru mencapai 10,73%. Sanitasi layak Provinsi Banten masih di bawah target nasional yaitu sanitasi layak 90%. Akses sanitasi layak Kabupaten Pandeglang 49,11% dan Kabupaten Lebak 56,82% perlu mendapat perhatian karena masih di bawah target capaian 70%. Sanitasi aman terendah juga diduduki oleh Kabupaten Pandeglang (0,77%) dan Kabupaten Lebak (3,40%). Layanan sanitasi layak dan aman masing – masing kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18 Sanitasi Layak & Aman Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Sanitasi Layak (%)	Sanitasi Aman (%)
1.	Kabupaten Pandeglang	49,11	0,77
2.	Kabupaten Lebak	56,82	3,40
3.	Kabupaten Serang	80,34	4,36
4.	Kabupaten Tangerang	85,89	10,32
5.	Kota Cilegon	97,07	14,40
6.	Kota Serang	90,76	11,06
7.	Kota Tangerang	94,94	19,79
8.	Kota Tangerang Selatan	98,84	21,75
	Total	81,72	10,73

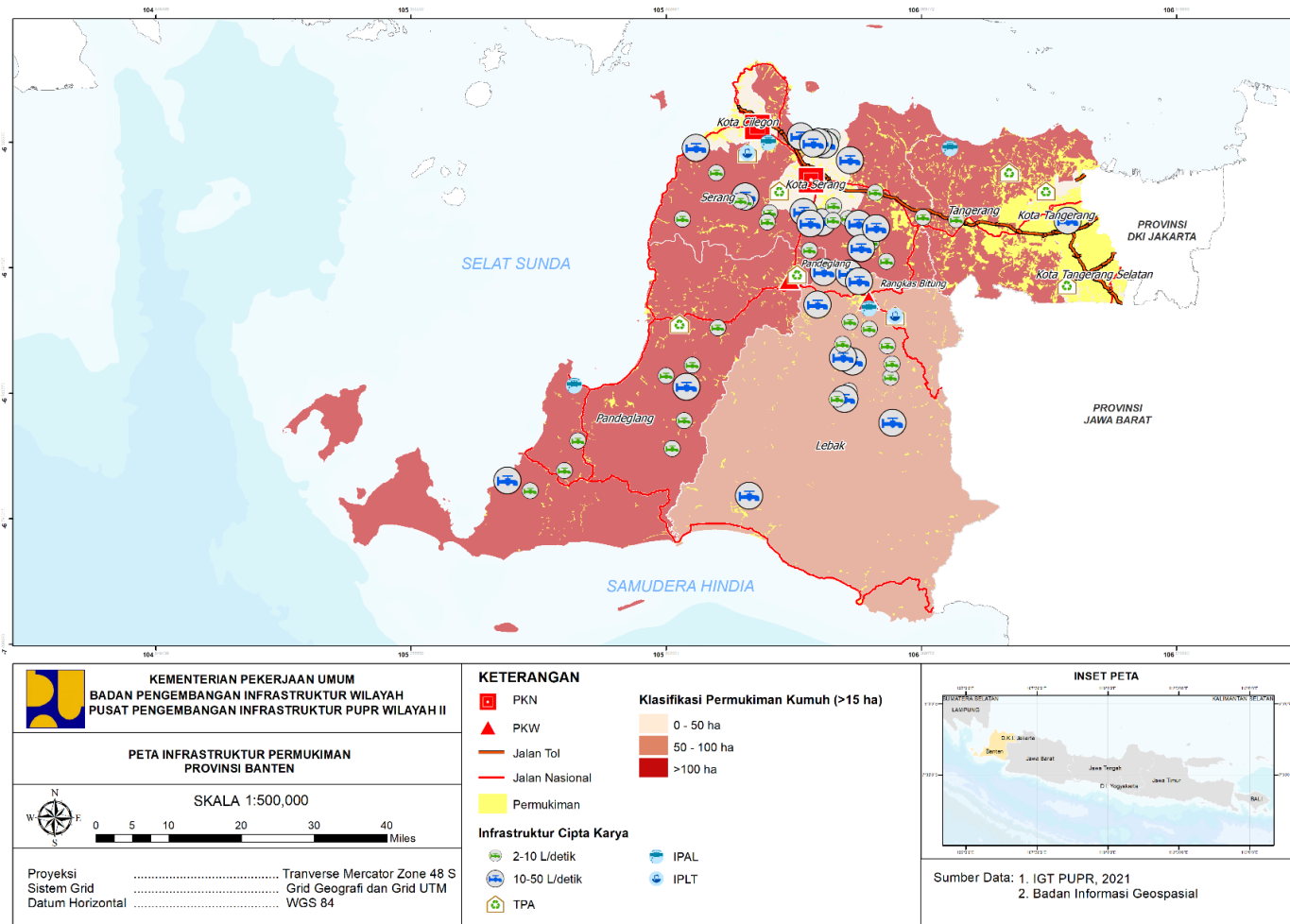
Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka, 2022

Terdapat 2 titik IPLT di Banten, yaitu IPLT Kota Cilegon (kapasitas 20.167 KK) dan IPLT Sindang Mulya (kapasitas 15.000 KK). Selain itu terdapat 4 buah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu 1) SPALD-T Kota Cilegon (kapasitas 100 KK); 2) SPALD-T Nelayan Kabupaten Tangerang (kapasitas 200 KK), 3) SPALD-T Kabupaten Lebak (kapasitas 150 KK); serta 4) Sanitasi KSPN Tanjung Lesung (kapasitas 2.000 KK).



Gambar 4.5 Akses Sanitasi Aman Provinsi Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Peta 4.3 Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten

4.4.Profil dan Kinerja Infrastruktur Prasarana Strategis

Provinsi Banten memiliki beberapa infrastruktur prasarana strategis yang sudah ditangani oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mendukung kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Banten memiliki 261 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah, menyediakan akses pendidikan dasar hingga menengah bagi generasi muda. Selain itu, terdapat 17 madrasah yang berkontribusi dalam penguatan pendidikan keagamaan serta pembentukan karakter siswa. Untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, tersedia 2 pasar yaitu Pasar Baros dan Pasar Anyar yang menjadi pusat perdagangan lokal dan distribusi hasil pertanian serta produk UMKM. Di sektor olahraga, provinsi ini memiliki 1 sarana olahraga yaitu GOR Tanara yang berfungsi sebagai fasilitas pembinaan atlet sekaligus ruang publik untuk kegiatan fisik masyarakat. Keberadaan prasarana ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui penyediaan fasilitas pendidikan, ekonomi, dan sosial yang merata dan berkelanjutan.

4.4.1. Infrastruktur Sarana Pendidikan

Infrastruktur sarana pendidikan dilakukan pembangunan dan pengembangan secara masif. Provinsi Banten dalam penanganan infrastruktur sarana pendidikan terdiri dari sekolah dan madrasah

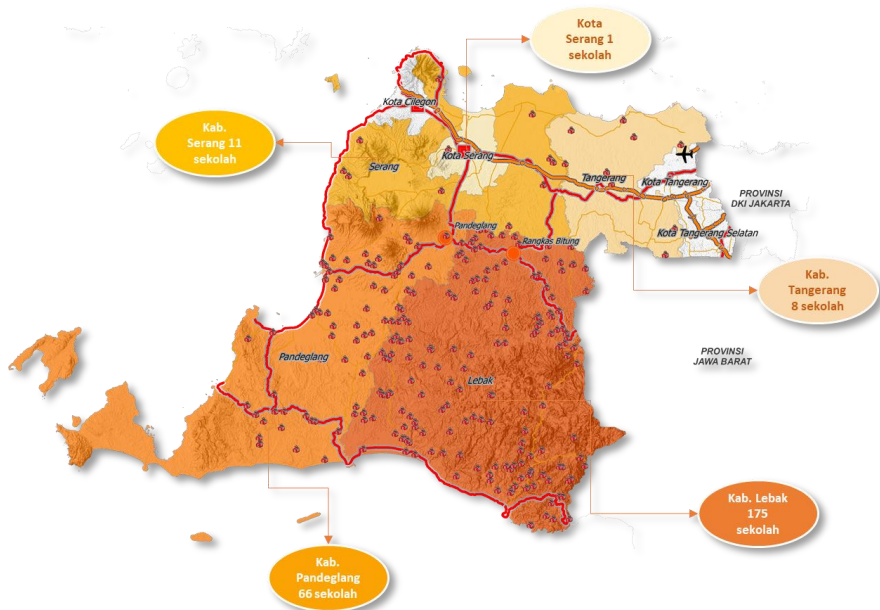
4.4.1.1 Sekolah

Sekolah yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jendral Prasarana Strategis di Provinsi Banten terdiri dari 261 sekolah dengan jenjang SD sebanyak 234 sekolah dan SMP sebanyak 27 sekolah. Terdapat 5 kabupaten/kota yang sudah ditangani yaitu Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang, sednagkan di Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan belum terdapat sekolah yang ditangani oleh Direktorat Jendal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.

Tabel 4.19 Jumlah Unit Sekolah di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Jenjang Sekolah		Jumlah Unit
	SD	SMP	
Kota Serang	1	-	1
Lebak	153	22	175
Pandeglang	61	5	66
Serang	11	-	11
Tangerang	8	-	8
Total	234	27	261

Sumber: SIGI, 2025



Gambar 4.6 Jumlah Unit Sekolah per Kabupaten Provinsi Banten

Sumber: SIGI diolah BPIW, 2025

4.4.1.2 Madrasah

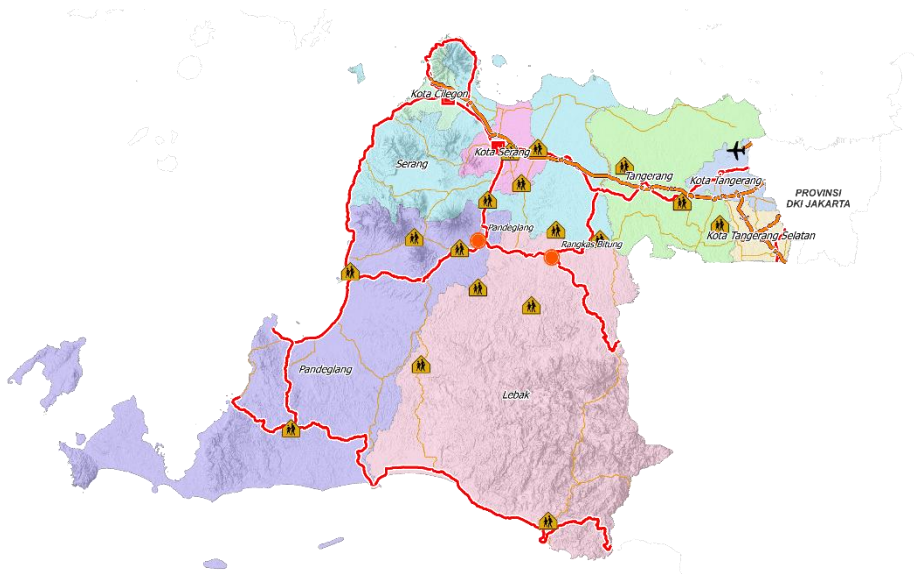
Pembangunan madrasah di Provinsi Banten juga terus diperluas hingga berbagai jenjang, seperti MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah). Pembangunan infrastruktur ini dilakukan dari tahun 2019 hingga 2021. Penanganan madrasah oleh Direktorat Jendral Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Banten telah diperoleh 17 madrasah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.20 Nama Madrasah per Kabupaten

Kabupaten	Nama Madrasah
Kota Serang	MTs Negeri 1 Kota Serang
	MTs Negeri 2 Kota Serang
Lebak	MI Negeri 2 Kab. Lebak
	MTs Negeri 3 Kab. Lebak
	MTs Negeri 4 Lebak
Pandeglang	MI Negeri 1 Kab. Pandeglang
	MI Negeri 2 Pandeglang
	MTs Negeri 1 Pandeglang
	MTs Negeri 2 Pandeglang
Serang	MTs Negeri 3 Pandeglang
	MI Negeri 2 Serang
	MI Negeri 3 Serang
	MI Negeri 4 Serang
Tangerang	MTs Negeri 1 Serang
	MI Negeri 3 Kab. Tangerang
	MI Negeri 4 Kab. Tangerang

Kabupaten	Nama Madrasah
	MTs Negeri 4 Kab. Tangerang

Sumber: SIGI, 2025



Gambar 4.7 Peta Sebaran Madrasah di Provinsi Banten

Sumber: SIGI diolah BPIW, 2025

4.4.2. Infrastruktur Dukungan Perekonomian

Pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor perekonomian terus dilaksanakan secara terpadu. Penanganan infrastruktur sektor perekonomian di Provinsi Banten oleh Direktorat Jendral Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terdiri dari 2 pasar yaitu Pasar Anyar dan Pasar Baros. Pasar Anyar dilakukan revitalisasi dan menjadikan pasar tradisional terlengkap bertaraf modern. Menyajikan kenyamanan untuk pedagang dan pengunjung dengan konsep wisata belanja dengan luasan 24.680 m². Penanganan Pasar Baros dilakukan dengan renovasi atau membangun kembali bangunan pasar lama yang kondisinya dinilai tidak layak karena banyaknya atap kios dan los yang bocor serta belum ada fasilitas penunjang yang memadai seperti sumber air bersih, toilet, tempat penampungan sampah sementara, tempat parkir, dan sistem drainase dengan total luasan 4.421 m². Renovasi pasar juga dilakukan untuk menata para pedagang yang kerap berjualan hingga ke pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas Jalan Raya Serang-Pandeglang.



Gambar 4.8 Infografis Pasar di Provinsi Banten

Sumber: SIGI diolah BPIW, 2025

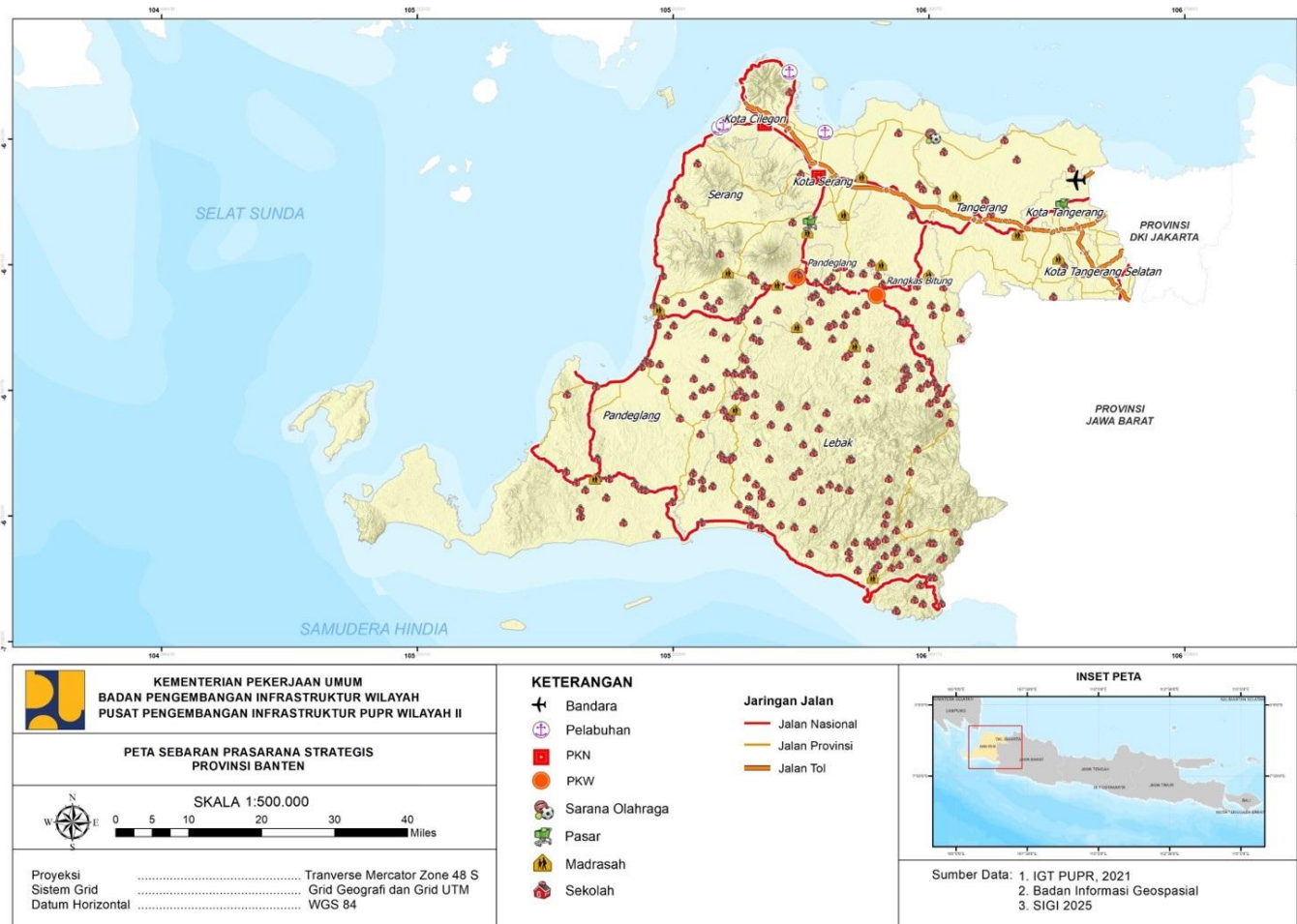
4.4.3. Infrastruktur Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya

Selain pembangunan infrastruktur pendidikan, pembangunan infrastruktur olahraga yang juga mendukung pengembangan potensi generasi muda juga terus dilakukan. Fasilitas olahraga yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jendral Prasarana Strategis di Provinsi Banten yaitu GOR Tanara yang berlokasi di Kecamatan Tanara, Kota Tangerang (2020). Kehadiran sarana olahraga tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional. Selain itu, fasilitas ini juga berperan penting sebagai pusat pengembangan berbagai aktivitas fisik serta pembinaan atlet yang berkompetisi pada tingkat regional.



Gambar 4.9 Infografis Sarana Olahraga di Provinsi Banten

Sumber: SIGI diolah BPIW, 2025



Peta 4.4 Profil Infrastruktur Prasarana Strategis Provinsi Banten

4.5. Profil dan Kinerja Infrastruktur Non - PU

Sub bab ini mencakup kondisi infrastruktur non-PU yang mendukung dalam pengembangan wilayah, yang terdiri dari profil dan kinerja sektor perumahan, perhubungan, energi.

4.5.1. Infrastruktur Perumahan

Profil dan kinerja perumahan terdiri dari jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), *backlog* perumahan, dan kondisi kumuh permukiman. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Banten sebanyak 156.668 unit atau sekitar 5,73% dari total jumlah keluarga (rumah tangga). Persentase RTLH tertinggi ada di Kabupaten Pandeglang sebanyak 21,34% (65.574 unit) dan Kabupaten Lebak sebanyak 18,23% (63.714 unit). Sedangkan RTLH terendah terdapat di Kota Cilegon sebanyak 0% (1 unit) dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 0,20% (696 unit).

Tabel 4.21 RTLH Provinsi Banten Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga	RTLH	RTLH (%)
1.	Kabupaten Lebak	349,537	63.714	18,23
2.	Kabupaten Pandeglang	307,254	65.574	21,34
3.	Kabupaten Serang	385,083	15.526	4,03
4.	Kabupaten Tangerang	824,820	8.950	1,09
5.	Kota Cilegon	108,341	1	0,00
6.	Kota Serang	158,496	1.235	0,78
7.	Kota Tangerang	510,170	972	0,19
8.	Kota Tangerang Selatan	351,395	696	0,20
TOTAL		2,995,096	156.668	5,73

Sumber: BPS & datartlh.perumahan.go.id

Total *backlog* kepemilikan rumah di Provinsi Banten mencapai 374.412 unit (12,50%). Wilayah dengan persentase *backlog* tertinggi adalah Kota Tangerang 23,49% (119.839 unit) dan Kota Cilegon 17,03% (18.450 Unit). Sedangkan *backlog* terendah berada di Kabupaten Serang 4,75% (18.288 unit) dan Kabupaten Lebak 6,64% (23.217 unit).

Tabel 4.22 Backlog Perumahan Provinsi Banten

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga	Backlog (unit)	Backlog (%)
1.	Kabupaten Lebak	349,537	23.217	6,64
2.	Kabupaten Pandeglang	307,254	32.990	10,74
3.	Kabupaten Serang	385,083	18.288	4,03
4.	Kabupaten Tangerang	824,820	86.651	10,51
5.	Kota Cilegon	108,341	18.450	17,03
6.	Kota Serang	158,496	18.870	11,91
7.	Kota Tangerang	510,170	119.839	23,49
8.	Kota Tangerang Selatan	351,395	23.217	6,64
TOTAL		2,995,096	374.412	12,50

Sumber: BPS Banten, 2021

Rumah khusus di Banten diperuntukkan bagi pemerintahan, rumah dinas, atlet, mahasiswa dan kelompok masyarakat tertentu (nelayan). Terdapat 127 rumah khusus yang tersebar di seluruh wilayah Banten.

Sebaran rumah khusus di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.23 Rumah Khusus Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Nama Rumah Khusus	Tahun Bangunan	Jumlah Unit
Lebak	Polsek Bayah	2015	1
	Rumdin Polsek Maja	2016	5
	Polsek Cipanas	2015	4
	Polsek Cikulur	2015	4
Pandeglang	Polsek Cikeudal	2015	4
	Polsek Pandeglang	2015	5
	SPN Polda Banten	2015	9
	Polsek Cigeulis	2015	4
Kota Cilegon	Polsek Anyer	2015	4
	Polsek Bojonegara	2015	1
Kota Tangerang	Kodiklat Mabes TNI	2015	23
Kota Tangerang Selatan	(PELTI - Atlet Deria Nur Haliza)	2019	1
Tangerang	Rusus Nelayan Mauk	2016	50
	(PELTI - Atlet Jessy Priskila Rompies)	2019	1
Serang	POLRES SERANG	2016	6
	Polsek Tirtayasa	2015	1
	Polsek Pontang	2015	4
TOTAL			127

Sumber: sigi.pu.go.id

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah membangun 31 rumah susun (rusun) di seluruh wilayah Provinsi Banten dengan jumlah total sebanyak 1.420 unit. Rumah susun ini terdiri dari rusun pekerja, rusun instansi pemerintahan, rusun mahawasiwa, dan rusun pondok pesantren. Sebaran rusun di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.24 Rumah Susun Provinsi Banten

No.	Balai	Nama Rusun	Jumlah Unit
1.	Pemda di Prov. Banten	BPPT Serpong	50
2.	Pemda di Prov. Banten	DCKPRKT Kota Tangerang	50
3.	Pemda di Prov. Banten	Dinas Tata Kota Serang	114
4.	Pemda di Prov. Banten	DITSBHARA Polda Banten	48
5.	Pemda di Prov. Banten	Kodiklat Mabes TNI	70
6.	Pemda di Prov. Banten	Pemkab Lebak	58
7.	Pemda di Prov. Banten	PP. Lingkungan Hidup Al Ihya	24
8.	Pemda di Prov. Banten	Rusun Pondok Pesantren Yayasan Raudatulsallam Mauk	14
9.	Pemda di Prov. Banten	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Prima Graha Serang	50
10.	Pemda di Prov. Banten	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	50
11.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	DTKBP Tangsel	70
12.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	DTRK Serang	70

13.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Politeknik Kemasyarakatan dan Politeknik Keimigrasian	43
14.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	PP Al Khairiyah	37
15.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	PP An Nawawi Tanara	30
16.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Rusun ASN Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	42
17.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Rusun KEK Tj Lesung	64
18.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Rusun Mahasiswa Yayasan Institut Ilmu Al Quran	107
19.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Rumah Susun Ponpes Al Husainy	37
20.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Rumah Susun Ponpes An Nawawi Tanara	32
21.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Rumah Susun Ponpes Daarul Falah	14
22.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Rumah Susun Ponpes Mambaul Hasan	14
23.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Rumah Susun Universitas Islam Negeri SMH	43
24.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Rusun Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mum	14
25.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Rusun Ponpes Jaiatul Ikhwan	14
26.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geologi	50
27.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	UIN Syarif Hidayatullah	50
28.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	50
29.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Yayasan An Nawawi Tanara	54
30.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Yayasan Yatim Piatu Shahibul Barokah Walfadillah	22
31.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	Yonif 320 Badak Putih	35
TOTAL			1.420

Sumber: *sigi.pu.go.id*

4.5.2. Penanganan Kumuh Kawasan

Pada tahun 2020, luas kawasan permukiman kumuh di Provinsi Banten mencapai 3.512,12 ha dengan kewenangan pusat sebesar 1.724,77 ha atau 49,11% dari luas kawasan kumuh Provinsi Banten. Dari semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten hanya Kota Cilegon yang tidak memiliki luas kumuh >15 ha (kewenangan pusat).

Tabel 4.25 Luasan Kawasan Kumuh Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Luasan Kumuh 2020 (ha)			Total
		<10	10-15	>15	
1.	Kota Tangerang	77,11	10,01	18,19	105,31
2.	Kabupaten Tangerang	71,7	84,08	177,19	332,97
3.	Kota Tangerang Selatan	59,54	0	45,69	105,23
4.	Kota Serang	149,81	45,68	19,55	215,04
5.	Kota Cilegon	23,54	14,12	0	37,66
6.	Kabupaten Pandeglang	26,98	34,93	137,45	199,36

No.	Kabupaten/Kota	Luasan Kumuh 2020 (ha)			Total
		<10	10-15	>15	
7.	Kabupetan Lebak	0	51,15	78,9	130,05
8.	Kabupaten Serang	411,8	726,9	1.247,8	2.386,5
	TOTAL	820.48	966.87	1,724.77	3.512,12

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Kawasan kumuh terluas terdapat di Kabupaten Serang yaitu seluas 2.386,5 ha. Sedangkan kawasan kumuh dengan luasan terkecil terdapat di Kota Cilegon yaitu seluas 37,66 ha.

4.5.3. Infrastruktur Perhubungan

Simpul utama transportasi di Banten, khususnya terkait perpindahan orang berpusat di Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan terutama ditunjang dengan keberadaan Pelabuhan Merak di Kota Cilegon. Sedangkan simpul utama transportasi barang berada di Pelabuhan Ciwandan yang juga didukung oleh keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian kecil pergerakan barang dilakukan melalui jaringan rel kereta api dan bandar udara. Sementara itu, terdapat simpul transportasi udara Bandara Soekarno-Hatta (Kab. Tangerang) yang menjadi hub internasional. Profil jaringan transportasi nasional dan regional dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**

4.5.4. Infrastruktur Jaringan Energi

Infrastruktur energi tersebar memanjang mengikuti jalur jalan raya Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Kapasitas terpasang listrik sebesar 7.653,14 MW, tenaga listrik yang dibangkitkan sebesar 47.925,99 GWh, dan listrik yang didistribusikan sebesar 24.646,11 GWh. Sumber energi listrik di Provinsi Banten berasal dari 3 (tiga) pembangkit listrik yang ada di Banten, yaitu PLTU Banten 1 Suralaya di Kota Cilegon dengan kapasitas PLTU total 7 unit dan 3.400 MW (atau menyumbang 12% dari kelistrikan Jawa-Madura-Bali), PLTU Banten 2 Labuhan di Kabupaten Pandeglang dengan kapasitas 2x300 MW, dan PLTU Banten 3 Lontar di Kabupaten Tangerang dengan kapasitas 3x315 MW. Selain Banten, listrik dari ketiga PLTU tersebut juga didistribusikan ke Provinsi DKI Jakarta dan sebagian Jawa Barat sebagai penyedia energi listrik untuk domestik dan industri.

4.5.5. Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi

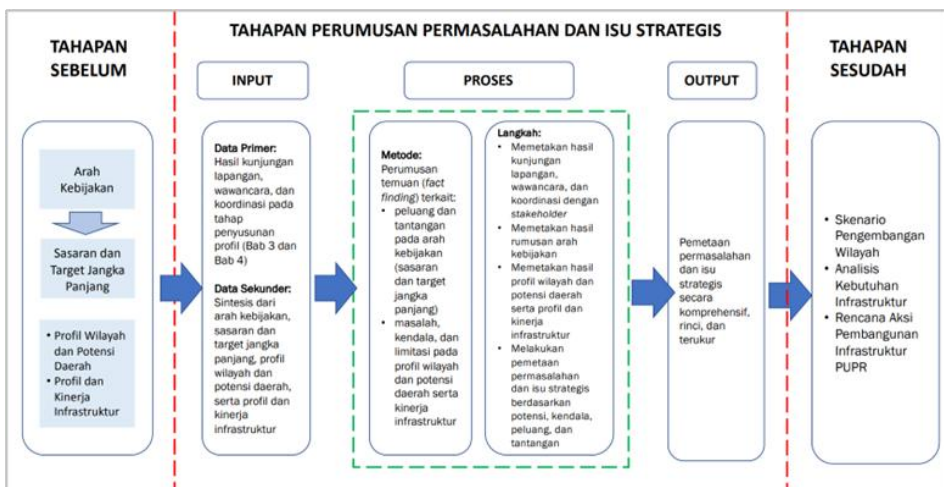
Presentase penduduk di Provinsi Banten yang menggunakan atau memiliki telepon rumah/PSTN di tahun 2020 sebesar 1,83%, dan sebanyak 64,40% telah menggunakan jaringan seluler/handphone. Jumlah menara *Base Transceiver Station (BTS)* di Banten terbanyak nomor 10 di Indonesia, yaitu sebanyak 1.106 unit (nasional 39.062 unit).

BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menyusun suatu perencanaan terutama rencana pengembangan, pastinya tidak terlepas dari *root cause* (akar masalah) yang harus diketahui sebelumnya, kemudian dilakukan *mapping* atau pemetaan hingga analisis yang tepat, sehingga menghasilkan rencana aksi (*action plan*) yang sesuai untuk mencapai *goal* atau tujuan yang diharapkan.

Permasalahan dan isu strategis selalu muncul dalam dinamika suatu negara, apalagi dengan Indonesia sebagai negara berkembang, yang tentunya juga terjadi di Provinsi Banten. Permasalahan adalah hal yang menjadi masalah atau persoalan; dan isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Perumusan potensi dan kendala (termasuk limitasi/daya dukung dan daya tampung) yang harus ditangani serta peluang dan ancaman yang dapat memberikan dampak dan pengaruh signifikan terhadap arahan kebijakan pengembangan wilayah serta dukungan infrastruktur PU, dibahas dalam bab 5 ini, yang kemudian menjadi masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah pada bab 6.



Gambar 5.1 Alur Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Sumber: SE Pedoman Muatan RPIW, 2022

Perumusan permasalahan dan isu strategis dilakukan berdasarkan fokus perencanaan yang dihasilkan dari rumusan arah kebijakan. Fokus perencanaan tersebut yaitu fokus perkotaan, industri, pertanian, pariwisata, dan afirmasi. Isu strategis juga menjadi dasar masukan

dalam menyusun skenario pengembangan wilayah berdasarkan masing-masing fokus perencanaan. Berikut merupakan alur perumusan permasalahan dan isu strategis.

Permasalahan dan isu strategis pada setiap fokus ditinjau dalam 3 konteks perencanaan, yaitu konteks makro yang bersifat skala nasional, konteks meso dengan skala Pulau Jawa, serta konteks mikro dengan skala provinsi dan kawasan prioritas. Isu strategis diperoleh dengan mempertimbangkan *baseline* (kondisi eksiting dan fokus kebijakan) dan skenario (opsi masa depan dan masalah utama dalam mewujudkan opsi masa depan).

Berdasarkan arahan kebijakan, profil wilayah dan potensi daerah, serta profil dan kinerja infrastruktur yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, isu di Provinsi Banten adalah kurangnya daya saing perkotaan Cilegon-Serang, masih lemahnya struktur industri hulu - hilir khususnya industri petrokimia dan baja, masih rendahnya daya saing pariwisata karena keterbatasan 3A dan daya dukung lingkungan, dan ketertinggalan wilayah Pansela Banten. Uraian isu strategis di setiap fokus dijelaskan sebagai berikut.

A. Kurangnya daya saing kawasan perkotaan Cilegon - Serang sehingga belum menjadi *engine of growth* yang kuat bagi pengembangan wilayah Banten

Pada provinsi Banten terdapat 2 pusat kegiatan nasional yaitu PKN Serang dan PKN Cilegon. Kedua PKN tersebut berkontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kewilayahan provinsi Banten, hal ini ditunjukkan dari kontribusi PDRB regional PKN Serang pada tahun 2023 terhadap PDRB Banten yang mencapai 85,9%, sedangkan PKN Cilegon mencapai empat kali lipat dari PDRB perkapita Banten. Tingginya pertumbuhan ekonomi di kawasan Banten tak lepas dari lokasinya yang dekat dengan kawasan aglomerasi Jakarta. Berdasarkan konstelasi regional, kedudukan perkotaan Cilegon - Serang sangat strategis karena berada dekat dengan aglomerasi Jakarta yang merupakan hub utama ekonomi nasional. Selain itu pada kedua perkotaan tersebut terdapat kawasan industri yang berkembang masif karena terdapatnya pelabuhan skala internasional yaitu Pelabuhan Ciwandan yang menjadi pintu keluar 29% barang untuk di ekspor dari Provinsi Banten. Selain Pelabuhan logistik utama yaitu Pelabuhan Ciwandan terdapat juga Pelabuhan Merak. Kedua pelabuhan tersebut berada di Kabupaten Cilegon. Keberadaan kedua pelabuhan tersebut serta kedekatan geografis dengan Bandara Soekarno - Hatta memperkuat posisi strategis ekonomi Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang.

Adapun tantangan dalam pengembangan kawasan perkotaan Cilegon - Serang antara lain sebagian besar wilayahnya mempunyai resiko banjir tiinggi, juga terdapat potensi tingginya polusi, degradasi lingkungan, dan

tingginya alih fungsi lahan hijau dan pertanian. Selain itu masifnya urbanisasi menyebabkan terjadinya perkembangan perkotaan yang tidak tertata yang mengarah ke urban sprawl. Banyaknya tantangan pada pengembangan perkotaan harus diatasi karena berpotensi menyebabkan potensi penurunan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat regulasi serta mendorong pengelolaan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi secara multi sektor dan multi aktor serta diperlukan arahan pengembangan yang jelas sebagai antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim dalam arah pengembangan Pantura Jawa dan Pesisir Selat Sunda.

Dari segi kependudukan, kepadatan perkotaan Serang-Cilegon (2.6-2.8 ribu jiwa/km²) jauh di atas rata-rata nasional, namun masih lebih longgar dibanding Jabodetabek (4.7 ribu jiwa/ km²). Proporsi usia produktif (68-69 %) lebih tinggi dari usia produktif nasional (60%), mendukung potensi ekonomi. Meski usia produktif tinggi, masih dibutuhkan peningkatan ketrampilan tenaga kerja sehingga dapat mengikuti perkembangan industri terkini.

Dukungan infrastruktur dasar perkotaan dan aksesibilitas regional yang cukup baik namun masih perlu ditingkatkan antara lain terkait sanitasi, dan konektivitas multimoda. Terkait capaian sanitasi aman perkotaan Serang baru mencapai 11,06% sedangkan perkotaan Cilegon mencapai 14,40% sedangkan target sanitasi nasional yaitu 30%. Meskipun akses ke Pelabuhan Merak relatif padat dengan VCR >0,8 berada di ruas jalan Raya Merak (Cilegon), Raya Serang (Cilegon), dan Raya Cilegon (Serang), namun aksesibilitas Perkotaan Serang - Cilegon cukup baik karena dilalui Jalan Tol Jakarta - Merak, dan KRL Commuterline namun perlu ditingkatkan dengan moda lainnya.

Tabel 5.1 Isu Strategis Fokus Perkotaan

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro	Kependudukan (Urbanisasi dan Kepadatan Penduduk)	Proporsi usia produktif (68-69 %) lebih tinggi dari usia produktif nasional (60%), mendukung potensi ekonomi. Kepadatan Cilegon - Serang (2.6-2.8 ribu jiwa/km ²) jauh di atas rata-rata nasional, namun masih lebih longgar dibanding Jabodetabek (4.7 ribu jiwa/km ²)	Pengembangan kawasan perkotaan Banten berbasis industri pengolahan	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang: - PKN Serang - PKN Cilegon - PKW Rangkasbitung - PKW Pandeglang	Penguatan peran perkotaan Serang-Cilegon sebagai pusat kegiatan industri pengolahan skala nasional dengan komoditas unggulan petrokimia dan industri pengolahan logam serta hasil tambang dari hulu ke hilir	Meski usia produktif tinggi, skill workforce belum sesuai standar industri terkini.	Kurangnya Daya Saing Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang sehingga Belum Menjadi Engine of Growth yang Kuat Bagi Pengembangan Wilayah Banten
	Lokasi Strategis	Secara geografis, kedekatan dengan aglomerasi Jakarta sebagai hub utama ekonomi nasional dapat menciptakan <i>trickling down effect</i> ke Kawasan Perkotaan Serang Cilegon	Dekat dengan Sumatra dan DKI Jakarta		Penguatan Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang sebagai Aglomerasi Jakarta dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional	Sistem pengelolaan dan pengendalian arus barang ekspor impor di jalur pelayaran internasional belum dapat dilaksanakan secara ketat yang dapat menyebabkan kemacetan di perkotaan	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meso	Pusat Ekonomi dan Kawasan Permukiman (Pengembangan kegiatan industri, jasa, dan pariwisata berskala internasional serta permukiman dengan kepadatan tinggi-sangat tinggi)	Kontribusi PDRB regional PKN Serang pada tahun 2023 terhadap PDRB Banten yang mencapai 85,9%, sedangkan PKN Cilegon mencapai empat kali lipat dari PDRB perkapita Banten.			Berdekatan dengan Jakarta sebagai pusat teknologi nasional, sehingga teknologi informasi dapat diakses dengan cepat	Konsentrasi kegiatan ekonomi di Serang – Cilegon dan sekitarnya dapat memperbesar ketimpangan wilayah Utara dan Selatan Banten	
	Jaringan Transportasi & Outlet Komoditas (jaringan jalan tol dan jalan nasional, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading)	Pelabuhan Ciwandan yang menjadi pintu keluar 29% barang untuk di ekspor dari Provinsi Banten Keberadaan pelabuhan penyeberangan Merak dan kedekatan geografis dengan Bandara Soekarno – Hatta memperkuat posisi strategis ekonomi Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang	Pengembangan konektivitas perkotaan Serang-Cilegon ke Perkotaan Jabodetabek		Pengembangan konektivitas dan jalur logistik Pantura Jawa untuk melayani perkotaan dan pengembangan sektor industri	Infrastruktur pendukung logistik yang belum memadai dapat mempengaruhi lalu lintas regional Serang Cilegon	
Mikro	Aktivitas Ekonomi, Komoditas Unggulan & Fisik Kewilayahan	Keberadaan Kawasan Industri dapat menciptakan multiplier effect	Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Banten yang		Pengelolaan kawasan perkotaan belum terintegrasi secara multi sektor dan multi aktor	Disparitas yang semakin tinggi antara wilayah utara yang merupakan pusat industri	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(Banten memiliki karakteristik yang beragam dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur)	ke Kawasan Perkotaan Serang - Cilegon	tersebar di WKP I (Kab. Tangerang - Kota Tangerang - Kota Tangerang Selatan) & WKP II (Kab. Serang - Kota Serang - Kota Cilegon)			dengan wilayah selatan yang belum memiliki pusat kegiatan ekonomi strategis	
		Meski investasi tercatat besar, daya beli per kapita dan pendapatan warga masih di bawah rata-rata provinsi, menjadi pusat perdagangan (30% PDRB) serta jasa, pendidikan, dan kesehatan	Mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok sektor perdagangan dan jasa.		Pengelolaan kawasan perkotaan belum terintegrasi secara multi sektor dan multi aktor	Faktor produksi belum siap, baik bahan baku, teknologi, dan SDM	
		Terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Wilayah Utara Banten sebesar 7.866 ha per tahun (terutama menjadi industri) yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan	Pengendalian alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun		Pengendalian pengembangan kawasan perkotaan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masih lemahnya pengawasan untuk memastikan kesesuaian peruntukan lahan	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

B. Lemahnya rantai nilai industri petrokimia dan baja sehingga belum memberikan *multiplier effect* terhadap pengembangan wilayah Banten

PDRB Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 531,74 triliun rupiah, dengan kontribusi sebesar 6,9% terhadap PDRB Pulau Jawa dan 3,97% terhadap PDB nasional. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Banten adalah industri pengolahan (30,35% PDRB dan 4,24% industri pengolahan nasional). Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi ke 2 di Banten, yaitu sebanyak 1.128.392 jiwa (20,3%). Selain industri pengolahan sebagai sektor unggulan, sektor yang memiliki kontribusi terbesar lainnya adalah sektor perdagangan (12,38%) dan konstruksi (11,69%).

Tingginya kontribusi sektor industri diakibatkan banyaknya kawasan industri (KI) dan kawasan peruntukkan industri (KPI). Terdapat 14 KI yang menyumbang 11% industri nasional dengan luasan 8.500 ha yang tersebar di utara (Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon). KI terbesar adalah KI Cilegon (pusat industri pengolahan petrokimia dan baja terbesar di Indonesia), KI Wilmar, dan KI Cikande. Banten juga menjadi provinsi peringkat 8 penghasil ekspor nasional dengan nilai ekspor 14,09 miliar pada tahun 2020 dan meningkat 4,32% dari tahun sebelumnya. Komoditas ekspor terbesar adalah sepatu (43%), besi dan baja (21%), plastik dan barang plastik (20%), serta bahan kimia (16%).

Perkembangan sektor industri di Banten juga didukung oleh keuntungan posisi kewilayahannya. Secara geografis, Provinsi Banten sangat strategis karena berada dalam jalur ALKI 1 (Laut Cina Selatan- Natuna-Selat Sunda- Samudera Hindia) sehingga kegiatan ekspor impor di Provinsi Banten dilakukan di pelabuhan dalam dan luar Provinsi Banten. Kegiatan ekspor sebagian besar dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok (38%), Pelabuhan Ciwandan (29%), dan Pelabuhan Cigading (19%). Dalam hal aksesibilitas, kegiatan industri Banten telah didukung oleh keberadaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan daerah sebagai jalur utama logistik.

Meskipun merupakan sektor dengan kontribusi PDRB terbesar, struktur industri hulu - hilir masih lemah dan belum memiliki nilai tambah yang optimal. Industri petrokimia dan pengolahan baja walaupun menjadi pengeksport dengan peringkat 8 terbesar, saat ini hanya berfungsi sebagai perusahaan hulu dan belum dapat mencukupi kebutuhan perusahaan hilir. Akibatnya, pemenuhan bahan baku untuk perusahaan hilir masih tergantung pada impor. Berdasarkan data BPS, impor bahan baku Indonesia mencapai 3,84 juta ton pada tahun 2024. Untuk mengurangi porsi bahan baku impor, pemerintah telah mengambil

kebijakan peningkatkan komponen dalam negeri pada seluruh sektor ekonomi, termasuk industri. Hal ini menjadi peluang bagi Provinsi Banten untuk memperbaiki rantai pasok industri guna mendorong terbentuknya struktur ekonomi berbasis bahan baku dalam negeri. Namun hal ini masih dihadapkan pada kendala kualitas bahan baku dalam negeri yang belum bisa bersaing dengan bahan baku impor.

Dalam hal kewilayahan, sektor industri sebagian besar terkonsentrasi di wilayah utara (97%), dengan kontributor terbesar Kota Cilegon - Serang (60 triliun rupiah), Kota Tangerang (39 triliun rupiah), dan Kabupaten Tangerang (32 triliun rupiah). Hal ini didukung oleh hub internasional Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta sebagai *outlet* dan jalan tol Merak-Tangerang dan jalan Pantura sebagai *backbone* distribusi barang. Tingginya aktivitas industri di wilayah utara yang belum terintegrasi dengan *outlet*, menyebabkan kenaikan bangkitan arus kendaraan logistik. Pada saat ini ruas jalan nasional yang mendukung kawasan industri memiliki tingkat pelayanan rendah ($VCR > 0,8$). Selain itu, sistem konektivitas jalur logistik Pantura Jawa belum terintegrasi dengan jalan-jalan radial non nasional sehingga arus logistik belum optimal.

Perkembangan sektor industri yang pesat perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan serta ketahanan pangan. Saat ini terjadi alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi di wilayah utara (Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang) akibat tingginya aktivitas ekonomi, termasuk industri, yaitu sebesar 7.866 ha per tahun. Alih fungsi ini terjadi di lahan dengan tingkat penyediaan jasa ekosistem pangan tinggi dan sangat tinggi sehingga berpotensi mengurangi produktivitas pertanian. Tingginya kebutuhan air di wilayah utara oleh besarnya aktivitas ekonomi baik industri, rumah tangga, dan komersial lainnya menyebabkan DAS di wilayah tersebut menjadi kritis berat.

Tabel 5.2 Isu Strategis Fokus Industri

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro	Kontribusi Ekonomi	Kontribusi ekonomi Provinsi Banten terhadap PDRB nasional sebesar 3,97% atau 531,47 triliun rupiah pada tahun 2024. Sedangkan sektor industri Banten berkontribusi sebesar 6,7% terhadap PDRB sektor industri nasional	Pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan (RTR Pulau Jawa Bali)	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang: - KPI Cilegon-Serang-Tangerang - KIT Wilmar - KI Krakatau Industrial Estate - KEK BSD - KI Cilegon - KI Wilmar - KI Cikande - KI Chandra Asri - KI Pancapuri - KI Nikomas Gemilang - KI Taman Tekno BSD - KI Sumber Rezeki - KI Griya Idola Park - KI Purat Kencana Alam - KI Cikupamas - KI Pasar Kemis - KI Sumber Bina Sukses - Millenium Industrial Estate	Penguatan peran Banten sebagai pusat kegiatan industri pengolahan skala nasional dengan komoditas unggulan petrokimia dan industri pengolahan logam serta hasil tambang dari hulu ke hilir	Nilai tambah ekonomi sektor industri masih rendah, dimana bahan baku masih bergantung pada impor dan produk ekspor masih berupa produk setengah jadi	Lemahnya Rantai Nilai Industri Petrokimia dan Baja sehingga Belum Memberikan Multiplier Effect terhadap Pengembangan Wilayah Banten
		Ekspor Banten berada di peringkat 11 nasional dengan nilai sebesar USD264,70 miliar rupiah pada tahun 2024 dengan pertumbuhan 9,03% dari tahun sebelumnya				Perubahan politik perdagangan internasional yang dapat mengancam nilai ekspor produk industri Banten	
		Komoditas ekspor terbesar adalah alas kaki (43%), besi dan baja (21%), plastik dan barang plastik (20%), serta bahan kimia (16%).					
		Industri pengolahan petrokimia (78% nasional) dan smelter baja (39% nasional) merupakan terbesar di Indonesia					
	Proses Produksi Industri	Industri petrokimia dan pengolahan baja Banten masih bergantung pada bahan baku impor	Peningkatan industri nasional melalui kebijakan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada seluruh sektor ekonomi		Perbaikan rantai pasok industri di Banten untuk mendorong terbentuknya struktur ekonomi berbasis bahan baku dalam negeri	Kualitas bahan baku hasil industri dalam negeri belum dapat memenuhi standar kebutuhan industri hilir	
		Industri baja Banten mendapatkan bahan baku dari dalam negeri dan juga impor					
	Lokasi Strategis	Secara geografis, Provinsi Banten sangat strategis karena berada dalam jalur	Indonesia sebagai poros maritim dunia		Peningkatan kualitas pelabuhan ekspor impor di	Sistem pengelolaan dan pengendalian arus barang ekspor impor di jalur	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ALKI 1 (Laut Cina Selatan- Natuna- Selat Sunda- Samudera Hindia)			Provinsi Banten untuk mempercepat proses pemasaran produk industri	pelayaran internasional belum dapat dilaksanakan secara ketat yang dapat mengancam stabilitas keamanan proses produksi industri nasional	
Meso	Jaringan Transportasi & Outlet Komoditas (jaringan jalan tol dan jalan nasional, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading)	Industri di koridor utara didukung oleh hub internasional Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta sebagai <i>outlet</i> dan jaringan jalan tol antarprovinsi dan jalan Pantura	Pengembangan konektivitas dan jalur logistik Pantura Jawa untuk melayani pengembangan sektor industri		Pengembangan konektivitas dan jalur logistik Pantura Jawa untuk melayani pengembangan sektor industri	Sistem konektivitas jalur logistik Pantura Jawa belum terintegrasi dengan jalan-jalan radial non nasional sehingga arus logistik belum optimal	
		Kegiatan ekspor sebagian besar dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok (38%), Pelabuhan Ciwandan (29%) dan Pelabuhan Cigading yang melayani KI Cilegon/ Krakatau Steel (19%)					
Mikro	Aktivitas Ekonomi, Komoditas Unggulan & Fisik Kewilayahan (Provinsi Banten memiliki karakteristik yang beragam dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur)	Dari total 14 KI di Banten sebanyak 97% berada di wilayah utara	Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Banten yang tersebar di WKP I (Kab. Tangerang – Kota Tangerang – Kota Tangerang Selatan) & WKP II (Kab. Serang – Kota Serang – Kota Cilegon)		Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Banten untuk mendorong integrasi sektor industri terutama di wilayah utara	Disparitas yang semakin tinggi antara wilayah utara yang merupakan pusat industri dengan wilayah selatan yang belum memiliki pusat kegiatan ekonomi strategis	
		Share sektor industri di Kawasan Serang – Cilegon sebesar 48,23% terhadap industri Provinsi Banten					
		Produk hasil industri sebagian besar hanya berupa produk setengah jadi			Hilirisasi sektor industri hingga menjadi produk jadi	Faktor produksi belum siap, baik bahan baku, teknologi, dan SDM	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Percampuran antara jalur logistik dengan lalu lintas wisata menyebabkan terganggunya transportasi dan kemacetan	Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri terutama konektivitas dan air baku		Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri terutama konektivitas dan air baku	Belum terintergasinya kawasan industri dengan pelabuhan yang mengakibatkan tingginya bangkitan lalu lintas logistik di jalan umum	
		Perkembangan industri Banten belum didukung oleh penyediaan air baku yang memadai				Penyediaan air baku tidak dapat mengakomodir peningkatan kebutuhan akibat perkembangan industri karena pemenuhan air baku diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik	
		Terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Wilayah Utara Banten sebesar 7.866 ha per tahun (terutama menjadi industri) yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun		Pengendalian pengembangan kawasan industri yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masih lemahnya pengawasan untuk memastikan kesesuaian peruntukan lahan	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

C. Rendahnya daya saing sektor pertanian sehingga belum berkontribusi signifikan terhadap perekonomian wilayah

Provinsi Banten memiliki produksi padi sebesar 1.550.623 ton, dan termasuk dalam 9 besar di Indonesia. Produksi padi tertinggi berada di Kab. Pandeglang sebesar 414.576 ton, disusul Kab. Serang sebesar 409.150 ton, serta posisi ketiga yaitu Kab. Lebak sebesar 357.013 ton. Kabupaten dengan produksi padi besar, sebagian besar berada di bagian selatan Provinsi Banten, atau berkontribusi 74% terhadap seluruh produksi padi di Banten. Meskipun penghasil padi terbesar, wilayah Banten Selatan masih relatif tertinggal karena aksesibilitas masih minim dimana hanya terdapat 1 ruas jalan nasional dan jalan daerah sehingga distribusi hasil pertanian belum optimal.

Dari segi rantai pasok, hasil pertanian dari pusat produksi sebagian besar didistribusikan ke pusat industri pengolahan di utara untuk diolah lebih lanjut, serta ke pusat perkotaan untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan. Berdasarkan hasil survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN), selain untuk konsumsi dalam daerah, produk pertanian juga didistribusikan ke provinsi lain, diantaranya produksi beras ke DKI Jakarta (167 ribu ton) dan Jawa Barat (459 ribu ton).

Berdasarkan nilai ekonominya, sektor pertanian hanya berkontribusi sebesar 5,65% atau 25,4 Miliar terhadap PDRB Provinsi Banten. Sektor pertanian berada di posisi terbesar ke 6 terhadap PDRB Provinsi Banten. Kabupaten dengan kontribusi PDRB Provinsi Banten sektor pertanian terbesar berada di Kab. Pandeglang sebesar 31,71% dan Kab. Lebak sebesar 25,88%.

Meskipun sebagai salah satu lumbung pangan utama nasional, ancaman alih fungsi lahan pertanian Banten cukup tinggi. Terdapat penurunan luasan lahan pertanian padi sebesar 77.463 hektar selama 10 tahun terakhir (2011-2021) atau sebesar 7.746 hektar per tahun. Penurunan ini terutama terjadi di wilayah utara yang memiliki perkembangan kawasan permukiman sangat tinggi akibat adanya aglomerasi kawasan perkotaan Jabodetabek dan perkembangan kawasan industri.

Lahan pertanian Banten menjadi bagian dari daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pusat (total luasan 52 ribu ha, yaitu DI Cisadane, DI Cibaliung, DI Ciliman, DI Cidurian, dan DI Ciujung), DI kewenangan provinsi sebesar 18.294 ha dan DI kewenangan kabupaten/kota dengan luasan sebesar 11.106 ha. Selain irigasi, pertanian juga didukung oleh konektivitas 1 ruas jalan nasional dan jalan daerah. Akses jalan kabupaten dan jalan desa menuju persawahan memiliki kondisi kurang mantap.

Tabel 5.3 Isu Strategis Fokus Pertanian

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro	Kontribusi Ekonomi	Produksi padi Banten masuk ke dalam 9 besar nasional, dengan produksi sebesar 1.550.623 ton, dan luas panen sebesar 300 ribu ha	Fokus pengembangan wilayah di Provinsi Banten salah satunya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ene rgi, air	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten (Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang) : - Kabupaten Serang - Kabupaten Pandeglang - Kabupaten Lebak - Kabupaten Tangerang	Strategi pembangunan wilayah Jawa-Bali untuk meningkatkan produktivitas pertanian	Meskipun menjadi penghasil padi nasional, produktivitas lahan sawah masih di bawah produktivitas nasional, yaitu hanya sebesar 51,84 (nasional 52,90).	Rendahnya daya saing sektor pertanian sehingga belum berkontribusi signifikan terhadap perekonomian wilayah
		Peningkatan peran sektor pertanian dalam peningkatan nilai ekonomi wilayah					
		PDRB sektor pertanian Kabupaten Serang berkontribusi sebesar 22,5%, Kabupaten Pandeglang berkontribusi sebesar 31,71%; dan Kabupaten Lebak sebesar 25,88% terhadap PDRB sektor pertanian Banten					
Mikro	Pemenuhan Infrastruktur Mendukung Pertanian	Tutupan lahan Banten didominasi oleh lahan pertanian (52% atau 505.834 ha) yang sebagian besar berupa pertanian lahan kering campur seluas 225.527 ha dan sawah seluas 223.447 ha.	penyediaan air berkelanjutan, konektivitas, dan infrastruktur dasar untuk pertanian		Terpenuhinya infrastruktur yang dapat meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Banten	Ancaman alih fungsi lahan pertanian Banten cukup tinggi. Terdapat penurunan luasan lahan pertanian padi sebesar 77.463 hektar selama 10 tahun terakhir (2011-2021) atau sebesar 7.746 hektar per tahun	
		Wilayah penghasil padi terbesar di Banten yaitu Kabupaten Pandeglang (produksi 414.576 ton; luas panen 77.466 ha); Kabupaten Serang (produksi 409.150 ton; luas panen 75.987 ha); dan Kabupaten Lebak (produksi 357.013 ton; luas panen 74.016 ha).					
		Lahan pertanian Banten menjadi bagian dari daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pusat (total luasan 52 ribu ha, yaitu DI Cisadane, DI Cibaliung, DI Ciliman,					

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		DI Cidurian, dan DI Ciujung), DI kewenangan provinsi sebesar 18.294 ha dan DI kewenangan kabupaten/kota dengan luasan sebesar 11.106 ha. Jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan berada di utara, sedangkan hasil pertanian dan perkebunan di selatan bersifat lokal dan sebagian kecil didistribusikan di Jawa Barat melalui jalan Pansela menuju Sukabumi. Akses jalan kabupaten dan jalan desa menuju persawahan memiliki kondisi kurang mantap Aksesibilitas ke persawahan di wilayah selatan Banten masih minim dikarenakan hanya terdapat 1 ruas jalan nasional dan jalan daerah					

Sumber: Hasil Analisis, 2025

D. Masih terbatasnya pengembangan pariwisata karena kondisi fisik geografis dan sosial budaya, sehingga daya ungkit ekonomi masih rendah

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 2,52 juta, naik 30% dibandingkan tahun 2023. Sedangkan jumlah perjalanan wisatawan ke Provinsi Banten pada tahun 2024 mencapai 4,8 juta wisatawan nusantara per tahun atau berada pada peringkat ke 5 tertinggi nasional. Tingginya kunjungan tersebut salah satunya dengan adanya hub transportasi internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara. Sebanyak 5% dari wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta merupakan wisatawan dengan tujuan ke Banten. Kedekatan geografis dengan DKI Jakarta juga mengakibatkan destinasi wisata di Banten menjadi salah satu alternatif tujuan wisatawan yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya.

Dari segi atraksi (*attraction*), Banten memiliki daya tarik wisata yang beragam, antara lain wisata alam dan bahari (Ujung Kulon, Tanjung Lesung), budaya (Baduy), sejarah dan religi (Banten Lama), serta minat khusus (Krakatau). Beberapa destinasi wisata juga telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah, yaitu KEK Tanjung Lesung (PP No. 26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung Lesung), KSPN Krakatau dsk, KPPN Serang- Banten Lama, dan KPPN Lebak- Baduy (PP No. 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS tahun 2010-2025). Labuan di Banten merupakan kawasan wisata pesisir yang menawarkan daya tarik utama seperti Pantai Labuan, Pelabuhan Perikanan, dan akses ke Pulau Umang serta Taman Nasional Ujung Kulon. Selain keindahan alam, Labuan juga dikenal dengan wisata budaya dan religi seperti makam Syekh Abdul Qodir Jailani serta festival laut tahunan. Potensi Labuan sebagai gerbang wisata selatan Banten didukung oleh kekayaan laut, budaya lokal, dan aksesibilitas yang strategis. Namun, konektivitas dan variasi pemilihan moda antara hub ke DTW dan DTW menuju DTW masih perlu peningkatan.

Amenitas (*amenity*) di Provinsi Banten sudah cukup banyak. Pada tahun 2024 terdapat 153 hotel berbintang dan 311 hotel nonbintang yang mayoritas berada di kawasan perkotaan. Dilihat dari jumlah kamar hotel, untuk hotel bintang terdapat 15.348 kamar atau 23.415 tempat tidur, sedangkan kategori hotel non bintang terdapat 5.123 kamar atau 7.499 tempat tidur. Namun di sekitar DTW kondisi akomodasi belum memadai baik dari segi ketersediaan kamar ataupun fasilitas. Selain itu itu, sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti tempat parkir, pusat informasi, masih terbatas, terutama pada destinasi yang jauh dari kawasan perkotaan.

Konektivitas (*accessibility*) Banten telah didukung oleh jaringan jalan yang cukup memadai, seperti akses jalan tol, jalan nasional dan daerah, serta pelabuhan. Sedangkan untuk DTW yang berada di selatan, hanya dilayani oleh jalan daerah, sehingga aksesibilitasnya masih tertinggal jika dibandingkan dengan utara.

Kendala lain dalam pengembangan pariwisata adalah posisi geografisnya yang berada di kawasan rawan bencana alam (gempa bumi, tsunami dan tanah longsor), khususnya di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang. Destinasi wisata di kawasan pesisir memiliki ancaman bencana tsunami yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik dari sesar yang berada di Samudera Hindia dan aktivitas vulkanik dari Anak Gunung Krakatau.

Tabel 5.4 Isu Strategis Fokus Pariwisata

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro	Kontribusi Ekonomi	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 2,52 juta, naik 30% dibandingkan tahun 2023	Pusat pariwisata berdaya saing berbasis cagar budaya, konservasi, religi, dan bahar	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung: - KEK Tanjung Lesung - Urban renewal Labuan - KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung - KSPN Krakatau dsk - KPPN Carita dsk - KPPN Ujung Kulon dsk - KPPN Serang - Banten Lama - KPPN Lebak - Baduy	Pusat pariwisata berdaya saing berbasis cagar budaya, konservasi, religi, dan bahari	Kedekatan dengan Metropolitan Jabodetabek dan Cekungan Bandung yang memiliki atraksi wisata alam dan buatan dengan kualitas yang baik menjadi ancaman bagi sektor pariwisata Banten	Masih Terbatasnya Pengembangan Pariwisata karena Kondisi Fisik Geografis dan Sosial Budaya, sehingga Daya Ungkit Ekonomi Masih Rendah
		Jumlah perjalanan wisatawan ke Provinsi Banten pada tahun 2024 mencapai 4,8 juta wisatawan nusantara per tahun atau berada pada peringkat ke 5 tertinggi nasional					
		Terdapat 3 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) terdiri dari 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banten dengan daya tarik utama wisata alam bentang alam, wisata pantai/bahari, taman nasional laut, dan kawasan olahraga					
Meso	Konstelasi Wilayah dan Jaringan Transportasi & Akses Pariwisata (Jalan Tol, Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak)	Dukungan hub transportasi internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara. Sebesar 8% wisman masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, 5% diantaranya menuju ke Provinsi Banten	Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pengembangan kawasan ekonomi lainnya yang didukung oleh jaringan prasarana transportasi yang memadai (RTRWN)		Keterpaduan konektivitas antarmoda transportasi & penyelesaian jaringan jalan tol antar hub transportasi dengan destinasi wisata dan antar DTW	Masih lemahnya konektivitas dan variasi pemilihan moda antar hub ke DTW dan DTW menuju DTW	
		Banten menjadi <i>hinterland</i> bagi WM Jabodetabekpunjur sehingga wisata Banten menjadi alternatif tujuan wisatawan nusantara dari Jakarta dan sekitarnya					
Mikro	Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Wisata (Provinsi)	Pariwisata Banten memiliki daya tarik yang beragam seperti Ujung Kulon (ekowisata), Cikadu dan Baduy (budaya), Sumur dan Krakatau (bahari)	Pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan fasilitas pariwisata, serta pemberdayaan		Target wisatawan sebesar 32 juta/tahun di 2029 yang didukung oleh	Wisata unggulan Banten berfungsi sebagai kawasan konservasi dan cagar budaya	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Banten memiliki karakteristik destinasi wisata yang beragam dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur)	Beberapa DTW prioritas Nasional masih belum terlayani dengan jaringan jalan yang baik	masyarakat dan pengembangan investasi bidang pariwisata		pengembangan atraksi dan amenitas di kawasan pariwisata unggulan	yang memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan	
		Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih belum memadai, terutama destinasi pariwisata yang jauh dari kawasan perkotaan					
		Beberapa DTW juga berstatus sebagai taman nasional, sehingga dalam pengembangannya perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan	Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberadaan kawasan rawan bencana		Pengembangan kawasan wisata berwawasan lingkungan, mitigasi bencana, dan memperhatikan prinsip pelestarian kawasan lindung setempat	Diversifikasi atraksi akan sangat terbatas karena resiko bencana yang tinggi	
		Kawasan Labuan - Tanjung Lesung berada di kawasan rawan bencana alam berupa letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor					

Sumber: Hasil Analisis, 2025

E. Masih lemahnya dukungan terhadap wilayah selatan Banten sehingga ketimpangan pertumbuhan masih tinggi

Ketertinggalan wilayah selatan dapat dilihat dari belum memadainya layanan infrastruktur dasar. Akses air aman rata-rata (12%) masih di bawah target RPJMN, akses sanitasi aman hanya 2% dan persampahan 13%. Minimnya layanan infrastruktur tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan dan aktivitas ekonomi. Aksesibilitas wilayah selatan Banten juga masih minim karena hanya didukung oleh jalan Pansela Jawa yang menghubungkan Pandeglang dan Lebak, serta beberapa ruas jalan daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan wilayah utara yang berfungsi sebagai salah satu pintu gerbang Pulau Jawa dengan dukungan berbagai infrastruktur seperti pelabuhan logistik, penumpang utama, bandara utama, jalan tol, dan jalan nasional.

Ketertinggalan suatu wilayah juga dapat dilihat dari 5 dimensi: pelayanan dasar di bawah target RPJMN, kondisi infrastruktur di bawah rata-rata nasional, aksesibilitas menuju PKL/PKW, cakupan pelayanan umum rendah, dan kondisi pemerintahan desa di bawah standar nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, kontribusi PDRB Banten masih rendah, yaitu hanya sebesar 6,93% PDRB Pulau Jawa dan 4,11% PDB Nasional. Konsentrasi PDRB tertinggi berada pada wilayah utara yaitu Kota Tangerang (102,41 T), Kabupaten Tangerang (93,48 T), dan Kota Cilegon (73,32 T), sedangkan PDRB wilayah selatan (Pandeglang dan Lebak) memiliki kontribusi terendah, yaitu sebesar 4,34% dan 4,58%. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antara utara dan selatan Provinsi Banten.

Pengembangan Pansela Jawa, termasuk Pansela Banten, perlu kehati-hatian karena memiliki keterbatasan geografis (wilayah selatan Banten merupakan kawasan rawan bencana gempa dan tsunami). Selain itu wilayah Lebak bagian timur-selatan merupakan bagian dari TN Halimun-Salak (di Provinsi Banten - Jawa Barat) yang memiliki fungsi sebagai konservasi. Hal ini menyebabkan pengembangan wilayah selatan tidak bisa masif seperti wilayah utara.

Tabel 5.5 Isu Strategis Fokus Afirmasi

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro	Distribusi Ekonomi Regional	Kontribusi PDRB Provinsi Banten masih rendah, yaitu hanya sebesar 6,93% PDRB Pulau Jawa dan 4,11% PDB Nasional	Strategi pembangunan wilayah Jawa-Bali untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mendorong pemerataan	Banten Selatan (pesisir selatan Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang : - Kabupaten Pandeglang - Kabupaten Lebak	Strategi pembangunan wilayah Jawa-Bali untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mendorong pemerataan	Minat investasi di wilayah selatan Banten masih rendah	Masih Lemahnya Dukungan Terhadap Wilayah Selatan Banten sehingga Ketimpangan Pertumbuhan Masih Tinggi
		Kontribusi PDRB wilayah selatan Banten (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) terhadap PDRB Provinsi Banten paling rendah, yaitu sebesar 4,34% dan 4,58%					
Meso	Konstelasi Wilayah dan Resiko Bencana	Wilayah selatan Banten dilayani oleh jalan Pansela Jawa, yang untuk Provinsi Banten menghubungkan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Pengembangan Pulau Jawa bagian selatan memperhatikan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana (RTR Pulau Jawa Bali)		Pengembangan wilayah selatan berbasis pertanian dan wisata pantai memanfaatkan koridor Pansela sebagai <i>backbone</i>	Pengembangan Pansela Jawa, termasuk Pansela Banten, perlu kehati-hatian karena memiliki keterbatasan geografis	
		Wilayah selatan Banten merupakan kawasan rawan bencana gempa dan tsunami karena berbatasan dengan Samudera Hindia			Pengurangan resiko bencana pada wilayah selatan Pulau Jawa, termasuk Pansela Banten		
		Kabupaten Lebak bagian timur-selatan merupakan bagian dari Taman Nasional Halimun-Salak (di Provinsi Banten - Jawa Barat) yang memiliki fungsi sebagai konservasi					
Mikro	Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas	Ketertinggalan dilihat dari 5 dimensi: pelayanan dasar yang masih di bawah target RPJMN, kondisi infrastruktur di bawah rata-rata nasional, aksesibilitas menuju PKL/PKW, cakupan pelayanan umum rendah, kondisi pemerintahan desa di bawah standar nasional	Kawasan pantai selatan sebagai kawasan strategis provinsi (RTRW Provinsi Banten)		Pengembangan Pansela Banten untuk mengurangi ketimpangan wilayah utara-selatan Banten	Keterbatasan kapasitas fiskal Provinsi Banten, terutama Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dalam penyediaan infrastruktur mendukung kegiatan ekonomi	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Akses air aman rata-rata 15,15% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Pandeglang) dan 9,94% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Lebak) yang mana masih jauh dari rata-rata target RPJMN			Terpenuhinya standar permukiman yang layak di kawasan perdesaan sesuai dengan amanat RPJMN 2024-2029 yaitu: 1) air layak 100%; 2) sanitasi aman 25% sanitasi layak 100%; 3) tingkat pengolahan sampah 80% 4) konektivitas layak melalui peningkatan kemantapan jalan	Pemenuhan infrastruktur dasar Pansela Banten terkendala kondisi geografis dan permukiman yang cenderung tersebar	
		Sanitasi aman 0,77% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Pandeglang) dan 3,40% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Lebak) masih jauh dari rata-rata target RPJMN					
		Tingkat pelayanan persampahan 7% (mengacu pada Kabupaten Pandeglang) dan 18% (mengacu pada Kabupaten Lebak)					
		Infrastruktur jalan berupa jalan kabupaten dan jalan desa dengan kondisi kurang mantap					
		Aksesibilitas wilayah selatan Banten masih minim dikarenakan hanya terdapat 1 ruas jalan nasional dan jalan daerah					

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Skenario pengembangan wilayah menjelaskan tentang proyeksi pertumbuhan, skenario pengembangan, serta justifikasi kawasan prioritas. Tujuan dari skenario pengembangan wilayah yaitu untuk menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah.

6.1. Proyeksi Pertumbuhan

Sub bab ini menjelaskan perkiraan kondisi atau perkembangan wilayah perencanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kecenderungan perkembangannya.

6.1.1. Proyeksi Demografi

Metode yang digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan model eksponensial dimana jumlah penduduk akan terus meningkat setiap tahunnya. Alasan penggunaan model eksponensial adalah untuk mendapatkan jumlah proyeksi penduduk yang maksimal, terkait perhitungan optimal kebutuhan infrastruktur.

Perhitungan proyeksi penduduk didasarkan pada kecenderungan 10 tahun terakhir (2010-2020). Dalam 10 tahun terakhir (2010-2020) penduduk Provinsi Banten meningkat sebanyak 1,3 juta jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk sebesar 11.904.562 jiwa, dan diperkirakan naik menjadi 14.262.531 jiwa pada 2034 dengan tingkat pertumbuhan per tahun 1,30%. Pada tahun 2034, diprediksi jumlah penduduk tertinggi ada di Kabupaten Tangerang (4.016.898 jiwa), Kota Tangerang (2.097.716 jiwa), dan Kabupaten Serang (2.005.686 jiwa). Sedangkan yang paling rendah berada di Kota Cilegon (539.270 jiwa) dan Kota Serang (894.747 jiwa).

Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Banten

Wilayah	(CAGR 10 TH)	Proyeksi Penduduk Banten (juta jiwa)									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Banten	1,30%	12,72	12,88	13,04	13,21	13,38	13,55	13,78	13,90	14,08	14,26
Pandeglang	1,05%	1,34	1,36	1,37	1,39	1,40	1,42	1,43	1,45	1,46	1,48
Lebak	1,44%	1,49	1,51	1,54	1,56	1,58	1,60	1,63	1,65	1,67	1,70
Tangerang	1,52%	3,50	3,56	3,61	3,66	3,72	3,78	3,83	3,89	3,95	4,01
Serang	1,49%	1,75	1,78	1,80	1,83	1,86	1,89	1,91	1,94	1,97	2,00
Kota Tangerang	0,69%	1,97	1,98	1,99	2,01	2,02	2,04	2,05	2,06	2,08	2,09
Kota Cilegon	1,51%	0,47	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	0,52	0,53	0,53
Kota Serang	1,82%	0,76	0,77	0,78	0,80	0,81	0,83	0,84	0,86	0,87	0,89
Kota Tangsel	0,84%	1,41	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,51	1,52

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, pada tahun 2023 kepadatan bruto Provinsi Banten berada dalam kategori rendah, yaitu kurang dari 150

jiwa/ha. Sementara pada tahun 2034 kepadatan tertinggi berada di Kota Tangerang dengan 136,29 jiwa/ha. Kabupaten dengan kepadatan terendah berada di Lebak yang hanya mencapai 4,97 jiwa/ha.

Tabel 6.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Banten

Wilayah	Kepadatan Penduduk Bruto (jiwa/km2)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Banten	33,34	33,69	34,03	34,38	34,73	35,09	35,45	35,82	36,19	36,56
Pandeglang	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53
Lebak	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49
Tangeravng	3,46	3,51	3,57	3,62	3,68	3,73	3,79	3,85	3,91	3,97
Serang	1,01	1,02	1,04	1,05	1,07	1,09	1,10	1,12	1,13	1,15
Kota Tangerang	12,80	12,89	12,98	13,07	13,16	13,25	13,34	13,44	13,53	13,62
Kota Cilegon	2,68	2,72	2,76	2,80	2,85	2,89	2,93	2,98	3,02	3,07
Kota Serang	2,85	2,90	2,95	3,01	3,06	3,12	3,17	3,23	3,29	3,35
Kota Tangsel	9,60	9,68	9,76	9,84	9,92	10,01	10,09	10,17	10,26	10,35

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

Secara spasial, kepadatan penduduk bruto untuk masing-masing wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.1 Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain penduduk alami, perkembangan pariwisata di Banten juga berpotensi mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke Banten. Dalam periode 2011-2022, terjadi peningkatan wisatawan yang cukup signifikan, yaitu 5,81% per tahun. Pada tahun 2034, jumlah wisatawan Banten diproyeksikan sebesar 45 juta jiwa.

Tabel 6.3 Proyeksi Wisatawan Provinsi Banten

Tahun	Proyeksi Wisatawan (juta jiwa)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wisatawan Nusantara	26,70	28,25	29,89	31,63	33,46	35,41	37,47	39,64	41,95	44,38
Wisatawan Mancanegara	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,64	0,68	0,72	0,76	0,80
Total	27,18	28,76	30,43	32,20	34,07	36,05	38,15	40,36	42,71	45,19

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

Perkembangan sektor industri yang pesat juga mengakibatkan pertambahan jumlah tenaga kerja industri. Pada tahun 2022, angkatan kerja penduduk Banten dalam sektor industri mencapai 20,3% dari total jumlah penduduk. Jumlah ini terbagi ke dalam dua klasifikasi berdasarkan ukurannya, yaitu industri besar-sedang dan industri mikro-kecil. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang di Banten bergerak ke arah positif. Pada tahun 2034, jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang diproyeksikan sebanyak 700 ribu jiwa, sedangkan tenaga kerja industri mikro dan kecil mencapai 200 ribu jiwa.

Tabel 6.4 Proyeksi Tenaga Kerja Provinsi Banten

Tahun	Proyeksi Tenaga Kerja (ribu jiwa)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Industri Besar dan Sedang	716,7	718,0	719,4	720,8	722,2	723,6	725,0	726,4	727,8	729,2
Industri Mikro dan Kecil	204,6	205,0	205,4	205,8	206,2	206,6	207,0	207,3	207,7	208,1
Total	921,3	923,1	924,8	926,6	928,4	930,2	932,0	933,8	935,6	937,4

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

6.1.2. Proyeksi Ekonomi

Pertumbuhan PDRB menggunakan model *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) tahun 2010-2020 dan mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun proyeksi sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2010-2020. Pada tahun 2023 nilai PDRB Provinsi Banten sebesar 1.078.492 miliar rupiah dan meningkat sebesar 6,5% per tahun, sehingga pada tahun 2034 nilai PDRB diproyeksikan sebesar 959.929 miliar rupiah.

Tabel 6.5 Proyeksi PDRB Provinsi Banten

Tahun	PDRB (miliar rupiah)
2025	576.378
2026	610.108
2027	646.089
2028	684.486
2029	725.474
2030	767.265
2031	811.463
2032	858.207
2033	907.644
2034	959.929

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

Sektor yang menjadi sektor unggulan PDRB ADHK tahun 2029 yaitu sektor industri pengolahan akan berkontribusi sebesar 28,29% terhadap PDRB Banten. Diikuti sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor yang diproyeksikan akan berkontribusi sebesar

14,33%, serta sektor konstruksi yang akan berkontribusi sebesar 12,86%. Sedangkan sektor dengan kontribusi terkecil adalah pengadaan air; pengelolaan sampah (0,10%) dan pertambangan dan penggalian (0,38%).

Tabel 6.6 Proyeksi Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahun 2029

Kode	Lapangan Usaha	Nilai PDRB	Presentase
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,927.68	4.40%
B	Pertambangan dan Penggalian	2,773.34	0.38%
C	Industri Pengolahan	205,259.19	28.29%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,922.35	0.68%
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah	732.65	0.10%
F	Konstruksi	93,284.60	12.86%
G	Perdagangan Besar dan Eceran	103,993.57	14.33%
H	Transportasi dan Pergudangan	29,136.06	4.02%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,069.88	2.77%
J	Informasi dan Komunikasi	60,619.52	8.36%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,192.31	2.78%
L	Real Estate	80,775.57	11.13%
M, N	Jasa Perusahaan	8,197.61	1.13%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	13,291.83	1.83%
P	Jasa Pendidikan	25,362.24	3.50%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,189.55	1.68%
R,S,T,U	Jasa Lainnya	12,746.24	1.76%
Banten		725,474.21	100%

Sumber: BPS diolah BPIW, 2025

6.1.3. Keberlanjutan Lingkungan

Jasa ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (*valuation*) suatu ekosistem. Ketersediaannya secara aktual dan potensial di masa depan harus menjadi bagian dari penilaian jasa ekosistem serta menjadi dasar pendekatan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan manfaatnya, jasa ekosistem dikelompokkan menjadi jasa ekosistem penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung.

1. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Wilayah dengan kemampuan penyedia pangan sangat tinggi seluas 18% dari total luas Provinsi Banten, terutama di bagian utara dan barat. Wilayah ini harus dipertahankan karena merupakan wilayah yang subur untuk budidaya tanaman pangan.

2. Jasa Ekosistem Penyedia Air

Wilayah dengan kemampuan penyedia air sangat tinggi hanya seluas 11% dimana 50% wilayah memiliki kemampuan penyedia air rendah.

Wilayah dengan kemampuan penyedia air sangat rendah umumnya berada di perkotaan dan kawasan industri yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.

3. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air & Banjir

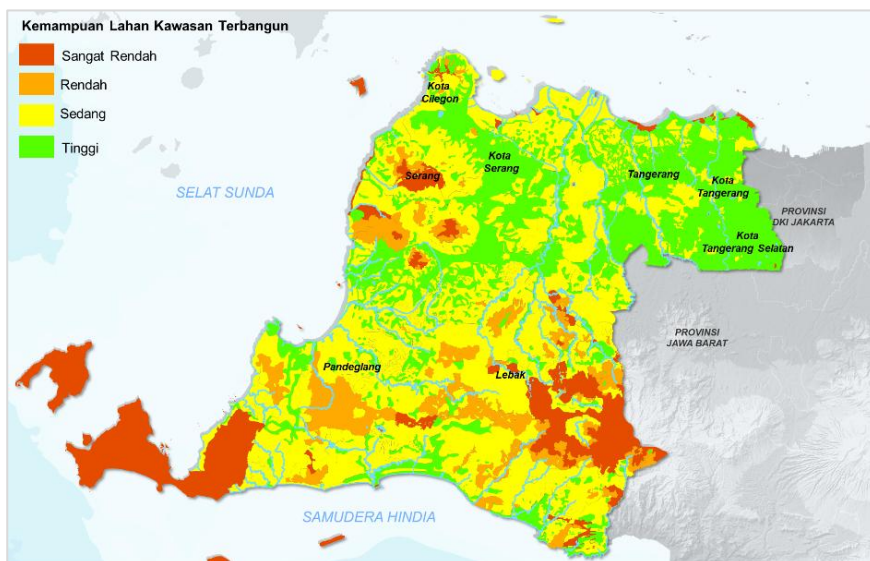
Kemampuan pengaturan tata air dan banjir cukup baik dengan 45% luasan wilayah Provinsi Banten memiliki kemampuan pencegahan banjir sangat tinggi. Akan tetapi wilayah perkotaan memiliki kemampuan rendah sebesar 13%.

4. Jasa Ekosistem Perlindungan & Pencegahan Bencana

Kemampuan perlindungan dan pencegahan bencana di Banten memiliki rentang yang bervariasi. Sebanyak 30% wilayah Provinsi Banten terutama di wilayah dataran rendah memiliki kemampuan sangat tinggi terhadap perlindungan bencana.

5. Jasa Ekosistem Tempat Tinggal & Ruang Hidup

Kemampuan penyediaan tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi hanya sebesar 28% dari wilayah Banten. Daerah yang memiliki daya dukung tinggi untuk permukiman sebagian besar berada di wilayah dataran rendah yang memiliki ketersediaan pangan tinggi dan di luar kawasan lindung.



Gambar 6.2 Kemampuan Lahan Provinsi Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2025

6.2. Visi dan Strategi

Sub bab visi dan strategi menjelaskan tentang perumusan visi wilayah dan analisis penyusunan strategi pengembangan Provinsi Banten.

6.2.1. Perumusan Visi Wilayah

Visi wilayah dirumuskan dari hasil analisis arah kebijakan di Bab II, dengan meninjau kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur di Bab III dan IV, serta menjawab permasalahan dan isu strategis di Bab V. Fokus pengembangan wilayah di Provinsi Banten meliputi pengembangan sektor industri, pariwisata, dan layanan kawasan tertinggal.

Visi/tujuan dalam pengembangan infrastruktur wilayah Banten yaitu:

"Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Banten melalui Peningkatan Daya Saing Perkotaan, Industri, Pariwisata, dan Pertanian, serta Pemerataan Ekonomi Selatan Banten"

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 5 misi (*grand strategy*) yang akan dilakukan. Keempat misi tersebut sekaligus akan menjawab permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan wilayah Provinsi Banten yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kurangnya daya saing perkotaan Serang-Panimbang sehingga Belum Menjadi Engine of Growth yang Kuat Bagi Pengembangan Wilayah Banten
2. Masih lemahnya struktur industri hulu - hilir khususnya industri petrokimia & baja serta industri turunannya guna mendorong nilai tambah & manfaat ekonomi bagi Provinsi Banten.
3. Masih rendahnya daya saing pariwisata Banten karena keterbatasan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Masih lemahnya kontribusi dari sektor pertanian sehingga belum berkontribusi signifikan terhadap perekonomian wilayah
5. Pengembangan wilayah selatan melalui pembangunan infrastruktur dasar khususnya di kawasan afirmasi untuk mengurangi ketimpangan.

6.2.2. Penyusunan Strategi Fokus Perkotaan

Sub bab ini menjelaskan tentang analisis setiap fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan analisis PESTLE maupun tingkat meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang disebut dengan analisis 5 FORCES. Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap

analisis berikutnya (IFAS, EFAS, dan SWOT). Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan yang digunakan pada masing-masing fokus perencanaan. Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT dan *grand strategy* sektor industri diuraikan sebagai berikut.

1) Analisis PESTLE Fokus Kawasan Perkotaan

Analisis PESTLE fokus kawasan perkotaan menunjukkan bahwa parameter sosial dinilai menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pengembangan kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan tingginya minat masyarakat untuk tinggal di kawasan perkotaan sehingga meningkatkan arus urbanisasi. Analisis PESTLE fokus kawasan perkotaan secara lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 6.7 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Kawasan Perkotaan

Kurangnya Daya Saing Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon sehingga Belum Menjadi Engine of Growth yang Kuat Bagi Pengembangan Wilayah Banten			
Parameter	Opportunities	Threats	Bobot Pengaruh
<i>POLITICAL</i>	Serang – Cilegon ditetapkan sebagai PKN yang merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi skala nasional.	Dominasi Kawasan Aglomerasi Jakarta dapat menghambat perkembangan kawasan Perkotaan Serang - Cilegon	14%
<i>ECONOMIC</i>	Keberadaan pelabuhan logistik yaitu pelabuhan Ciwandan dan pelabuhan penyeberangan Merak, serta kedekatan geografis dengan Bandara Soekarno – Hatta memperkuat posisi strategis ekonomi Kawasan Perkotaan Serang - Cilegon	Konsentrasi kegiatan ekonomi di Serang – Cilegon dan sekitarnya dapat memperbesar ketimpangan wilayah Utara dan Selatan Banten	23%
<i>SOCIOLOGICAL</i>	Tingginya minat masyarakat untuk tinggal di kawasan perkotaan sehingga memiliki SDM yang mencukupi untuk memutar roda ekonomi perkotaan	Kualitas SDM Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon relatif lebih rendah dibandingkan dengan kualitas SDM di kawasan perkotaan sekitarnya (Aglomerasi Jakarta), sehingga daya saing SDM lokal lebih rendah	18%
<i>TECHNOLOGICAL</i>	Berdekatan dengan Jakarta sebagai pusat teknologi nasional, sehingga teknologi informasi dapat diakses dengan cepat	Pengelolaan perkotaan berbasis teknologi dengan mengandalkan digitalisasi dan teknologi informasi rentan terhadap <i>cyber attack</i>	14%
<i>LEGAL</i>	Dalam RPJMN 2025-2029, pengembangan Kawasan Perkotaan Serang Cilegon menjadi salah satu prioritas pembangunan	Pengembangan Kawasan Perkotaan Cilegon belum memiliki legal basis spesifik seperti halnya Perpres Kawasan Perkotaan disekitarnya	18%

Kurangnya Daya Saing Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon sehingga Belum Menjadi Engine of Growth yang Kuat Bagi Pengembangan Wilayah Banten			
Parameter	Opportunities	Threats	Bobot Pengaruh
ENVIRONMENT	Terdapat arahan antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim dalam arah pengembangan Pantura Jawa dan Pesisir Selat Sunda	Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat terjadinya urbanisasi, <i>urban sprawl</i> , dan eksploitasi sda mengancam keberlanjutan kawasan perkotaan	14%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2) Analisis Five Forces Fokus Kawasan Perkotaan

Dalam Analisis *Five Forces* fokus kawasan perkotaan, lima aspek yang ditinjau adalah teknologi informasi, simpul transportasi, kawasan perkotaan prioritas, iklim dan kebencanaan, serta kependudukan. Secara rinci Analisis *Five Forces* fokus kawasan perkotaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.8 Analisis Five Forces (Meso) Fokus Kawasan Perkotaan

Kurangnya Daya Saing Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon sehingga Belum Menjadi Engine of Growth yang Kuat Bagi Pengembangan Wilayah Banten			
PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Konversi Threat Menjadi Opportunity	50%	Kedekatan dengan aglomerasi Jakarta sebagai hub utama ekonomi nasional dapat menciptakan <i>trickling down effect</i> ke Kawasan Perkotaan Serang Cilegon	Dominasi Kawasan Aglomerasi Jakarta dapat menghambat perkembangan kawasan Perkotaan Serang - Cilegon
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
Trend Eksisting	56%	Keberadaan pelabuhan penyeberangan Merak dan kedekatan geografis dengan Bandara Soekarno – Hatta memperkuat posisi strategis ekonomi Kawasan Perkotaan Serang - Cilegon	Infrastruktur pendukung logistik yang belum memadai dapat mempengaruhi lalu lintas regional Serang Cilegon
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Ketergantungan Saat ini	50%	Serang – Cilegon ditetapkan sebagai PKN yang merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi skala nasional.	Alih fungsi lahan di perkotaan yang masif sebagai akibat dari meningkatnya kepadatan dan jumlah penduduk.
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Tantangan Yang Dihadapi	50%	Serang – Cilegon ditetapkan sebagai PKN yang merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi skala nasional.	Alih fungsi lahan di perkotaan yang masif sebagai akibat dari meningkatnya kepadatan dan jumlah penduduk.
THREAT OF SUBSTITUTES			
Trend Analisis PESTLE	71%	Keberadaan pelabuhan utama yaitu pelabuhan Ciwandan dan pelabuhan	Konsentrasi kegiatan ekonomi di Serang – Cilegon dan sekitarnya

Kurangnya Daya Saing Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon sehingga Belum Menjadi Engine of Growth yang Kuat Bagi Pengembangan Wilayah Banten			
PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
		penyeberangan Merak dan kedekatan geografis dengan Bandara Soekarno – Hatta memperkuat posisi strategis ekonomi Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon	dapat memperbesar ketimpangan wilayah Utara dan Selatan Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3) Analisis SWOT (IFAS EFAS) Fokus Kawasan Perkotaan

Analisis SWOT untuk fokus kawasan perkotaan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6.9 Analisis SWOT Fokus Perkotaan

Strengths		Weaknesses	
1	Terdapat 2 PKN di Banten sebagai kutub pertumbuhan ekonomi dan kewilayahan.	1	Tingkat polusi dan degradasi lingkungan cenderung tinggi karena keberadaan pabrik dan industri
2	Akses Perkotaan Serang – Cilegon cukup baik karena dilalui Jalan Tol Jakarta – Merak, dan KRL Commuterline.	2	Sebagian besar wilayah Perkotaan Serang -Cilegon memiliki risiko banjir tinggi
3	Keberadaan Kawasan Industri dapat menciptakan multiplier effect ke Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon.	3	Layanan dasar perkotaan di beberapa wilayah belum optimal
4	Kawasan Perkotaan Serang - Cilegon merupakan pusat perdagangan jasa di Provinsi Banten	4	Masih minimnya moda transportasi massal perkotaan sehingga tingkat kemacetan masih tinggi
5	Mayoritas penduduk di Perkotaan Serang Cilegon berusia produktif (15-59 tahun), mencapai >60% dari total populasi.	5	Pengelolaan kawasan perkotaan belum terintegrasi secara multi sektor dan multi aktor
Opportunities		Threats	
1	Kedekatan dengan aglomerasi Jakarta sebagai hub utama ekonomi nasional dapat menciptakan <i>trickling down effect</i> ke Kawasan Perkotaan Serang Cilegon	1	Dominasi Kawasan Aglomerasi Jakarta dapat menghambat perkembangan kawasan Perkotaan Serang - Cilegon
2	Keberadaan pelabuhan Ciwandan dan pelabuhan penyeberangan Merak dan kedekatan geografis dengan Bandara Soekarno – Hatta memperkuat posisi strategis ekonomi Kawasan Perkotaan Serang - Cilegon	2	Infrastruktur pendukung logistik yang belum memadai dapat mempengaruhi lalu lintas regional Serang Cilegon
3	Serang – Cilegon ditetapkan sebagai PKN yang merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi skala nasional.	3	Alih fungsi lahan di perkotaan yang masif sebagai akibat dari meningkatnya kepadatan dan jumlah penduduk.
4	Terdapat arahan antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim dalam arah pengembangan Pantura Jawa dan Pesisir Selat Sunda	4	Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat terjadinya urbanisasi, <i>urban sprawl</i> , dan eksploitasi SDA mengancam keberlanjutan kawasan perkotaan.
5	Berdekatan dengan Jakarta sebagai pusat teknologi nasional, sehingga teknologi informasi dapat diakses dengan cepat	5	Konsentrasi kegiatan ekonomi di Serang – Cilegon dan sekitarnya dapat memperbesar ketimpangan wilayah Utara dan Selatan Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Masing-masing komponen dalam SWOT kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor. Pembobotan untuk faktor internal ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6.10 Skor *Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Perkotaan

Faktor Internal			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
Strengths	1	Terdapat 2 PKN di Banten sebagai kutub pertumbuhan ekonomi dan kewilayahan.	3	0,19	3	0,56
	2	Akses Perkotaan Serang – Cilegon cukup baik karena dilalui Jalan Tol Jakarta – Merak, dan KRL Commuterline.	4	0,25	4	1,00
	3	Keberadaan Kawasan Industri dapat menciptakan multiplier effect ke Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon.	2	0,13	2	0,25
	4	Kawasan Perkotaan Serang - Cilegon merupakan pusat perdagangan jasa di Provinsi Banten	3	0,19	3	0,56
	5	Mayoritas penduduk di Perkotaan Serang Cilegon berusia produktif (15-59 tahun), mencapai >60% dari total populasi.	4	0,25	4	1,00
Sub Total			16	1,00		3,38
Weaknesses	1	Tingkat polusi dan degradasi lingkungan cenderung tinggi karena keberadaan pabrik dan industri	2	0,15	-2	-0,31
	2	Sebagian besar wilayah Perkotaan Serang -Cilegon memiliki risiko banjir tinggi	3	0,23	-3	-0,69
	3	Layanan dasar perkotaan di beberapa wilayah belum optimal	3	0,23	-3	-0,69
	4	Masih minimnya moda transportasi massal perkotaan sehingga tingkat kemacetan masih tinggi	2	0,15	-2	-0,31
	5	Pengelolaan kawasan perkotaan belum terintegrasi secara multi sektor dan multi aktor	2	0,15	-2	-0,31
Sub Total			12	0,92		-2,31
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL						1,07

Sumber: Hasil Analisis, 2025

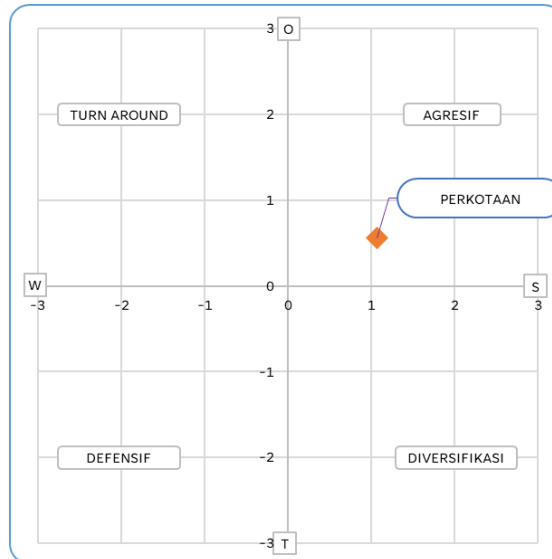
Pembobotan untuk faktor eksternal ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6.11 Skor *Opportunities* dan *Threats* Fokus Perkotaan

Faktor Eksternal				Bobot	Rating	Skor
Opportunities	1	Kedekatan dengan aglomerasi Jakarta sebagai hub utama ekonomi nasional dapat menciptakan <i>trickling down effect</i> ke Kawasan Perkotaan Serang Cilegon	3	0,23	3	0,69
	2	Keberadaan pelabuhan utama Pelabuhan Ciwandan dan pelabuhan penyeberangan Merak dan kedekatan geografis dengan Bandara Soekarno – Hatta memperkuat posisi strategis ekonomi Kawasan Perkotaan Serang - Cilegon	3	0,23	2	0,46
	3	Serang – Cilegon ditetapkan sebagai PKN yang merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi skala nasional.	4	0,31	4	1,23
	4	Terdapat arahan antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim dalam arah pengembangan Pantura Jawa dan Pesisir Selat Sunda	2	0,15	2	0,31
	5	Berdekatan dengan Jakarta sebagai pusat teknologi nasional, sehingga teknologi informasi dapat diakses dengan cepat	2	0,15	2	0,31
Sub Total			14	1,08		3,00
Threats	1	Dominasi Kawasan Aglomerasi Jakarta dapat menghambat perkembangan kawasan Perkotaan Serang - Cilegon	3	0,19	-2	-0,38
	2	Infrastruktur pendukung logistik yang belum memadai dapat mempengaruhi lalu lintas regional Serang Cilegon	3	0,19	-3	-0,56
	3	Alih fungsi lahan di perkotaan yang masif sebagai akibat dari meningkatnya kepadatan dan jumlah penduduk.	2	0,13	-2	-0,25
	4	Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat terjadinya urbanisasi, <i>urban sprawl</i> , dan eksploitasi SDA mengancam keberlanjutan kawasan perkotaan.	2	0,13	-2	-0,25
	5	Konsentrasi kegiatan ekonomi di Serang – Cilegon dan sekitarnya dapat memperbesar ketimpangan wilayah Utara dan Selatan Banten	4	0,25	-4	-1,00
Sub Total			14	0,88		-2,44
TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL						-0,56

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus perkotaan berada pada kuadran agresif, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strength*) untuk meningkatkan potensi (*opportunity*).



Gambar 6.3 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Perkotaan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Strategi memperkuat pengembangan sektor perkotaan di Provinsi Banten yaitu:

1. **Percepatan pemenuhan layanan perkotaan** untuk menciptakan daya saing sebagai kota berbasis logistik (**S2 - W3 - O2**).
2. **Penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi** (**S1 - W5 - O3**).
3. **Pengembangan kawasan perkotaan yang berketahanan bencana** (**W1 - W2**).
4. **Pengembangan integrasi antar moda dan sistem angkutan umum massal perkotaan** (**W4 - T2**).

6.2.3. Penyusunan Strategi Fokus Industri

Sub bab ini menjelaskan tentang analisis setiap fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan analisis PESTLE maupun tingkat meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang disebut dengan analisis 5 FORCES. Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap analisis berikutnya (IFAS, EFAS, dan SWOT). Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan yang digunakan pada masing-masing fokus perencanaan. Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT dan *grand strategy* sektor industri diuraikan sebagai berikut.

1) Analisis PESTLE (Makro)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *political* (politik), *economic* (ekonomi), *sociological* (sosial), *technological* (teknologi), *legal* (kebijakan), dan *environment* (lingkungan).

Tabel 6.12 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Industri

Masih Lemahnya Struktur Industri Hulu - Hilir Khususnya Industri Petrokimia & Baja serta Industri Turunannya guna Mendorong Nilai Tambah & Manfaat Ekonomi bagi Provinsi Banten			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Kementerian Perindustrian telah menargetkan sektor industri petrokimia & smelter baja di Indonesia, termasuk Provinsi Banten, mampu menjadi nomor 1 di ASEAN	Perubahan politik perdagangan internasional yang dapat mengancam nilai ekspor produk industri Banten	26%
ECONOMIC	Industri pengolahan petrokimia (78% nasional) dan smelter baja (39% nasional) merupakan terbesar di Indonesia	Industri petrokimia dan pengolahan baja Banten masih bergantung pada bahan baku impor	21%
SOCIOLOGICAL	Kedekatan Provinsi Banten dengan kawasan metropolitan (Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung) berpotensi untuk penyediaan tenaga kerja terampil untuk proses produksi industri	Migrasi tenaga kerja industri dari provinsi sekitar dapat mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal	11%
TECHNO-LOGICAL	Era pembangunan 4.0 dengan <i>Smart Infrastructure, Smart Logistic System, Human Capital Infrastructure, Digital Hub & Inovation Park</i>	Sektor industri belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan khususnya industri petrokimia & smelter baja	11%
LEGAL	Sejalan dengan Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) pergerakan pembangunan industri pengolahan yang berada pada WPPI (wilayah pusat pertumbuhan industri) terkonsentrasi pada koridor pertumbuhan utara Banten	Perubahan agenda prioritas nasional mendukung kawasan industri	16%
ENVIRONMENT	Kawasan industri berada di wilayah utara Banten yang memiliki kondisi geografis yang mendukung aktivitas industri	Pencemaran Limbah B3 yang tidak terkendali dapat mencemari lingkungan	16%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2) Analisis 5 Forces (Meso)

Berdasarkan isu strategis Provinsi Banten yang telah dirumuskan, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *rivalry among existing*

competitor (persaingan antar kompetitor eksisting), *bargaining power of customers* (daya tawar pelanggan), *bargaining power of suppliers* (daya tawar pemasok), *threat of new entrants* (ancaman pendatang baru), dan *threat of substitutes* (ancaman produk pengganti).

Tabel 6.13 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Industri

Masih Lemahnya Struktur Industri Hulu - Hilir Khususnya Industri Petrokimia & Baja serta Industri Turunannya guna Mendorong Nilai Tambah & Manfaat Ekonomi bagi Provinsi Banten			
PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Konversi Threat Menjadi Opportunity	50%	Secara geografis, Provinsi Banten sangat strategis karena berada dalam jalur ALKI 1 (Laut Cina Selatan- Natuna- Selat Sunda- Samudera Hindia)	Sistem pengelolaan dan pengendalian arus barang ekspor impor di jalur pelayaran internasional belum dapat dilaksanakan secara ketat yang dapat mengancam stabilitas keamanan proses produksi industri nasional
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
Trend Eksisting	56%	Kedekatan Provinsi Banten dengan kawasan metropolitan (Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung) berpotensi untuk penyediaan tenaga kerja terampil untuk proses produksi industri	Migrasi tenaga kerja industri dari provinsi sekitar dapat mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Ketergantungan Saat ini	50%	Industri di koridor utara didukung oleh hub internasional Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta sebagai <i>outlet</i> dan jaringan jalan tol antarprovinsi dan jalan Pantura	Sistem konektivitas jalur logistik Pantura Jawa belum terintegrasi dengan jalan-jalan radial non nasional sehingga arus logistik belum optimal
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Tantangan Yang Dihadapi	50%	Industri pengolahan petrokimia (78% nasional) dan smelter baja (39% nasional) merupakan terbesar di Indonesia	Nilai tambah ekonomi sektor industri masih rendah, dimana bahan baku masih bergantung pada impor dan produk ekspor masih berupa produk setengah jadi
THREAT OF SUBSTITUTES			
Trend Analisis PESTLE	71%	Kementerian Perindustrian telah menargetkan sektor industri petrokimia & smelter baja di Indonesia, termasuk Provinsi Banten, mampu menjadi nomor 1 di ASEAN	Perubahan politik perdagangan internasional yang dapat mengancam nilai ekspor produk industri Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3) Analisis SWOT (EFAS IFAS) Fokus Industri

Analisis SWOT sektor industri di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.14 Analisis SWOT Fokus Industri

	Strength		Weakness
1	Share sektor industri di Kawasan Serang – Cilegon sebesar 48,23% terhadap industri Provinsi Banten	1	Masih lemahnya industri petrokimia dan pengolahan baja Banten sehingga masih bergantung pada bahan baku impor
2	Komoditas ekspor terbesar Banten adalah alas kaki (43%), besi dan baja (21%), plastik dan barang plastik (20%), serta bahan kimia (16%).	2	Produk hasil industri sebagian besar hanya berupa produk setengah jadi
3	Dari total 14 KI di Banten sebanyak 97% berada di wilayah utara	3	Perkembangan industri Banten belum didukung oleh penyediaan air baku yang memadai
4	Industri pengolahan petrokimia (78% nasional) dan smelter baja (39% nasional) merupakan terbesar di Indonesia	4	Faktor produksi belum siap, baik bahan baku, teknologi, dan SDM
5	Sektor industri Banten memiliki kontribusi sebesar 5% terhadap PDB sektor industri nasional	5	Kualitas bahan baku hasil industri dalam negeri belum dapat memenuhi standar kebutuhan industri hilir
	Opportunity		Threat
1	Kedekatan Provinsi Banten dengan kawasan metropolitan (Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung) berpotensi untuk penyediaan tenaga kerja terampil untuk proses produksi industri	1	Sistem konektivitas jalur logistik Pantura Jawa belum terintegrasi dengan jalan-jalan radial non nasional sehingga arus logistik belum optimal
2	Industri di koridor utara didukung oleh hub internasional Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta sebagai <i>outlet</i> dan jaringan jalan tol antarprowinsi dan jalan Pantura	2	Perubahan politik perdagangan internasional yang dapat mengancam nilai ekspor produk industri Banten
3	Secara geografis, Provinsi Banten sangat strategis karena berada dalam jalur ALKI 1 (Laut Cina Selatan- Natuna- Selat Sunda- Samudera Hindia)	3	Migrasi tenaga kerja industri dari provinsi sekitar dapat mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal
4	Koridor utara Banten menjadi pusat industri pengolahan, perdagangan dan jasa, dan pusat pemerintahan	4	Sistem pengelolaan dan pengendalian arus barang ekspor impor di jalur pelayaran internasional belum dapat dilaksanakan secara ketat yang dapat mengancam stabilitas keamanan proses produksi industri nasional
5	Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) pergerakan pembangunan industri pengolahan yang berada pada WPPI (wilayah pusat pertumbuhan industri) terkonsentrasi pada koridor pertumbuhan utara Banten	5	Sektor industri belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan khususnya industri petrokimia & smelter baja

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Masing-masing komponen dalam SWOT kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor.

Tabel 6.15 Skoring *Strength* dan *Weakness* Fokus industri

FAKTOR INTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGTH	1	Share sektor industri di Kawasan Serang – Cilegon sebesar 48,23% terhadap industri Provinsi Banten	3	0.21	3	0.64
	2	Komoditas ekspor terbesar Banten adalah alas kaki (43%), besi dan baja (21%), plastik dan barang plastik (20%), serta bahan kimia (16%).	3	0.21	3	0.64
	3	Dari total 14 KI di Banten sebanyak 97% berada di wilayah utara	2	0.14	3	0.43
	4	Industri pengolahan petrokimia (78% nasional) dan smelter baja (39% nasional) merupakan terbesar di Indonesia	3	0.21	3	0.64
	5	Sektor industri Banten memiliki kontribusi sebesar 5% terhadap PDB sektor industri nasional	3	0.21	2	0.43
SUB TOTAL					14	2.79
WEAKNESS	1	Masih lemahnya industri petrokimia dan pengolahan baja Banten sehingga masih bergantung pada bahan baku impor	3	0.26	-2	-0.52
	2	Produk hasil industri sebagian besar hanya berupa produk setengah jadi	2	0.17	-1	-0.17
	3	Perkembangan industri Banten belum didukung oleh penyediaan air baku yang memadai	3	0.26	-2	-0.52
	4	Faktor produksi belum siap, baik bahan baku, teknologi, dan SDM	2	0.17	-3	-0.52
	5	Kualitas bahan baku hasil industri dalam negeri belum dapat memenuhi standar kebutuhan industri hilir	1.5	0.13	-3	-0.39
SUB TOTAL					11.5	-2.13
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL						0,66

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sedangkan skoring *opportunity* dan *threat* fokus industri di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

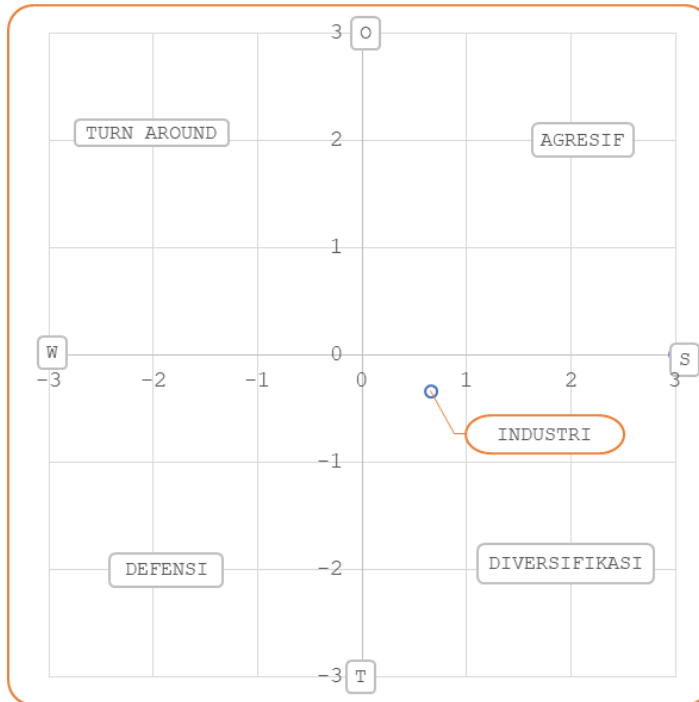
Tabel 6.16 Skoring *Opportunity* dan *Threat* Fokus industri

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITY	1	Kedekatan Provinsi Banten dengan kawasan metropolitan (Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung) berpotensi untuk penyediaan tenaga kerja terampil untuk proses produksi industri	2	0.17	3	0.50
	2	Industri di koridor utara didukung oleh hub internasional Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta sebagai <i>outlet</i> dan jaringan jalan tol antarprovinsi dan jalan Pantura	3	0.25	3	0.75

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
	3	Secara geografis, Provinsi Banten sangat strategis karena berada dalam jalur ALKI 1 (Laut Cina Selatan- Natuna- Selat Sunda- Samudera Hindia)	2	0.17	2	0.33
	4	Koridor utara Banten menjadi pusat industri pengolahan, perdagangan dan jasa, dan pusat pemerintahan	3	0.25	3	0.75
	5	Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) pergerakan pembangunan industri pengolahan yang berada pada WPPI (wilayah pusat pertumbuhan industri) terkonsentrasi pada koridor pertumbuhan utara Banten	2	0.17	2	0.33
SUB TOTAL					12	2.67
THREAT	1	Sistem konektivitas jalur logistik Pantura Jawa belum terintegrasi dengan jalan-jalan radial non nasional sehingga arus logistik belum optimal	3	0.23	-3	-0.69
	2	Perubahan politik perdagangan internasional yang dapat mengancam nilai ekspor produk industri Banten	3	0.23	-3	-0.69
	3	Migrasi tenaga kerja industri dari provinsi sekitar dapat mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal	3	0.23	-3	-0.69
	4	Sistem pengelolaan dan pengendalian arus barang ekspor impor di jalur pelayaran internasional belum dapat dilaksanakan secara ketat yang dapat mengancam stabilitas keamanan proses produksi industri nasional	2	0.15	-3	-0.46
	5	Sektor industri belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan khususnya industri petrokimia & smelter baja	2	0.15	-3	-0.46
SUB TOTAL			13	1.00		-3.00
TOTAL						-0.33

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus industri berada pada kuadran diversifikasi, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strength*) untuk meminimalisir ancaman (*threat*).



Gambar 6.4 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Industri

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Strategi dalam rangka memperkuat Struktur Industri Hulu - Hilir Khususnya Industri Petrokimia & Baja serta Industri Turunannya guna Mendorong Nilai Tambah & Manfaat Ekonomi bagi Provinsi Banten yaitu:

1. **Penguatan keterkaitan industri hulu ke hilir** melalui kebijakan pembatasan ekspor impor bahan baku industri dan peningkatan kapasitas produksi industri petrokimia & baja (S4 - T4 - T5)
2. **Peningkatan konektivitas dan jalur logistik** untuk mendukung pengembangan kawasan industri baru (S3 - T1 - T3)
3. **Pemanfaatan teknologi informasi** dalam pengembangan industri khususnya industri petrokimia & smelter baja (S4 - T5)
4. **Penguatan ketenagakerjaan industri** melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia (SDM) industri (S2 - S4 - T3).

6.2.4. Penyusunan Strategi Fokus Pariwisata

Sub bab ini menjelaskan tentang analisis setiap fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan analisis PESTLE maupun tingkat meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang disebut dengan analisis 5 FORCES. Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan.

Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap analisis berikutnya (IFAS, EFAS, dan SWOT). Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan yang digunakan pada masing-masing fokus perencanaan. Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT dan *grand strategy* sektor industri diuraikan sebagai berikut.

1) Analisis PESTLE (Makro)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *political* (politik), *economic* (ekonomi), *sociological* (sosial), *technological* (teknologi), *legal* (kebijakan), dan *environment* (lingkungan).

Tabel 6.17 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pariwisata

Masih Rendahnya Daya Saing Pariwisata Banten karena Keterbatasan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Penetapan KEK Tanjung Lesung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Perubahan agenda prioritas pemerintah pada sektor pariwisata	22%
ECONOMIC	Kontribusi PDRB pariwisata semakin naik dari tahun ke tahun, dan ditargetkan naik 40% pada 2025 (<i>baseline</i> 2021)	Terjadi penurunan jumlah wisatawan setelah adanya pandemi dan bencana alam	11%
SOCIOLOGICAL	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy dan Kawasan Banten Lama) berbasis religi, budaya dan sejarah menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga perlu kehati-hatian dalam pengembangannya	28%
TECHNO-LOGICAL	Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan aktivitas pariwisata Banten	Masyarakat lokal (pelaku pariwisata) belum dapat secara cepat menerima dan memanfaatkan teknologi	11%
LEGAL	PP 50/2011 tentang penetapan 2 KSPN, 4 KPPN, PP 26/2012 tentang penetapan KEK Tanjung Lesung	Usia PP penetapan KSPN dan KEK sudah lebih dari 10 tahun namun jumlah wisatawan belum sesuai target, sehingga status KEK rawan dicabut	6%
ENVIRON-MENT	Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang cocok sebagai kawasan pariwisata berbasis alam dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang didukung oleh pemerintah pusat	Rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi yang dapat menurunkan daya tarik wisatawan	22%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2) Analisis 5 Forces (Meso)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter.

Tabel 6.18 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pariwisata

Masih Rendahnya Daya Saing Pariwisata Banten karena Keterbatasan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			
PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Kualitas Yang Diinginkan	50%	Pusat pariwisata berdaya saing berbasis cagar budaya, konservasi, religi, dan bahari	Kedekatan dengan Metropolitan Jabodetabek dan Cekungan Bandung yang memiliki atraksi wisata alam dan buatan dengan kualitas yang baik menjadi ancaman bagi sektor pariwisata Banten
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
Trend Eksisting	45%	Terdapat 3 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) terdiri dari 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banten dengan daya tarik utama wisata alam bentang alam, wisata pantai/bahari, taman nasional laut, dan kawasan olahraga	Terjadi penurunan jumlah wisatawan setelah adanya pandemi dan bencana alam
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Ketergantungan Saat ini	45%	Dukungan Hub Transportasi Internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara. Sebesar 8% wisman masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, 5% diantaranya menuju ke Provinsi Banten	Masih lemahnya konektivitas dan variasi pemilihan moda antar hub ke DTW dan DTW menuju DTW
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	38%	Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang cocok sebagai kawasan pariwisata berbasis alam dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang didukung oleh pemerintah pusat	Rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi yang dapat menurunkan daya tarik wisatawan
THREAT OF SUBSTITUTES			
Trend Analisis PESTLE	42%	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy dan Kawasan Banten Lama) berbasis religi, budaya dan sejarah menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga perlu kehati-hatian dalam pengembangannya

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3) Analisis SWOT (EFAS & IFAS)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan analisis SWOT sektor pariwisata yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.19 Analisis SWOT Fokus Pariwisata

Strength		Weakness	
1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Provinsi Banten terbesar ke 4 se Indonesia, yaitu 38 juta orang/tahun pada tahun 2021	1	Sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang masih belum memadai terutama jauh dari kawasan perkotaan
2	Pariwisata Banten memiliki daya tarik yang beragam seperti, Cikadu dan Baduy (budaya), Sumur dan Krakatau (bahari)	2	Terdapat beberapa DTW prioritas nasional masih belum terlayani oleh jaringan jalan yang memadai
3	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy) menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	3	Lamanya waktu tempuh menuju kawasan pariwisata bagian barat (Labuan - Tanjung Lesung) dan pantai bagian selatan dengan waktu tempuh 3- 4 jam dari Jabodetabek
4	Kontribusi PDRB pariwisata semakin naik dari tahun ke tahun, dan ditargetkan naik 40% pada 2025 (baseline 2021)	4	Persebaran DTW dan kunjungan wisatawan yang tidak merata antara wilayah utara-selatan
5	Terdapat wisata religi di Banten Lama yang menjadi daya tarik wisatawan	5	Kurangnya promosi terhadap pariwisata Banten yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisatawan nusantara maupun mancanegara
Opportunity		Threat	
1	Pusat pariwisata berdaya saing berbasis cagar budaya, konservasi, religi, dan bahari	1	Kedekatan dengan Metropolitan Jabodetabek dan Cekungan Bandung yang memiliki atraksi wisata alam dan buatan dengan kualitas yang baik menjadi ancaman bagi sektor pariwisata Banten
2	Dukungan hub transportasi internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara. Sebesar 8% wisman masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, 5% diantaranya menuju ke Provinsi Banten	2	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga perlu kehati-hatian dalam pengembangannya
3	Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang cocok sebagai kawasan pariwisata berbasis alam dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang didukung oleh pemerintah pusat	3	Rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi yang dapat menurunkan daya tarik wisatawan
4	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy dan Kawasan Banten Lama) berbasis religi, budaya dan sejarah menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	4	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga ada limitasi dalam pengembangan wisata
5	Terdapat 3 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) terdiri dari 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banten dengan daya tarik utama wisata alam bentang alam, wisata pantai/bahari, taman nasional laut, dan kawasan olahraga	5	Masih lemahnya konektivitas dan variasi pemilihan moda antar hub ke DTW dan DTW menuju DTW

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Masing-masing komponen dalam SWOT kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor.

Tabel 6.20 Skoring *Strength* dan *Weakness* Fokus Pariwisata

FAKTOR INTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGTH	1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Provinsi Banten terbesar ke 4 se Indonesia, yaitu 38 juta orang/tahun pada tahun 2021	3	0,25	3	0,75
	2	Pariwisata Banten memiliki daya tarik yang beragam seperti Cikadu dan Baduy (budaya), Sumur dan Krakatau (bahari)	2	0,17	2	0,33
	3	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy) menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	3	0,25	3	0,75
	4	Kontribusi PDRB pariwisata semakin naik dari tahun ke tahun, dan ditargetkan naik 40% pada 2025 (<i>baseline</i> 2021)	2	0,17	3	0,50
	5	Terdapat wisata religi di Banten Lama yang menjadi daya tarik wisatawan	2	0,17	2	0,33
SUB TOTAL			12	1.00		2,67
WEAKNESS	1	Sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang masih belum memadai terutama jauh dari kawasan perkotaan	3	0,25	-2	-0,50
	2	Terdapat beberapa DTW prioritas nasional masih belum terlayani oleh jaringan jalan yang memadai	2	0,17	-1	-0,17
	3	Lamanya waktu tempuh menuju kawasan pariwisata bagian barat (Labuan - Tanjung Lesung) dan pantai bagian selatan dengan waktu tempuh 3 4 jam dari Jabodetabek	2	0,17	-2	-0,33
	4	Persebaran DTW dan kunjungan wisatawan yang tidak merata antara wilayah utara-selatan	3	0,25	-3	-0,75
	5	Kurangnya promosi terhadap pariwisata Banten yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisatawan nusantara maupun mancanegara	2	0,17	-2	-0,33
SUB TOTAL			12	1.00		-2,08
TOTAL						0,58

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sedangkan analisis EFAS sektor pariwisata di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

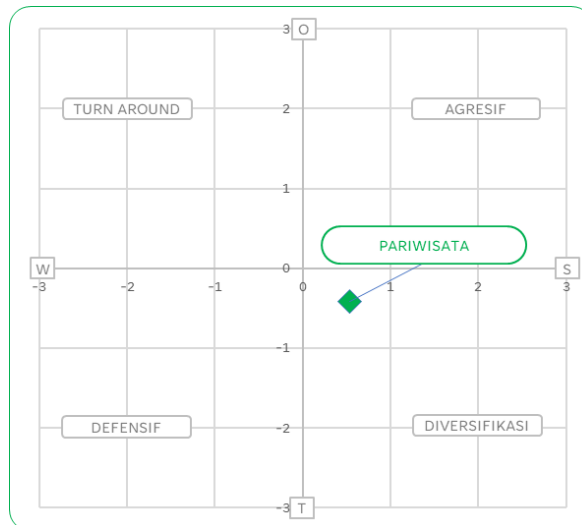
Tabel 6.21 Skoring *Opportunity* dan *Threat* Fokus Pariwisata

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITIES	1	Pusat pariwisata berdaya saing berbasis cagar budaya, konservasi, religi, dan bahari	2	0,17	2	0,33
	2	Dukungan hub transportasi internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara. Sebesar 8% wisman masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, 5% diantaranya menuju ke Provinsi Banten	3	0,25	3	0,75
	3	Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang cocok sebagai kawasan pariwisata berbasis alam dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang didukung oleh pemerintah pusat	2	0,17	2	0,33
	4	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy dan Kawasan Banten Lama) berbasis religi, budaya dan sejarah menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	3	0,25	3	0,75
	5	Terdapat 3 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) terdiri dari 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banten dengan daya tarik utama wisata alam bentang alam, wisata pantai/bahari, taman nasional laut, dan kawasan olahraga	2	0,17	2	0,33
		SUB TOTAL	12	1.00		2,50
THREAT	1	Kedekatan dengan Metropolitan Jabodetabek dan Cekungan Bandung yang memiliki atraksi wisata alam dan buatan dengan kualitas yang baik menjadi ancaman bagi sektor pariwisata Banten	3	0,25	-3	-0,75
	2	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga perlu kehati-hatian dalam pengembangannya	3	0,25	-3	-0,75
	3	Rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi yang dapat menurunkan daya tarik wisatawan	3	0,25	-3	-0,75
	4	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga ada limitasi dalam pengembangan wisata	1	0,08	-2	-0,17
	5	Masih lemahnya konektivitas dan variasi pemilihan moda antar hub ke DTW dan DTW menuju DTW	2	0,17	-3	-0,50
		SUB TOTAL	12	1.00		-2,92
TOTAL						-0,42

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan.

Pengembangan fokus industri berada pada kuadran agresif, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*).



Gambar 6.5 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Strategi memperkuat pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Banten yaitu:

1. **Penguatan destinasi cagar budaya** dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diversifikasi atraksi pariwisata (S4 – S5 – T1)
2. **Pengembangan infrastruktur pariwisata** mendukung peningkatan kualitas destinasi wisata (S1 – S2 – S3 – T1)
3. **Penguatan konektivitas dan aksesibilitas** menuju destinasi wisata (S2 – S3 – T5)
4. **Integrasi pengembangan destinasi wisata** Banten melalui paket wisata terintegrasi dan penguatan kelembagaan (S1 – S5 – T4)
5. Pengembangan pariwisata berbasis **pengurangan risiko bencana** (S1 – S2 – T3).

6.2.5. Penyusunan Strategi Fokus Pertanian

Sub bab ini menjelaskan tentang analisis setiap fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan analisis PESTLE maupun tingkat meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang disebut dengan analisis 5 FORCES. Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap analisis berikutnya (IFAS, EFAS, dan SWOT). Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk

menentukan strategi pengembangan yang digunakan pada masing-masing fokus perencanaan. Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT dan *grand strategy* sektor industri diuraikan sebagai berikut.

1) Analisis PESTLE (Makro)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *political* (politik), *economic* (ekonomi), *sociological* (sosial), *technological* (teknologi), *legal* (kebijakan), dan *environment* (lingkungan).

Tabel 6.22 Analisis Pestle (Makro) Fokus Pertanian

Rendahnya daya saing sektor pertanian sehingga belum berkontribusi signifikan terhadap perekonomian wilayah			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Pulau Jawa termasuk Provinsi Banten merupakan lumbung pangan utama nasional dengan kontribusi lebih dari 50% suplai beras nasional berasal dari Pulau Jawa. (Kontribusi produksi beras Banten 0,31% dari nasional).	Kebijakan impor beras dari pemerintah dapat mengancam produksi beras dalam negeri.	19%
ECONOMIC	Produksi padi Banten masuk ke dalam 9 besar nasional, dimana PDRB sektor pertanian Kabupaten Serang 22,5%, Pandeglang, dan Lebak berkontribusi sebesar 31,71% dan 25,88% terhadap PDRB sektor pertanian Banten	Wilayah Jawa Barat Selatan (Sukabumi dan Cianjur) merupakan lumbung pangan nasional yang merupakan pesaing pasar bagi wilayah selatan Provinsi Banten	15%
SOCIOLOGICAL	Kemampuan bercocok tanam masyarakat agraris Pulau Jawa sudah turun-temurun mendukung Banten sebagai lumbung pangan nasional.	45% penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani dengan pendapatan rendah sehingga berpotensi untuk beralih ke sektor pekerjaan lain.	19%
TECHNO-LOGICAL	Modernisasi pertanian mampu meningkatkan produktivitas lahan dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.	SDM bidang pertanian belum memiliki cukup kemampuan untuk mengoperasikan teknologi modern.	9%
LEGAL	Dalam RPJMN 2025-2029, Provinsi Banten termasuk dalam kawasan swasembada pangan, air, dan energi	RPJMN bersifat kebijakan 5 tahunan yang dapat berubah setelah periode selesai	15%
ENVIRON-MENT	76% lahan pertanian di Pulau Jawa termasuk Provinsi Banten berada pada wilayah dengan potensi air permukaan yang memadai.	Ancaman alih fungsi lahan pertanian Provinsi Banten cukup tinggi mencapai 7.746 Ha pertahun	23%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2) Analisis 5 Forces (Meso)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter.

Tabel 6.23 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pertanian

<i>Rendahnya daya saing sektor pertanian sehingga belum berkontribusi signifikan terhadap perekonomian wilayah</i>			
PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Kualitas Yang Diinginkan	55%	Produksi padi Banten masuk ke dalam 9 besar nasional, dimana PDRB sektor pertanian Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak berkontribusi sebesar 31,71% dan 25,88% terhadap PDRB sektor pertanian Banten	Adanya persaingan pasar komoditas padi dengan wilayah Jawa Barat Selatan (Sukabumi dan Cianjur) yang juga merupakan lumbung pangan nasional
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
Trend Eksisting	56%	Produktivitas padi tertinggi ke-4 di Pulau Jawa sehingga produksi pada Banten menjadi komoditas unggulan yang dapat dikembangkan	Minimnya atau keterbatasan terkait infrastruktur mendukung pertanian
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Ketergantungan Saat ini	45%	Aksesibilitas regional sudah cukup memadai untuk distribusi dan lalu lintas hasil pertanian	Sistem konektivitas belum menyeluruh sampai ke jalan lokal dan jalan desa yang terhubung dengan sentra produksi pangan
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	20%	Pengembangan sektor unggulan industri Banten dapat diintegrasikan dengan pengembangan komoditas pangan	45% penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani dengan pendapatan rendah sehingga berpotensi untuk beralih ke sektor pekerjaan lain
THREAT OF SUBSTITUTES			
Trend Analisis PESTLE	40%	76% lahan pertanian di Pulau Jawa termasuk Provinsi Banten berada pada wilayah dengan potensi air permukaan yang memadai.	Ancaman alih fungsi lahan pertanian Provinsi Banten cukup tinggi mencapai 7.746 Ha pertahun

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3) Analisis SWOT (EFAS IFAS)

Analisis SWOT sektor infrastruktur dasar kawasan pertanian di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.24 Analisis SWOT Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Pertanian

	Strength		Weakness
1	Sektor pertanian menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ke-6 terhadap PDRB Banten yaitu sebesar Rp. 25,4 miliar	1	Produktivitas lahan sawah masih di bawah produktivitas nasional, yaitu hanya sebesar 51,84 (nasional 52,90)

2	Produksi padi Provinsi Banten sebesar 1,55 juta ton, serta wilayah selatan berkontribusi sebesar 74% terhadap produksi padi Banten	2	Kondisi infrastruktur irigasi di Provinsi Banten dalam kondisi kurang dan perlu perhatian dengan IKSI 61,30, yang terdiri dari jaringan utama 64,94, dan jaringan tersier 46,74
3	Masyarakat di Kawasan Swasembada Pangan Banten umumnya bermata pencaharian dari sektor pertanian	3	Aksesibilitas menuju sentra produksi pangan masih belum memadai
4	Lahan untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak masih relatif luas	4	Hasil pertanian dan perkebunan di selatan bersifat lokal dan sebagian kecil didistribusikan di Jawa Barat melalui jalan Pansela menuju Sukabumi
5	Jaringan irigasi sudah mencapai 60% dari total luasan LP2B dan kinerja irigasi masih akan terus ditingkatkan	5	Penggunaan teknologi pertanian terbaru masih terbatas, sehingga produktivitas belum maksimal
Opportunity		Threat	
1	Produksi padi Banten masuk ke dalam 9 besar nasional, dimana PDRB sektor pertanian Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak berkontribusi sebesar 22%, 31,71% dan 25,88% terhadap PDRB sektor pertanian Banten.	1	Adanya persaingan pasar komoditas padi dengan wilayah Jawa Barat Selatan (Sukabumi dan Cianjur) yang juga merupakan lumbung pangan nasional
2	Produktivitas padi tertinggi ke-4 di Pulau Jawa sehingga produksi pada Banten menjadi komoditas unggulan yang dapat dikembangkan	2	Minimnya atau keterbatasan terkait infrastruktur mendukung pertanian
3	Aksesibilitas regional sudah cukup memadai untuk distribusi dan lalu lintas hasil pertanian	3	Sistem konektivitas belum menyeluruh sampai ke jalan lokal dan jalan desa yang terhubung dengan sentra produksi pangan
4	Pengembangan sektor unggulan industri Banten dapat diintegrasikan dengan pengembangan komoditas pangan	4	45% penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani dengan pendapatan rendah sehingga berpotensi untuk beralih ke sektor pekerjaan lain
5	76% lahan pertanian di Pulau Jawa termasuk Provinsi Banten berada pada wilayah dengan potensi air permukaan yang memadai.	5	Ancaman alih fungsi lahan pertanian Provinsi Banten cukup tinggi mencapai 7.746 Ha pertahun

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Masing-masing komponen dalam SWOT kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor.

Tabel 6.25 Skoring *Strength* dan *Weakness* Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Pertanian

FAKTOR INTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGTH	1	Sektor pertanian menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ke-6 terhadap PDRB Banten yaitu sebesar Rp. 25,4 miliar	3	0,23	3	0,69
	2	Produksi padi Provinsi Banten sebesar 1,55 juta ton, serta wilayah selatan berkontribusi sebesar 74% terhadap produksi padi Banten	2	0,15	3	0,46
	3	Masyarakat di Kawasan Swasembada Pangan Banten umumnya bermata pencaharian dari sektor pertanian	2	0,15	2	0,31

FAKTOR INTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
	4	Lahan untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak masih relatif luas	3	0,23	3	0,69
	5	Jaringan irigasi sudah mencapai 60% dari total luasan LP2B dan kinerja irigasi masih akan terus ditingkatkan	3	0,23	3	0,69
		SUB TOTAL	13	1.00		2.85
WEAKNESS	1	Produktivitas lahan sawah masih di bawah produktivitas nasional, yaitu hanya sebesar 51,84 (nasional 52,90)	3	0,21	-3	-0,64
	2	Kondisi infrastruktur irigasi di Provinsi Banten dalam kondisi kurang dan perlu perhatian dengan IKS1 61,30, yang terdiri dari jaringan utama 64,94, dan jaringan tersier 46,74	3	0,21	-3	-0,64
	3	Aksesibilitas menuju sentra produksi pangan masih belum memadai	3	0,21	-3	-0,64
	4	Hasil pertanian dan perkebunan di selatan bersifat lokal dan sebagian kecil didistribusikan di Jawa Barat melalui jalan Pansela menuju Sukabumi	3	0,21	-2	-0,43
	5	Penggunaan teknologi pertanian terbaru masih terbatas, sehingga produktivitas belum maksimal	2	0,14	-2	-0,29
		SUB TOTAL	14	1.00		-2.64
TOTAL						0.20

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sedangkan skoring *opportunity* dan *threat* infrastruktur dasar kawasan pertanian di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

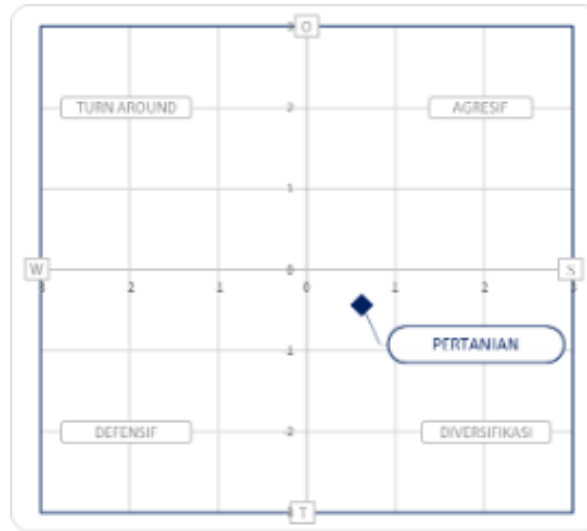
Tabel 6.26 Skoring Opportunity dan Threat Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Pertanian

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITIES	1	Produksi padi Banten masuk ke dalam 9 besar nasional, dimana PDRB sektor pertanian Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak berkontribusi sebesar 22,55%, 31,71% dan 25,88% terhadap PDRB sektor pertanian Banten	3	0,23	3	0,69
	2	Produktivitas padi tertinggi ke-4 di Pulau Jawa sehingga produksi pada Banten menjadi komoditas unggulan yang dapat dikembangkan	3	0,23	2	0,46
	3	Aksesibilitas regional sudah cukup memadai untuk distribusi dan lalu lintas hasil pertanian	3	0,23	3	0,69

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
	4	Pengembangan sektor unggulan industri Banten dapat diintegrasikan dengan pengembangan komoditas pangan	2	0,15	2	0,31
	5	76% lahan pertanian di Pulau Jawa termasuk Provinsi Banten berada pada wilayah dengan potensi air permukaan yang memadai.	2	0,15	2	0,31
		SUB TOTAL	13	1.00		2,46
THREAT	1	Adanya persaingan pasar komoditas padi dengan wilayah Jawa Barat Selatan (Sukabumi dan Cianjur) yang juga merupakan lumbung pangan nasional	3	0,25	-3	-0,75
	2	Minimnya atau keterbatasan terkait infrastruktur mendukung pertanian	2	0,17	-3	-0,50
	3	Sistem konektivitas belum menyeluruh sampai ke jalan lokal dan jalan desa yang terhubung dengan sentra produksi pangan	2	0,17	-3	-0,50
	4	45% penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani dengan pendapatan rendah sehingga berpotensi untuk beralih ke sektor pekerjaan lain	2	0,17	-2	-0,33
	5	Ancaman alih fungsi lahan pertanian Provinsi Banten cukup tinggi mencapai 7.746 Ha pertahun	3	0,25	-3	-0,75
		SUB TOTAL	12	1.00		-2,83
		TOTAL				-0,37

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus industri berada pada kuadran diversifikasi, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strength*) untuk meminimalisir ancaman (*threat*).



Gambar 6.6 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Strategi memperkuat pengembangan sektor infrastruktur dasar Pertanian di Provinsi Banten yaitu:

1. **Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian** melalui peningkatan jaringan irigasi, serta sarana dan prasarana pertanian lainnya, (O1 – W1 – T2)
2. **Pengembangan sistem konektivitas dan jalur logistik** untuk distribusi dan perluasan pasar hasil pertanian (O3 – T3 – W3)
3. **Pemanfaatan inovasi dan teknologi sektor pertanian** untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian (O2 – T1 – W4 – W5)
4. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat** dalam pengelolaan hasil pertanian (T4 – S3)
5. **Perlindungan dan optimalisasi lahan pertanian** untuk mencegah meluasnya alih fungsi lahan pertanian (S5 – T5).

6.2.6. Penyusunan Strategi Fokus Kawasan Afirmasi

Sub bab ini menjelaskan tentang analisis setiap fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan analisis PESTLE maupun tingkat meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang disebut dengan analisis 5 FORCES. Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap analisis berikutnya (IFAS, EFAS, dan SWOT). Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan yang digunakan pada masing-

masing fokus perencanaan. Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT dan *grand strategy* sektor industri diuraikan sebagai berikut.

1) Analisis PESTLE (Makro)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *political* (politik), *economic* (ekonomi), *sociological* (sosial), *technological* (teknologi), *legal* (kebijakan), dan *environment* (lingkungan).

Tabel 6.27 Analisis Pestle (Makro) Fokus Kawasan Afirmasi

Masih Lemahnya Dukungan Terhadap Wilayah Selatan Banten sehingga Ketimpangan Pertumbuhan Masih Tinggi			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Target RPJMN 2025-2029 tingkat kemiskinan maksimal 3,42%, sementara tingkat kemiskinan Provinsi Banten 5,84%	Titik berat pembangunan Provinsi Banten masih pada wilayah Utara	19%
ECONOMIC	Kawasan Afirmasi berada diantara Kawasan Pariwisata Labuan - Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Bogor - Sukabumi - Cianjur, dapat menciptakan <i>multiplier effect</i> sektor pariwisata.	Dukungan Pemerintah Daerah masih berfokus pada sektor industri dan jasa perkotaan	25%
SOCIOLOGICAL	Berdekatan dengan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan di Kawasan Jabodetabek dan Jawa Barat, dapat menjadi peluang bagi peningkatan SDM di Provinsi Banten	Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta belum optimalnya peran lembaga pendidikan dan kelembagaan sosial budaya.	13%
TECHNO-LOGICAL	Berdekatan dengan Jakarta sebagai pusat teknologi nasional, sehingga teknologi informasi dapat diakses dengan cepat.	Penyebaran teknologi informasi tidak dapat menyeluruh terutama di Wilayah Selatan Banten yang infrastruktur pendukungnya belum masif.	6%
LEGAL	Arahan RPJMN 2025-2029 tentang percepatan pengentasan kemiskinan pada Kawasan Afirmasi di Banten Selatan	RPJMN bersifat kebijakan 5 tahunan yang dapat berubah setelah periode selesai	31%
ENVIRON-MENT	Kondisi lingkungan di Wilayah Jawa Bagian Selatan pada umumnya masih alami dan pengembangan belum masif, sehingga masih sangat memungkinkan untuk pengembangan berorientasi lingkungan	Percepatan peningkatan kawasan afirmasi dapat berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.	6%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2) Analisis 5 Forces (Meso)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter.

Tabel 6.28 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Kawasan Afirmasi

Masih lemahnya Dukungan Terhadap Wilayah Selatan Banten sehingga Ketimpangan Pertumbuhan Masih Tinggi			
PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Konversi <i>Threat</i> Menjadi <i>Opportunity</i>	50%	Kawasan Afirmasi berada diantara Kawasan Pariwisata Labuan – Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Bogor – Sukabumi – Cianjur, dapat menciptakan <i>multiplier effect</i> sektor pariwisata.	Kawasan pariwisata sekitar lebih cepat berkembang sehingga tidak dapat diimbangi oleh perkembangan kawasan afirmasi
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
Penciptaan Nilai	50%	Secara geografis berdekatan dengan Kawasan Pariwisata Palabuhanratu di Jawa Barat yang sudah cukup berkembang, sehingga dapat mendorong pengembangan kawasan pariwisata Banten Selatan	Minimnya atau keterbatasan terkait dukungan aksesibilitas dan infrastruktur dasar di wilayah afirmasi
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Daya Dukung Eksisting	30%	Keberadaan Jalur Pansela Banten dapat meningkatkan distribusi dan angkutan lalu lintas regional yang dapat berdampak pada sektor ekonomi unggulan	Keberadaan Geopark Halimun – Salak dan Geopark Bayah Dome dapat membatasi pengembangan wilayah di Kawasan Afirmasi
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Tantangan Yang Dihadapi	65%	Terdapat berbagai dukungan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan Utara dan Selatan Provinsi Banten.	Intervensi kebijakan dapat mengancam keunikan sosial budaya dan daya dukung lingkungan.
THREAT OF SUBSTITUTES			
Trend Analisis PESTLE	70%	Arahan RPJMN 2025-2029 tentang percepatan pengentasan kemiskinan pada Kawasan Afirmasi di Banten Selatan	RPJMN bersifat kebijakan 5 tahunan yang dapat berubah setelah periode selesai

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3) Analisis SWOT (EFAS IFAS)

Analisis SWOT sektor infrastruktur dasar kawasan afirmasi di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.29 Analisis SWOT Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Afirmasi

Strength		Weakness	
1	Sektor unggulan perekonomian di kawasan Banten Selatan bervariasi mencakup pariwisata, pertanian, dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan PDRB perkapita dan nilai tambah terhadap komoditas unggulan	1	Kunjungan wisatawan ke Wilayah Banten Selatan masih relatif rendah dibandingkan dengan Kawasan Wisata Pantai Selat Sunda

Strength		Weakness	
2	Keunikan sosial budaya yang dimiliki masyarakat lokal dan keindahan alam dapat menjadi daya tarik sektor pariwisata	2	Persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Banten berada di Kabupaten Pandeglang (9,18%) dan Kabupaten Lebak (8.44%)
3	Proporsi penduduk dengan usia produktif tinggi, yaitu >60%	3	Akses air aman rata-rata 15,15% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Pandeglang) dan 9,94% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Lebak) yang mana masih jauh dari rata-rata target RPJMN. Terdapat 15 desa yang belum terlayani Pamsimas, SPAM, dan PDAM.
4	Terdapat industri semen merah putih sebagai salah satu daya ungkit pengembangan ekonomi di Banten Selatan	4	Persentase sanitasi aman 0,77% (mengacu rata-rata Kabupaten Pandeglang) dan 3,40% (mengacu pada rata-rata Lebak) masih jauh dari rata-rata target RPJMN. Tingkat pelayanan persampahan 7% (mengacu pada Kabupaten Pandeglang) dan 18% (mengacu pada Kabupaten Lebak), dimana 15 desa belum terlayani TPA
5	Kondisi lingkungan umumnya masih alami dan pengembangan belum masif, sehingga masih sangat memungkinkan untuk pengembangan berorientasi lingkungan	5	Aksesibilitas wilayah selatan Banten masih minim dikarenakan hanya terdapat 1 (satu) ruas jalan nasional dan jalan daerah
Opportunity		Threat	
1	Kawasan Afirmasi berada diantara Kawasan Pariwisata Labuan – Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Bogor – Sukabumi – Cianjur, dapat menciptakan <i>multiplier effect</i> sektor pariwisata.	1	Kawasan pariwisata sekitar lebih cepat berkembang sehingga tidak dapat diimbangi oleh perkembangan kawasan afirmasi
2	Secara geografis berdekatan dengan Kawasan Pariwisata Palabuhanratu di Jawa Barat yang sudah cukup berkembang, sehingga dapat mendorong pengembangan kawasan pariwisata Banten Selatan	2	Minimnya atau keterbatasan terkait dukungan aksesibilitas dan infrastruktur dasar di wilayah afirmasi
3	Keberadaan Jalur Pansela Banten dapat meningkatkan distribusi dan angkutan lalu lintas regional yang dapat berdampak pada sektor ekonomi unggulan	3	Keberadaan Geopark Halimun – Salak dan Geopark Bayah Dome dapat membatasi pengembangan wilayah di Kawasan Afirmasi
4	Terdapat berbagai dukungan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan Utara dan Selatan Provinsi Banten.	4	Intervensi kebijakan dapat mengancam keunikan sosial budaya dan daya dukung lingkungan.
5	Arahan RPJMN 2025-2029 tentang percepatan pengentasan kemiskinan pada Kawasan Afirmasi di Banten Selatan	5	RPJMN bersifat kebijakan 5 tahunan yang dapat berubah setelah periode selesai

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Masing-masing komponen dalam SWOT kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor.

Tabel 6.30 Skoring *Strength* dan *Weakness* Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Afirmasi

FAKTOR INTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGTH	1	Sektor unggulan perekonomian di kawasan Banten Selatan bervariasi mencakup pariwisata, pertanian, dan perikanan,	3	0,19	3	0,56

FAKTOR INTERNAL		TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
	2	4	0,25	4	1,00
	3	2	0,13	2	0,25
	4	3	0,19	3	0,56
	5	4	0,25	4	1,00
SUB TOTAL		16	1,00		3,38
WEAKNESS	1	2	0,15	-2	-0,31
	2	3	0,23	-3	-0,69
	3	3	0,23	-3	-0,69
	4	3	0,23	-3	-0,69
	5	2	0,15	-2	-0,31
SUB TOTAL		13	1		-2,69
TOTAL					0,68

Sumber: Hasil Analisis, 2025

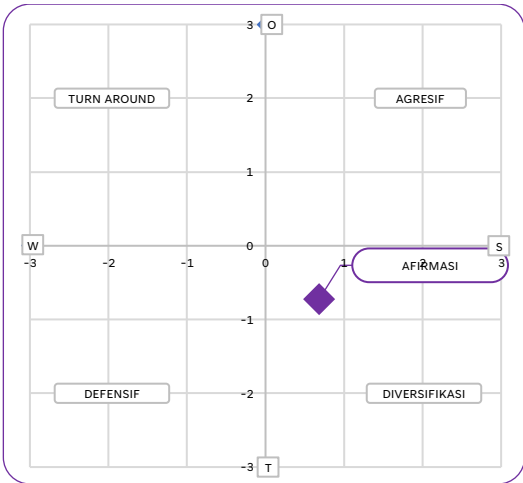
Sedangkan skoring *opportunity* dan *threat* infrastruktur dasar Kawasan Afirmasi di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.31 Skoring *Opportunity* dan *Threat* Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Afirmasi

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITIES	1	Kawasan Afirmasi berada diantara Kawasan Pariwisata Labuan – Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Bogor – Sukabumi – Cianjur, dapat menciptakan <i>multiplier effect</i> sektor pariwisata.	3	0,23	3	0,69
	2	Secara geografis berdekatan dengan Kawasan Pariwisata Palabuhanratu di Jawa Barat yang sudah cukup berkembang, sehingga dapat mendorong pengembangan kawasan pariwisata Banten Selatan	3	0,23	2	0,46
	3	Keberadaan Jalur Pansela Banten dapat meningkatkan distribusi dan angkutan lalu lintas regional yang dapat berdampak pada sektor ekonomi unggulan	3	0,23	3	0,69
	4	Terdapat berbagai dukungan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan Utara dan Selatan Provinsi Banten.	2	0,15	2	0,31
	5	Arahan RPJMN 2025-2029 tentang percepatan pengentasan kemiskinan pada Kawasan Afirmasi di Banten Selatan	2	0,15	2	0,31
		SUB TOTAL	13	1,00		2,46
THREAT	1	Kawasan pariwisata sekitar lebih cepat berkembang sehingga tidak dapat diimbangi oleh perkembangan kawasan afirmasi	3	0,19	-2	-0,38
	2	Minimnya atau keterbatasan terkait dukungan aksesibilitas dan infrastruktur dasar di wilayah afirmasi	3	0,19	-3	-0,56
	3	Keberadaan Geopark Halimun – Salak dan Geopark Bayah Dome dapat membatasi pengembangan wilayah di Kawasan Afirmasi	2	0,13	-2	-0,25
	4	Intervensi kebijakan dapat mengancam keunikan sosial budaya dan daya dukung lingkungan.	4	0,25	-4	-1,00
	5	RPJMN bersifat kebijakan 5 tahunan yang dapat berubah setelah periode selesai	4	0,25	-4	-1,00
		SUB TOTAL	16	1,00		-3,19
TOTAL						-0,73

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus industri berada pada kuadran diversifikasi, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strength*) untuk meminimalisir ancaman (*threat*).



Gambar 6.7 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Afirmasi
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Strategi memperkuat pengembangan sektor infrastruktur dasar Kawasan Afirmasi di Provinsi Banten yaitu:

1. **Peningkatan layanan dasar permukiman** melalui peningkatan infrastruktur air baku, air minum, dan sanitasi (W3 – W4)
2. **Pengembangan sistem konektivitas dan jalur logistik** untuk memperlancar lalu lintas barang dan orang (W5 – O3 – T2)
3. **Peningkatan dukungan terhadap komoditas unggulan** untuk mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi (S1 – O1 – O2 – T1)
4. **Mempertahankan keunikan sosial dan daya dukung lingkungan** untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di wilayah Banten Selatan (S4 - T5)

6.3. Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan)

Skenario perumusan kawasan prioritas meliputi penentuan kawasan prioritas dan tahapan pengembangannya.

6.3.1. Penentuan Kawasan Prioritas

Dalam menentukan kawasan prioritas disusun penilaian kawasan berdasarkan metode *multicriteria analysis* (MCA). Daftar panjang kawasan prioritas yang telah disusun pada bab 2 diberikan bobot berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai untuk mendapatkan daftar kawasan prioritas yang akan ditangani hingga tahun 2034.

1) Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Perkotaan

Parameter penilaian untuk fokus perkotaan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.32 Parameter Penilaian Fokus Perkotaan

Kode	Parameter	Penilaian	
A	Beban perkotaan berdasarkan ukuran kota	Kota besar (> 500.000 jiwa)	1
		Metropolitan (> 1.000.000 jiwa)	2
B	Fungsi pelayanan perkotaan	Pusat Kegiatan Wilayah	1
		Pusat Kegiatan Nasional	2
C	Kontribusi PDRB 2024	PDRB 0-50 triliun rupiah	1
		PDRB >50 triliun rupiah	2
D	Terdapat dalam dokumen perencanaan	Terdapat dalam RPJMN 2025-2029	2

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Penilaian MCA untuk fokus perkotaan adalah sebagai berikut.

Tabel 6.33 Penilaian Kawasan Fokus Perkotaan

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter				Total
			A	B	C	D	
1	PKN Kota Tangerang	Aglomerasi Jakarta	2	2	2	2	8
2	PKN Kota Tangerang Selatan	Aglomerasi Jakarta	2	2	2	2	8
3	PKN Cilegon	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	2	2	2	2	8
4	PKN Serang	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	2	2	2	2	8
5	PKW Pandeglang	Perkotaan Pandeglang	-	1	1	1	3
6	PKW Rangkasbitung	Perkotaan Rangkasbitung	-	1	1	1	3

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil penilaian di atas, serta menghindari duplikasi kawasan prioritas pada RPIW Jabodetabek (PKN Kota Tangerang dan Tangerang Selatan), maka kawasan prioritas untuk fokus perkotaan adalah **Perkotaan Serang** dan **Perkotaan Cilegon**.

2) Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Industri

Parameter penilaian untuk fokus industri adalah sebagai berikut: **Tabel**

6.34 Parameter Penilaian Fokus Industri

Kode	Parameter	Penilaian	
A	Ketersediaan Akses Jalan Tol/ Nasional	Tersedia Kurang dari 10 km	1
B	Kedekatan dengan pelabuhan ekspor impor	Lebih dari 50 km	1
		25-50 km	2
		Kurang dari 25 km	3
C	RIPIN	Termasuk dalam delineasi WPPI	1
D	Proyek Strategis Nasional	Terdapat proyek infrastruktur yang berdampak secara langsung (tersebut)	1
E	Kesiapan Operasional	Siap beroperasi	1
F	Terdapat dalam dokumen perencanaan	Terdapat dalam RPJMN 2025-2029	2

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Setelah ditentukan parameter yang dipakai, selanjutnya adalah pembobotan dengan memberikan nilai sesuai dengan penilaian parameter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.35 Penilaian Kawasan Fokus Industri

No	Kawasan Industri	Kawasan Prioritas	Parameter/ Kebijakan Strategis						Total
			A	B	C	D	E	F	
1	KI Cilegon	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	1	3	1	0	1	2	8
2	KI Wilmar	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	1	2	1	1	1	2	8
3	KI Cikande	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	1	2	1	0	1	2	8
4	KI Pancapuri	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	1	1	1	0	0	2	5
5	KI Nikomas Gemilang	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	1	1	1	0	0	2	5
6	KI Taman Tekno BSD	Kawasan Industri Tangerang	0	1	1	0	0	0	2
7	KI Sumber Rezeki	Kawasan Industri Tangerang	0	1	1	0	0	0	2
8	KI Griya Idola Park	Kawasan Industri Tangerang	1	1	1	0	0	0	3
9	KI Purat Kencana Alam	Kawasan Industri Tangerang	0	1	1	0	0	0	2
10	KI Cikupamas	Kawasan Industri Tangerang	1	1	1	0	0	0	3
11	KI Pasar Kemis	Kawasan Industri Tangerang	1	1	1	0	0	0	3
12	KI Sumber Bina Sukses	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	0	1	1	0	0	2	4
13	Millenium Industrial Estate	Kawasan Industri Tangerang	1	1	1	0	0	0	3

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil penilaian di atas, kawasan prioritas untuk fokus industri adalah **Kawasan Industri Cilegon**, **Kawasan Industri Cikande**, dan **Kawasan Industri Wilmar** di Kawasan Industri Cilegon - Serang. Sedangkan untuk Kawasan industri di Kab. Tangerang tidak termasuk Lokasi prioritas karena masuk ke dalam RPIW Jabodetabek.

3) Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Pariwisata

Parameter penilaian untuk fokus pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 6.34 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata

Kode	Parameter	Penilaian	
A	Akses Jalan Nasional	>10 km	1
		5-10 km	2
		<5 km	3
B	Kedekatan dengan hub (bandara, pelabuhan)	>25 km	1
		10-25 km	2
		<10 km	3
C	Termasuk delineasi KEK	Termasuk	1
D	Tercantum dalam RIPPARNAS	Tercantum	1
E	Kunjungan wisatawan	Kurang dari 500rb/tahun	1
		500rb-1 juta/ tahun	2
		Lebih dari 1 juta/tahun	3
F	Keunikan atraksi	Ada	1
G	Terdapat dalam dokumen RPJMN	Ada	2

Setelah ditentukan parameter yang dipakai, selanjutnya adalah pembobotan dengan memberikan nilai sesuai dengan penilaian parameter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.35 Penilaian Kawasan Fokus Pariwisata

No	Kawasan	Kawasan Prioritas	Parameter							Total
			A	B	C	D	E	F	G	
1	KEK Tanjung Lesung	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	2	1	1	1	1	0	2	8
2	KSPN Krakatau	-	1	1	0	1	1	0	0	4
3	KPPN Carita dsk	Serang – Panimbang	1	1	0	1	2	0	0	5
4	KPPN Serang - Banten Lama	Serang – Panimbang	2	1	0	1	2	0	0	6
5	Kawasan Labuan	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	1	1	0	1	1	1	2	7

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil penilaian di atas, kawasan prioritas untuk fokus pariwisata adalah **KEK Tanjung Lesung dan Kawasan Labuan**.

4) Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Pertanian

Parameter penilaian untuk fokus pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 6.36 Parameter Penilaian Fokus Pertanian

Kode	Parameter	Penilaian	
A	Produksi padi	Produksi padi >300.000 ton/tahun	1
B	RPJMN	Masuk dalam kawasan prioritas	1
C	Luasan panen	Luas panen >70.000 ha	1
D	Produktivitas	Produktivitas lahan >50	1
E	Daerah Irigasi Teknis	Luas daerah irigasi >40.000 ha	1

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Penilaian MCA untuk fokus pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 6.37 Penilaian Kawasan Fokus Pertanian

No	Longlist Kawasan Prioritas	Parameter				E	Total
		A	B	C	D		
1	Pandeglang	1	1	1	1	1	5
2	Serang	1	1	1	1	1	5
3	Lebak	1	1	1	1	1	5
4	Tangerang	0	1	0	1	0	2

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil penilaian di atas serta menghindari duplikasi data dan analisis pada lokasi yang sama dengan fokus industri, maka **kawasan prioritas untuk fokus pertanian berada di Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak.**

5) Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Afirmasi

Parameter penilaian untuk fokus kawasan afirmasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.38 Penilaian Kawasan Fokus Afirmasi

No	Kabupaten	Kawasan Prioritas	Parameter				Total
			A	B	C	D	
1	Kabupaten Pandeglang	Kecamatan Cikeusik	3	3	1	1	8
2	Kabupaten Lebak	Kecamatan Bayah, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cihara, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cileles, dan Kecamatan Leuwidamar	3	3	1	2	9

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Merujuk pada RPJMN 2025-2029, terdapat highlight intervensi pada Kawasan Afirmasi, seperti pada tabel berikut:

Tabel 6.39 Fokus Intervensi Kawasan Afirmasi Kab. Lebak

Kecamatan	Intervensi Berdasarkan RPJMN
Malingping	Pembangunan rumah murah bersanitasi baik
Sawarna Kec. Bayah	Peningkatan 6A pariwisata, pembangunan jalan
Kec. Panggarangan, Kec. Cihara, Kec. Wanasalam	Pembangunan/peningkatan jalan akses pantai selatan
Kec. Cikulur, Kec. Cileles, Kec. Cimarga	Pembangunan/peningkatan jalan akses dari Tol Serang Panimbang menuju pantai selatan dan Baduy
Baduy Luar di Kec. Bojongmanik dan Kec. Leuwidamar	Peningkatan 6A pariwisata, pembangunan jalan akses dari Tol Serang Panimbang menuju Baduy

Sumber: RPJMN dan Hasil Analisis, 2025

Dari hasil penilaian di atas serta menghindari duplikasi data dan analisis pada lokus yang sama dengan fokus pariwisata, maka kawasan prioritas untuk fokus kawasan afirmasi pada tahap I berada di Kecamatan Bayah, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cihara, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cikurur, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cileles, dan Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Tahap II akan dilanjutkan pada Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang.

6.3.2. Daftar Kawasan Prioritas di Banten

Berdasarkan hasil *multicriteria analysis* yang telah dilakukan, terdapat 5 kawasan prioritas di Banten antara lain dengan fokus perkotaan, industri, pariwisata, pertanian, dan afirmasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.40 Daftar Kawasan Prioritas di Banten

No	Kawasan Prioritas	Fokus
1	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	Perkotaan
2	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	Industri
3	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Pariwisata
4	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten (Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang)	Pertanian
5	Banten Selatan (pesisir selatan Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang) (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)	Afirmasi

Sumber: Hasil Analisis, 2025

PKN Serang – PKN Cilegon merupakan pusat ekonomi di Provinsi Banten dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, serta pusat pemerintahan. KEK Tanjung Lesung dan KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung ditetapkan menjadi kawasan pariwisata prioritas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 yang memiliki daya tarik wisatawan cukup tinggi. Selain itu, Banten juga memiliki komoditas unggulan pertanian di wilayah tengah-selatan yang berpotensi dikembangkan seiring dengan adanya kebijakan pemerataan utara – selatan, pengembangan koridor Serang – Panimbang, dan pengembangan koridor Pansela.

6.3.3. Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas

Pengembangan kawasan prioritas dibagi ke dalam dua tahapan. Tahap pertama tahun 2025-2034 untuk kawasan prioritas terpilih sesuai dengan hasil *multicriteria analysis*. Sedangkan bagi kawasan prioritas lainnya pengembangan dilakukan setelah tahun 2034. Untuk penjelasan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

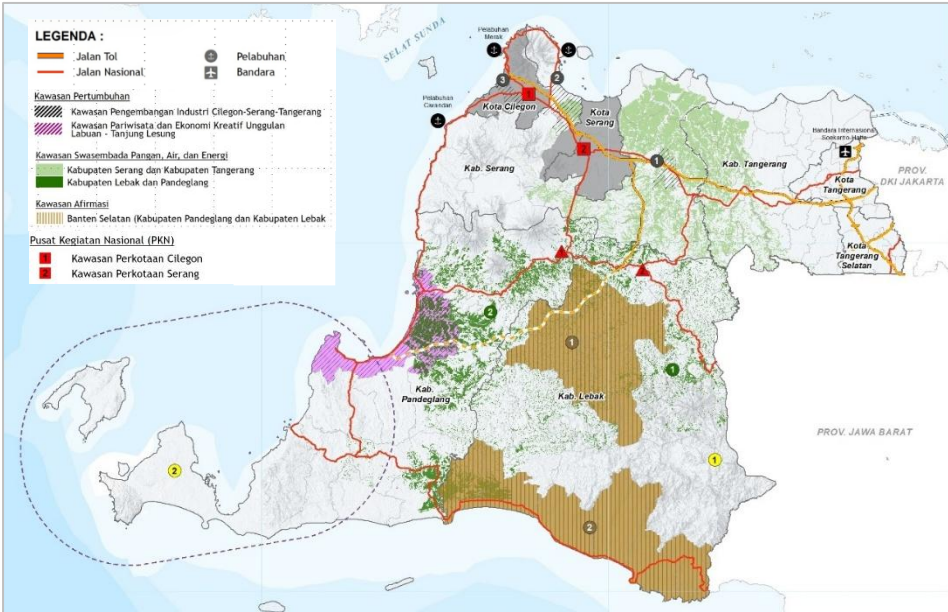
Tabel 6.41 Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas di Banten

No	Lokasi Spesifik	Kecamatan Prioritas	Tahap I	Tahap II
			2025-2029	2030-2034
Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang				
1	PKN Serang	Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Kasemen, dan Kecamatan Walantaka		
2	PKN Cilegon	Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Jombang, Kecamatan Purwakarta, dan Kecamatan Cilegon		
Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang				
1	KI Cilegon	Kecamatan Citangkil		
2	KI Wilmar	Kecamatan Kramatwatu		
3	KI Cikande	Kecamatan Kibin		
Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung				
1	KEK Tanjung Lesung	Kecamatan Panimbang		
2	Kawasan Labuan	Kecamatan Labuan		
3	KSPN Krakatau dsk	Kecamatan Anyer, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Pulo Ampel, dan Kecamatan Bojonegara		
4	KPPN Carita dsk	Kecamatan Carita, Kecamatan Labuan, Kecamatan Jiput, Kecamatan Cisata, Kecamatan Patia, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Pagelaran		
5	KPPN Serang - Banten Lama dsk	Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang		
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten (Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang)				
1	Serang	Anyer, Bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunung Sari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu, Lebak Wangi, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, Tataran, Tirtayasa, Tunjung Teja, Waringinkurung		
2	Lebak	Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cikulur, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Curugbitung, Gunungkencana, Karanganyar, Lebakgedong, Leuwidamar, Maja, Malingping, Muncang, Panggarangan, Rangkasbitung, Sajira, Sobang, Wanasalam, Warunggunung		
3	Pandeglang	Angsana, Banjar, Bojong, Cadasari, Carita, Cibaliung, Cibitung, Cigeulis, Cikedal, Cikeusik, Cimanggu, Cimanuk, Cipeucang, Cisata, Jiput, Kaduhejo, Karang Tanjung, Koroncong, Labuan, Majasari, Mandalawangi, Mekarjaya, Menes, Munjul, Pagelaran, Pandeglang, Panimbang, Patia, Picung, Pulosari, Saketi, Sindangresmi, Sobang, Sukaresmi, Sumur		

No	Lokasi Spesifik	Kecamatan Prioritas	Tahap I	Tahap II
			2025-2029	2030-2034
Banten Selatan (pesisir selatan Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang) (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)				
1	Kabupaten Pandeglang	Kecamatan Cikeusik		
2	Kabupaten Lebak	Kecamatan Bayah, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cihara, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cileles, dan Kecamatan Leuwidamar		

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kawasan prioritas yang akan dikembangkan pada tahap 1 adalah Kawasan Perkotaan (Serang – Cilegon), Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang (KI Cilegon, KI Wilmar, dan KI Cikande), Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung (KEK Tanjung Lesung, KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung, KPPN Serang - Banten Lama dsk), Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten (Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang), serta Kawasan Banten Selatan di Kabupaten Lebak. Kawasan-kawasan prioritas tersebut selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan skenario pengembangan wilayah yang tepat. Skenario pengembangan wilayah Provinsi Banten secara spasial dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.8 Skenario Pengembangan Wilayah Provinsi Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari skenario di atas, kawasan prioritas masing-masing lokus utama dipetakan untuk melihat posisinya secara spasial. Lokus Kawasan

Perkotaan berada di Kota Cilegon dan Kota Serang sebagai Pusat Pelayanan di Provinsi Banten. Lokus industri, kawasan prioritas utama adalah KI Cilegon, KI Wilmar, dan KI Cikande. Untuk lokus pariwisata adalah KEK Tanjung Lesung, KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung, KPPN Serang - Banten Lama, dan KPPN Baduy. Sedangkan lokus afirmasi terdiri dari 5 kecamatan di Bagian Selatan Kabupaten Lebak, dan 5 kecamatan di Bagian Tengah Kabupaten Lebak. Sedangkan Kawasan Pertanian berada pada daerah dengan sawah terluas di Provinsi Banten, yaitu di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Keseluruhan kawasan tersebut dihubungkan oleh konektivitas jalan tol, jalan nasional, dan jalan daerah untuk selanjutnya dihubungkan menuju hub-hub utama seperti pelabuhan dan bandara.

BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

Analisis kebutuhan infrastruktur berisi sandingan antara kinerja infrastruktur eksisting terhadap kebutuhan infrastruktur, yang meliputi analisis ketersediaan, analisis kebutuhan, sandingan ketersediaan dan kebutuhan untuk menghasilkan gap/kesenjangan, serta identifikasi penyebab kesenjangan. Analisis ini akan dilakukan pada setiap kawasan prioritas di Provinsi Banten.

Provinsi Banten memiliki 5 kawasan prioritas yang terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertanian, dan kawasan afirmasi. Kawasan perkotaan berada di utara Banten yaitu PKN Serang dan PKN Cilegon, dan PKN Tangerang. Sedangkan kawasan industri umumnya lokasinya tersebar di perkotaan tersebut yaitu KI Wilmar, KI Cikande, dan KI Cilegon. Sementara kawasan pariwisata umumnya tersebar di selatan sebelah barat dan timur. Untuk kawasan pertanian lokasinya juga tersebar, yang terbanyak berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Sedangkan kawasan afirmasi berada di selatan Provinsi Banten.

7.1. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, pengembangan kawasan prioritas akan difokuskan pada industri, pariwisata, dan penanganan kawasan tertinggal di wilayah selatan Banten. Pada masing-masing fokus akan dilakukan analisis kebutuhan infrastruktur untuk dibandingkan dengan ketersediaan infrastruktur eksisting sehingga dihasilkan analisis kesenjangan.

7.1.1. Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi Banten

Analisis standar pelayanan minimum terdiri dari analisis kebutuhan infrastruktur SDA, jalan jembatan, permukiman, dan perumahan.

1) Analisis Kebutuhan Infrastruktur SDA Provinsi Banten

Total kapasitas tampung di Provinsi Banten hingga tahun 2034 sebesar 335.404.625 m³ yang terdiri dari bendungan sebesar 328.192.000 m³ dan embung sebesar 7.365.470 m³. Pada tahun 2034, jumlah penduduk Provinsi Banten diproyeksikan sebanyak 12.407.278 jiwa sehingga kapasitas tampung Provinsi Banten adalah sebesar 27,03 m³/kapita/tahun. Angka tersebut masih berada di bawah target capaian tahun 2034 sebesar 115 m³/kapita/tahun. Saat ini terdapat 4 bendungan eksisting, 1 embung eksisting, dan 3 bendungan rencana. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Bendungan Eksisting dan Kontruksi

No.	Bendungan	Kab/Kota	Tahun Selesai	Volume (m3)	Gap 2022-2029	Gap 2022-2034
Bendungan Eksisting					-28,24 m3/capita/tahun	-76,38 m3/capita/tahun
1.	Karian	Kabupaten Lebak	2023	314.700.000		
2.	Sindangheula	Kabupaten Serang	2021	9.300.000		
3.	Gintung	Kota Tangerang Selatan	1932	720.000		
4.	Krenceng	Kota Cilegon	1977	3.472.000		
Total Bendungan Eksisting				328.192.000		
Embung Eksisting						
1.	Embung			7.365.470		
Total Tampunguan Eksisting (Bendungan + Embung)				335.404.625		
Bendungan Rencana						
1.	Pasir Kopo	Kab. Serang		166.210.000		
2.	Cidanau	Kab. Lebak		25.010.000		
3.	Cilawang	Kab. Lebak		24.070.000		
Total Tampunguan Rencana				215.294.000		
Total Tampunguan Eksisting dan Rencana				550.851.470		

Sumber: Kementerian PUPR, 2023

Dengan selesai dibangunnya waduk/bendungan baru, kapasitas tampung di Banten pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 550.851.470 m³/kapita/tahun dan pada tahun 2034 diasumsikan tidak terjadi penurunan volume tampungan akibat sedimentasi sehingga volume tampungan tetap 550.851.470 m³ atau 38,62 m³/kapita/tahun. Untuk mencapai target 115 m³/kapita/tahun pada tahun 2034, diperlukan pembangunan tampungan air baku lagi dengan kapasitas total sebesar 1.046.551.972 m³.

Dari segi pengendalian daya rusak air, daerah rawan tsunami tinggi yang berada di kawasan permukiman terukur sepanjang 11,2 km. Sebagian besar dari daerah tersebut berada di Kawasan Selat Sunda yang berbatasan langsung dengan Gunung Anak Krakatau dan lempeng Indo-Australia. Namun infrastruktur pelindung pantai atau sejenisnya baru terbangun 2 km.

2) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Banten

Pengukuran konektivitas jalan diukur melalui waktu tempuh. Waktu tempuh adalah waktu yang diperlukan (dalam jam) untuk menempuh perjalanan sepanjang 100 km. Waktu tempuh terbagi dalam dua kategori yaitu waktu tempuh lintas utama dan waktu tempuh perkotaan. Waktu tempuh lintas utama diukur pada koridor jalan yang telah ditentukan dalam dokumen Renstra Ditjen Bina Marga, dimana terdapat 1 koridor jalan utama di Provinsi Banten. Koridor dan waktu tempuh tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.2 Waktu Tempuh Lintas Utama Banten

No.	Ruas Lintas Utama	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (jam/100km)
1.	Jakarta-Merak	99,2	87,5	1,47

Sumber: Google Maps, diolah 2023

Target waktu tempuh lintas utama pada tahun 2025 adalah sebesar 2,2 dan meningkat menjadi 1,6 pada 2034. Dari hasil pengukuran, ruas Jakarta-Merak telah mencapai target waktu tempuh pada tahun 2025 dan 2034.

Waktu tempuh perkotaan dihitung pada ruas-ruas jalan perkotaan pada masing-masing kabupaten/kota di Banten. Waktu tempuh ruas jalan nasional di dalam perkotaan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 7.3 Waktu Tempuh Perkotaan Banten

No.	Ruas Jalan Nasional	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (Jam/100 km)
1.	Jalan Sudirman (Serang)	1,85	5,5	4,95
2.	Raya Cilegon (Serang)	4,45	12	4,49
3.	Raya Cilegon (Cilegon)	1,4	4	4,76
4.	Raya Merak (Cilegon)	2,5	8	5,33
5.	Raya Cikande (Jalan Otto Iskandardinata)	0,82	2,5	5,05
6.	Merak – BTS. Kota Cilegon	6,75	16,5	4,07
7.	Raya Pandeglang (Serang)	0,84	2,5	5,05
8.	BTS. Kota Serang – BTS. Kota Pandeglang	20,95	37,5	2,98
9.	TB. Suwandi (Serang)	2,9	15	8,62
10.	Raya Cipanas (Rangkasbitung)	3,8	12	5,26
11.	Abdul Hadi (Serang)	1,2	8,5	11,81
12.	KH. Abdul Fatah Hasan (Serang)	1,55	8,5	9,14
13.	Otista (Tangerang)	1,15	5,5	7,97
14.	KS. Tubun (Tangerang)	1,5	5,5	6,11
15.	Raya Serang (Cilegon)	3,85	14	6,06
16.	Rambutan (Ciputat)	0,8	3,5	7,29
17.	Otista (Ciputat)	0,76	4	8,83
18.	By Pass Rangkasbitung (Jalan Soekarno Hatta)	3,95	13	5,49
19.	Raya Serang (Pandeglang)	1,4	4	4,76
20.	Letnan Jidun (Serang)	0,9	4	7,41
21.	Daan Mogot (Tangerang – BTS. DKI)	8,25	29,5	5,96
22.	Raya Serang (Tangerang)	8,95	42,5	7,91

Sumber: Google Maps, diolah 2025

Target waktu tempuh di perkotaan pada tahun 2025 adalah sebesar 3,3 jam/100 km dan meningkat menjadi 2,5 jam/100 km pada 2034. Ruas yang terpilih adalah ruas pada kabupaten/kota yang memiliki tingkat pelayanan jalan tinggi terutama pada kawasan perkotaan/pusat kota.

Dari data di atas, ruas jalan perkotaan di Provinsi Banten memiliki waktu tempuh yang cenderung lama yang disebabkan karena arus yang bertumpuk antara arus lokal dan industri khususnya di wilayah utara Banten.

3) Analisis Kebutuhan infrastruktur Permukiman Provinsi Banten

Kebutuhan infrastruktur untuk menunjang kegiatan di kawasan permukiman dibutuhkan diantaranya adalah akses air minum perpipaan, akses sanitasi aman, akses pengolahan sampah, dan penataan kawasan kumuh.

A. Air Minum

Air minum yang digunakan dalam perhitungan yaitu akses air minum perpipaan. Presentase akses air minum perpipaan di Provinsi Banten pada tahun 2022 sebesar 12,07%, sementara target presentase akses air minum perpipaan dalam draft teknokratik RPJP 2045 pada tahun 2034 sebesar 75%, sehingga gap presentase air minum perpipaan pada tahun 2022 sebesar 62,93%. Untuk mencapai target air minum perpipaan 75% pada tahun 2034, dilakukan proyeksi peningkatan kebutuhan setiap tahunnya hingga mencapai target.

Dari segi ketersediaan, pada tahun 2022 ketersediaan air minum perpipaan yang dikelola PDAM di Banten sebesar 8.798 liter/detik, sedangkan kebutuhan air minum perpipaan sebesar 6.849,57 liter/detik sehingga pada tahun 2022 ketersediaan air masih mencukupi kebutuhan. Namun seiring pertambahan penduduk dan aktivitas industri, diproyeksikan kebutuhan air semakin naik dari tahun ke tahun. Proyeksi kebutuhan air menggunakan asumsi kebutuhan air untuk penggunaan domestik sebesar 120 liter/orang/hari untuk kota sedang dan 100 liter/orang/hari untuk kota kecil (berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU (1996)). Skala kota ditentukan dari jumlah penduduk. Untuk Provinsi Banten, wilayah yang termasuk kota sedang adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan, sedangkan Kota Cilegon dikategorikan sebagai kota kecil.

Selain kebutuhan domestik, perhitungan juga mempertimbangkan kebutuhan air non domestik sebesar 30% dari air domestik (berdasarkan Permen PUPR 18/2007) dan kehilangan air (berdasarkan kinerja PDAM). Kebutuhan air kemudian disesuaikan dengan presentase target pelayanan air minum per tahun yang telah diproyeksikan sebelumnya. Hasil yang didapat lalu selanjutnya dikurangi dengan ketersediaan air minum eksisting sehingga didapatkan gap kebutuhan air minum *bussiness as usual* tanpa adanya intervensi penanganan. Proyeksi air

minum per kabupaten/kota di Provinsi Banten secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.4 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Perkotaan di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Baseline	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (lt/detik)		
			2025	2029	2034
1.	Kabupaten Pandeglang	120	2.841	2.962	3.121
2.	Kabupaten Lebak	120	3.153	3.339	3.797
3.	Kabupaten Tangerang	120	7.388	7.847	8.028
4.	Kabupaten Serang	120	3.697	3.923	4.270
5.	Kota Tangerang	120	4.152	4.268	4.626
6.	Kota Cilegon	100	827	878	1.167
7.	Kota Serang	120	1.602	1.722	1.905
8.	Kota Tangerang Selatan	120	2.977	3.078	3.174
TOTAL			26.635	28.106	30.087

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Secara keseluruhan kebutuhan air bersih perkotaan di Provinsi Banten hingga tahun 2034 sebesar 30.087 liter/detik. Jumlah kebutuhan air terbesar berada di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang masing-masing sebesar 8.028 liter/detik dan 4.626 liter/detik. Sementara itu kebutuhan air bersih perkotaan terendah berada di Kota Cilegon dan Kota Serang masing-masing sebesar 1.167 liter/detik dan 1.905 liter/detik.

Tabel 7.5 Proyeksi Penyediaan Air Bersih Perkotaan di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/ Kota	Layanan						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022-2029	2022-2034
		l/det	%	l/det	%	l/det	%	l/det	l/det
1.	Kabupaten Pandeglang	344	12,51	1,450	49	2.340	75	-1,106	-1.996
2.	Kabupaten Lebak	300	9,94	1,693	48	2.848	75	-1,375	-2.530
3.	Kabupaten Tangerang	3.679	52,11	4,874	65	6.021	75	-1,383	-2.530
4.	Kabupaten Serang	456	12,90	1,948	49	3.202	75	-1,487	-2.741
5.	Kota Tangerang	594	14,62	2,227	50	3.470	75	-1,605	-2.847
6.	Kota Cilegon	163	20,64	472	52	875	75	-305	-707
7.	Kota Serang	196	12,90	855	49	1.429	75	-657	-1.231
8.	Kota Tangerang Selatan	3	0,10	1,333	44	2.380	75	-1,330	-2.378

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Target layanan air minum perpipaan pada tahun 2025 sebesar 39% dan pada tahun 2034 naik menjadi 75%. Sementara itu, secara keseluruhan tingkat layanan air minum perpipaan eksisting di Provinsi Banten masih

sebesar 12,07%, jauh dari target layanan tahun 2034. Pembangunan beberapa SPAM diarahkan pada masing-masing kabupaten yang masih memiliki layanan air minum perpipaan di bawah target.

B. Air Limbah

Sanitasi yang digunakan dalam perhitungan yaitu akses sanitasi aman. Presentase akses sanitasi aman di Provinsi Banten pada tahun 2022 sebesar 10,73%, sementara target presentase akses sanitasi aman dalam draft teknokratik RPJP 2045 sebesar 55%, sehingga gap presentase sanitasi aman pada tahun 2022 sebesar 44,27%. Untuk mencapai target air sanitasi aman 55% pada tahun 2034, dilakukan proyeksi peningkatan kebutuhan setiap tahunnya hingga mencapai target.

Dari segi infrastruktur sanitasi eksisting, pada tahun 2022 kapasitas IPAL di Banten sebesar 1.191,79 liter/detik, sedangkan timbulan air limbah sebesar 13.529,93 liter/detik sehingga gap penanganan air limbah sebesar 12.338,14 liter/detik. Seiring pertambahan penduduk dan aktivitas industri, diproyeksikan timbulan air limbah semakin naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan Buku A Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T Kementerian PUPR (2018), persentase timbulan air limbah domestik adalah 60-80% dari pemakaian air minum. Dalam dokumen ini, digunakan angka 80% dalam perhitungan.

Timbulan air limbah kemudian disesuaikan dengan presentase target pelayanan sanitasi aman per tahun yang telah diproyeksikan sebelumnya, lalu selanjutnya dikurangi dengan kapasitas IPAL eksisting sehingga didapatkan gap timbulan air limbah business as usual tanpa adanya intervensi penanganan. Proyeksi timbulan air limbah per kabupaten/kota di Provinsi Banten secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.6 Proyeksi Timbulan Air Limbah di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Baseline	Proyeksi Timbulan Air Limbah (lt/detik)		
			2025	2029	2034
1.	Kabupaten Pandeglang	80%	1.499	1.562	1.646
2.	Kabupaten Lebak		1.663	1.761	1.892
3.	Kabupaten Tangerang		3.897	4.139	4.463
4.	Kabupaten Serang		1.950	2.069	2.229
5.	Kota Tangerang		2.190	2.252	2.331
6.	Kota Cilegon		436	463	599
7.	Kota Serang		845	908	994
8.	Kota Tangerang Selatan		1.570	1.624	1.693
TOTAL			14.051	14.779	15.847

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Secara keseluruhan timbulan air limbah di Provinsi Banten hingga tahun 2034 sebesar 15.847 liter/detik. Jumlah timbulan air limbah terbesar berada di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang masing-masing sebesar 4.463 liter/detik dan 2.331 liter/detik. Sementara itu kebutuhan

air bersih perkotaan terendah berada di Kota Cilegon dan Kota Serang masing-masing sebesar 599 liter/detik dan 994 liter/detik.

Target layanan sanitasi aman pada tahun 2029 sebesar 30% dan meningkat pada tahun 2034 menjadi 55%. Sementara itu, secara keseluruhan tingkat layanan sanitasi aman di Provinsi Banten sebesar 10,73%. Beberapa wilayah yang sudah melampaui target tahun 2025 layanan cenderung berada di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang (14,40%), Kota Serang (19,79%) dan Kota Tangerang Selatan (21,75%). Untuk wilayah lainnya masih berada di bawah target layanan yaitu Kabupaten Pandeglang (0,77%), Kabupaten Lebak (3,40%), dan Kabupaten Tangerang (4,36%) sebagai wilayah dengan tingkat layanan terendah. Pembangunan beberapa fasilitas pengolahan limbah cair diarahkan pada masing-masing kabupaten yang masih memiliki layanan sanitasi aman di bawah target (15%).

Tabel 7.7 Proyeksi Penyediaan Air Limbah di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Layanan						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022- 2029	2022- 2034
		l/det	%	l/det	%	l/det	%	l/det	l/det
1.	Kabupaten Pandeglang	11	0,77	506	32	905	55	-483	-882
2.	Kabupaten Lebak	54	3,40	590	34	1.041	55	-475	-926
3.	Kabupaten Tangerang	162	4,36	1,403	34	2.455	55	-1,058	-2.109
4.	Kabupaten Serang	363	10,32	753	36	1.226	55	-344	-816
5.	Kota Tangerang	309	14,40	857	38	1.282	55	-222	-647
6.	Kota Cilegon	82	11,06	170	37	330	55	-72	-231
7.	Kota Serang	158	19,79	366	40	547	55	-25	-205
8.	Kota Tangerang Selatan	333	21,75	668	41	931	55	21	-242

Sumber: Hasil Analisis, 2025

C. Persampahan

Kategori persampahan yang digunakan dalam perhitungan yaitu pengelolaan persampahan dan daur ulang. Presentase pengelolaan persampahan di Provinsi Banten pada tahun 2022 sebesar 55% dan daur ulang sebesar 4,64%, sementara dalam draft teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2045, target presentase pengelolaan persampahan pada tahun 2034 sebesar 60% dan target daur ulang sebesar 25%. Sehingga, dalam skala provinsi terdapat gap pengelolaan persampahan sebesar 5%, serta masih terdapat gap pada skala kabupaten/kota dengan nilai yang bervariasi. Untuk mencapai target pengelolaan persampahan 60% dan daur ulang 25%, dilakukan proyeksi peningkatan kebutuhan setiap tahunnya hingga mencapai target pada tahun 2034.

Timbulan sampah kemudian disesuaikan dengan presentase target pengelolaan sampah dan daur ulang per tahun yang telah diproyeksikan

sebelumnya. Hasil yang didapat lalu selanjutnya dikurangi dengan kapasitas TPA eksisting sehingga didapatkan gap timbunan persampahan *bussiness as usual* tanpa adanya intervensi penanganan. Proyeksi timbunan persampahan per kabupaten/kota secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.8 Proyeksi Timbunan Persampahan

No	Kabupaten/Kota	Baseline (%)	Proyeksi Timbunan Sampah (ton/hari)		
			2025	2029	2034
1.	Kabupaten Pandeglang	0,40	539	562	593
2.	Kabupaten Lebak	0,40	599	634	681
3.	Kabupaten Tangerang	0,43	1.508	1.602	1.727
4.	Kabupaten Serang	0,77	1.352	1.434	1.544
5.	Kota Tangerang	0,59	1.163	1.196	1.238
6.	Kota Cilegon	0,76	358	380	410
7.	Kota Serang	0,85	646	695	761
8.	Kota Tangerang Selatan	0,63	890	921	960
TOTAL		54,6%	7.056	7.424	7.913

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Target layanan sanitasi aman pada tahun 2029 sebesar 30% dan meningkat pada tahun 2034 menjadi 55%. Sementara itu, secara keseluruhan tingkat layanan sanitasi aman di Provinsi Banten sebesar 10,73%. Beberapa wilayah yang sudah melampaui target tahun 2025 layanan cenderung berada di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang (14,40%), Kota Serang (19,79%) dan Kota Tangerang Selatan (21,75%). Untuk wilayah lainnya masih berada di bawah target layanan yaitu Kabupaten Pandeglang (0,77%), Kabupaten Lebak (3,40%), dan Kabupaten Tangerang (4,36%) sebagai wilayah dengan tingkat layanan terendah. Pembangunan beberapa fasilitas pengolahan limbah cair diarahkan pada masing-masing kabupaten yang masih memiliki layanan sanitasi aman di bawah target (15%).

Secara keseluruhan timbunan sampah di Provinsi Banten hingga tahun 2034 sebesar 7.913 ton/hari. Timbunan sampah terbesar berada di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang masing-masing sebesar 1.602 ton/hari dan 1.434 ton/hari. Sementara itu timbunan terendah berada di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masing-masing sebesar 562 ton/hari dan 634 ton/hari.

Tabel 7.9 Proyeksi Timbunan Sampah di Provinsi Banten

No	Kabupaten/Kota	Layanan						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022-2029	2022-2034
		ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	ton/hari
1.	Kabupaten Pandeglang	32	6,15	211	37,56	356	60,00	-179	-323
2.	Kabupaten Lebak	132	23,04	283	44,60	409	60,00	-151	-277

No	Kabupaten/Kota	Layanan						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022-2029	2022-2034
		ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	ton/hari
3.	Kabupaten Tangerang	874	60,66	1,014	63.31	1,048	60.66	-140	-173
4.	Kabupaten Serang	96	7,45	1,011	70.48	927	60.00	-914	-830
5.	Kota Tangerang	1.138	99,94	1,527	127.68	1,238	100.00	-388	-99
6.	Kota Cilegon	285	83,25	553	145.52	410	100.00	-268	-125
7.	Kota Serang	348	56,76	1,026	147.61	761	100.00	-678	-413
8.	Kota Tangerang Selatan	864	99,52	1,228	133.34	960	100.00	-363	-96

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tingkat layanan pengelolaan sampah di Provinsi Banten sebesar 54,60% sampah terkelola, sudah melampaui target sampah terkelola tahun 2029 sebesar 40%. Kawasan perkotaan sudah memiliki tingkat layanan pengelolaan sampah yang tinggi (lebih dari 80%). Namun masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki tingkat pengelolaan sampah rendah diantaranya Kabupaten Pandeglang (6,15%), Kabupaten Serang (7,45%), dan Kabupaten Lebak (23,04%). Sementara itu, tingkat daur ulang sampah di Provinsi Banten masih tergolong rendah dengan rata-rata 4,64% dari total timbunan sampah terangkut (target tahun 2034 sebesar 25%). Perlu direncanakan beberapa TPST terutama pada permukiman di kabupaten yang tertinggal dan kawasan wisata untuk dapat mengatasi permasalahan pengolahan sampah di Provinsi Banten.

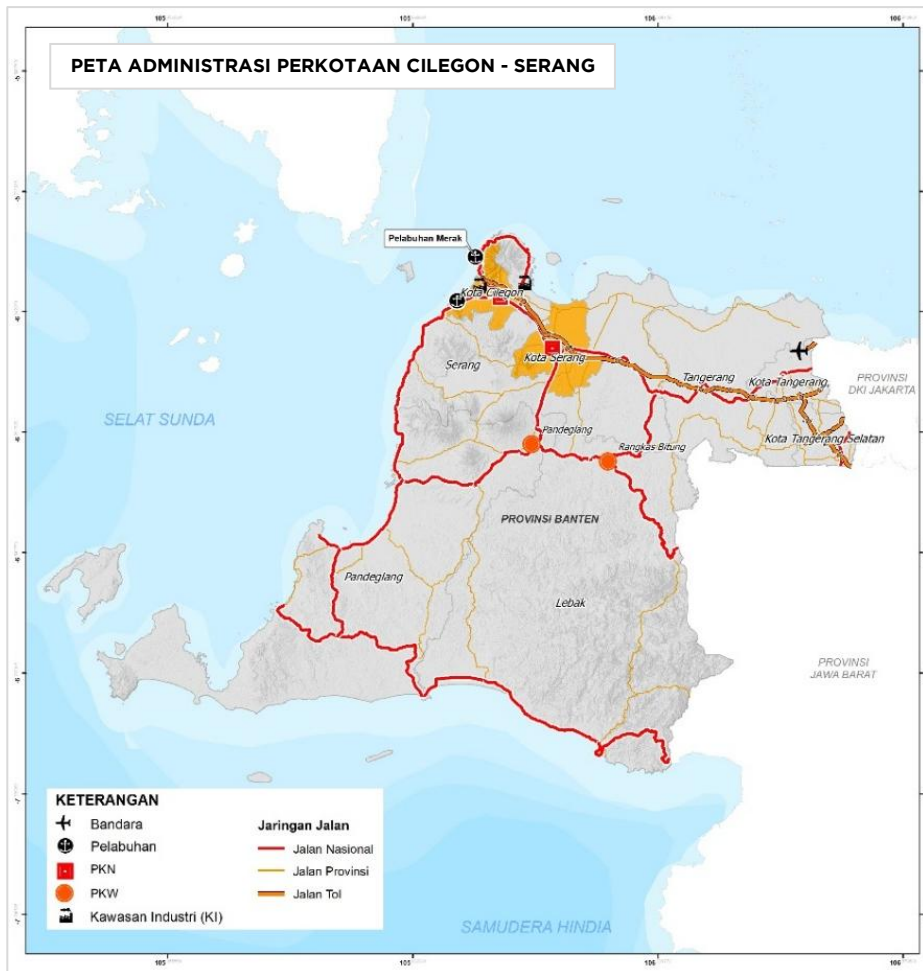
7.1.2. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Perkotaan

Analisis kebutuhan kawasan perkotaan mencakup Kota Cilegon, Kota Serang, dan keberadaan pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Ciwandan dan pelabuhan kelas I yaitu Pelabuhan Merak yang penagannya diprioritaskan hingga tahun 2034.

A. Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang

Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang merupakan kawasan perkotaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025 - 2029 menjadi dua Pusat Kegiatan Nasional di Banten. Kota Serang dan Kota Cilegon terletak di Wilayah Utara Banten dengan luas wilayah masing-masing 265,79 km² dan 162,51 m². Secara demografi penduduk, jumlah penduduk Kota Cilegon - Serang mayoritas termasuk dalam kelompok usia produktif. Sedangkan secara geografis, kawasan perkotaan Serang - Banten dilewati oleh jaringan jalan tol antar provinsi dan hub logistik Bandara Soekarno Hatta - Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Ciwandan. Kedua aspek tersebut menunjukkan potensi pengembangan Kota Serang dan Kota Cilegon ke arah kawasan perkotaan yang mendukung

pengembangan hub logistik industri internasional. Daerah administrasi Kota Serang dan Kota Cilegon ditampilkan lebih jelas pada peta berikut.



Gambar 7.1 Peta Administrasi Perkotaan Cilegon - Serang

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Secara ekonomi, PDRB Atar Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Cilegon tahun 2024 sebesar 88,63 triliun rupiah dengan sektor unggulan industri pengolahan (61,00% PDRB), sedangkan PDRB ADHK Kota Serang adalah sebesar 26,86 triliun rupiah dengan sektor unggulan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (27,52% PDRB). Angka ini masing-masing berkontribusi 16,53% dan 5,01% pada PDRB Provinsi Banten. Sektor unggulan Kota Cilegon didukung oleh keberadaan dua kawasan industri besar, yaitu Kawasan Industri Krakatau dan Kawasan Industri Cilegon.

Pertumbuhan kawasan perkotaan Cilegon dan Serang (terutama Kota Cilegon) tidak bisa lepas dari adanya hub logistik utama yaitu Pelabuhan Ciwandan dan pelabuhan kelas I yang berfokus untuk penyeberang penumpang yaitu Pelabuhan Merak. Pelabuhan Ciwandan merupakan salah satu pelabuhan utama di Indonesia berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang melayani logistik regional, nasional, bahkan internasional. Sementara Pelabuhan Merak tersebut merupakan Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Kelas I yang melayani simpul pergerakan dan sabuk penyeberangan nasional Jawa – Sumatera. Dari segi PDRB, pelabuhan Ciwandan dan pelabuhan Merak menyumbang sektor jasa serta transportasi dan perdagangan.

Secara Geografis Kota Serang dan Kota Cilegon berada di pesisir laut utara Jawa dan secara topografi sebagian besar morfologinya berupa dataran rendah sehingga menimbulkan potensi kerawanan bencana pada kawasan perkotaan. Berdasarkan data analisa kerawanan bencana di Banten, Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang termasuk dalam resiko banjir tinggi (35%) dan kerawanan tsunami kelas tinggi (0.06%). Maka dari itu, pengembangan Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang perlu menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tanggap kebencanaan. Sebaran kerawanan bencana Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang ditampilkan lebih jelas pada peta berikut.

Tabel 7.10 Luas Kawasan Kerawanan Banjir di Cilegon - Serang

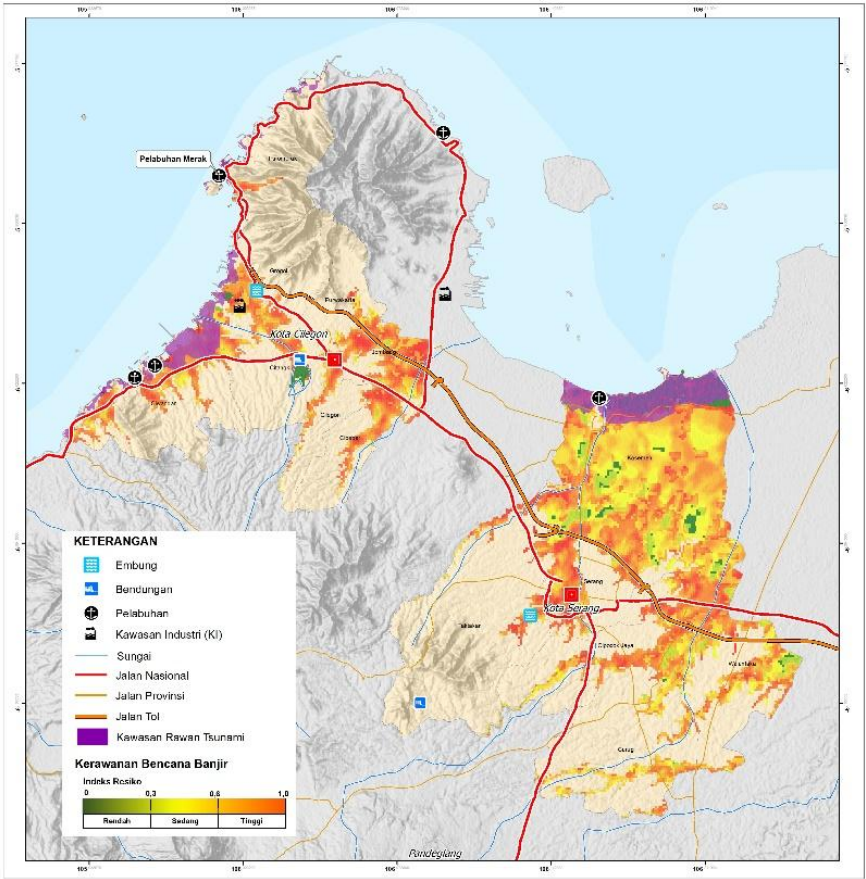
Kecamatan	Kerawanan Banjir (ha)		
	Resiko Rendah	Resiko Sedang	Resiko Tinggi
SERANG	32,70	802,39	11076,53
Curug	1,00	7,28	715,51
Walantaka	20,66	166,72	1883,51
Cipocok Jaya	2,40	33,38	1254,16
Serang	7,00	54,72	1382,54
Taktakan	1,64	13,53	451,79
Kasemen	0,00	526,76	5389,03
CILEGON	111,00	112,99	4220,77
Ciwandan	20,77	80,46	1010,36
Citangkil	87,09	7,50	626,72
Pulomerak	0,00	0,00	91,11
Purwakarta	0,00	2,68	296,78
Grogol	3,13	0,68	526,52
Cilegon	0,00	0,02	152,47
Jombang	0,00	13,76	770,25
Cibeber	0,00	7,88	746,56
TOTAL	143,69	915,38	15297,31

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.11 Luas Kawasan Kerawanan Tsunami di Cilegon - Serang

Kota	Kecamatan	Kelas Kerawanan Tsunami (ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Kota Cilegon	Citangkil	1.32	2.94	0.91	5.16
	Ciwandan	1.05	3.64	1.18	5.86
	Gerogol	0.15	0.78	0.33	1.26
	Pulomerak	0.10	0.65	0.96	1.70
	Total	2.61	8.01	3.37	13.99
Kota Serang	Kasemen	8.42	2.54	0.59	11.55
	Total	8.42	2.54	0.59	11.55
Grand Total		11.02	10.55	3.96	25.53

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 7.2 Peta Kerawanan Bencana Kota Cilegon - Serang

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kebutuhan infrastruktur pengembangan kawasan perkotaan Cilegon – Serang dihitung berdasarkan jumlah penduduk alami Kota Cilegon – Serang dan jumlah pekerja dan pengguna Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak. Pada Subbab selanjutnya ditunjukkan perhitungan kebutuhan infrastruktur perkotaan Cilegon - Serang sebagai berikut.

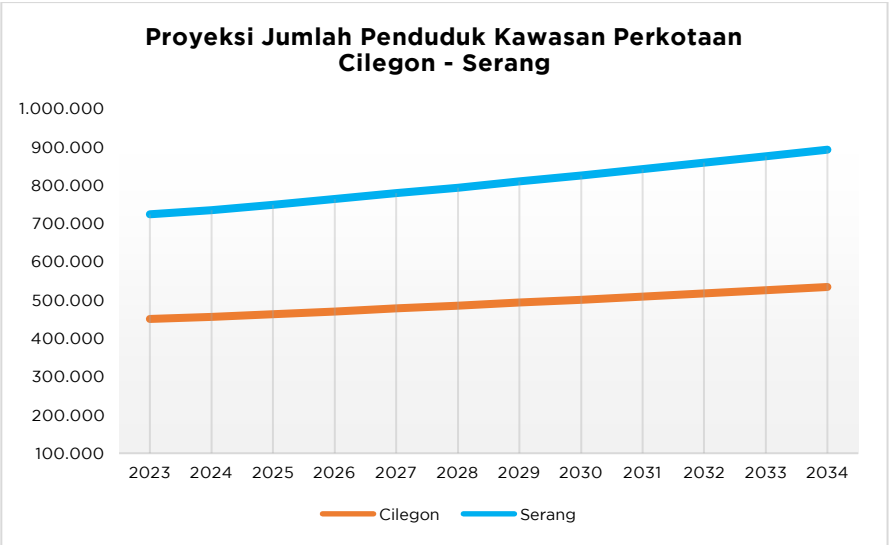
B. Proyeksi Penduduk Kawasan Perkotaan dan Pengguna Pelabuhan

Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk di Kota Cilegon dan Kota Serang, pada tahun 2034 diperkirakan akan mencapai 534.032 jiwa di Kota Cilegon dan 892.469 jiwa untuk Kota Serang. Oleh karena perkembangan perkotaan Cilegon dan Serang tidak bisa lepas dari keberadaan Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak, maka perlu dipertimbangkan kebutuhan pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak berdasarkan jumlah penumpang dan pekerja yang keluar masuk di pelabuhan.

Tabel 7.12 Proyeksi Jumlah Penduduk Alami Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
	2025	2027	2029	2031	2033	2034
Kota Cilegon	462.842	477.683	493.066	509.011	525.540	534.032
Ciwandan	52.420	54.146	55.929	57.771	59.673	60.648
Citangkil	87.468	91.196	95.082	99.134	103.359	105.538
Pulomerak	50.716	51.963	53.241	54.550	55.892	56.575
Purwakarta	44.446	45.440	46.455	47.493	48.554	49.094
Grogol	44.074	44.988	45.920	46.872	47.844	48.337
Cilegon	49.603	51.231	52.912	54.649	56.442	57.361
Jombang	67.379	68.514	69.668	70.841	72.034	72.638
Cibeber	66.735	70.207	73.859	77.701	81.743	83.842
Kota Serang	749.069	778.455	809.199	841.372	875.046	892.469
Curug	62.265	64.726	67.284	69.943	72.707	74.130
Walantaka	117.575	125.027	132.951	141.378	150.338	155.029
Cipocok Jaya	108.089	113.107	118.359	123.854	129.604	132.579
Serang	232.917	236.869	240.888	244.976	249.132	251.237
Taktakan	111.950	117.709	123.764	130.131	136.825	140.300
Kasemen	116.273	121.017	125.953	131.091	136.439	139.194

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 7.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Perkotaan Cilegon - Serang

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sebagai Pelabuhan Utama, Pelabuhan Ciwandan merupakan salah satu simpul logistik terbesar di Indonesia. Jumlah kunjungan kapal pengangkut kargo di Pelabuhan Ciwandan pada tiga dermaga mencapai 11.720 unit kapal dalam negeri dan 2.162 unit kapal luar negeri pada tahun 2022. Untuk menghitung kebutuhan infrastruktur pendukung Pelabuhan Ciwandan, diasumsikan 1 kapal kargo tersebut mempunyai 8 awak kapal (berdasarkan dan jumlah pekerja kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten sebagai pengguna Pelabuhan Banten (berdasarkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2022). Perhitungan proyeksi ABK dan pekerja di Pelabuhan Ciwandan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.13 Proyeksi Jumlah ABK dan Pekerja Pelabuhan Ciwandan

	Proyeksi jumlah awak kapal (jiwa)					
	2025	2027	2029	2031	2033	2034
ABK kapal dalam negeri	103.627	110.838	118.551	126.801	135.625	140.265
ABK kapal luar negeri	19.817	21.698	23.758	26.014	28.483	29.805
Pekerja	149	149	149	149	149	149
TOTAL	123.592	132.685	142.458	152.964	164.257	170.218

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sementara itu, fungsi utama dari Pelabuhan Merak adalah sebagai pelabuhan penyebrangan orang. Jumlah penumpang angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak mengalami laju peningkatan 2,68% per tahun dan mencapai total 821.462 ribu penumpang dewasa dan

anak-anak di tahun 2034. Jumlah ini diproyeksikan berdasarkan jumlah penumpang angkutan penyeberangan kapal Ro-Ro (*Roll on-Roll off*) dan kapal cepat dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Sedangkan perhitungan jumlah pekerja mengacu pada kapasitas maksimum gedung kantor Pelabuhan Merak yang dihitung berdasarkan standar luas ruang gedung kantor untuk bangunan sederhana 2 lantai, yaitu sebesar 9,6 m²/orang. Secara detail, perhitungan proyeksi penumpang dan pekerja di Pelabuhan Merak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.14 Proyeksi Jumlah ABK dan Pekerja Pelabuhan Ciwandan

Proyeksi Penumpang dan Pekerja Pelabuhan Merak (jiwa)						
	2025	2027	2029	2031	2033	2034
Penumpang	647.512	682.672	719.742	758.824	800.028	821.462
Pekerja	98	98	98	98	98	98
Total	647.610	682.770	719.839	758.922	800.126	821.560

Sumber: Hasil Analisis, 2025

C. Analisis kebutuhan infrastruktur dasar

Analisis kebutuhan infrastruktur dasar terdiri dari analisis kebutuhan infrastruktur SDA, jalan jembatan, dan permukiman.

1) Analisis Kebutuhan Infrastruktur SDA

a. Analisis Wilayah Sungai dan Sumber Air Baku

Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang termasuk dalam Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian yang merupakan wilayah sungai kewenangan nasional. Potensi air baku di Kawasan Serang - Cilegon sebanyak 2.790 liter/detik, yang diperoleh dari 4 sungai besar di sekitar kawasan. Potensi air baku terbesar dari sungai Cidanau - Krenceng - Waduk Krenceng (2.320 liter/detik).

Tabel 7.15 Potensi Sumber Air Baku Kota Serang - Cilegon

No.	Kecamatan	Sumber Potensi	Debit (liter/detik)
1.	Kec. Curug	Sungai Ciujung	200
2.	Kec. Ciwandan	Sungai Cianyur	460
3.	Kec. Taktakan	Sungai Cibanten	50
4.	Kec. Cilegon	Cidanau - Krenceng - Waduk Krenceng	2.320
	Total		2.790

Sumber: Hasil Analisis, 2025

b. Analisis Kebutuhan Air Baku

Total kebutuhan air baku di Perkotaan Cilegon - Serang pada tahun 2025 sebesar 927,36 liter/detik dan 1.794,65 liter/detik. Kebutuhan tersebut

terus bertambah dan diproyeksikan pada tahun 2034 menjadi sebesar 1.070,45 liter/detik dan 2.138,21 liter/detik. Kebutuhan air baku perkotaan tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan rumah tangga, perkotaan, Pelabuhan Ciwandan sebagai pelabuhan utama, dan Pelabuhan Merak sebagai pelabuhan penyeberangan atau pelabuhan kelas I di Kota Cilegon.

Perhitungan kebutuhan air di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak diasumsikan melalui jumlah pengguna harian pelabuhan dengan kebutuhan air sebesar 50 liter/orang/hari untuk pekerja pelabuhan (berdasarkan SNI 03-7065-2005), dan 2 liter/orang/hari untuk penumpang Pelabuhan. Secara detail, perhitungan proyeksi kebutuhan air baku di Kawasan Perkotaan Cilegon – Serang dapat dilihat pada tabel berikut.

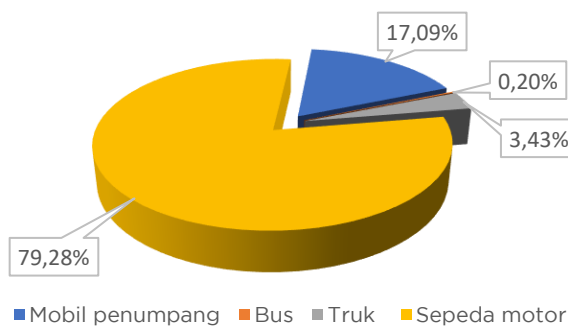
Tabel 7.16 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang

Kebutuhan Air Baku Kawasan Perkotaan (liter/detik)										
Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
CILEGON	925,63	940,35	955,34	970,59	986,13	1001,95	1018,05	1034,45	1051,14	1068,14
Ciwandan	104,66	106,37	108,10	109,87	111,66	113,49	115,34	117,23	119,14	121,09
Citangkil	174,63	178,31	182,07	185,91	189,83	193,84	197,92	202,10	206,36	210,71
Pulomerak	101,26	102,49	103,75	105,01	106,30	107,60	108,91	110,24	111,59	112,95
Purwakarta	88,74	89,72	90,72	91,73	92,75	93,78	94,82	95,87	96,94	98,02
Grogol	87,99	88,90	89,82	90,75	91,68	92,63	93,58	94,55	95,52	96,51
Cilegon	99,03	100,64	102,28	103,95	105,64	107,36	109,11	110,88	112,69	114,52
Jombang	134,52	135,65	136,79	137,94	139,09	140,26	141,44	142,62	143,82	145,02
Cibeber	133,24	136,66	140,17	143,77	147,46	151,25	155,13	159,12	163,20	167,39
Pelabuhan Merak	0,135	0,136	0,138	0,139	0,141	0,143	0,144	0,146	0,148	0,150
Pelabuhan Ciwandan	0,130	0,130	0,131	0,131	0,131	0,132	0,132	0,133	0,133	0,134
SERANG	1794,65	1829,45	1865,05	1901,46	1938,71	1976,81	2015,79	2055,66	2096,46	2138,21
Cigemblong	149,18	152,10	155,07	158,11	161,20	164,36	167,57	170,85	174,19	177,60
Cimarga	281,69	290,48	299,54	308,89	318,53	328,47	338,72	349,29	360,19	371,42
Bojongmanik	258,96	264,91	270,99	277,21	283,57	290,08	296,73	303,54	310,51	317,64
Lebokgedong	558,03	562,75	567,50	572,29	577,13	582,00	586,92	591,88	596,88	601,92
Cijaku	268,21	275,03	282,01	289,17	296,52	304,05	311,77	319,69	327,81	336,14
Leuwidamar	278,57	284,20	289,94	295,79	301,76	307,86	314,07	320,41	326,88	333,49

Sumber: Hasil Analisis, 2025

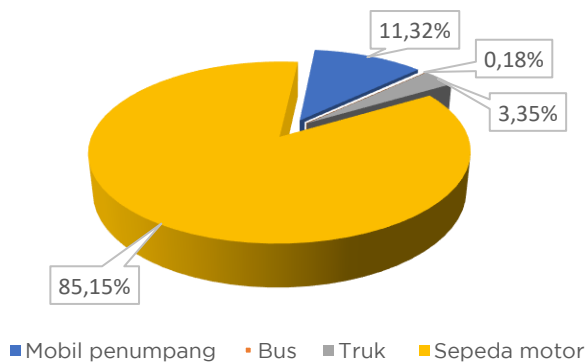
2) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Berdasarkan perhitungan jumlah kendaraan Kawasan Perkotaan Cilegon – Serang pada tahun 2024, jumlah kepemilikan sepeda motor pada Kota Serang dan Kota Cilegon mendominasi sebesar 79,28% dan 85,15%, diikuti kepemilikan mobil penumpang 17,09% dan 11,32% (2024). Pertumbuhan kendaraan Kota Cilegon – Serang sebesar 25% dan 20% per tahun, dimana mayoritas penduduk menggunakan kendaraan pribadi (96%) dibandingkan kendaraan umum (4%). Perbandingan jenis kendaraan di Kota Cilegon – Serang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7.4 Jenis Kendaraan Kota Serang

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 7.5 Jenis Kendaraan Kota Cilegon

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan analisa, proyeksi jumlah kendaraan di Kota Serang – Cilegon pada tahun 2034 mencapai 1,14 juta dan 0,83 juta kendaraan, meningkat 2,5 kali lipat dari jumlah kendaraan di tahun 2024.

Tabel 7.17 Proyeksi Jumlah Kendaraan Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan						
	2024	2025	2027	2029	2031	2033	2034
Kota Cilegon	439.790	514.121	601.677	704.887	826.642	970.386	1.140.231
Kota Serang	354.181	407.314	468.821	540.116	622.888	719.171	831.450

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kawasan perkotaan Cilegon-Serang dilalui oleh 16 jalan nasional dan 20 jalan provinsi. Pada tahun 2025, volume kendaraan di 7 ruas jalan nasional sudah melebihi kapasitas jalan yang ditandai dengan LOS/VCR jalan lebih dari 1. Kondisi jalan nasional tersebut secara linear akan terus memburuk dan pada tahun 2034 terdapat 13 ruas jalan nasional dengan kinerja jalan (VCR) lebih dari 1. Pada tahun 2034, beban ruas Jalan Bts. Kota Serang – Bts. Kota Pandeglang, Jalan Raya Anyer (Cilegon), dan Jalan TB. Suwandi (Serang) paling tinggi diantara ruas jalan lainnya, dengan angka VCR >2. Secara Rinci, proyeksi LHRT dan kinerja (VCR/LOS) ruas jalan di Kawasan Perkotaan Cilegon – Serang dapat dilihat pada Tabel 7.18 dan Tabel 7.19.

Kelebihan volume kendaraan pada 7 ruas jalan nasional pada tahun 2025 disebabkan oleh aktivitas logistik dan pergerakan penduduk Pelabuhan Merak – Jakarta serta kegiatan perkotaan yang terfokus pada lintas utara. Untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi beban jalan, diperlukan pelebaran jalan nasional. Sesuai dengan arahan RPJMN, pelebaran jalan diprioritaskan pada ruas jalan Merak – Bts. Kota Cilegon. Ruas jalan Merak – Bts. Kota Cilegon berfungsi sebagai salah satu akses utama ke Pelabuhan Merak, sehingga pengembangannya juga diharapkan mampu mendukung pergerakan penduduk dan logistik Pelabuhan Merak – Perkotaan Banten. Selain jalan nasional, RPJMN juga mengamatkan pengembangan transportasi publik berupa peningkatan jalur kereta api Rangkasbitung – Merak. Untuk pengembangan perkotaan dibutuhkan konektivitas dan aksesibilitas yang baik tidak hanya kewenangan nasional namun juga kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 7.18 Proyeksi LHRT Jalan Nasional Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (km)	Lebar (m)	Proyeksi LHRT (Kendaraan/jam)									
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
22031	Jln. Akses Tol Merak	4,2	12,56	1129	1184	1240	1300	1362	1428	1496	1568	1643	1722
2203314	Merak - Bts. Kota Cilegon	9,4	8,17	977	1024	1073	1124	1178	1235	1294	1356	1421	1490
2203315	Jln. Raya Merak (Cilegon)	2,7	13,61	2017	2114	2216	2322	2434	2550	2673	2801	2936	3077
2203316	Jln. Raya Cilegon (Cilegon)	1,5	13,66	6509	6821	7149	7492	7851	8228	8623	9037	9471	9926
2203317	Bts. Kota Cilegon - Bts. Kota Serang	8,4	12,3	2168	2272	2381	2495	2615	2740	2872	3010	3154	3305
2203318	Jln. Raya Serang (Cilegon)	3,5	14,44	2979	3122	3272	3429	3594	3767	3947	4137	4335	4543
2203319	Jln. Raya Cilegon (Serang)	2,8	11,39	2458	2576	2699	2829	2965	3107	3256	3412	3576	3748
220331A	Jln. Letnan Jidun (Serang)	0,59	7,42	3048	3195	3348	3509	3677	3853	4038	4232	4435	4648
2203511	Jln. Tb. Suwandi (Serang)	3,26	6,86	1539	1613	1690	1771	1856	1946	2039	2137	2239	2347
2203611	Jln. Abdul Hadi (Serang)	0,72	12,21	3775	3956	4146	4345	4554	4772	5002	5242	5493	5757
22037	Jln. Kh. Abdul Fatah Hasan (Serang)	1,41	15,39	3685	3862	4047	4241	4445	4658	4882	5116	5362	5619
2203711	Jln. Sudirman (Serang)	1,78	13,95	2918	3058	3204	3358	3519	3688	3865	4051	4245	4449
2203714	Jln. Raya Anyer (Cilegon)	3,6	6,12	1478	1549	1624	1702	1783	1869	1959	2053	2151	2254
22101	Bts. Kota Serang - Bts. Kota Pandeglang	16,64	9,15	1894	1985	2080	2180	2284	2394	2509	2629	2756	2888
22104	Jln. Raya Pandeglang (Serang)	0,77	13,02	2473	2591	2716	2846	2983	3126	3276	3433	3598	3770
	Bts Kota Serang - Bts. Kota Tangerang	53,7	13,41	2118	2219	2326	2437	2554	2677	2805	2940	3081	3229

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.19 Kinerja Jaringan Jalan Nasional Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang

No Ruas	Nama Ruas	Kinerja Jaringan Jalan (VCR)									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
22031	Jln. Akses Tol Merak	0,32	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48
2203314	Merak - Bts. Kota Cilegon	0,89	0,93	0,97	1,02	1,07	1,12	1,18	1,23	1,29	1,35
2203315	Jln. Raya Merak (Cilegon)	0,74	0,78	0,81	0,85	0,89	0,94	0,98	1,03	1,08	1,13
2203316	Jln. Raya Cilegon (Cilegon)	0,60	0,62	0,65	0,69	0,72	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91
2203317	Bts. Kota Cilegon - Bts. Kota Serang	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,21	1,26	1,32	1,39	1,45
2203318	Jln. Raya Serang (Cilegon)	1,11	1,17	1,22	1,28	1,34	1,41	1,47	1,55	1,62	1,70
2203319	Jln. Raya Cilegon (Serang)	1,14	1,19	1,25	1,31	1,37	1,44	1,51	1,58	1,66	1,74
220331A	Jln. Letnan Jidun (Serang)	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,76	0,79	0,83	0,87
2203511	Jln. Tb. Suwandi (Serang)	1,31	1,37	1,44	1,51	1,58	1,66	1,74	1,82	1,91	2,00
2203611	Jln. Abdul Hadi (Serang)	0,99	1,04	1,09	1,14	1,20	1,26	1,32	1,38	1,45	1,52
22037	Jln. Kh. Abdul Fatah Hasan (Serang)	1,32	1,39	1,46	1,52	1,60	1,67	1,76	1,84	1,93	2,02
2203711	Jln. Sudirman (Serang)	1,22	1,28	1,34	1,40	1,47	1,54	1,61	1,69	1,77	1,86
2203714	Jln. Raya Anyer (Cilegon)	1,38	1,44	1,51	1,59	1,66	1,74	1,83	1,91	2,00	2,10
22101	Bts. Kota Serang - Bts. Kota Pandeglang	1,50	1,57	1,64	1,72	1,81	1,89	1,98	2,08	2,18	2,28
22104	Jln. Raya Pandeglang (Serang)	0,91	0,96	1,00	1,05	1,10	1,16	1,21	1,27	1,33	1,39
	Bts. Kota Serang - Bts. Kota Tangerang	0,94	0,99	1,03	1,08	1,13	1,19	1,25	1,31	1,37	1,43

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Analisis ini mencakup proyeksi pertumbuhan kawasan dan proyeksi kebutuhan infrastruktur permukiman, berupa air minum, perpipaan, persampahan, dan air limbah.

a. Infrastruktur Air Minum

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk perkotaan Cilegon – Serang, selanjutnya dihitung proyeksi kebutuhan air minum. Jumlah kebutuhan air minum domestik dan non domestik Kawasan Perkotaan Cilegon – Serang pada tahun 2034 sebesar 804,92 liter/detik dan 1.611,40 liter/detik. Proyeksi tersebut telah memperhitungkan kebutuhan air minum pengguna Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan yang terletak di Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Ciwandan dengan asumsi kebutuhan air minum pengguna pelabuhan sebesar 50 dari kebutuhan penduduk perkotaan. Proyeksi kebutuhan air minum domestik dan non domestik Kota Serang dan Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel 7.20 berikut.

Tabel 7.20 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik dan Non Domestik Kawasan Perkotaan Cilegon – Serang

Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik dan Non Domestik Serang - Cilegon										
Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kota Cilegon	696,60	707,66	718,93	730,40	742,08	753,97	766,07	778,40	790,95	803,73
Ciwandan	78,97	80,26	81,56	82,90	84,25	85,62	87,02	88,44	89,88	91,35
Citangkil	131,61	134,38	137,22	140,11	143,06	146,08	149,16	152,31	155,52	158,80
Pulomerak	76,41	77,34	78,29	79,24	80,21	81,19	82,18	83,19	84,20	85,23
Purwakarta	66,88	67,62	68,37	69,13	69,90	70,67	71,46	72,25	73,06	73,87
Grogol	66,31	67,00	67,69	68,39	69,09	69,81	70,53	71,25	71,99	72,73
Cilegon	74,63	75,85	77,08	78,34	79,61	80,91	82,23	83,56	84,92	86,31
Jombang	101,38	102,23	103,09	103,95	104,82	105,70	106,59	107,48	108,38	109,29
Cibeber	100,41	102,99	105,63	108,35	111,13	113,98	116,91	119,91	122,99	126,15
Kota Serang	1.352,4 ₉	1.378,7 ₂	1.405,54	1.432,98	1.461,05	1.489,77	1.519,14	1.549,20	1.579,94	1.611,40
Curug	112,42	114,62	116,87	119,15	121,48	123,86	126,29	128,76	131,28	133,85
Walantaka	212,29	218,91	225,74	232,79	240,05	247,54	255,27	263,23	271,44	279,91
Cipocok Java	195,16	199,64	204,22	208,91	213,70	218,61	223,62	228,76	234,01	239,38
Serang	420,55	424,10	427,68	431,29	434,94	438,61	442,32	446,05	449,82	453,62
Taktakan	202,13	207,27	212,53	217,93	223,46	229,14	234,96	240,93	247,05	253,32
Kasemen	209,94	214,18	218,50	222,91	227,42	232,01	236,69	241,47	246,35	251,32

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi, capaian pelayanan air minum perpipaan di Kota Cilegon dan Kota Serang pada tahun 2034 masing-masing sebesar 19,64% dan 12,90%. Sehingga dibutuhkan penambahan layanan perpipaan air minum pada Kota Serang dan Kota Cilegon untuk mencapai target pelayanan air minum RPJMN pada tahun 2034.

Pemenuhan pelayanan air minum tersebut dapat dipenuhi melalui pemanfaatan jaringan air baku air minum dari bendungan Karian atau optimalisasi dari sumber air baku air minum existing yang lain. Hal ini

tentunya diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran.

b. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Dari perhitungan proyeksi penduduk perkotaan Cilegon - Serang, dapat diproyeksikan jumlah timbulan sampah pada tahun 2034 sebesar **1.749,42 m³/hari** di Kota Serang dan **2.290,07 m³/hari** di Kota Cilegon. Nilai timbulan sampah paling besar berada pada Pelabuhan Merak Kota Cilegon (704,55 m³/hari) sedangkan paling rendah terdapat pada Kecamatan Grogol Kota Cilegon (143,24 m³/hari). Infrastruktur persampahan eksisting adalah TPA Cilowong (Kota Serang) dan TPA Bagendung (Kota Cilegon) dengan kapasitas masing-masing 155.928 m³/tahun dan 91.000 m³/tahun. Saat ini TPA Cilowong terpakai 128.782 ton/tahun (82.59 %) dan TPA Bagendung 81.395 ton/tahun (89,45 %).

Tabel 7.21 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Perkotaan Cilegon - Serang

Kecamatan	Proyeksi Timbulan Sampah (m3/hari)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kota Cilegon	1.514,94	1.539,15	1.563,80	1.588,89	1.614,44	1.640,47	1.666,96	1.693,94	1.721,43	1.749,42
Ciwandan	170,37	173,15	175,98	178,85	181,77	184,74	187,76	190,82	193,94	197,11
Citangkil	284,27	290,27	296,39	302,64	309,02	315,53	322,19	328,98	335,92	343,00
Pulomerak	164,83	166,84	168,88	170,94	173,03	175,15	177,29	179,45	181,65	183,87
Purwakarta	144,45	146,06	147,68	149,32	150,98	152,66	154,35	156,07	157,80	159,55
Grogol	143,24	144,72	146,21	147,72	149,24	150,78	152,33	153,91	155,49	157,10
Cilegon	161,21	163,83	166,50	169,21	171,96	174,76	177,61	180,50	183,44	186,42
Jombang	218,98	220,82	222,67	224,54	226,42	228,32	230,23	232,16	234,11	236,07
Cibeber	216,89	222,46	228,17	234,03	240,04	246,21	252,53	259,01	265,66	272,49
Pelabuhan Merak	6,08	6,24	6,40	6,56	6,73	6,90	7,07	7,26	7,44	7,63
Pelabuhan Ciwandan	4,62	4,76	4,92	5,08	5,25	5,42	5,60	5,78	5,98	6,18
Kota Serang	1.988,66	2.011,10	2.051,08	2.090,42	2.119,36	2.166,45	2.202,86	2.119,62	2.249,32	2.290,02
Curug	159,61	159,84	161,41	162,86	164,18	165,38	166,41	174,28	186,37	189,90
Walantaka	264,88	270,00	277,52	285,02	292,44	299,82	307,08	299,76	333,26	343,26
Cipocok Jaya	292,34	302,51	315,67	329,12	342,82	356,83	371,03	298,99	321,45	327,79
Serang	704,55	706,89	715,17	722,96	729,46	736,83	742,83	729,77	735,14	741,22
Taktakan	269,94	273,34	279,10	284,76	284,76	295,62	300,79	300,17	325,96	333,96
Kasemen	297,34	298,52	302,21	305,70	305,70	311,97	314,72	316,65	347,14	353,89

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Untuk dapat memenuhi kebutuhan persampahan tersebut diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran. Sebagai upaya untuk tindak lanjut diperlukan usaha untuk perubahan perilaku seperti kebijakan pengurangan sampah dari sumber dan pemilahan sampah.

c. Infrastruktur Air Limbah

Kebutuhan infrastruktur air limbah didasarkan pada analisis perhitungan kebutuhan air minum per orang dikali 80%. Berdasarkan analisis tersebut, proyeksi timbulan air limbah pada tahun 2034, kebutuhan

penanganan air limbah di Kota Cilegon - Serang pada tahun 2034 mencapai 495,03 lt/dtk dan 991,63 lt/dtk untuk kebutuhan domestik. Penanganan dilakukan melalui beberapa cara, yakni sistem setempat per rumah, secara komunal terpadu beberapa rumah, dan terpusat pada level kabupaten. Sementara untuk limbah industri sedang dan besar dilakukan secara *onsite* di masing-masing kawasan industri.

Pada pelabuhan merak dan pelabuhan ciwandan, timbulan air limbah pengguna pelabuhan diasumsikan 50% dari potensi timbulan air limbah penduduk perkotaan. Pada tahun 2034 diproyeksikan timbulan air limbah di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan mencapai 0,52 liter/detik dan 0,44 liter/detik. Pelayanan sanitasi pada pelabuhan termasuk dalam cakupan layanan Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Pulomerak. Proyeksi timbulan air limbah di kawasan perkotaan serang-cilegon lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.22 Timbulan Air Limbah di Perkotaan Cilegon - Serang

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Air Limbah Kawasan Perkotaan Serang - Cilegon (lt/dtk)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kota Cilegon	428,63	435,44	442,38	449,44	456,62	463,94	471,39	478,97	486,69	494,56
Ciwandan	48,54	49,33	50,14	50,95	51,79	52,63	53,49	54,37	55,25	56,16
Citangkil	80,99	82,70	84,44	86,22	88,04	89,90	91,79	93,73	95,70	97,72
Pulomerak	46,96	47,53	48,11	48,70	49,30	49,90	50,51	51,13	51,75	52,38
Purwakarta	41,15	41,61	42,07	42,54	43,01	43,49	43,97	44,46	44,96	45,46
Grogol	40,81	41,23	41,66	42,08	42,52	42,96	43,40	43,85	44,30	44,76
Cilegon	45,93	46,68	47,44	48,21	48,99	49,79	50,60	51,42	52,26	53,11
Jombang	62,39	62,91	63,44	63,97	64,51	65,05	65,59	66,14	66,70	67,26
Cibeber	61,79	63,38	65,01	66,68	68,39	70,14	71,95	73,79	75,69	77,63
Pelabuhan Merak	0,039	0,039	0,040	0,040	0,041	0,041	0,042	0,042	0,043	0,043
Pelabuhan Ciwandan	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,039	0,039	0,039
Kota Serang	832,30	848,44	864,95	881,84	899,11	916,78	934,86	953,35	972,27	991,63
Curug	69,18	70,54	71,92	73,32	74,76	76,22	77,71	79,23	80,79	82,37
Walantaka	130,64	134,71	138,92	143,25	147,72	152,33	157,09	161,99	167,04	172,25
Cipocok Jaya	120,10	122,86	125,67	128,56	131,51	134,53	137,62	140,77	144,00	147,31
Serang	258,80	260,98	263,19	265,41	267,65	269,91	272,20	274,49	276,81	279,15
Taktakan	124,39	127,55	130,79	134,11	137,52	141,01	144,59	148,26	152,03	155,89
Kasemen	129,19	131,80	134,46	137,18	139,95	142,77	145,66	148,60	151,60	154,66

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kota Cilegon saat ini memiliki satu IPAL terpadu skala komunitas dengan kapasitas 10,67 liter/detik yang melayani 100 KK. Sehingga diperlukan penambahan infrastruktur IPAL untuk melayani gap kapasitas timbulan air limbah. Kota Cilegon telah memiliki satu IPLT dengan cakupan layanan 20.167 KK. Penanganan air limbah Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan termasuk dalam wilayah pelayanan Kecamatan

Ciwandan, sehingga proyeksi timbunan air limbah Kecamatan Ciwandan sebesar 57,14 liter/detik.

Pada Kota Serang tersedia 7 IPAL skala komunal, yaitu IPAL Ciwedus Cerah di Kecamatan Kasemen (7,5 liter/detik), IPAL Karya Mandiri di kecamatan Walantaka, IPAL Cidada Berjaya di Kecamatan Curug, IPAL Karya Bersama di Kecamatan Walantaka, IPAL Bendung Akur di Kecamatan Kasemen, IPAL Deduluran di Kecamatan Cipocok Jaya, dan IPAL Puji Indah di Kecamatan Kasemen dengan total kapasitas keseluruhan IPAL 52,5 liter/detik cakupan layanan 420 KK. Belum terdapat IPLT di Kota Serang, sehingga diperlukan fasilitas pengolahan lumpur tinja sesuai dengan timbunan lumpur tinja Kota Serang. Untuk mengatasi permasalahan sanitasi tersebut diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pembiayaan infrastruktur terkait operasional dan pemeliharaannya.

7.1.3. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Industri

Analisis kebutuhan kawasan industri mencakup kawasan industri yang diprioritaskan penanganannya hingga tahun 2034, KI Cilegon, KI Cikande, dan KI Wilmar.

A. Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang

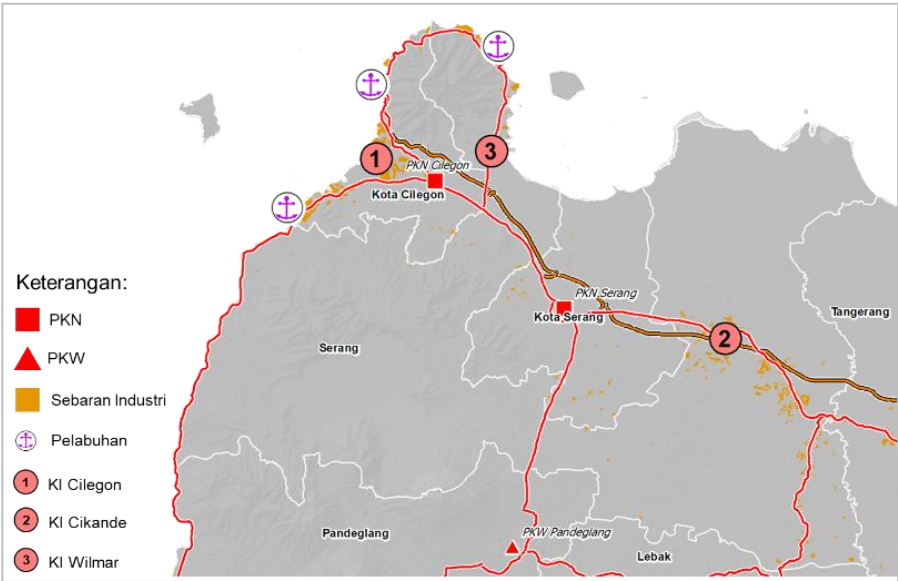
Kawasan industri Cilegon - Serang memiliki luasan kawasan industri sebesar 6.000 Ha atau 71% dari total luasan kawasan industri di Provinsi Banten. Sektor industri kawasan Cilegon - Serang yang terbesar pada sektor industri bahan kimia, alas kaki, dan industri logam dasar besi dan baja. KI Cilegon, KI Cikande, dan KI Wilmar termasuk dalam wilayah kawasan industri Cilegon - Serang di bagian utara Provinsi Banten. Lokasi dan luasan masing-masing kawasan industri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.23 Luas Kawasan Industri di Cilegon - Serang

No	Kawasan Industri	Lokasi	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	KI Cilegon	Kota Cilegon	Citangkil	546
2.	KI Cikande	Kabupaten Serang	Kibin	2.095
3.	KI Wilmar	Kabupaten Serang	Kramatwatu	645
Total				3.286

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari segi persebaran, sebagian besar kawasan industri berada di wilayah utara dengan kecenderungan mendekati jalan tol Jakarta-Merak. Untuk lebih jelasnya, sebaran kawasan industri tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.6 Sebaran Kawasan Industri Prioritas Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2025

B. Analisis Kebutuhan Air Baku Kawasan Industri

Kebutuhan air baku di 3 (tiga) kawasan industri tersebut dipenuhi dari DAS Cidanau dan DAS Ciujung dengan total ketersediaan air baku sebesar 0,80 m³/detik yang berasal dari Bendungan Sindangheula. Selain itu, kebutuhan air baku industri juga dipenuhi dari rencana Bendungan Karian yang memiliki volume tampungan total sebesar 314,70 juta m³ dengan tampungan air baku sebesar 9,10 m³/detik.

Perhitungan kebutuhan air baku untuk kawasan industri didasarkan pada luasan kawasan industri yang telah terokupansi serta pertumbuhan industri diikuti dengan laju pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor industri sebesar 3,7% dalam 10 tahun terakhir dengan pertumbuhan luasan kawasan industri pada tahun 2020 - 2034 sebesar 44%. Modern Cikande Industrial Estate memiliki tingkat luasan pertumbuhan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan industri lainnya, yaitu 64% hingga tahun 2034.

Tabel 7.24 Proyeksi Okupansi KI Prioritas

Tahun	Proyeksi Okupansi Kawasan Industri (Ha)			Total
	KI Cilegon	KI Cikande	KI Wilmar	
2025	655	2.512	773	1430.512

Tahun	Proyeksi Okupansi Kawasan Industri (Ha)			Total
	KI Cilegon	KI Cikande	KI Wilmar	
2026	679	2.605	802	1483.605
2027	704	2.702	832	1538.702
2028	730	2.802	863	1595.802
2029	757	2.905	894	1653.905
2030	785	3.013	927	1715.013
2031	814	3.124	962	1779.124
2032	844	3.24	997	1844.24
2033	875	3.36	1.034	879.394
2034	908	3.484	1.072	912.556

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dasar perhitungan kebutuhan air baku industri adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, yakni sebesar 0,55 - 0,75 liter/detik/ha. Pada analisis kebutuhan air baku KI prioritas Provinsi Banten menggunakan konstanta 0,65 liter/detik/ha sebagai acuan dasar untuk melakukan perhitungan kebutuhan air baku dengan mengalikan luas okupansi industri dengan nilai konstanta. Hasil proyeksi kebutuhan air baku industri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.25 Proyeksi Kebutuhan Air Baku di Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang

Tahun	Proyeksi Kebutuhan Air Baku (liter/detik)			Total
	KI Cilegon	KI Cikande	KI Wilmar	
2025	425,75	1632,80	502,45	2561,00
2026	441,35	1693,25	521,30	2655,90
2027	457,60	1756,30	540,80	2754,70
2028	474,50	1821,30	560,30	2856,10
2029	492,05	1888,25	581,10	2961,40
2030	510,28	1958,32	602,73	3071,34
2031	529,16	2030,78	625,03	3184,98
2032	548,74	2105,92	648,16	3302,83
2033	569,04	2183,84	672,14	3425,03
2034	590,10	2264,64	697,01	3551,76

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pemenuhan pelayanan air minum tersebut dapat dipenuhi melalui pemanfaatan jaringan air baku air minum dari bendungan Karian atau optimalisasi dari sumber air baku air minum existing yang lain. Hal ini tentunya diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran.

C. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Kegiatan industri dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas, terutama akibat pergerakan kendaraan dari kawasan industri menuju *outlet* (pelabuhan). Bangkitan lalu lintas industri dihitung berdasarkan Permenperin 40/2016, dimana diasumsikan bahwa bangkitan lalu lintas sebesar 5,5 smp/hari/ha dengan luas kawasan yang dihitung adalah luas

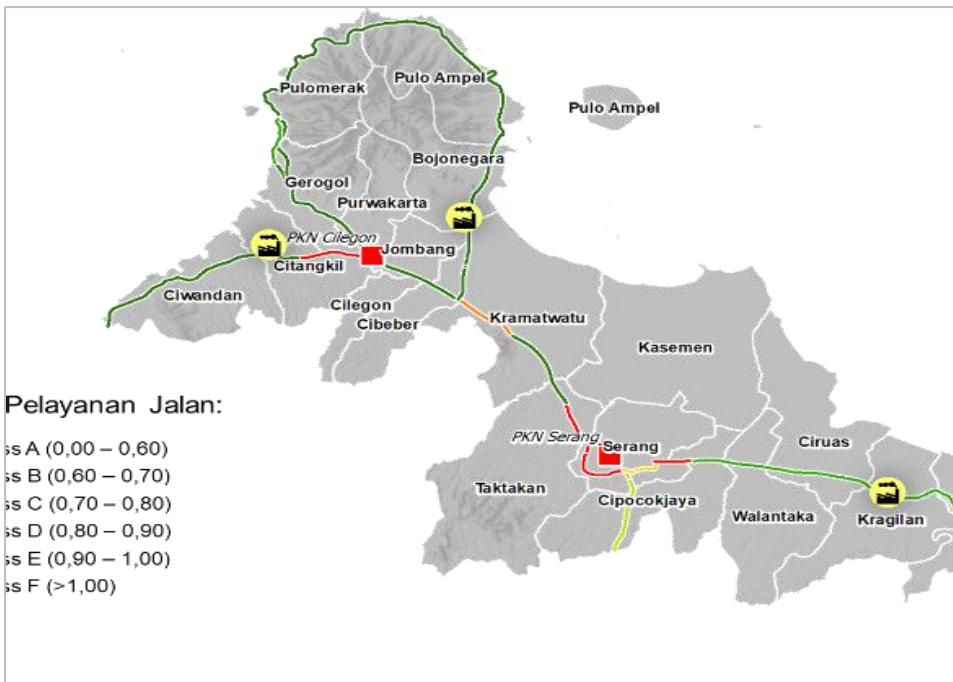
kawasan yang telah terokupansi. Proyeksi bangkitan lalu lintas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.26 Proyeksi Bangkitan Lalu Lintas

Tahun	Proyeksi Bangkitan Lalu Lintas (smp/jam)			Total
	KI Cilegon	KI Cikande	KI Wilmar	
2025	47,11	177,67	55,65	280,43
2026	48,86	184,24	57,71	290,81
2027	50,66	191,06	59,84	301,57
2028	52,54	198,13	62,06	312,73
2029	54,48	205,46	64,35	324,30
2030	56,50	213,06	66,73	336,30
2031	58,59	220,95	69,20	348,74
2032	60,76	229,12	71,76	361,64
2033	63,00	237,60	74,42	375,02
2034	65,34	246,39	77,17	388,90

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Bangkitan kendaraan terbesar di Banten berada di wilayah utara, sebagai akibat adanya kegiatan industri (97% industri Banten ada di utara). Dari segi jenis pergerakan lalu lintas, saat ini masih didominasi pergerakan campuran antara lalu lintas lokal dan logistik, khususnya di ruas jalan Pantura Banten. Dari segi kinerja jalan, jaringan jalan di wilayah Kabupaten Serang menuju Kota Serang memiliki kinerja yang baik (kondisi mantap, $VCR < 0,8$), sedangkan jalan Kota Serang menuju Kota Cilegon memiliki kinerja rendah rendah (ada beberapa ruas dengan $VCR > 0,8$). Jalan yang memiliki tingkat pelayanan rendah ($VCR > 0,8$) berada di ruas jalan: Jalan Sudirman (Serang); Jalan Abdul Hadi (Serang); Jalan TB. Suwandi (Serang); Jalan Letnan Jidun (Serang); Jalan Raya Cilegon (Serang); Jalan Raya Serang (Cilegon); dan Jalan Raya Anyer (Cilegon). Selain itu, titik kemacetan lalu lintas di jalan nasional berada di pintu masuk dan pintu keluar Gerbang Tol Serang Timur, terutama akibat antrian kendaraan logistik. Untuk percepatan sektor perindustrian dibutuhkan konektivitas dan aksesibilitas yang baik tidak hanya kewenangan nasional namun juga kewenangan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas multimoda dan juga menurunkan biaya logistik yang mendorong meningkatnya daya saing industri.



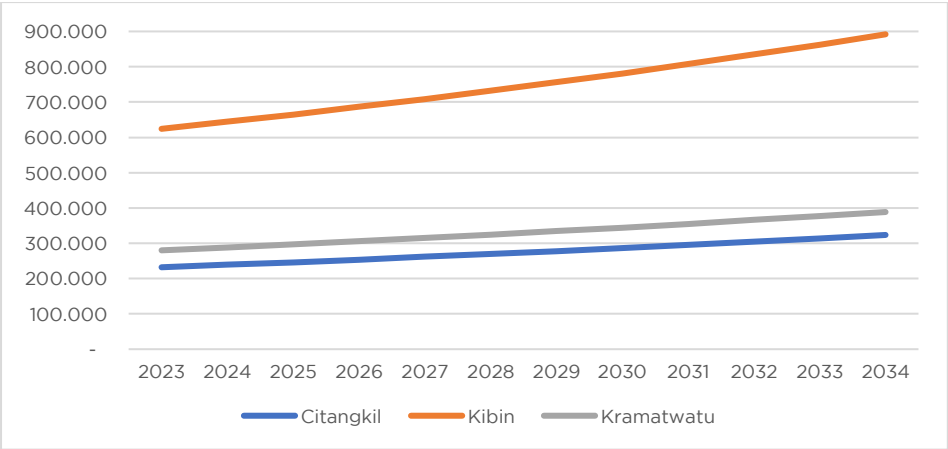
Gambar 7.7 Kondisi Layanan Jalan di Kawasan Cilegon - Serang

Sumber: Hasil Analisis, 2025

D. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Kebutuhan infrastruktur permukiman dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk alami dan tenaga kerja industri. Lokus perhitungan adalah 3 (tiga) kecamatan terpilih yang menjadi lokasi ketiga KI prioritas. Pada tahun 2029 dan tahun 2034, diproyeksikan jumlah penduduk alami di sekitar KI prioritas sebanyak 263.429 jiwa (2029) dan 278.891 jiwa (2034) dengan jumlah penduduk alami tertinggi ada di Kecamatan Kramatwatu (KI Wilmar) yaitu 117.601 jiwa (2029) dan 128.600 jiwa (2034). Sedangkan jumlah penduduk alami di Kecamatan Citangkil (KI Cilegon) dan Kecamatan Kibin (KI Cikande) pada tahun 2029 masing-masing sebesar 94.272 jiwa dan 51.556 jiwa dan pada tahun 2034 masing-masing sebesar 103.343 jiwa dan 46.948 jiwa.

Selain penduduk alami, keberadaan pekerja industri juga terus bertumbuh seiring dengan perkembangan kegiatan industri. Pada tahun 2034, jumlah penduduk alami dan pekerja industri diproyeksikan sebanyak 1.603.911 jiwa dengan persebaran terbesar di Kecamatan Kibin.



Gambar 7.8 Proyeksi Penduduk dan Pekerja Industri

Sumber: Hasil Analisis, 2025

1) Infrastruktur Air Minum

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan pertambahan tenaga kerja industri, selanjutnya dihitung proyeksi kebutuhan air minum. Jumlah kebutuhan air minum domestik dan non domestik pada tahun 2034 sebesar 2.561,80 liter/detik. Sedangkan capaian pelayanan air minum perpipaan di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang masing-masing sebesar 19,64% dan 15,65%.

Tabel 7.25 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik dan Non Domestik

Tahun	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik dan Non Domestik (liter/detik)			Total
	Citangkil	Kibin	Kramatwatu	
2025	393.5	1061.7	474.4	1929.5
2026	405.4	1096.1	488.6	1990.1
2027	417.8	1132.0	503.3	2053.2
2028	430.6	1169.2	518.5	2118.3
2029	443.8	1207.5	534.2	2185.5
2030	457.4	1247.8	550.4	2255.7
2031	471.5	1289.3	567.3	2328.1
2032	486.0	1332.8	584.4	2403.1
2033	501.0	1377.8	602.3	2481.0
2034	516.8	1424.4	620.6	2561.8

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kebutuhan air minum di Kecamatan Kramatwatu (KI Wilmar) pada tahun 2034 sebesar 620,62 liter/detik, sementara ketersediaan air minum eksisting sebesar 22 liter/detik yang berasal dari PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang. Dengan mempertimbangkan tingkat kebocoran dan peningkatan pelayanan, maka gap kebutuhan air minum pada tahun 2034 defisit sebesar 273,08 liter/detik. Namun jika dilakukan intervensi berupa penambahan kapasitas WTP Sindangheula dengan kapasitas

400 liter/detik, maka pada tahun 2034 ketersediaan air minum menjadi surplus 126,92 liter/detik.

Kebutuhan air minum di Kecamatan Kibin (KI Cikande) pada tahun 2034 sebesar 1.424,43 liter/detik, sementara ketersediaan air minum eksisting sebesar 40 liter/detik yang berasal dari PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang. Dengan mempertimbangkan tingkat kebocoran dan peningkatan pelayanan, maka gap kebutuhan air minum pada tahun 2034 defisit sebesar 637,25 liter/detik. Meskipun jika dilakukan intervensi berupa penambahan kapasitas WTP Sindangheula dengan kapasitas 400 liter/detik, maka pada tahun 2034 ketersediaan air minum menjadi defisit 237,25 liter/detik.

2) Infrastruktur Persampahan

Dari perhitungan proyeksi penduduk dan tenaga kerja industri, dapat diproyeksikan jumlah timbulan sampah pada tahun 2034 sebesar **1.283,13 ton/hari**. Infrastruktur persampahan eksisting adalah TPA Cilowong (Kabupaten Serang) dan TPA Bagendung (Kota Cilegon) dengan kapasitas masing-masing 210.000 m³/tahun dan 595 m³/tahun. Saat ini TPA Cilowong terpakai 50% dari kapasitasnya dan TPA Bagendung sudah terpakai mencapai 98%. Untuk dapat memenuhi kebutuhan persampahan tersebut diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran. Sebagai upaya untuk tindak lanjut diperlukan usaha untuk perubahan perilaku seperti kebijakan pengurangan sampah dari sumber dan pemilahan sampah.

Tabel 7.26 Timbulan Sampah di Kecamatan KI Prioritas Provinsi Banten

Tahun	Timbulan Sampah Domestik (ton/hari)			Total
	Citangkil	Kibin	Kramatwatu	
2025	197.1	531.8	237.6	966.5
2026	203.1	549.0	244.7	996.8
2027	209.3	567.0	252.1	1028.4
2028	215.7	585.6	259.7	1061.0
2029	222.3	604.8	267.6	1094.7
2030	229.1	625.0	275.7	1129.8
2031	236.2	645.8	284.1	1166.1
2032	243.4	667.6	292.7	1203.7
2033	250.9	690.1	301.7	1242.7
2034	258.8	713.5	310.8	1283.1

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3) Infrastruktur Air Limbah

Kebutuhan penanganan air limbah di kawasan industri prioritas Banten pada tahun 2034 sebesar **2.049,44 liter/detik**, timbulan air limbah dihasilkan dari air domestik dan non domestik yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk alami dan tenaga kerja di kecamatan inti

kawasan industri prioritas Provinsi Banten. Untuk mengatasi permasalahan sanitasi tersebut diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pembiayaan infrastruktur terkait operasional dan pemeliharannya.

Tabel 7.27 Timbulan Air Limbah di Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang

Tahun	Timbulan Air Limbah (liter/detik)			Total
	Citangkil	Kibin	Kramatwatu	
2025	314.77	849.37	379.49	1543.64
2026	324.35	876.87	390.88	1592.11
2027	334.25	905.64	402.65	1642.53
2028	344.47	935.35	414.80	1694.62
2029	355.04	966.02	427.35	1748.41
2030	365.95	998.27	440.31	1804.53
2031	377.19	1031.46	453.83	1862.48
2032	388.81	1066.23	467.48	1922.52
2033	400.77	1102.26	481.81	1984.84
2034	413.40	1139.54	496.49	2049.44

Sumber: Hasil Analisis, 2025

7.1.4. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan pariwisata prioritas penanganan hingga tahun 2034 di Provinsi Banten adalah KEK Tanjung Lesung dan KPPN Serang-Banten Lama. Sedangkan Kawasan Pariwisata Labuan adalah salah satu destinasi wisata yang memiliki sejarah panjang dan potensi ekonomi besar di wilayah pesisir barat Provinsi Banten, tepatnya di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.

A. Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung

KEK Tanjung Lesung, KSPN Ujung Kulon-Tanjung Lesung, dan KPPN Serang-Banten Lama merupakan kawasan pariwisata di Provinsi Banten yang telah ditetapkan berdasarkan Ripparnas 2010-2025. Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung merupakan kawasan wisata berbasis wisata pantai dan mempunyai potensi wisata berupa wisata bahari, ekowisata, dan wisata budaya. Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung terletak di Kabupaten Pandeglang dengan kecamatan inti yang meliputi Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cigeulis, Subang, Panimbang, Angsana, dan Sukaresmi. Sektor pariwisata di Kabupaten Pandeglang berkontribusi 17,3% terhadap seluruh kedatangan wisatawan di Banten dan Provinsi Banten menyumbang kontribusi sebesar 5% dari total kedatangan wisata mancanegara melalui gerbang Soekarno Hatta.

Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung memiliki daya tarik utama di KEK Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Selain itu terdapat wisata pendukung seperti Pulau Umang, Pulau Mangir, Pantai Daplangu – Dadaplangu, Pantai Cemara, Pulau Liwungan, Desa Cikadu, Pantai Ciputih, dan Pulau Oar.

Namun, berdasarkan RPJMN 2025-2029, kawasan KSPN Ujung-Kulon ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan rawan bencana yang memperkuat posisi Ujung Kulon menjadi Taman Nasional bersama Taman Nasional Halimun-Salak. Oleh karena itu KSPN Ujung Kulon tidak lagi diarahkan menjadi kawasan pariwisata dan kecamatan inti kawasan pariwisata Tanjung Lesung hanya Kecamatan Panimbang.

Hingga triwulan II tahun 2025, pembangunan fisik KEK Tanjung Lesung mencapai 46,26%. Pengembangan pada KEK Tanjung Lesung dengan luas 1.500 ha diproyeksikan dapat meningkatkan PDRB sebesar 16 triliun rupiah pada tahun 2045. Aksesibilitas kawasan wisata menjadi prioritas pengembangan infrastruktur, diantaranya operasional tol Serang – Panimbang, reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung – Labuan, dan penetapan Marina Tanjung Lesung sebagai pelabuhan kapal pesiar asing.



Gambar 7.9 Peta Sebaran DTW di Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sementara itu KPPN Serang-Banten Lama merupakan kawasan wisata mempunyai potensi wisata berupa wisata religi, budaya, dan sejarah. KPPN Serang-Banten Lama terletak di Kota Serang dengan kecamatan inti yang meliputi Kecamatan Kasemen dan Serang. Sektor pariwisata di Kota Serang berkontribusi 38% terhadap seluruh kedatangan wisatawan di Banten. Kawasan KPPN Serang-Banten Lama memiliki daya tarik utama berupa Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Speelwijk, Vihara Avalokitesvara, serta Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.



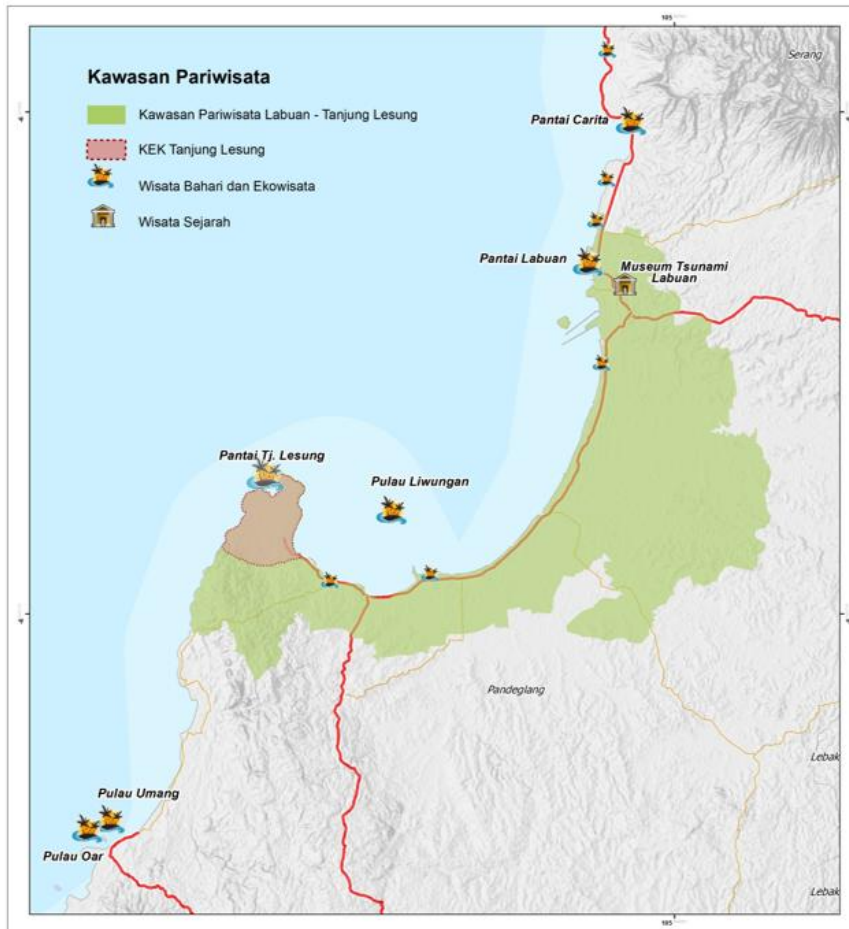
Gambar 7.10 Peta Sebaran DTW di KPPN Serang-Banten Lama

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sedangkan untuk Kawasan Labuan merupakan kawasan pariwisata sesuai arahan RPJMN 2025-2029. Kawasan ini menawarkan kombinasi wisata bahari, budaya, dan sejarah, antara lain: pantai, pulau-pulau kecil, museum sejarah, wisata kuliner, dan budaya lokal. Untuk detailnya Kawasan Labuan terdiri dari beberapa kawasan sebagai berikut:

1. Pantai Carita & Pantai Labuan: Cocok untuk wisata keluarga, berenang, dan menikmati matahari terbenam.
2. Pulau-pulau kecil (Pulau Umang, Pulau Oar, dsb.): Destinasi untuk snorkeling, diving, dan wisata eksklusif.

3. Jejak sejarah letusan Krakatau 1883: Termasuk Museum Tsunami mini dan situs bersejarah.
4. Kedekatan dengan Taman Nasional Ujung Kulon: Titik transit penting bagi wisatawan yang ingin menjelajah konservasi badak Jawa.
5. Wisata kuliner dan budaya lokal: Seperti ikan bakar, sate bandeng, dan tradisi seni debus.



Gambar 7.11 Peta Sebaran DTW di Kawasan Labuan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan karakteristik geologis Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung, mayoritas DTW terletak di pesisir pantai dengan potensi kebencanaan tsunami. Selain itu, gempa bumi banten pada tahun 2019 yang mengakibatkan tsunami pada beberapa titik di wilayah Kabupaten Pandeglang menunjukkan urgensi kebutuhan intervensi pengaman pantai sebagai respon tanggap kebencanaan dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan-

Tanjung Lesung. Pada tahun 2025 terdapat total 1.420 m pengaman pantai di Kecamatan Labuan dan Kecamatan Panimbang. Pengaman pantai di Kawasan Labuan-Tanjung Lesung lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.28 Pengaman Pantai di Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung

Pengaman Pantai	Panjang (m)	Kecamatan
Cipakis	10	Panimbang
Cikubang 2	150	Panimbang
Teluk	160	Labuan
KEK Tanjung Lesung	1.100	Panimbang

Sumber: Hasil Analisis, 2025

B. Proyeksi Penduduk dan Wisatawan

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung hingga tahun 2034 sebesar 141.571 jiwa. Kecamatan Panimbang memiliki jumlah penduduk lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Labuan, pada tahun 2034 sebesar 72.312 jiwa.

Tabel 7.29 Proyeksi Jumlah Penduduk Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung

Tahun	Jumlah Penduduk		
	Panimbang	Labuan	Total
2025	61.576	62.939	124.514
2026	62.685	63.611	126.297
2027	63.815	64.291	128.106
2028	64.965	64.979	129.943
2029	66.135	65.673	131.808
2030	67.327	66.375	133.702
2031	68.540	67.085	135.625
2032	69.775	67.802	137.577
2033	71.032	68.527	139.559
2034	72.312	69.259	141.571

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, tren jumlah wisatawan pada kecamatan Labuan dan Panimbang mengalami penurunan. Pada tahun sebelumnya, yaitu 2024, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan menjadi 2,3 juta orang dari 3,4 juta orang pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk cuaca ekstrem dan kekhawatiran akan potensi gempa megathrust, serta kemacetan lalu lintas menuju objek wisata. Jumlah wisatawan Labuan – Tanjung Lesung dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut.

Tabel 7.30 Jumlah Wisatawan Kawasan Labuan – Tj. Lesung

Kecamatan	Jumlah wisatawan						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Panimbang	109.317	17.672	7.353	6.306	38.242	43.389	29.579
Labuan	205.737	138.936	133.579	108.812	118.979	137.182	101.140
Total	315.054	156.608	140.932	115.118	157.221	180.571	130.719

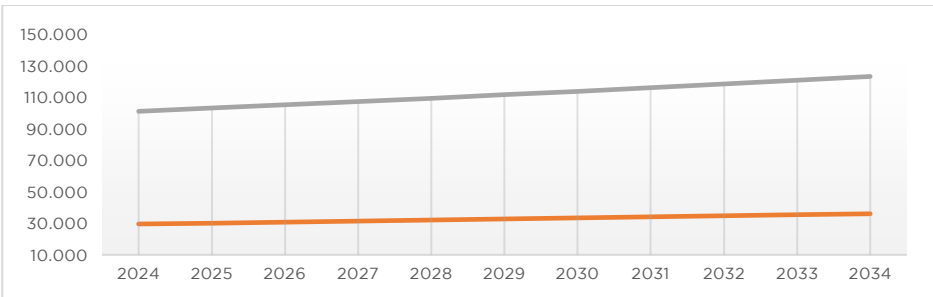
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Banten, 2025

Oleh karena itu, pada RPIW ini dilakukan asumsi pada kenaikan jumlah wisatawan sebesar 2% pertahun dengan adanya pembangunan Tol Serang-Panimbang, sehingga hasil analisis proyeksi jumlah wisatawan sebagai berikut.

Tabel 7.31 Proyeksi Jumlah Wisatawan Kawasan Labuan – Tj. Lesung

Kecamatan	Target Laju Pertumbuhan Wisatawan per tahun	Proyeksi Jumlah Wisatawan (jiwa)						
		2024	2025	2027	2029	2031	2033	2034
Panimbang	2%	29.579	30.171	31.389	32.658	33.977	35.350	36.057
Labuan		101.140	103.163	107.331	111.667	116.178	120.872	123.289
Total		130.719	133.333	138.720	144.324	150.155	156.221	159.346

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 7.12 Proyeksi Jumlah Wisatawan Labuan - Tj. Lesung

Sumber: Hasil Analisis, 2025

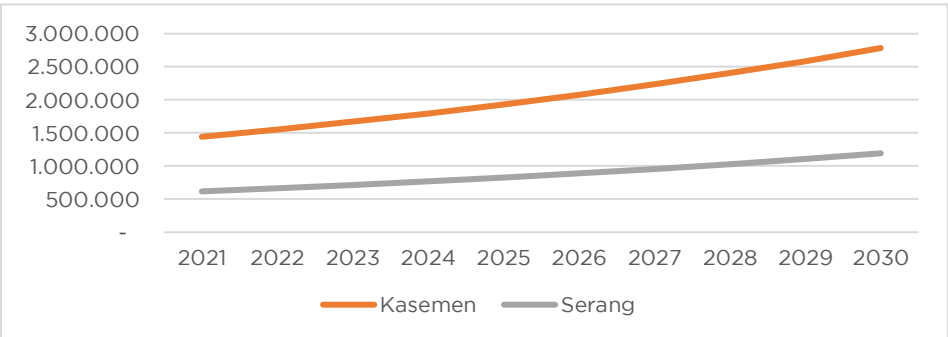
Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk di KPPN Serang-Banten Lama hingga tahun 2034 sebesar 393.678 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Kasemen yaitu sebesar 253.846 jiwa.

Tabel 7.32 Proyeksi Jumlah Penduduk di KPPN Serang-Banten Lama

Tahun	Jumlah Penduduk		
	Kasemen	Serang	Total
2025	235.707	117.599	353.306
2026	237.657	119.884	357.540
2027	239.623	122.212	361.835
2028	241.605	124.587	366.191
2029	243.603	127.007	370.610
2030	245.618	129.474	375.092
2031	247.650	131.989	379.639
2032	249.698	134.554	384.252
2033	251.764	137.167	388.931
2034	253.846	139.832	393.678

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain pertambahan penduduk, jumlah wisatawan KPPN Serang-Banten Lama juga diperkirakan akan bertambah. Pada tahun 2034 jumlah wisatawan mencapai 5,3 juta jiwa. Laju pertumbuhan wisatawan KPPN Serang-Banten Lama sebesar 7,6%.



Gambar 7.13 Proyeksi Jumlah Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara) di KPPN Serang-Banten Lama

Sumber: Hasil Analisis, 2025

C. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air

KSPN Labuan-Tanjung Lesung termasuk ke dalam Wilayah Sungai Ciliman-Cibungur yang merupakan WS kewenangan provinsi. Potensi air baku di Labuan – Tanjung Lesung sebanyak 2.430 liter/detik, yang diperoleh dari 9 sungai besar di sekitar kawasan. Potensi air baku terbesar berasal dari Sungai Ciliman, yaitu 1.800 liter/detik.

Tabel 7.33 Potensi Air Baku di Labuan – Tj. Lesung

No.	Kecamatan	Sumber Potensi	Debit (liter/detik)
1.	Cimanggu	Sungai Sisih	45
2.	Cibaliung	Sungai Cibaliung	25
3.	Cikeusik	Sungai Cikeusik	225
4.	Cigeulis	Sungai Ciseureuheun	45
5.	Munjul	Sungai Ciliman	1.800
6.	Bojong	Sungai Cilemer	105
7.	Pagelaran	Sungai Cibungur	25
8.	Labuan	Sungai Cibama	100
9.	Cimanuk	Sungai Cilembu	60
Total			2.430

Sumber: Hasil Analisis, 2025

D. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan

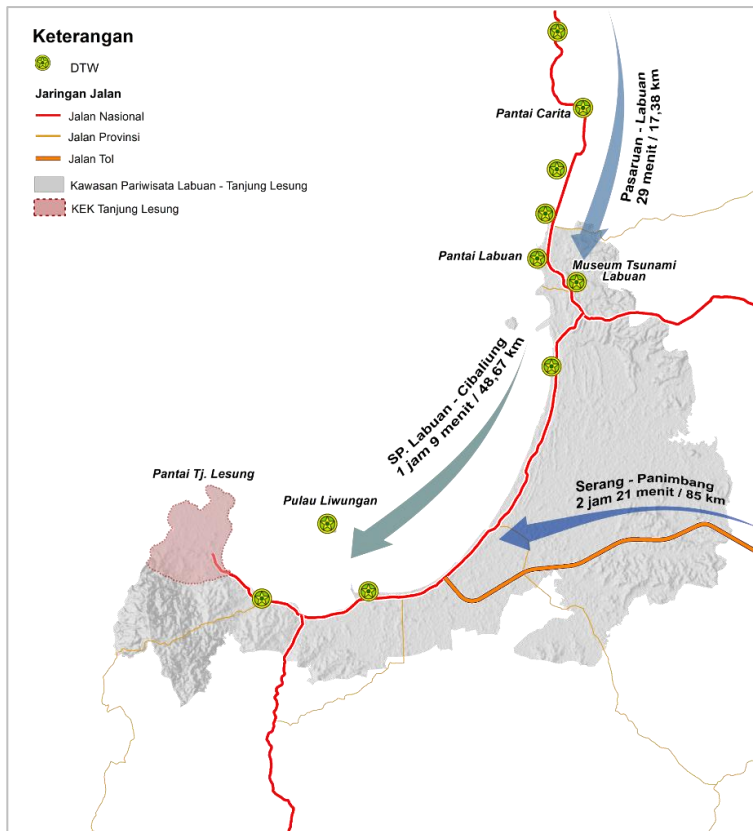
Analisis kebutuhan infrastruktur jalan terdiri dari *relevant road* kawasan pariwisata dan proyeksi bangkitan lalu lintas akibat adanya kegiatan pariwisata di Labuan—Tj. Lesung dan KPPN Serang—Banten Lama.

1) *Relevant Road Kawasan Pariwisata*

Akses menuju Kawasan Labuan - Tanjung Lesung dikategorikan cukup jauh, karena tidak adanya hub transportasi yang dekat dengan Kabupaten Pandeglang. Akses terdekat dari hub transportasi dapat melalui 3 pintu yaitu: Kota Cilegon melalui Pelabuhan Merak, Kota Tangerang melalui Bandara Soekarno- Hatta, dan Kabupaten Lebak melalui stasiun KRL Rangkasbitung.

Dari hub transportasi Kota Cilegon, dilanjutkan melalui jalan nasional ruas Citereup - Tanjung Lesung, dan SP. Labuan - Cibaliung. Kondisi jalan nasional baik dengan VCR masih di bawah 0,8 dan lebar sudah sesuai standar (7 m) dengan kondisi mantap.

Akses menuju KPPN Serang-Banten Lama dikategorikan mudah dijangkau karena posisinya yang berada di tengah Kota Serang. Akses terdekat dari hub transportasi dapat melalui 2 pintu yaitu: Kota Cilegon melalui Pelabuhan Merak, Kota Tangerang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari hub transportasi Kota Cilegon, dilanjutkan melalui jalan nasional ruas Raya Merak (Cilegon), Raya Cilegon (Cilegon), Merak - Bts. Kota Cilegon, Raya Serang (Cilegon), dan Bts. Kota Cilegon - Bts. Kota Serang, dan Raya Cilegon (Serang). Kondisi jalan nasional menuju KPPN Serang-Banten Lama dari hub transportasi melalui Pelabuhan Merak relatif padat dengan VCR >0,8 berada di ruas jalan Raya Merak (Cilegon), Raya Serang (Cilegon), dan Raya Cilegon (Serang). Sementara itu, terdapat jalan tol Jakarta-Merak yang melayani wisatawan melalui hub transportasi Bandara Soekarno Hatta menuju kawasan KPPN Serang-Banten Lama yang memiliki exit toll di Kota Serang. Untuk pengembangan perkotaan dibutuhkan konektivitas dan aksesibilitas yang baik tidak hanya kewenangan nasional namun juga kewenangan pemerintah daerah.



Gambar 7.14 Akses Menuju Kawasan Labuan-Tanjung Lesung
Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 7.15 Akses Menuju KPPN Serang-Banten Lama
Sumber: Hasil Analisis, 2025

2) Proyeksi Bangkitan Pergerakan Kawasan Pariwisata

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Pandeglang akan didukung dengan adanya Jalan Tol Serang – Panimbang menimbulkan bangkitan pergerakan pariwisata sebesar 3.007 smp/minggu dengan proyeksi wisatawan 144.324 pada tahun 2029. Jalan nasional sudah memiliki tingkat pelayanan cukup baik (LOS A-C). Namun, jalan kabupaten belum mampu menampung bangkitan kendaraan dari aktivitas pariwisata sehingga diarahkan adanya peningkatan kapasitas jalan kabupaten guna mendukung pariwisata Kawasan Labuan – Tanjung Lesung.

Tabel 7.34 Proyeksi Jumlah Wisatawan Kawasan Labuan – Tj. Lesung

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan	Jumlah Wisatawan / Minggu	Jumlah Wisatawan / Hari
1	2024	130,719	2,723	358
2	2025	133,333	2,778	365
3	2026	136,000	2,833	373
4	2027	138,720	2,890	380
5	2028	141,494	2,948	388
6	2029	144,324	3,007	395
7	2030	147,211	3,067	403
8	2031	150,155	3,128	411
9	2032	153,158	3,191	420
10	2033	156,221	3,255	428
11	2034	159,346	3,320	437

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dengan adanya pertumbuhan wisatawan di Labuan – Tanjung Lesung total bangkitan pergerakan wisatawan pada tahun 2034 sebesar 437 smp/hari atau 3.320 smp/minggu. Berdasarkan proyeksi terdapat salah satu jalan nasional di sekitar Kawasan Labuan – Tanjung Lesung berada pada kondisi jenuh yaitu Ruas Jalan Citereup – Tanjung Lesung dan SP. Labuan – Cibaliung pada tahun (2034). Ruas jalan Citereup – Tanjung Lesung tidak menunjukkan tingkat kejenuhan yang signifikan hingga tahun 2034. Sedangkan untuk Ruas Jalan Pasaruran – Labuan, JL. A. Yani, Labuan – SP. Labuan, dan Simp. Labuan – Saketik menunjukkan tingkat pelayanan yang cukup baik (LOS A-C).

Tabel 7.35 Proyeksi Bangkitan Pergerakan Kawasan Labuan – Tj. Lesung

No	Ruas Jalan	Tahun					
		2025	2029	2034	2025	2029	2034
		Bangkitan Pergerakan (smp/hari)			Bangkitan Pergerakan (smp/minggu)		
1.	Cibaliung – Sumur	297	520	1.046	2.082	3.641	7.323
2.	Citereup – Tanjung Lesung	717	1.254	2.522	5.018	8.777	17.654
3.	SP. Labuan – Cibaliung	1.365	2.076	4.801	9.554	16.709	33.609

Sumber Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan proyeksi terdapat salah satu jalan nasional di sekitar Kawasan Labuan – Tanjung Lesung berada pada kondisi jenuh yaitu Ruas Jalan Citereup – Tanjung Lesung dan SP. Labuan – Cibaliung pada

tahun (2034). Ruas jalan Citereup – Tanjung Lesung tidak menunjukkan tingkat kejenuhan yang signifikan hingga tahun 2034. Sedangkan untuk Ruas Jalan Pasauran – Labuan, JL. A. Yani, Labuan – SP. Labuan, dan Simp. Labuan – Saketiki menunjukkan tingkat pelayanan yang cukup baik (LOS A-C).

Tabel 7.36 Proyeksi LHR dan VCR di Jalan Nasional

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (km)	Lebar (m)	IRI	LHR (smp/jam)			VCR		
					2025	2029	2034	2025	2029	2034
2203312	Citereup - Tanjung Lesung	6,1	3,62	8.76	342	412	521	0.98	1.18	1.50
2203716	Pasauran - Labuan	17,38	6,52	8.61	478	577	729	0.07	0.08	0.10
2203717	Jl. A. Yani (Labuhan)	1,1	6,75	4.76	1.333	1608	2.032	0.20	0.24	0.30
2203718	Labuan - Sp. Labuan	1,8	6,52	4.32	2.213	2669	3.374	0.33	0.40	0.51
2203811	Simp. Labuan - Saketiki	19,79	6,69	5.16	802	967	1.222	0.12	0.14	0.18
2208513	Sp. Labuan - Cibaliung	48,67	6,24	7.27	651	785	992	0.69	0.83	1.05

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sedangkan pada KPPN Serang-Banten Lama, selain jalan nasional, jalan utama menuju DTW merupakan jalan dengan status jalan daerah. Berdasarkan hasil proyeksi, bangkitan akibat aktivitas pariwisata di KPPN Serang-Banten Lama pada tahun 2034 cukup besar, yaitu 3.721 smp/hari, sehingga diarahkan adanya peningkatan kapasitas jalan daerah guna mendukung pariwisata.

Tabel 7.37 Proyeksi Bangkitan Pergerakan KPPN Serang-Banten Lama

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan/Tahun	Bangkitan Pergerakan (smp/hari)	Bangkitan Pergerakan (smp/minggu)
1.	2025	2.760.039	1.890	13.233
2.	2026	2.969.257	2.034	14.236
3.	2027	3.194.335	2.188	15.315
4.	2028	3.436.474	2.354	16.476
5.	2029	3.696.968	2.532	17.725
6.	2030	3.992.725	2.735	19.143
7.	2031	4.312.143	2.954	20.675
8.	2032	4.657.115	3.190	22.329
9.	2033	5.029.684	3.445	24.115
10.	2034	5.432.059	3.721	26.044

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Untuk pengembangan industri dibutuhkan konektivitas dan aksesibilitas yang baik tidak hanya kewenangan nasional namun juga kewenangan pemerintah daerah, sehingga tercipta dukungan konektivitas multimoda yang baik antar pusat kegiatan dan destinasi tujuan wisata (DTW).

E. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Analisis kebutuhan infrastruktur permukiman menguraikan kebutuhan air minum, timbulan sampah, dan timbulan air limbah.

1) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Air Minum

Kebutuhan air minum Kabupaten Pandeglang bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah wisatawan hingga tahun 2034 di Kawasan Labuan – Tanjung Lesung. Kebutuhan air minum domestik hingga tahun 2034 sebesar 196,63 liter/detik serta kebutuhan non domestik sebesar 29,49 liter/detik. Proyeksi total kebutuhan suplai air di Kawasan Labuan – Tanjung Lesung pada tahun 2029 181,21 liter/detik dengan target pelayanan akses air perpipaan hingga tahun 2029 sebesar 30% (RPJMN 2024) dan faktor kehilangan air 15% sehingga dapat di proyeksikan untuk kebutuhan suplai air dan kehilangan air di Kawasan Labuan – Tanjung Lesung pada tahun 2029 sebesar 208,39 liter/detik.

Tabel 7.38 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Labuan - Tj. Lesung

Kecamatan		Panimbang	Labuan
Baseline Kebutuhan Air (Liter/ orang/ hari)		120	120
Kebutuhan Air Domestik (Liter/ detik)	2025	85,52	87,41
	2029	91,85	91,21
	2034	100,43	96,19
Kebutuhan Air Non Domestik (Liter/ detik)	2025	12,83	13,11
	2029	13,78	13,68
	2034	15,06	14,43
Sambungan Rumah (SR) (Liter/ orang/ hari)	2025	61.576	62.939
	2029	66.135	65.673
	2034	72.312	69.259

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kebutuhan air minum perpipaan saat ini dilayani oleh PDAM Perumdam Tirta Berkah, dengan cakupan pelayanan Kecamatan Panimbang. Pemenuhan air minum Kecamatan Panimbang dilayani oleh SPAM Tanjung Lesung dan Tanjungjaya dengan total kapasitas produksi 102 liter/detik. Sedangkan Kecamatan Labuan dilayani oleh SPAM Sukamaju, MA Cipanggitik, Cipicung, dan Citaman dengan total kapasitas produksi 91 liter/detik.

Tabel 7.39 GAP Kebutuhan Air Minum Kecamatan Panimbang (SPAM Tj Lesung dan KPSPAMS Tanjung Jaya)

Tahun	Kapasitas Produksi SPAM	(%) Layanan	Kebutuhan Layanan (Domestik) (liter/detik)	GAP SPAM	Kebutuhan Layanan (Wisatawan) (liter/detik)	GAP Total
2025	102	22%	10,98	91,02	0,115	90,91
2026	102	27%	13,71	88,29	0,117	88,17
2027	102	33%	17,06	84,94	0,119	84,82
2028	102	39%	20,53	81,47	0,122	81,35
2029	102	45%	24,11	77,89	0,124	77,76
2030	102	50%	27,27	74,73	0,127	74,60
2031	102	56%	31,10	70,90	0,129	70,77
2032	102	62%	35,05	66,95	0,132	66,82
2033	102	68%	39,13	62,87	0,135	62,73

Tahun	Kapasitas Produksi SPAM	(%) Layanan	Kebutuhan Layanan (Domestik) (liter/detik)	GAP SPAM	Kebutuhan Layanan (Wisatawan) (liter/detik)	GAP Total
2034	102	75%	43,94	58,06	0,137	57,92

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.40 GAP Kebutuhan Air Minum Kecamatan Labuan (SPAM Sukamaju, Cipanggitik, Citaman, dan Cipicung)

Tahun	Kapasitas Produksi SPAM	(%) Layanan	Kebutuhan Layanan (Domestik) (liter/detik)	GAP SPAM	Kebutuhan Layanan (Wisatawan) (liter/detik)	GAP Total
2025	91	22%	11,22	79,78	0,39	79,39
2026	91	27%	13,92	77,08	0,40	76,68
2027	91	33%	17,19	73,81	0,41	73,40
2028	91	39%	20,53	70,47	0,42	70,05
2029	91	45%	23,94	67,06	0,42	66,63
2030	91	50%	26,89	64,11	0,43	63,68
2031	91	56%	30,44	60,56	0,44	60,12
2032	91	62%	34,06	56,94	0,45	56,49
2033	91	68%	37,75	53,25	0,46	52,79
2034	91	75%	42,08	48,92	0,47	48,45

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pada tahun 2025 kebutuhan air di Labuan—Tj. Lesung sebesar 172,94 liter/detik untuk kebutuhan domestik dan 0,70 liter/detik untuk kebutuhan wisatawan dan pada tahun 2034 kebutuhan air di Labuan-Tj. Lesung sebesar 196,63 liter/detik untuk kebutuhan domestik dan 0,83 liter/detik untuk kebutuhan wisatawan. Sedangkan saat ini, ketersediaan air minum di SPAM Tj. Lesung hanya 100 liter/detik, sehingga terjadi defisit kebutuhan air minum sebesar 83,82 liter/detik (2029) dan 97,46 liter/detik (2034).

Selain itu, persentase layanan diproyeksikan terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai 45% pada tahun 2029, dengan rata-rata kenaikan layanan air minum sebesar 5% per tahunnya.

Kebutuhan air minum di kecamatan inti KPPN Serang-Banten Lama bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah wisatawan hingga tahun 2034. Kebutuhan air minum domestik tahun 2029 sebesar 514,74 liter/detik dan kebutuhan air minum domestik hingga tahun 2034 sebesar 546,78 liter/detik, kebutuhan non domestik tahun 2029 sebesar 77,21 liter/detik dan kebutuhan non domestik tahun 2034 sebesar 82,02 liter/detik, serta kebutuhan wisatawan tahun 2029 sebesar 19,34 liter/detik dan kebutuhan wisatawan tahun 2034 sebesar 27,87 liter/detik.

Proyeksi total kebutuhan suplai air di KPPN Serang-Banten Lama pada tahun 2029 sebesar 611,29 liter/detik dengan target pelayanan akses air perpipaan hingga tahun 2029 sebesar 30% (RPJMN 2024) serta total kebutuhan suplai air di KPPN Serang-Banten Lama pada tahun 2034 sebesar 656,66 liter/detik dengan target pelayanan akses perpipaan

sebesar 45% dan faktor kehilangan air 15% sehingga dapat di proyeksikan untuk kebutuhan suplai air + kehilangan air pada tahun 2029 sebesar 254,10 liter/detik dan pada tahun 2034 sebesar 409,33 liter/detik.

Tabel 7.41 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KPPN Serang-Banten Lama

Kecamatan		Kasemen	Serang	Total
Baseline (Liter/ orang/ hari)		120	120	120
Domestik (Liter/ detik)	2025	327,37	163,33	490,70
	2029	338,34	176,40	514,74
	2034	325,56	194,21	546,78
Non Domestik (Liter/ detik)	2025	49,11	24,50	73,61
	2029	50,75	26,46	77,21
	2034	52,88	29,13	82,02
Sambungan Rumah (SR) (Liter/ orang/ hari)	2025	235.707	117.599	353.306
	2029	243.603	127.007	370.61
	2034	253.846	139.832	393.678

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kebutuhan air minum perpipaan saat ini dilayani oleh SPAM Banten Lama Kota Serang dengan kapasitas 25 liter/detik, dengan cakupan pelayanan Kecamatan Kasemen serta Perumdam Tirta Kabupaten Serang yang juga melayani Kecamatan Serang. Saat ini tingkat pelayanan baru 13% (27 liter/detik) dikarenakan terbatasnya jaringan perpipaan. Jika tidak dilakukan intervensi berupa penambahan kapasitas SPAM atau pemanfaatan *iddle capacity* PDAM, pada tahun 2029 gap kebutuhan air minum di KPPN Serang-Banten Lama sebesar 559,29 liter/detik dan pada tahun 2034 gap kebutuhan air minum di KPPN Serang-Banten Lama sebesar 604,66 liter/detik.

Pemenuhan pelayanan air minum tersebut dapat dipenuhi melalui pemanfaatan jaringan air baku air minum dari bendungan Karian atau optimalisasi dari sumber air baku air minum existing yang lain. Hal ini tentunya diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran.

Tabel 7.42 GAP Kebutuhan Air Minum KPPN Serang-Banten Lama

Tahun	Proyeksi Kebutuhan (Liter/detik)			GAP Total
	SPAM Banten Lama dan PDAM	Kebutuhan Layanan (Domestik dan Non Domestik)	Kebutuhan Layanan (Wisatawan)	
2025	52	564,31	14,44	-526,75
2026	52	571,07	15,54	-534,61
2027	52	577,93	16,71	-542,64
2028	52	584,89	17,98	-550,87
2029	52	591,95	19,34	-559,29
2030	52	599,11	20,81	-567,91
2031	52	606,37	22,39	-576,75
2032	52	613,74	24,08	-585,82
2033	52	621,21	25,91	-595,12
2034	52	628,79	27,87	-604,66

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Timbulan sampah yang dihitung merupakan sampah domestik penduduk dan wisatawan, dengan rata-rata timbulan 113,61 ton/hari tahun 2034. Kurang memadainya fasilitas persampahan mengakibatkan praktek pembakaran sampah dan pembuangan ke badan air oleh masyarakat. Di setiap DTW juga harus disediakan fasilitas sampah komunal. Hingga tahun 2034 Kecamatan Panimbang memiliki timbulan sampah terbesar di Kawasan Labuan – Tanjung Lesung sebesar 21.143,84 ton/tahun.

Tabel 7.43 Proyeksi Timbulan Sampah Labuan - Tj. Lesung

Timbulan Sampah (ton/tahun)			
Kecamatan	Panimbang	Labuan	Total
2025	18.004,28	18.460,62	36.464,90
2026	18.328,72	18.658,73	36.987,45
2027	18.659,01	18.858,97	37.517,98
2028	18.995,25	19.061,36	38.056,61
2029	19.337,55	19.265,94	38.603,49
2030	19.686,02	19.472,71	39.158,74
2031	20.040,77	19.681,72	39.722,49
2032	20.401,91	19.892,97	40.294,89
2033	20.769,57	20.106,50	40.876,07
2034	21.143,84	20.322,34	41.466,18

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Timbulan sampah kawasan Labuan – Tanjung Lesung masuk dalam cakupan layanan TPA Bangkonol dan TPA Bojong Canar. TPA Bojong Canar merupakan TPA terdekat dari Kawasan Labuan – Tanjung Lesung berjarak 10 km dari Kecamatan Labuan, sedangkan TPA Bojong Canar terletak 40 km dari Kecamatan Labuan. Rata-rata timbulan TPA Bangkonol pada tahun 2020 adalah 6.730 m³/bulan atau sama dengan 225 m³/hari, penanganan di TPA Bangkonol pada tahun 2020 hanya 6,62%. Jika sesuai target RPJMN 2020-2024 penanganan sebesar 80% maka diperkirakan timbulan sampah akan menjadi 81.330 m³/bulan atau 2.711 m³/hari serta kapasitas TPA Bangkonol sendiri akan bisa menampung timbulan sampah hingga tahun 2032. Sedangkan TPA Bojongcanar yang mempunyai luas sebesar 32 ha dengan sisa kapasitas 91.000 m³ memiliki *idle capacity* -1.907 m³ hingga tahun 2026.

Tabel 7.44 Kapasitas TPA di wilayah Kab. Pandeglang

Nama TPA	Luas	Kapasitas Terpakai 2022 (Ha)	Sisa Kapasitas (m ³)	Cakupan Pelayanan	Timbulan (m ³ /hari)	Timbulan (m ³ /hari)	Total Timbulan (m ³)	Idle Capacity (m ³)
Bangkonol	3,10	3,2	987.000	19 Kecamatan (wilayah utara)	250	7.500	91.250	99.799
Bojongcanar	3,2	3,05	91.000	16 Kecamatan (wilayah selatan)	50	1.500	18.250	18.916

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Terdapat 1 TPA yang melayani KPPN Serang-Banten Lama yaitu TPA Cilowong di Kota Serang. TPA Cilowong memiliki luas 12 ha dengan kapasitas 155.928 m³/tahun. Meskipun masih dapat menampung sampah yang masuk, diperkirakan TPA Cilowong akan penuh 2-3 tahun lagi.

Timbulan sampah yang dihitung berdasarkan hitungan 0,8 kg/orang/hari dan dilakukan perhitungan baik untuk penduduk ataupun wisatawan. Pada tahun 2034 diproyeksikan timbulan sampah mencapai 119.295 ton/tahun dengan timbulan sampah terbesar berada di Kecamatan Kasemen yaitu 77.157 ton/tahun. Untuk dapat memenuhi kebutuhan persampahan tersebut diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran. Sebagai upaya untuk tindak lanjut diperlukan usaha untuk perubahan perilaku seperti kebijakan pengurangan sampah dari sumber dan pemilahan sampah.

Tabel 7.45 Timbulan Sampah di KPPN Serang-Banten Lama

Timbulan Sampah Penduduk dan Wisatawan (ton/tahun)			
Kecamatan	Kasemen	Serang	Total
2025	70.419,22	35.024,84	105.444,06
2026	71.106,08	35.742,59	106.848,67
2027	71.806,53	36.477,12	108.283,65
2028	72.521,28	37.228,96	109.750,24
2029	73.251,11	37.998,69	111.249,79
2030	73.996,82	38.786,89	112.783,71
2031	74.759,30	39.594,19	114.353,49
2032	75.539,49	40.421,26	115.960,75
2033	76.338,39	41.268,78	117.607,18
2034	77.157,10	42.137,49	119.294,59

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Sanitasi

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Induk SPAL, Ditjen Cipta Karya Tahun 2016, potensi produksi air limbah cair (*grey water*) adalah 80% dari konsumsi domestik, potensi produksi lumpur tinja adalah 0,5 liter/orang/hari. Potensi produksi air limbah domestik pada Kawasan Labuan - Tanjung Lesung (2034) adalah sebesar 23,6 liter/detik. Sehingga dibutuhkan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 7.46 Timbulan Air Limbah Domestik Labuan - Tj. Lesung

Timbulan Air Limbah Domestik (Liter/detik)			
Kecamatan	Panimbang	Labuan	Total
2025	10,26	10,49	20,75
2026	10,45	10,60	21,05
2027	10,64	10,72	21,35
2028	10,83	10,83	21,66
2029	11,02	10,95	21,97
2030	11,22	11,06	22,28
2031	11,42	11,18	22,60

Timbunan Air Limbah Domestik (Liter/detik)			
Kecamatan	Panimbang	Labuan	Total
2032	11,63	11,30	22,93
2033	11,84	11,42	23,26
2034	12,05	11,54	23,60

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain itu, potensi produksi air limbah yang ditimbulkan oleh kegiatan wisatawan (2034) adalah sebesar 0,485 liter/detik atau 41.910,11 liter/hari. Potensi produksi lumpur tinja penduduk pada Kawasan Labuan - Tanjung Lesung (2034) adalah sebesar 70,79 m³/hari. Sehingga dibutuhkan infrastruktur pengolahan air limbah sesuai dengan kebutuhan dikarenakan belum ada IPLT terutama untuk kawasan pariwisata serta kecamatan yang masih banyak belum memiliki sistem sanitasi on site.

Tabel 7.47 Timbunan Air Limbah Pariwisata Labuan - Tj. Lesung

No.	Tahun	Timbunan Limbah Pariwisata (Liter/hari)	Timbunan Limbah Pariwisata (Liter/detik)
1.	2025	35.068,51	0,406
2.	2026	35.769,88	0,414
3.	2027	36.485,27	0,422
4.	2028	37.214,98	0,431
5.	2029	37.959,28	0,439
6.	2030	38.718,46	0,448
7.	2031	39.492,83	0,457
8.	2032	40.282,69	0,466
9.	2033	41.088,34	0,476
10.	2034	41.910,11	0,485

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Saat ini Kota Serang belum mempunyai IPLT sehingga pengelolaan limbah domestik masih menggunakan sistem *onsite*. KPPN Serang-Banten Lama juga membutuhkan sistem pengelolaan air limbah, karena saat ini beberapa pembuangan air limbah masih dibuang langsung dari rumah warga ke sungai terdekat. Untuk mengatasi permasalahan sanitasi tersebut diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pembiayaan infrastruktur terkait operasional dan pemeliharannya.

Tabel 7.48 Proyeksi Timbunan Air Limbah KPPN Serang-Banten Lama

Timbunan Air Limbah Domestik (Liter/detik)			
Kecamatan	Kasemen	Serang	Total
2025	269,98	134,13	404,11
2026	272,76	136,93	409,70
2027	275,61	139,80	415,41
2028	278,52	142,74	421,26
2029	281,50	145,76	427,26
2030	284,56	148,85	433,42
2031	287,70	152,03	439,73
2032	290,93	155,28	446,21

2033	294,25	158,63	452,87
2034	297,66	162,06	459,72

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Timbulan air limbah di KPPN Serang-Banten Lama pada tahun 2034 diproyeksikan sebesar 459,72 liter/detik. Dibutuhkan infrastruktur pengolahan air limbah dikarenakan belum adanya IPLT terutama untuk kawasan pariwisata, serta masih banyak yang belum memiliki sistem sanitasi *onsite* yang sesuai.

7.1.5. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pertanian

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan pertanian prioritas penanganan pertanian hingga tahun 2029 di Provinsi Banten adalah di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

A. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten

Kabupaten di Provinsi Banten dengan potensi pertanian tertinggi adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Rata-rata produktivitas padi di Provinsi Banten sebesar 53,63 kw/ha. Produktivitas tertinggi di Provinsi Banten berada di Kabupaten Serang yaitu sebesar 53,84, disusul Kabupaten Pandeglang sebesar 53,52, serta Kabupaten Lebak sebesar 48,23. Dari sisi produksi, tertinggi berada di Kabupaten Pandeglang sebesar 414.576 ton, disusul Kabupaten Serang sebesar 409.150 ton, serta Kabupaten Lebak sebesar 357.013 ton. Luasan panen terbesar berada di Kabupaten Pandeglang sebesar 77.466 Ha, disusul Kabupaten Serang sebesar 75.987 Ha, serta Kabupaten Lebak sebesar 74.016 Ha. Secara rinci, data kawasan pertanian prioritas Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.49 Data Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten

Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)	Luas Sawah (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi Padi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	PDRB Pertanian (Miliar Rupiah)	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)
Serang	146.735	47.123	86.997	409.150	53,84	9.567	9,36
Pandeglang	274.681	47.078	77.466	414.576	53,52	11.646	34,23
Lebak	331.218	40.203	74.016	357.013	48,23	22.706	42,87

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Ditinjau dari segi ekonomi, kontribusi pertanian terhadap ekonomi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sangat tinggi. Sektor pertanian menyumbang sebesar 31,10% terhadap PDRB Kabupaten Pandeglang dan 42,87% terhadap PDRB Kabupaten Lebak. Sementara sektor pertanian Kabupaten Serang menyumbang sebesar 9,36% terhadap PDRB Kabupaten Serang. Jika dilihat dari total sektor pertanian di Provinsi Banten, PDRB sektor pertanian Kabupaten Serang 22,5%, Kabupaten Pandeglang 31,71%, dan Kabupaten Lebak 25,88%,

terhadap PDRB sektor pertanian Banten. Peta dibawah ini menggambarkan deliniasi kawasan pertanian di Kabupaten Serang dengan menggabungkan LP2B, DI, dan juga batas DAS nasional.



Gambar 7.16 Kawasan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2025

1) Layanan Irigasi Teknis

Total luas lahan sawah yang telah beririgasi di Kabupaten Pandeglang mencapai 11.721 ha, sedangkan di Kabupaten Lebak mecapai 771 ha, sementara luas lahan sawah di Kabupaten Serang mencapai 9.307 ha. Luasan tersebut sudah berkurang dari Kepmen PU no 293/KPTS/M/20014 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Penurunan luas daerah irigasi dalam 5 tahun terakhir terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.50 Luas Daerah Irigasi

Kewengangan Daerah Irigasi (DI)	Permen PUPR no 4 Tahun 2015 (Ha)	Data IGT Kementeri an PU (Ha)	Luas Fungsio nal (Ha)	IKSI (%)
Prov. Banten	29.221	248,46	19.641	56,65
Kab. Serang	9.307,44	6.114,47		45,76
Kab. Pandeglang	39.366	42.111,98	11.721	47,48
Kab. Lebak	47.119	12.522,16		71,93

Sumber: BBWS C3, Diolah BPIW, 2025

Di daerah terdapat pengurangan lahan yg cukup masif, namun di beberapa Kabupaten belum melakukan pengukuran luasan daerah irigasi yang fungsional dan masih dipertahankan menjadi lahan pertanian. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian di daerah selain

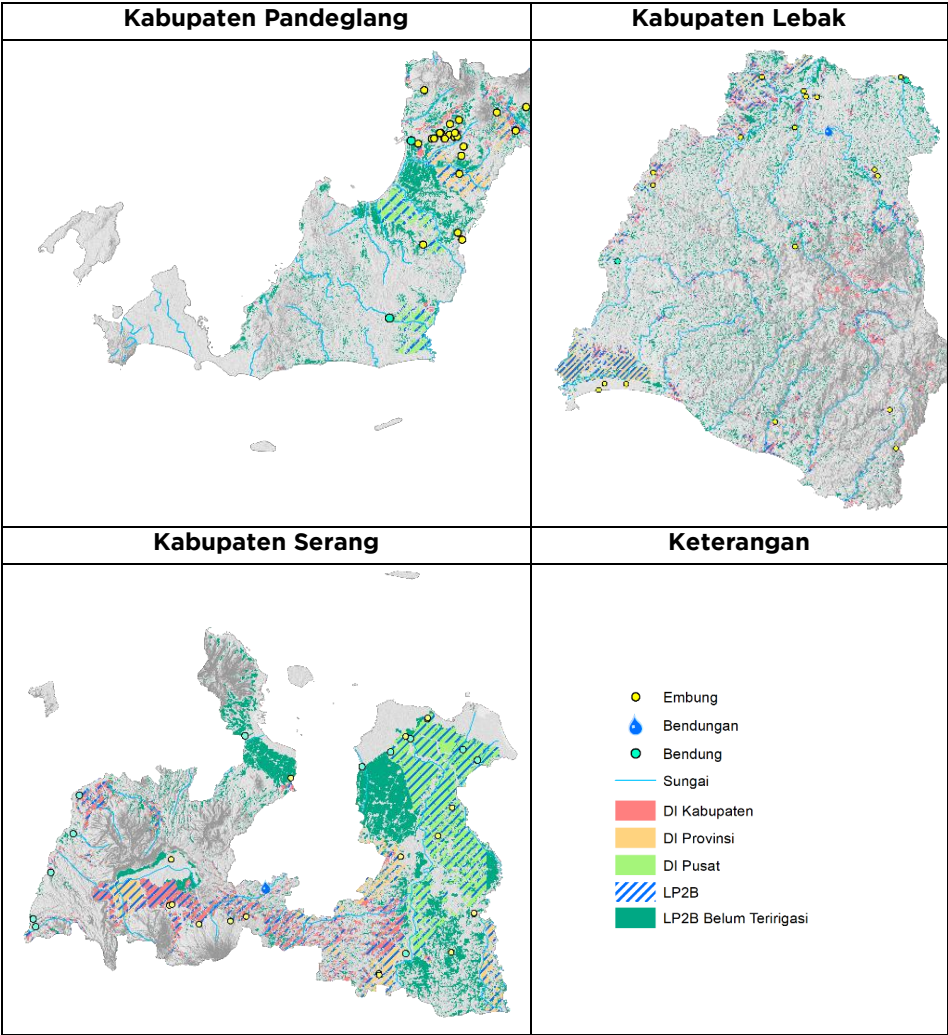
pengaruh dari pertumbuhan penduduk juga disebabkan karena banyak daerah irigasi yang tidak diperlihara sehingga mempunyai kondisi rusak dan tidak terpelihara sehingga lahan sawah yang dulunya produktif menjadi lahan tegalan dan berubah fungsinya yang terlihat dari nilai indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) yang kurang dari 70.

Pada Provinsi Banten terdapat 20 DI dimana 15 DI dalam kondisi kurang baik dan rusak (IKSI < 70), namun dari 15 DI tersebut baru 12 yang diusulkan penanganan melalui Inpres no 2 Tahun 2025. Sementara, Kabupaten Serang mempunyai 230 DI dimana keseluruhan dari DI tersebut telah teridentifikasi IKSI-nya dan hanya 3 DI yang berkondisi cukup baik (IKSI > 70), sebanyak 13 DI telah disusun RCnya dan kesemuanya telah diusulkan dalam Inpres no 2 Tahun 2025. Sementara ada 6 DI yang diusulkan melalui program JIAT.

Pada Kabupaten Lebak terdapat 463 DI dimana 214 DI dalam kondisi kurang baik dan rusak (IKSI < 70), namun hanya 28 DI yang sudah disusun RCnya. Dari 28 DI tersebut sudah diusulkan penanganan melalui Inpres no 2 Tahun 2025 sebanyak 14 DI. Sedangkan, pada Kabupaten Pandeglang terdapat 618 DI, dimana 608 DI dalam kondisi kurang baik dan rusak (IKSI < 70), namun baru 23 DI yang sudah disusun RCnya dan kesemuanya telah dimasukkan dalam usulan penanganan melalui Inpres no 2 Tahun 2025.

Dari luas lahan sawah tersebut diantaranya merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Dengan kebijakan LP2B tersebut diharapkan dapat mempertahankan lahan pertanian di Banten sebagai lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk saling mendukung dan menyediakan infrastruktur jaringan irigasi lintas kewenangan.

Dari total 137.177,78 ha luasan LP2B di Serang, Lebak, dan Pandeglang, sebesar 28,5 % (39.158,67 ha) sudah teraliri irigasi teknis baik melalui daerah irigasi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten. Sementara 71,45 % (98.019,11 ha) LP2B merupakan sawah tadah hujan dan sawah irigasi non teknis. Secara rinci, luas daerah irigasi di kawasan pertanian prioritas dapat dilihat pada tabel berikut dan secara spasial dapat dilihat pada Gambar 7.17 berikut ini.



Gambar 7.17 Sebaran LP2B dan Daerah Irigasinya

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan analisis geospasial dari peta kawasan pertanian dan sebaran LP2B yang disuperimpose terhadap daerah irigasi, dapat diketahui jika presentase daerah irigadi kewenangan nasional (DI Pusat) di Kabupaten Serang hanya sebesar 29,83%, sementara di Kabupaten Pandeglang hanya sebesar 18,98%. Presentase luas DI Pusat terkecil berada di Kabupaten Lebak yang hanya 0,19% dari luas LP2Bnya. DI Ciliman telah selesai ditangani pada tahun 2024, sedangkan DI Ciujung, direncanakan akan ditangani tahun 2026.

Tabel 7.51 Kinerja Jaringan Irigasi

Daerah Irigasi	IP	Luas Permen PU 14/2015 (Ha)	Luas IGT 2024 (Ha)	Panjang (Km)	Panjang Saluran			Nilai IKSI (persentase)		
					Utama	Tersier	Gabungan	Utama	Tersier	Gabungan
Ciujung (Kab. Serang dan Kab. Cilegon)	207	21.350,00	16.680,28	237,66	166,46	71,20	237,66	67,24 (Baik)	43,16 (Kurang dan Perlu Perhatian)	62,43 (Baik)
Ciliman (Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang)	200	5.423,00	5.007,00	358,34	62,24	18,90	81,14	64,11	43,12 (Kurang dan Perlu Perhatian)	59,91 (Kurang dan Perlu Perhatian)

Sumber: Hasil Analisis, 2025

*) Saluran Utama : Jaringan Primer dan Sekunder,
Jaringan primer merupakan kewenangan nasional dan jaringan sekunder merupakan kewenangan provinsi
Saluran Tersier : Jaringan tersier merupakan kewenangan kabupaten

Berdasarkan data Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) tahun 2024, diketahui bahwa jaringan irigasi utama di DI Ciujung berkinerja baik. Namun pada jaringan irigasi sekunder mempunyai kinerja kurang baik, sehingga direncanakan akan ditangani di tahun 2026. Demikian juga pada DI Ciliman yang berada di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang kinerja jaringan irigasi kewenangan kabupatennya berkinerja buruk dan menjadi fokus ditangani di tahun 2024.

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa sepanjang 111,92 Km jaringan utama di DI Ciujung telah berkinerja baik dan sepanjang 54,54 Km jaringan utama di DI Ciujung masih bekinerja kurang baik. Sementara itu, jaringan irigasi utama di DI Ciliman yang berkinerja baik adalah sepanjang 39,9 Km dan sebesar 22,33 Km masih berkinerja kurang baik.

Kebutuhan air di Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak pada tahun 2024 sebesar 137.178 lt/det, sementara suplai air baku melalui irigasi teknis baru mencapai 41,81%. Hingga tahun 2029 diproyeksikan terjadi peningkatan volume air irigasi sebesar 52.362 lt/det dari tahun 2023 seiring pembangunan bendungan/waduk. Sementara itu, dari tahun 2029 hingga 2034, volume air irigasi bertambah secara signifikan. Berikut merupakan rincian proyeksi volume kebutuhan penyediaan air irigasi.

Tabel 7.52 Proyeksi Volume Kebutuhan Air Baku Irigasi

Kabupaten	Luas LP2B	Daerah Irigasi	Total Kebutuhan Air Baku	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
	Hektar	Hektar	lt/det	lt/det	lt/det	lt/det	lt/det	lt/det	lt/det	lt/det
Serang	49.906	30.089	19.817	13.872	17.340	16.646	19.420	19.024	21.402	29.593
Pandeglang	40.147	18.161	21.986	16.059	20.074	24.088	28.103	32.118	36.132	56.206

Kabupaten	Luas LP2B	Daerah Irigasi	Total Kebutuhan Air Baku	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
	Hektar	Hektar	lt/det	lt/det	lt/det	lt/det	lt/det	lt/det	lt/det	lt/det
Lebak	47.123	18.325	28.798	18.849	23.562	28.274	32.986	37.698	42.411	65.972

Sumber: Hasil Analisis, 2025

*) Diasumsikan 1 Ha luasan LP2B membutuhkan 1 liter/detik

Layanan irigasi teknis di Kabupaten Lebak diproyeksikan meningkat dari 45,64% menjadi 47,39% pada tahun 2023-2034. Peningkatan tersebut berasal dari pembangunan Bendungan Karian yang sudah beroperasi pada tahun 2024. Bendungan Karian menambah suplai air irigasi sebesar 700 lt/det dengan suplesi pada jaringan irigasi *existing* dan pengembangan daerah irigasi baru.

Layanan irigasi teknis di Kabupaten Pandeglang dan Serang diproyeksikan tidak mengalami peningkatan pada tahun 2023-2034. Dikarenakan pada Kabupaten Pandeglang tidak ada rencana pembangunan bendungan yang akan menyuplai kebutuhan air irigasi.

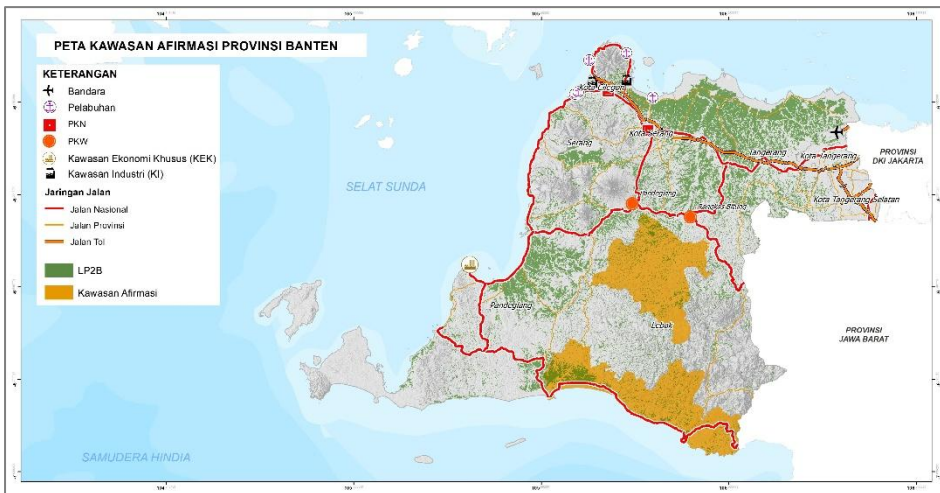
Selain, dukungan prasarana untuk ketahanan pangan berupa infrastruktur yang mendukung jaringan irigasi, diperlukan juga dukungan infrastruktur jalan untuk mendukung logistik pertanian.

7.1.6. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Afirmasi

Kawasan Banten Selatan di Provinsi Banten dipilih berdasarkan kajian kebijakan RPJMN 2025-2029 serta hasil analisis pada Bab 6, sehingga terpilih delineasi kawasan mencakup Kecamatan Bayah, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cihara, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cileles, dan Kecamatan Leuwidamar di Kabupaten Lebak. Berdasarkan karakteristik kawasan, Kawasan Banten Selatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pantai Selatan terdiri dari Kecamatan Bayah, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cihara, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, serta Baduy dan sekitarnya yaitu Kecamatan Cikulur, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cileles, dan Kecamatan Leuwidamar.

A. Kawasan Banten Selatan

Kondisi topografi di Kawasan Banten Selatan Baduy berupa perbukitan dengan ketinggian rata-rata 100 mdpl, sedangkan di pantai selatan berupa pesisir pantai landai dan dataran rendah. Kecamatan di Kawasan Banten Selatan dengan jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten Lebak yaitu Kecamatan Bayah (110 km), Kecamatan Panggarangan (103 km), dan Kecamatan Cihara (92,5 km).



Gambar 7.18 Delineasi Kawasan Banten Selatan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sektor unggulan perekonomian di Kawasan Banten Selatan Banten bagian Selatan bervariasi mencakup pariwisata dan perikanan. Potensi pariwisata di Kawasan Banten Selatan cukup beragam. Pada Pantai Selatan potensi berupa wisata alam dan pantai yang membentang dari Kawasan Sawarna Kecamatan Bayah hingga Kawasan Binuangeun dengan hamparan pantai pasir putih dan tebing karst, serta ombak Samudra Hindia yang cocok untuk berselancar.

Potensi wisata di Kabupaten Lebak juga terdapat Geowisata Bayah Dome yang memiliki potensi wisata dan edukasi. Kawasan Bayah Dome mencakup 32 situs warisan geologi di 15 kecamatan termasuk Kecamatan Cibeber. Potensi geologi mencakup Kubah magmatik Bayah, batuan granodiorit, dan gua mineral. Geowisata mulai dikembangkan setelah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 173 tahun 2025, adapun rencana pengembangan berupa pusat informasi, wisata edukasi, dan konservasi.

Pada Kawasan Banten Selatan Baduy dan sekitarnya, potensi berupa wisata budaya Suku Baduy. Desa Wisata Saba Budaya Baduy berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Penduduk asli Desa Baduy berjumlah sekitar 26.000 jiwa. Potensi Desa Wisata diantaranya pola hidup tradisional masyarakat Baduy tanpa terpapar teknologi modern, selain itu, wisatawan dapat mempelajari berbagai kerajinan khas Baduy seperti menenun kain dan anyaman. Pengembangan pariwisata Baduy diutamakan untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (*community-based tourism*), serta pelestarian budaya. Pengembangan Kawasan Baduy juga dengan mempertimbangkan adanya Kawasan Konservasi seluas 5.136,58 hektar

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Peningkatan wisatawan di Kawasan Banten Selatan ditargetkan pada angka 10%, karena mengingat kondisi lingkungan di Wilayah Jawa Bagian Selatan pada umumnya masih alami dan pengembangan belum masif, sehingga masih perlu pengembangan berorientasi lingkungan.

Tabel 7.53 Proyeksi Wisatawan Kawasan Banten Selatan

Kawasan	Proyeksi Wisatawan									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PANTAI SELATAN	346.205	350.741	355.337	359.994	364.711	369.490	374.332	379.237	384.206	389.241
Bayah	229.478	232.485	235.532	238.618	241.745	244.912	248.122	251.373	254.667	258.004
Cihara	27.626	27.988	28.355	28.727	29.103	29.484	29.871	30.262	30.659	31.060
Malingping	51.590	52.266	52.951	53.645	54.348	55.060	55.782	56.513	57.253	58.003
Wanasalam	37.510	38.002	38.500	39.004	39.515	40.033	40.558	41.089	41.627	42.173
BADUY	72.283	73.230	74.190	75.162	76.147	77.145	78.155	79.180	80.217	81.268
Cikukur	14.541	14.732	14.925	15.120	15.318	15.519	15.722	15.928	16.137	16.349
Leuwidamar	57.742	58.498	59.265	60.042	60.828	61.625	62.433	63.251	64.080	64.920
TOTAL	418.488	423.972	429.527	435.156	440.858	446.635	452.487	458.416	464.423	470.509

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain pariwisata, potensi Kawasan Banten Selatan juga mencakup sektor perikanan. Sektor perikanan di Kawasan Banten Selatan didukung adanya 11 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Produksi perikanan laut di Kabupaten Lebak sebesar 1,76 juta kilogram, atau berkontribusi sebesar 28,49% terhadap Provinsi Banten. Keunikan sosial budaya yang dimiliki masyarakat lokal dan keindahan alam dapat menjadi daya tarik sektor pariwisata serta potensi perikanan kelautan yang tinggi dapat meningkatkan PDRB perkapita dan nilai tambah terhadap komoditas unggulan di Kawasan Banten Selatan.

Dalam perhitungan proyeksi kebutuhan infrastruktur, diperlukan perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk, khususnya di kawasan prioritas. Berikut hasil proyeksi penduduk di Kawasan Banten Selatan hingga tahun 2034.

Tabel 7.54 Proyeksi Penduduk Kawasan Banten Selatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kawasan Banten Selatan (Pansela)	255.374	255.405	255.436	255.468	255.499	255.530	255.561	255.592	255.624	255.655
Bayah	46.879	46.883	46.888	46.893	46.897	46.902	46.907	46.911	46.916	46.921
Panggarangan	39.447	39.449	39.451	39.453	39.455	39.457	39.459	39.461	39.463	39.465
Cihara	34.318	34.321	34.325	34.328	34.332	34.335	34.339	34.342	34.346	34.350

Kecamatan	Jumlah Penduduk									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Malingping	74.361	74.374	74.386	74.399	74.412	74.425	74.437	74.450	74.463	74.476
Wanasalam	60.370	60.378	60.386	60.395	60.403	60.411	60.419	60.427	60.435	60.443
Kawasan Banten Selatan (Baduy)	276.438	276.490	276.541	276.593	276.644	276.696	276.747	276.799	276.850	276.902
Cikulur	62.868	62.888	62.907	62.927	62.947	62.967	62.986	63.006	63.026	63.046
Bojongmanik	25.719	25.722	25.726	25.730	25.734	25.737	25.741	25.745	25.749	25.752
Cimarga	75.234	75.249	75.264	75.279	75.294	75.309	75.324	75.339	75.353	75.368
Cileles	57.142	57.153	57.163	57.174	57.184	57.194	57.205	57.215	57.226	57.236
Leuwidamar	55.476	55.478	55.481	55.483	55.486	55.489	55.491	55.494	55.496	55.499
TOTAL	531.813	531.895	531.978	532.060	532.143	532.226	532.308	532.391	532.474	532.557

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Secara total pada Tahun 2024 Kawasan Pantai Selatan memiliki penduduk 255.343 jiwa sedangkan Kawasan Baduy memiliki penduduk 276.438 jiwa. Berdasarkan proyeksi menggunakan CAGR, laju pertumbuhan rata - rata 0,76% per tahun dapat diproyeksikan jumlah penduduk Kawasan Pantai Selatan pada tahun 2034 menjadi 255.655 jiwa, sedangkan Kawasan Baduy menjadi 276.902 jiwa, sehingga proyeksi jumlah penduduk total di Kawasan Banten Selatan sebesar 532.557 jiwa.

B. Analisis Kebutuhan Infrastruktur SDA

Analisis ini mencakup wilayah sungai, sumber air baku, dan kebutuhan air baku.

1) Analisis Wilayah Sungai dan Sumber Air Baku

Kawasan Banten Selatan tersebar di 2 wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai Cibaliung - Cisawarna untuk Kawasan Pantai Selatan, dan Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (C3) untuk Kawasan Baduy. Wilayah Sungai C3 merupakan wilayah sungai kewenangan nasional, sedangkan Wilayah Sungai Cibaliung - Cisawarna merupakan kewenangan Provinsi Banten. Ketersediaan air permukaan di WS Cibaliung-Cisawarna sebesar 102 lt/dtk untuk pelayanan di seluruh Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Sedangkan pada WS C3, untuk Kabupaten Lebak terdapat ketersediaan air permukaan sebesar 1.130 lt/detik.

2) Perhitungan Kebutuhan Air Baku Kawasan Banten Selatan

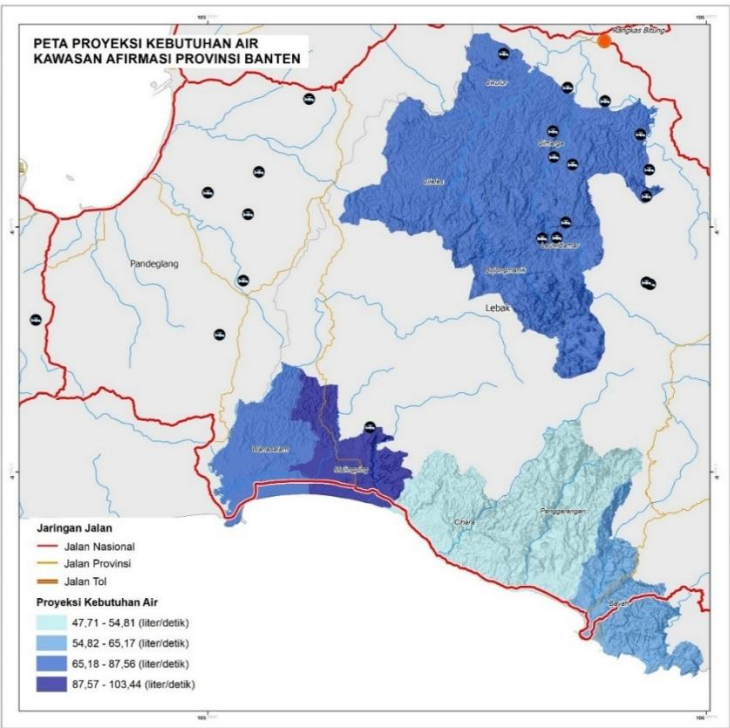
Total kebutuhan air domestik kawasan Pantai Selatan pada tahun 2024 sebesar 354,64 liter/detik. Kebutuhan tersebut bertambah pada tahun 2034 menjadi sebesar 355,08 liter/detik. Pada Kawasan Baduy, kebutuhan air domestik pada tahun 2024 sebesar 243,68, dan proyeksi kenaikan pada tahun 2034 sebesar 244,14 liter/detik. Kebutuhan bertambah sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk di kawasan perdesaan dengan laju pertumbuhan rata - rata 0,01% per tahun.

Tabel 7.55 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Banten Selatan

Tahun	Kebutuhan Air Baku Kawasan Banten Selatan (liter/detik)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kawasan Banten Selatan (Pansela)	354,69	354,73	354,77	354,82	354,86	354,90	354,95	354,99	355,03	355,08
Bayah	65,11	65,12	65,12	65,13	65,14	65,14	65,15	65,15	65,16	65,17
Panggarangan	54,79	54,79	54,79	54,80	54,80	54,80	54,80	54,81	54,81	54,81
Cihara	47,66	47,67	47,67	47,68	47,68	47,69	47,69	47,70	47,70	47,71
Malingping	103,28	103,30	103,31	103,33	103,35	103,37	103,39	103,40	103,42	103,44
Wanasalam	83,85	83,86	83,87	83,88	83,89	83,90	83,92	83,93	83,94	83,95
Kawasan Banten Selatan (Baduy)	400,14	400,21	400,27	400,33	400,40	400,46	400,53	400,59	400,65	400,72
Cikurur	87,32	87,34	87,37	87,40	87,43	87,45	87,48	87,51	87,54	87,56
Bojongmanik	79,36	79,38	79,39	79,41	79,42	79,44	79,45	79,47	79,48	79,49
Cimarga	77,05	77,05	77,06	77,06	77,06	77,07	77,07	77,07	77,08	77,08
Cileles	79,36	79,38	79,39	79,41	79,42	79,44	79,45	79,47	79,48	79,49
Leuwidamar	77,05	77,05	77,06	77,06	77,06	77,07	77,07	77,07	77,08	77,08
TOTAL	754,83	754,94	755,04	755,15	755,26	755,36	755,47	755,58	755,69	755,79

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kebutuhan air baku untuk mendukung Kawasan Banten Selatan di Kawasan Pantai Selatan sebesar 355,08 liter/detik dan Kawasan Baduy sebesar 400,72 liter/detik dengan penambahan kebutuhan untuk pariwisata. Proyeksi kebutuhan air minum pada tahun 2034 masih dapat dipenuhi dengan suplai air baku dari setiap wilayah sungai tersebut.



Gambar 7.19 Proyeksi Kebutuhan Air Kawasan Banten Selatan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

C. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Analisis kebutuhan infrastruktur jalan dihitung berdasarkan kewenangan pemerintah, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, serta jalan non-status. Tetapi selain kewenangan pusat, hanya ruas jalan yang mendukung kawasan prioritas (*Relevant Road*). Kebutuhan infrastruktur jalan di Kawasan Banten Selatan selain untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi dan logistik masyarakat, juga mendukung pengembangan pariwisata. Aksesibilitas Kawasan Banten Selatan akan didukung dengan adanya Jalan Tol Serang – Panimbang menimbulkan bangkitan pergerakan pariwisata sebesar 2.256 smp/minggu dengan proyeksi wisatawan 389.241 jiwa pada tahun 2029. Jalan nasional sudah memiliki tingkat pelayanan cukup baik (LOS A-C). Namun, jalan provinsi dan kabupaten belum mampu menampung bangkitan kendaraan dari aktivitas pariwisata sehingga diarahkan adanya peningkatan kapasitas jalan kabupaten guna mendukung Kawasan Banten Selatan.

Tabel 7.56 Proyeksi Bangkitan Pergerakan Kawasan Pantai Selatan

Tahun	Jumlah Wisatawan/Tahun	Bangkitan Pergerakan (smp/hari)	Bangkitan Pergerakan (smp/minggu)
2025	346.205	237	1.660
2026	350.741	240	1.682

Tahun	Jumlah Wisatawan/Tahun	Bangkitan Pergerakan (smp/hari)	Bangkitan Pergerakan (smp/minggu)
2027	355.337	243	1.704
2028	359.994	247	1.726
2029	364.711	250	1.749
2030	369.490	253	1.772
2031	374.332	256	1.795
2032	379.237	260	1.818
2033	384.206	263	1.842
2034	389.241	267	1.866

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dengan adanya pertumbuhan wisatawan di Kawasan Pantai Selatan total bangkitan pergerakan wisatawan pada tahun 2034 sebesar 267 smp/hari atau 1.866 smp/minggu. Kawasan Baduy memiliki bangkitan pergerakan wisatawan lebih sedikit, karena mempertahankan keberlanjutan masyarakat adat Baduy, sebesar 55,66 smp/hari atau 390 smp/minggu.

Tabel 7.57 Proyeksi Bangkitan Pergerakan Kawasan Baduy

Tahun	Jumlah Wisatawan/Tahun	Bangkitan Pergerakan (smp/hari)	Bangkitan Pergerakan (smp/minggu)
2025	72.283	49,51	347
2026	73.230	50,16	351
2027	74.190	50,81	356
2028	75.162	51,48	360
2029	76.147	52,16	365
2030	77.145	52,84	370
2031	78.155	53,53	375
2032	79.180	54,23	380
2033	80.217	54,94	385
2034	81.268	55,66	390

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Peningkatan wisatawan dan pertumbuhan penduduk berpengaruh cukup signifikan terhadap bangkitan jalan, akibat peningkatan volume lalu lintas orang dan kendaraan. Bangkitan wisatawan juga menambah beban jalan pada ruas-ruas jalan nasional. Ruas Jalan SP. Labuan – Cibaliung memiliki kontribusi bangkitan tertinggi sebesar 57% dan memiliki kontribusi bangkitan pergerakan wisatawan tahun 2034 sebesar 33.609 smp/minggu.

Tabel 7.58 Proyeksi Bangkitan Pergerakan di Jalan Nasional

Ruas Jalan	Tahun					
	2025	2029	2034	2025	2029	2034
	Bangkitan Pergerakan (smp/hari)			Bangkitan Pergerakan (smp/minggu)		
Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangen	20,7	21,8	23,3	145	153	163
Simpang - Bayah	43,5	45,8	48,9	305	321	343
Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jabar	45,5	47,9	51,1	318	335	358
Muara Binuangeun - Simpang	50,4	53,1	56,7	353	372	397
Sp. Labuan - Cibaliung	77,0	81,1	86,6	539	568	606

Sumber Hasil Analisis, 2025

Dari segi jenis pergerakan lalu lintas, saat ini masih didominasi pergerakan campuran antara lalu lintas lokal, logistik, dan wisatawan, khususnya di ruas jalan Pantai Selatan Banten. Dari segi kinerja jalan, jaringan jalan di wilayah Kabupaten Lebak memiliki kinerja yang baik dan kondisi mantap. Dari hasil proyeksi jalan, rata-rata VCR tahun 2034 terjadi peningkatan volume lalu lintas melebihi kapasitas jalan, sehingga terjadi kemacetan. Seiring dengan peningkatan penduduk dan wisatawan, muncul titik kemacetan lalu lintas di jalan nasional yang berada di pintu masuk dan pintu keluar kawasan wisata, serta kemacetan akibat akses masuk dari Provinsi Jawa Barat.

Tabel 7.59 Proyeksi Jalan Nasional

Ruas Jalan	Panjang	LHR			VCR		
		2025	2029	2034	2025	2029	2034
Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangen	37,4	111,51	134,51	170,05	0,09	0,11	1,06
Simpang - Bayah	32,23	234,50	282,88	357,60	0,23	0,27	1,17
Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jabar	34,66	244,93	295,46	373,51	0,46	0,55	1,20
Muara Binuangeun - Simpang	16,83	271,74	327,80	414,39	0,58	0,70	1,30
Sp. Labuan - Cibaliung	48,97	414,96	500,56	632,79	0,62	0,75	1,45

Sumber Hasil Analisis, 2025

Akses menuju Kawasan Baduy melalui hub transportasi darat dapat melalui 3 pintu yaitu: Kota Cilegon melalui Pelabuhan Merak, Kota Tangerang melalui Bandara Soekarno - Hatta, dan Kabupaten Lebak melalui stasiun KRL Rangkasbitung. Dari hub transportasi tersebut, dilanjutkan melalui jalan daerah karena belum ada jalan nasional untuk menuju kawasan tersebut. Kondisi jalan umumnya berupa aspal hotmix dengan kondisi beberapa jalanan berlubang atau dalam kategori rusak ringan dan tanjakan curam. Lebar jalan rata-rata 4 sampai 6 meter. Titik kemacetan lalu lintas di jalan akses menuju Baduy berada di pintu masuk dan pintu keluar Terminal Ciboleger, terutama akibat antrian kendaraan wisatawan. Kemacetan terjadi di jalan utama dari Rangkasbitung menuju Ciboleger khususnya saat jam puncak akhir pekan dan libur panjang.

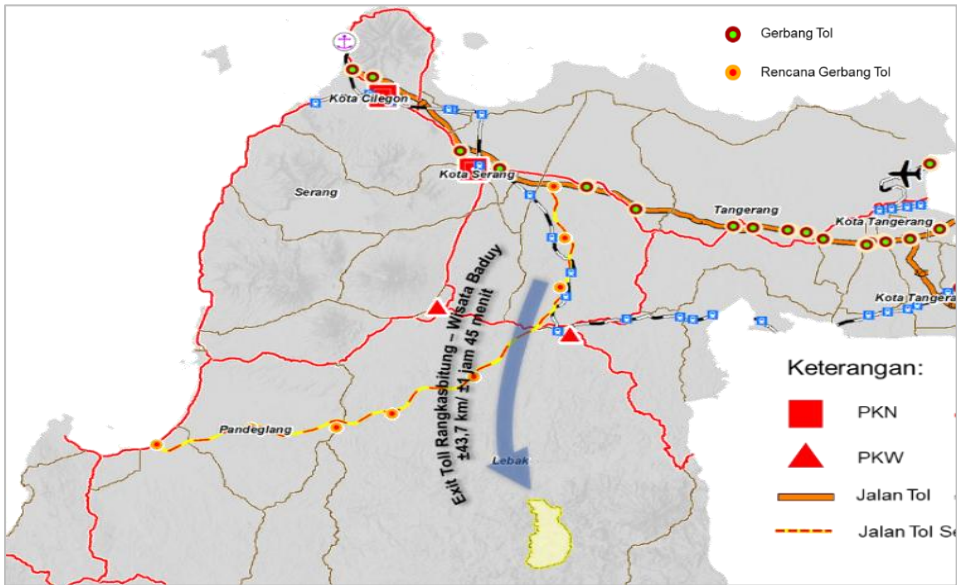
Diidentifikasi dari kondisi kemandapan jalan provinsi dan kabupaten, ruas relevant road belum memerlukan adanya intervensi dari Pemerintah Pusat, karena kemandapan masih berkisar antara 90% ke atas. Dalam rangka mengakomodir bangkitan wisatawan, diperlukan pelebaran jalan menuju standar pada ruas Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Berdasarkan Permen PUPR 5 Tahun 2023, standar lebar jalan provinsi skala sedang yaitu 7 meter, terdiri dari 2 jalur atau 2 arah, masing-masing 3,5 meter. Sedangkan untuk jalan lokal, standar lebar jalan sebesar 6 meter, terdiri dari 2 jalur atau 2 arah, masing-masing 3 meter. Ruas Relevant Road yang perlu penanganan pelebaran ruas jalan menuju standar adalah Rangkasbitung - Sajir, Simpang - Ciboleger, dan Cileles - Posko.

Tabel 7.60 Proyeksi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten

Ruas Jalan	Lintas	Panjang (km)	Lebar (m)	Kondisi Kemantapan
Jalan Provinsi				
Picung - Malingping - Simpang	Baduy - Pantai Selatan	45,8	7	95%
Bayah - Simpang	Pantai Selatan	3,4	7	95%
Jalan Kabupaten				
Rangkasbitung - Sajir	Baduy - Pantai Selatan	29,1	6	99%
Gunung Kencana - Malingping	Baduy - Pantai Selatan	30,5	7	99%
Leuwidamar - Pasarkupa	Baduy	40,15	7	92%
Simpang - Ciboleger	Baduy	7,1	4	90%
Cileles - Posko	Baduy	13,55	4	99%

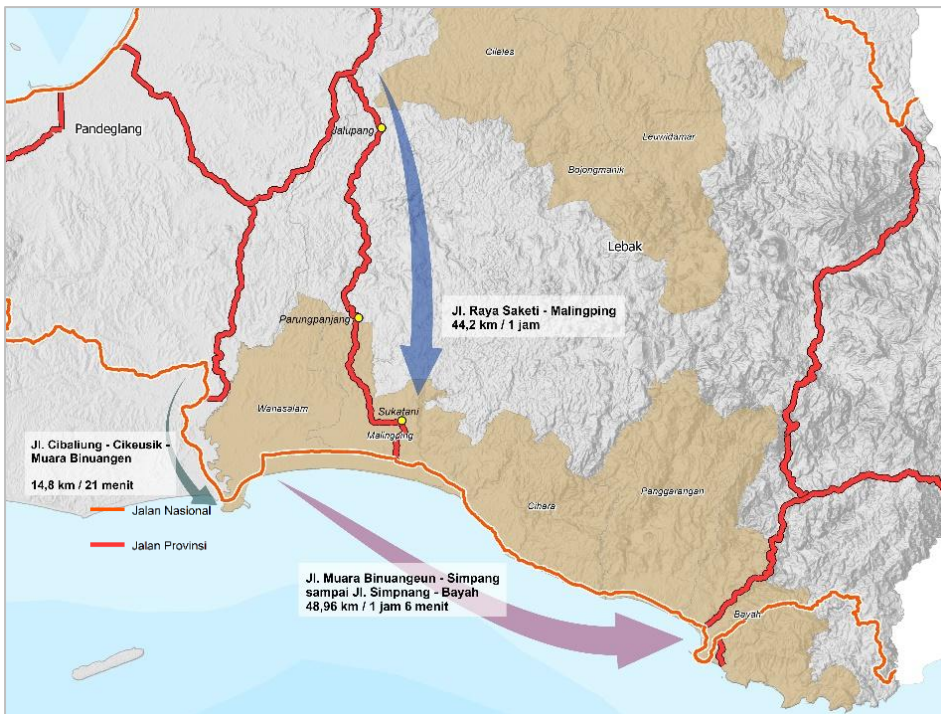
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lebak, 2025

Untuk pengembangan perkotaan dibutuhkan konektivitas dan aksesibilitas yang baik tidak hanya kewenangan nasional namun juga kewenangan pemerintah daerah. Dukungan infrastruktur konektivitas akan mewujudkan sinergi konektivitas dan aksesibilitas multimoda lintas wilayah.



Gambar 7.20 Relevant Road Menuju Kawasan Banten Selatan di Baduy

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 7.21 Relevant Road Menuju Kawasan Banten Selatan di Pantai Selatan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

D. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Pada analisis kebutuhan infrastruktur permukiman, dilakukan analisis untuk sektor air minum perpipaan, persampahan, serta kebutuhan infrastruktur penanganan air limbah.

1) Analisis Layanan Air Minum Perpipaan

Kabupaten Lebak dilayani oleh PDAM Tirta Multatuli Lebak dengan kapasitas produksi 213 liter/detik, kapasitas terpasang 695 liter/detik dan cakupan layanan 37,11%. Pelayanan air kawasan prioritas Pantai Selatan menggunakan SPAM IKK Bayah, IKK Wanasalam, dan SPAM pedesaan lainnya dengan total produksi 77 liter/detik, sedangkan di Kawasan Baduy dilayani SPAM IKK Leuwidamar dan SPAM pedesaan lainnya dengan kapasitas 52 liter/detik Berdasarkan target 30% terlayani di Kawasan Pantai Selatan, untuk mencapai target pada tahun 2034, perlu peningkatan hingga 21 liter/detik. Dari hasil proyeksi, diperkirakan akan terjadi defisit pada tahun 2031.

Tabel 7.61 Proyeksi Air Minum Perpipaan Kawasan Banten Selatan di Pantai Selatan

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kapasitas Eksisting (L/dtk)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Baseline Kebutuhan Air (L/dtk)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kebutuhan Domestik (L/dtk)	236,5	236,5	236,5	236,5	236,6	236,6	236,6	236,7	236,7	236,7
Kebutuhan Non Domestik (L/dtk)	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Kebutuhan Domestik + Non Domestik (L/dtk)	271,9	272,0	272,0	272,0	272,1	272,1	272,1	272,2	272,2	272,2
Tingkat Kebocoran (%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Kebutuhan + Kebocoran (L/dtk)	326,3	326,4	326,4	326,4	326,5	326,5	326,6	326,6	326,6	326,7
Peningkatan Pelayanan (%)	14%	15%	17%	19%	21%	23%	25%	26%	28%	30%
Kebutuhan Total (L/dtk)	44,3	50,3	56,3	62,2	68,2	74,1	80,1	86,1	92,0	98,0
GAP	32,7	26,7	20,7	14,8	8,8	2,9	-3,1	-9,1	-15,0	-21,0

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Penyediaan air minum Kawasan Baduy diproyeksikan akan defisit pada tahun 2028 sebesar -4,9 liter/detik. Dalam rangka pencapaian target pelayanan air minum sebesar 30%, maka pada tahun 2034, terdapat kebutuhan penambahan debit sebesar 47,4 liter/detik. Pemenuhan pelayanan air minum tersebut dapat dipenuhi melalui pemanfaatan jaringan air baku air minum dari bendungan Karian atau optimalisasi dari sumber air baku air minum existing yang lain. Hal ini tentunya diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran.

Tabel 7.62 Proyeksi Air Minum Perpipaan Kawasan Banten Selatan di Baduy

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kapasitas Eksisting (L/dtk)	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Baseline Kebutuhan Air (L/dtk)	80	80	80	80	80	80	80	81	82	83
Kebutuhan Domestik (L/dtk)	255,9	256,0	256,0	256,1	256,1	256,2	256,2	259,5	262,7	266,0
Kebutuhan Non Domestik (L/dtk)	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,9	39,4	39,9
Kebutuhan Domestik + Non Domestik (L/dtk)	294,3	294,4	294,4	294,5	294,5	294,6	294,6	298,4	302,1	305,8
Tingkat Kebocoran (%)	20,00%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kebutuhan + Kebocoran (L/dtk)	353,2	353,2	353,3	353,4	353,4	353,5	353,6	358,0	362,5	367,0
Peningkatan Pelayanan (%)	11,76%	14%	15%	17%	19%	21%	23%	25%	26%	28%
Kebutuhan Total (L/dtk)	41,5	48,0	54,4	60,9	67,4	73,8	80,3	87,8	95,5	103,4
GAP	14,5	8,0	1,6	-4,9	-11,4	-17,8	-24,3	-31,8	-39,5	-47,4

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

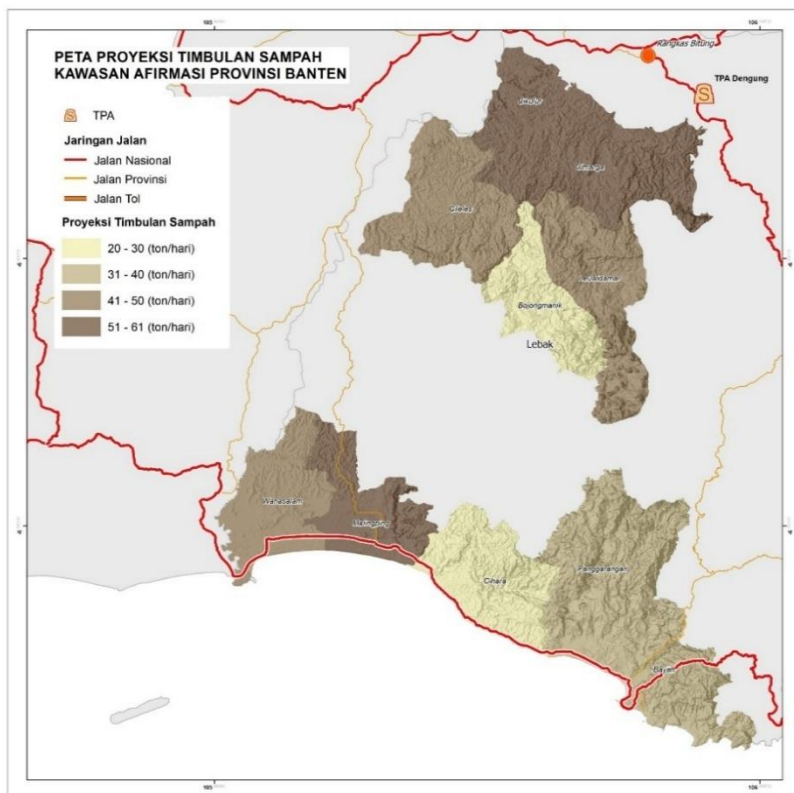
Timbulan sampah eksisting kawasan Banten Selatan pada 2024 mencapai ton/hari, dengan rincian Kawasan Pansela sebesar 204,27 ton/hari dan Kawasan Baduy sebesar 221,11 ton/hari. Sementara itu, TPA di sekitar Kawasan Banten Selatan hanya tersedia TPA Cihara, berjarak sekitar 30 km menuju Kawasan Pantai Selatan dan terdapat TPA Dengung berjarak 40 km dari Kawasan Baduy. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak berencana membangun TPS, salah satunya di Kecamatan Leuwidamar untuk mendukung Kawasan Baduy. Sedangkan timbulan sampah di setiap kecamatan akan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta jumlah wisatawan. Proyeksi penambahan timbulan sampah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.63 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Banten Selatan

Tahun	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Banten Selatan (Pantai Selatan)	204,30	204,32	204,35	204,37	204,40	204,42	204,45	204,47	204,50	204,52
Bayah	37,50	37,50	37,51	37,51	37,51	37,52	37,52	37,53	37,53	37,54
Panggarangan	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56	31,57	31,57	31,57	31,57
Cihara	27,45	27,45	27,46	27,46	27,46	27,47	27,47	27,47	27,47	27,48
Malingping	59,48	59,49	59,50	59,51	59,52	59,53	59,54	59,55	59,56	59,58
Wanasalam	48,29	48,30	48,30	48,31	48,32	48,32	48,33	48,34	48,34	48,35
Banten Selatan (Baduy)	221,15	221,19	221,23	221,27	221,32	221,36	221,40	221,44	221,48	221,52
Cikurur	50,29	50,31	50,33	50,34	50,36	50,37	50,39	50,40	50,42	50,44
Bojongmanik	20,57	20,58	20,58	20,58	20,59	20,59	20,59	20,60	20,60	20,60
Cimarga	60,19	60,20	60,21	60,22	60,23	60,25	60,26	60,27	60,28	60,29
Cileles	45,71	45,72	45,73	45,74	45,75	45,76	45,76	45,77	45,78	45,79
Leuwidamar	44,38	44,38	44,38	44,39	44,39	44,39	44,39	44,39	44,40	44,40
TOTAL	425,45	425,52	425,58	425,65	425,71	425,78	425,85	425,91	425,98	426,05

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Jika tidak dilakukan penanganan sampah di kawasan ini pada tahun yang akan datang, dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga diperlukan penanganan sampah skala kawasan seperti TPS/TPS3R. Secara spasial, proyeksi timbulan sampah pada masing-masing wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.22 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Banten Selatan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Untuk dapat memenuhi kebutuhan persampahan tersebut diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran. Sebagai upaya untuk tindak lanjut diperlukan usaha untuk perubahan perilaku seperti kebijakan pengurangan sampah dari sumber dan pemilahan sampah.

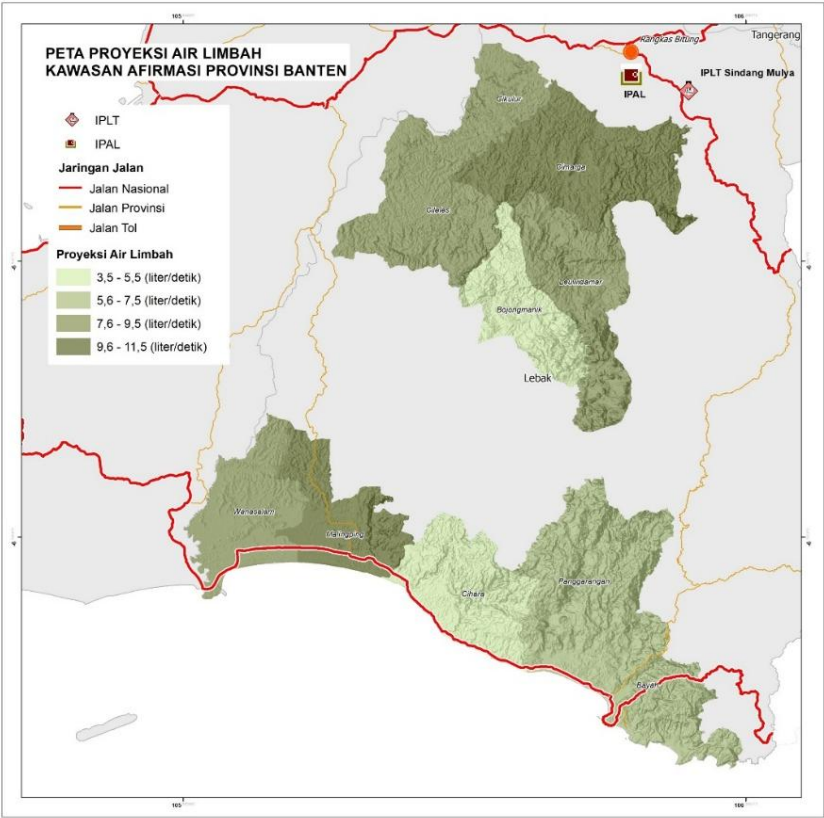
3) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Air Limbah

Kebutuhan penanganan air limbah di Banten Selatan pada tahun 2024 sebesar 79,93 liter/detik. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2034, kebutuhan penanganan air limbah meningkat sebesar 80,05 liter/detik. Penanganan air limbah ini masih dilakukan secara setempat atau *on-site*. Berdasarkan kepadatan penduduk per kecamatan sampai tahun 2034 belum ada yang melebihi 150 jiwa/ha sehingga penanganan air limbah belum memerlukan sistem terpusat. Penanganan air limbah dapat dilakukan secara *on-site* seperti melalui program animas.

Tabel 7.64 Proyeksi Air Limbah

Tahun	Proyeksi Timbunan Air Limbah (liter/detik)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Banten Selatan (Pantai Selatan)	38,39	38,39	38,40	38,40	38,40	38,41	38,41	38,42	38,42	38,43
Bayah	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
Panggarangan	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Cihara	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Malingping	11,18	11,18	11,18	11,18	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19
Wanasalam	9,07	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,09
Banten Selatan (Baduy)	41,55	41,56	41,57	41,58	41,58	41,59	41,60	41,61	41,61	41,62
Cikurur	9,45	9,45	9,46	9,46	9,46	9,46	9,47	9,47	9,47	9,48
Bojongmanik	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Cimarga	11,31	11,31	11,31	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,33	11,33
Cileles	8,59	8,59	8,59	8,59	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Leuwidamar	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
TOTAL	79,94	79,95	79,96	79,98	79,99	80,00	80,01	80,03	80,04	80,05

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 7.23 Proyeksi Air Limbah Kawasan Banten Selatan

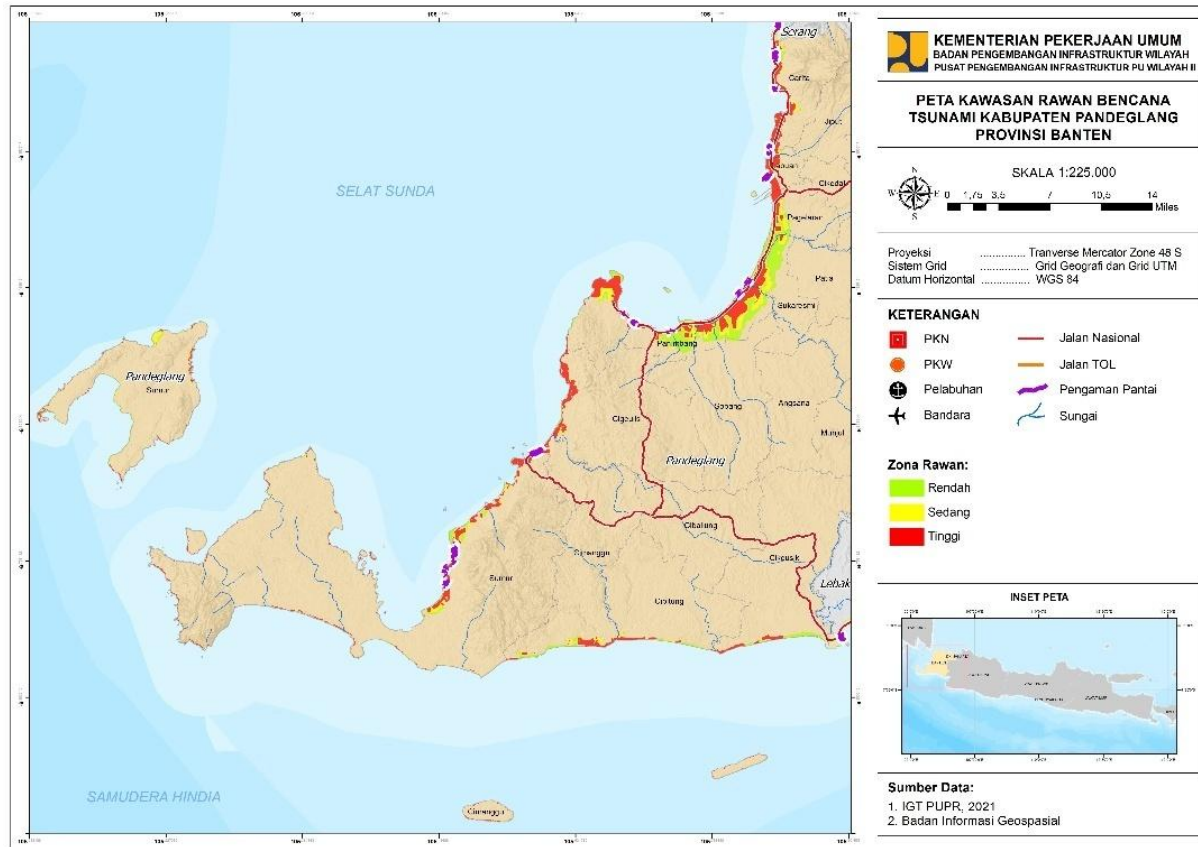
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Jika tidak dilakukan penanganan air limbah di kawasan ini pada tahun yang akan datang, dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga diperlukan penanganan sampah skala kawasan seperti melalui program sanimas. Secara spasial, proyeksi timbunan air limbah pada masing-masing wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk mengatasi permasalahan sanitasi tersebut diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pembiayaan infrastruktur terkait operasional dan pemeliharannya.

7.1.7. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan kebijakan RPJMN 2025-2029, deliniasi kawasan rawan bencana di Provinsi Banten meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Namun berdasarkan analisis spasial melalui *superimpose* GIS tidak semua Kabupaten yang disebut sebagai Kawasan rawan bencana dalam RPJMN merupakan kawasan bencana tsunami tinggi dapat dilihat pada Peta 7.1, 7.2, 7.3, dan 7.4.

Secara Geografis Kota Serang dan Kota Cilegon berada di pesisir laut utara Jawa dan secara topografi sebagian besar morfologinya berupa dataran rendah sehingga menimbulkan potensi kerawanan bencana. Selain itu, gempa bumi Banten pada tahun 2019 yang mengakibatkan tsunami pada beberapa titik di wilayah Kabupaten Pandeglang menunjukkan urgensi kebutuhan intervensi pengaman pantai sebagai respon tanggap kebencanaan dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan-Tanjung Lesung.



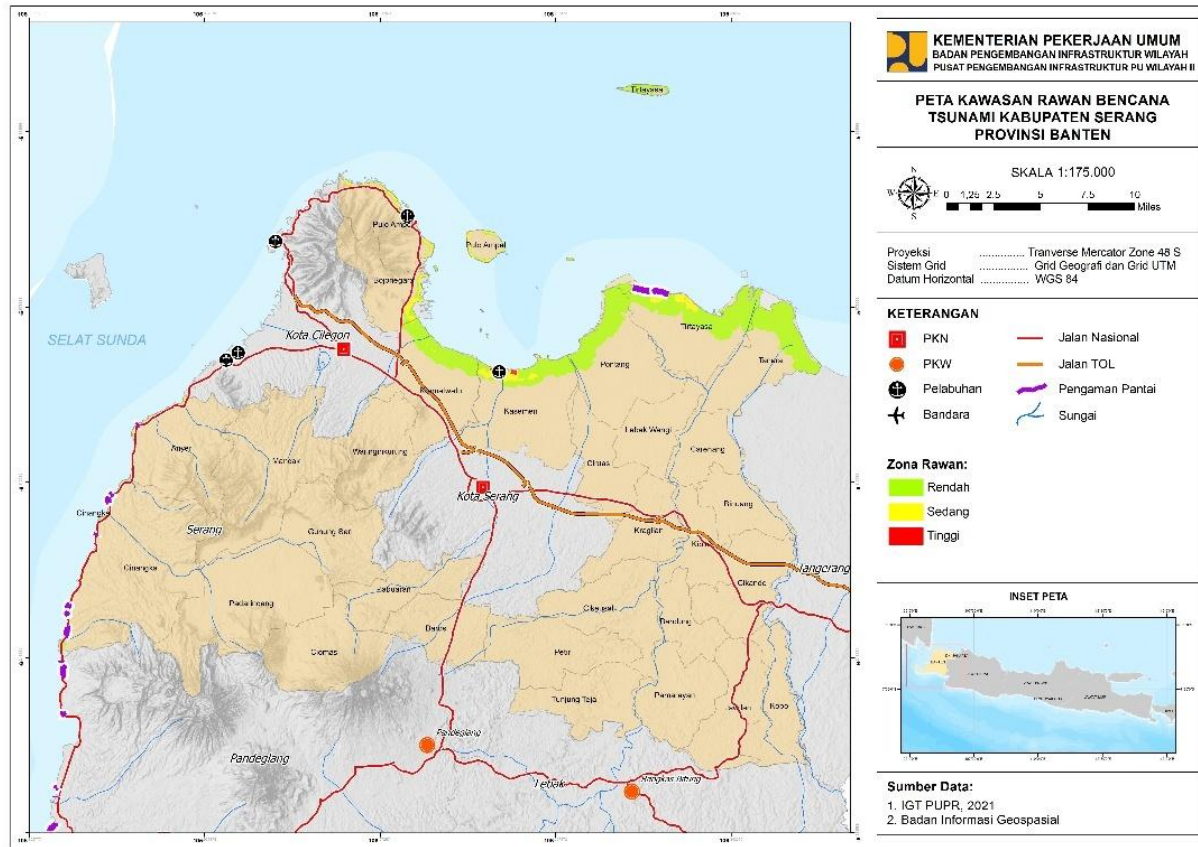
Peta 7.1 Kondisi rawan bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang

Sumber: Hasil Analisis, 2025



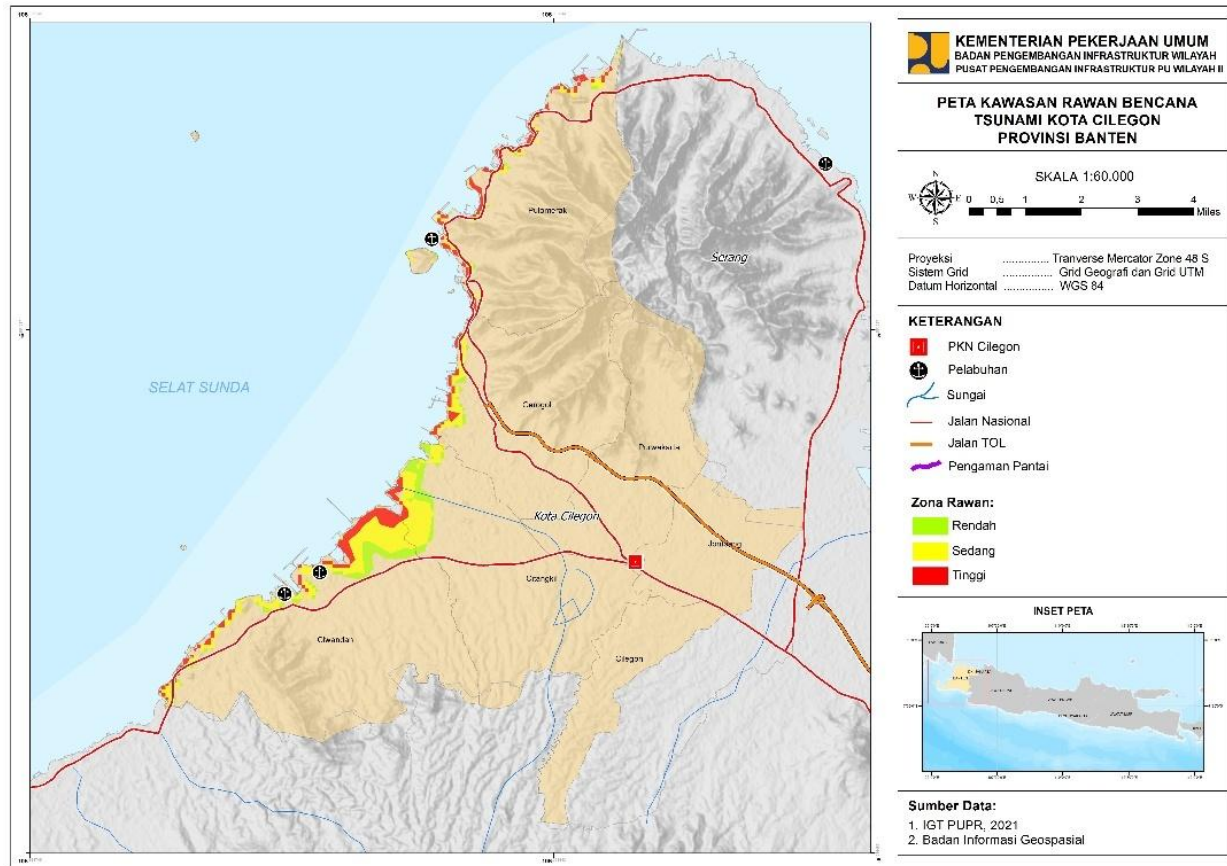
Peta 7.2 Kondisi rawan bencana tsunami di Kabupaten Lebak

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Peta 7.3 Kondisi rawan bencana tsunami di Kabupaten Serang

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Peta 7.4 Kondisi rawan bencana tsunami di Kota Cilegon



Gambar 7.24 Kondisi rawan bencana ekstrem dan tsunami (sumber: www.inarisk.bnpb.go.id)

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Resiko Bencana tahun 2024, terdapat 6 lokasi rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon. Sedangkan Kawasan rawan bencana tsunami di Banten berada di Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon.

7.2. Analisis Keterpaduan Infrastruktur

Analisis keterpaduan infrastruktur merumuskan keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dengan memperhatikan kaidah urutan fungsi infrastruktur sebagai suatu sistem.

Pada Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten serta, keterpaduan infrastruktur dapat dilihat pada pembangunan penyediaan air baku berupa pembangunan Bendungan Cidanau, normalisasi Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, dan Cibeber serta peningkatan jaringan irigasi DI Ciujung dan DI Cibanten (sebagai pengoptimalan Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian yang telah selesai).

Pada Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang, serta Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang, keterpaduan infrastruktur dapat dilihat pada Peningkatan jalan Kota Tangerang – Kota Serang – Kota Cilegon berfungsi sebagai mendukung jalur logistik mendukung Kawasan Industri Cikande, Kawasan Industri Wilmar, dan Kawasan Industri Cilegon. Untuk pemanfaatan air baku dari Bendungan Sindangheula diperlukan pembangunan SPAM Sindangheula. Dalam pemenuhan layanan dasar diperlukan peningkatan kapasitas TPA Cilowong dan TPA Bagendung untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kawasan Serang-Cilegon dan pembangunan IPLT Kota Serang, IPLT Kab. Serang,

dan IPAL Kota Serang. Dalam pemenuhan adanya kegiatan industri yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk di Kawasan Serang-Cilegon maka diperlukan pembangunan rumah susun di Kota Cilegon dan Kota Serang.

Pada Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung, keterpaduan infrastruktur dapat dilihat pada pembangunan penyediaan air baku dan dilanjutkan dengan peningkatan SPAM untuk mendukung kegiatan pariwisata dan pengendalian terhadap bencana berupa pembangunan pengaman pantai di sekitar pantai Tanjung Lesung dan Pantai Sumur. Peningkatan pariwisata harus didukung oleh peningkatan kapasitas Jalan Citereup - Tj. Lesung dan Simpang Labuhan - Citereup. Dalam pelayanan dasar persampahan dan limbah diperlukan peningkatan TPA Bangkonol, TPA Bojongcanar, dan IPAL skala kawasan.

Pada Kawasan Prioritas Banten Selatan, keterpaduan infrastruktur dilihat pada pembangunan konektivitas Jalan Tol Serang - Panimbang yang dilanjutkan dengan pelebaran jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten mendukung mobilitas dan aksesibilitas wisatawan menuju ke Kawasan Baduy dan Kawasan Pantai Selatan. Salah satu jalan yang perlu diperlebar yaitu ruas Jalan Raya Cileles - Malingping.

Dalam mendukung Tol Serang - Panimbang diperlukan peningkatan akses *exit* menuju kawasan industri seperti peningkatan kapasitas Jalan Nasional Ruas Bts. Kota Pandeglang - Bts. Kota Rangkasbitung, Jalan Provinsi Syekh Nawawi, dan Jalan Provinsi Arief Rahman Kaduagung. Dengan beroperasinya Jalan Tol Serang-Panimbang akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan jumlah penduduk sehingga diperlukan penyediaan air baku berupa pembangunan Bendungan Pasir Kopo dan penyediaan air baku perkotaan serta dalam meningkatkan komoditas unggulan berupa pertanian diperlukan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.

7.2.1. Matriks Keterpaduan Infrastruktur Prioritas

Analisis keterpaduan infrastruktur merumuskan keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dengan memperhatikan kaidah urutan fungsi infrastruktur sebagai suatu sistem.

Tabel 7.65 Matriks Keterpaduan Infrastruktur Prioritas

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		PS		Padu antar PU	Padu Non PU
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
Provinsi Banten	Peningkatan Konektivitas			Dukungan Penanganan Jalan Daerah Kewenangan Pemerintah Daerah	2025-2030						Preservasi dan Pemeliharaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
				Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang	2018-2025						Pelebaran jalan akses ke jalan tol kewenangan daerah oleh Pemerintah Daerah
				Pembangunan Jalan Tol Serang-Rangkas Bitung-Panimbang	2028-2029						
	Penyediaan Infrastruktur Strategis							Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah PHTC	2025		Pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah
Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	Peningkatan Konektivitas			Peningkatan Kapasitas BTS. Kota Serang - BTS. Kota Tangerang	2027-2029						Pelebaran dan preservasi jalan kewenangan daerah (yang terkoneksi langsung) oleh Pemda
				Pembangunan Akses Kawasan Industri Petrokimia Cilegon	2027-2029						
				Pelebaran Jalan Merak Batas Kota Cilegon	2027-2029						
				Peningkatan Kapasitas	2027-2029						

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		PS		Padu antar PU	Padu Non PU
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
				Merak – BTS. Kota Cilegon							
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Penyediaan Air Baku dan Peningkatan Produktivitas Pertanian	Pembangunan Bendungan Cidanau	2027-2029			Pembangunan SPAM Regional - Pembangunan SPAM Maja	2027				Pembangunan jaringan distribusi tersier oleh Pemda
		Pembangunan Bendungan Karian	2025			Pembangunan SPAM Regional Karian Barat	2029-2032				
		Pembangunan Sarana Prasarana Air Baku Bendungan Karian	2026-2027								
		Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	2028-2029								
		Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ciujung	2025								
		Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cibanten	2026-2029								
		Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Cimoyan	2025-2026								
		Rehabilitasi D.I. Cibaliung	2025-2026								
		Penyediaan Air Baku di Perkotaan Cibadak	2027-2029								
		Penyediaan Air Baku di Perkotaan Cileles	2027-2029								

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		PS		Padu antar PU	Padu Non PU
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
	Pengendalian daya rusak air dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian	Pengendalian Banjir Sungai Ciujung	2027-2029								Pengendalian banjir di kawasan kewenangan daerah oleh Pemda
		Pengendalian Banjir Sungai Cibanten	2025-2027								
		Normalisasi Sungai Cibeber	2030-2034								
		Penanganan Sempadan Danau Rawa Dano	2027-2028								
	Konektivitas			Peningkatan Kapasitas Jalan Bts. Kota Pandeglang - Bts. Kota Rangkasbitung	2026-2027						Pelebaran dan preservasi jalan kewenangan daerah (yang terkoneksi langsung) oleh Pemda
Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Penyediaan Air Baku	Penyediaan Air Baku Wisata KSPN Uj. Kulon - Tj. Lesung	2027-2029								Pembangunan jaringan distribusi tersier oleh Pemda
		Pembangunan Bendungan Pasir Kopo	2030-2034								
	Konektivitas			Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Citereup - Tj. Lesung	2027-2028						Pelebaran dan preservasi jalan kewenangan daerah (yang terkoneksi langsung) oleh Pemda
				Peningkatan Kapasitas Jalan Simpang Labuan - Citereup	2027-2029						
				Preservasi jalan ruas Panimbang-Labuan	2027-2028						
				Preservasi jalan ruas Panimbang-Tanjunglesung	2027-2028						
				Preservasi jalan ruas Panimbang-	2027-2028						

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		PS		Padu antar PU	Padu Non PU
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
				Sumur-ujungkulon (via pesisir)							
	Pemenuhan Pelayanan Dasar					Urban renewal Kawasan Pariwisata Labuan	2028-2029				Pemeliharaan dan Operasional oleh Pemda
Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	Pemenuhan Pelayanan Dasar					Pembangunan Terintegrasi Rancang Bangun TPST Bagendung	2025				Pemeliharaan dan Operasional oleh Pemda
						Pembangunan IPA Dalung	2027				
						Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT) Kota Serang	2027-2029				
						Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT) Kab. Serang	2027-2029				
	Penyediaan Infrastruktur Strategis							Rehabilitasi Dan Renovasi Rumah Sakit	2027-2029		Pemeliharaan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan
Banten Selatan	Konektivitas			Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Ruas Bts. Kota Pandeglang - Bts. Kota Rangkasbitung	2026-2027						Pelebaran dan preservasi jalan kewenangan daerah (yang terkoneksi langsung) oleh Pemda
	Pemenuhan Pelayanan Dasar					Pembangunan TPST Regional Cileles	2027-2029				Pemeliharaan dan Operasional oleh Pemda
						Pembangunan TPS 3R Leuwidamar	2025				
	Penyediaan Infrastruktur Strategis							Rehabilitasi Dan Renovasi Rumah Sakit	2027-2029		Pemeliharaan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		PS		Padu antar PU	Padu Non PU
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Banten	Penerapan <i>gray infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman <i>megathrust</i> dan tsunami	Pembangunan Pengaman Pantai Perkotaan Panimbang	2027-2028								- Penyediaan infrastruktur mitigasi bencana oleh Pemda BNPB; - Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan - Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan - Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan - Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah - Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya untuk Penanganan Darurat bencana Tsunami berdasarkan Perencanaan Kontijensi
		Pembangunan Pengaman Pantai Kab. Serang	2027-2029								
		Pembangunan Pengaman Pantai Kab. Lebak	2027-2029								
		Pembangunan Pengaman Pantai Kota Cilegon	2027-2029								
		Pembangunan Pengaman Pantai Kab. Pandeglang	2027-2029								

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Rencana aksi (*action plan*) disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi organisasi dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Pada bab ini memuat rencana aksi pembangunan infrastruktur yang diturunkan dari *grand strategy* dan dijabarkan ke dalam program pembangunan infrastruktur. Rencana aksi tersebut merupakan pendetailan dari program yang dilaksanakan dalam kurun waktu dari tahun 2025 hingga tahun 2034 mendatang.

8.1. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Bidang PU

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang keenam sektor yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten, yaitu sektor perkotaan, pertanian, industri, pariwisata, kawasan afirmasi dan rawan bencana. Yang mana pembangunannya dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab dari semua pihak terkait, tentunya Kementerian PU mempunyai tugas dan tanggung jawab besar dalam mewujudkannya. Selanjutnya pada subbab ini dijelaskan rencana aksi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh keempat Unit Organisasi (UNOR) di lingkup Kementerian PU yaitu: Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga (BM), Cipta Karya (CK), dan Prasarana Strategis (PS).

Dalam tabel rencana aksi infrastruktur bidang PU ini dijelaskan tentang program-program (kegiatan) dari masing-masing UNOR, dengan cakupan kerja pada kawasan prioritas dan lokasi spesifik di kabupaten/kota yang dimaksud, dilengkapi dengan justifikasi/tujuan dan deskripsi kegiatan, kesiapan *readiness criteria* (dilihat dari kondisi tahun 2023 ini), asal sumber dana yang dibutuhkan, dan periode rencana tahun pelaksanaan (sejak dimulai sampai dengan selesai) dari masing-masing program di kawasan prioritas.

8.1.1. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

Rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor perkotaan, industri, pariwisata, pertanian, kawasan afirmasi, dan rawan bencana. Matriks rencana aksi infrastruktur SDA dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.1 Rencana Aksi Infrastruktur SDA Provinsi Banten

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	O6-SDA	Pengendali Banjir Sungai Ciujung	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Kragilan, Kabupaten Serang	- Terdapat luasan daerah rawan banjir sebesar 37.554 ha - Debit puncak banjir Q50 Sungai Ciujung sebesar 1.700 m³/detik - Terdapat 755.060 jiwa yang tinggal di wilayah dengan risiko banjir tinggi - Debit sungai ciujung 114 m³/detik - Mengurangi risiko banjir di Kabupaten Serang dengan kawasan prioritas, Kawasan Industri Cikande dan PKN Serang - Melaksanakan normalisasi Sungai Ciujung dengan Q25, secara bertahap (60%), kumulatif (100%) - Direncanakan pembangunan polder pengendali banjir pada 7 kawasan	Agar dipersiapkan		2 km	800 Miliar	APBN	2028	2029
2	O6-SDA	Pengendali Banjir Sungai Cibanten	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Kasemen, Serang, Cipocok Jaya, Kota Serang	- Terdapat luasan daerah rawan banjir sebesar 11.865 ha, - Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan untuk mengurangi genangan seluas 5 Ha, panjang 0,2 km, sebesar 23 milyar. - Terdapat 312.860 jiwa yang tinggal di wilayah dengan risiko banjir - Debit Sungai Cibanten 1.200 m³/detik - Mengurangi risiko banjir di Kota Serang dan PKN Serang - Melaksanakan revitalisasi Sungai Cibanten, penataan sempadan Sungai Banten Girang Kota Serang panjang 1,5 km lebar 20 m - Membutuhkan sinkronisasi dengan pembangunan drainase perkotaan Serang	Agar dipersiapkan		2 km	122,5 Miliar	APBN	2025	2027
3	O6-SDA	Normalisasi Sungai Cibeber	Kawasan Pengemba	Kec. Cibeber, Kota Cilegon,	Peningkatan Kapasitas sungai dalam rangka mengurangi luasan daerah	Agar dipersiapkan		2 km	8,4 Miliar	APBN	2030	2034

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ngan Industri Cilegon-Serang	Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	rawan banjir sebesar 37.554 ha dan 4.258 ha • Debit puncak banjir Q50 Sungai Cibeber sebesar 123.005 m³/detik • Terdapat 755.060 dan 156.167 jiwa yang tinggal di wilayah dengan risiko banjir tinggi • Debit sungai cibeber 29.095 m³/detik • Mengurangi risiko banjir di Kab. Serang dan Kota Cilegon							
4	O6-SDA	Pembangunan Bendungan Cidanau	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Cinangka, Kab. Serang	• Menyediakan air baku RKI Kota Cilegon sebesar 1,18 liter/detik • Memiliki potensi debit rata-rata 2.000 liter/detik • Terdapat Bendungan Krenceng di Kota Cilegon yang memiliki kapasitas 5 juta m³ • Telah terdapat DED, termasuk dalam highlight intervensi lampiran IV	Agar dipersiapkan		1 unit	21 Miliar	APBN/ KPBU	2030	2034
5	O6-SDA	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ciujung	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Serang	• Menaikkan nilai IP dari 265% (2021) 280% (2030) guna pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan efisiensi, dan peningkatan penyediaan air irigasi • Menyediakan air baku Daerah Irigasi Ciujung Kiri seluas 7.176,70 ha • Penyediaan air baku DI Ciujung sebesar 6.459 liter/detik (2029) • Termasuk Highlight Intervensi RPJMN Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. L. Cisadane, D. I. Ciujung & D. I. Cidurian • Output seluas 1.994 Ha	Siap		15,75 km	1,05 Triliun	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	O6-SDA	Pembangunan Sarana Prasarana Air Baku Bendungan Karian	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon	- Bendungan Karian selesai dan beroperasi pada tahun 2024, dilanjutkan dengan pembangunan jaringan transmisi - Direncanakan untuk penyediaan air baku Kota Serang, Kab. Serang, dan Kota Cilegon 1500 liter/detik - Tingkat pelayanan air minum perpipaan Kota Serang 1,8%, Kab. Serang 9% dan Kota Cilegon 11% - Termasuk Highlight Intervensi RPJMN Pembangunan Bendungan Karian - Hasil Rakorbangwil 2025, pekerjaan masih berlanjut hingga 2027 dengan volume pekerjaan 64 km dan kebutuhan anggaran 5 T dari PHLN.	Agar dipersiapkan		64 km	5 Triliun	PHLN	2025	2029
8	O6-SDA	Penanganan Sempadan Danau Rawa Dano	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Serang	- Mendukung percepatan penanganan 15 danau prioritas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional - Danau Rawa Dano merupakan pemasok air baku untuk Kota Cilegon dan kawasan industri di Kota Cilegon - Danau Rawa Dano merupakan wilayah kawasan konservasi	Agar dipersiapkan		1 unit	100 Miliar	APBN	2027	2028
9	O6-SDA	Penyediaan Air Baku Kawasan Wisata Labuan - Tj. Lesung	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	- Merupakan amanat RPJMN 2025-2029 - DAS Kalicaah merupakan bagian dari WS Cibaliung Sawarna - Pertumbuhan wisatawan di Tanjung Lesung di tahun 2022 - 2029 diproyeksikan naik sebesar 38% atau 6 juta wisatawan di tahun 2029 - Jumlah kebutuhan air baku wisatawan tahun 2029 101,42 liter/bed/hari, dan debit sebesar 20.839 m³/detik	Agar dipersiapkan		21 ribu m ³ /detik	9,2 Miliar	APBD	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					• Debit andalan DAS Kalicaah Q50 sebesar 0.47 liter/detik • Peningkatan tambahan debit air baku di KEK & KSPN Tj Lesung • Potensi ketersediaan air baku di Kecamatan Panimbang berupa SPAM 15 liter/detik • Membutuhkan sinkronisasi dengan pembangunan drainase di kawasan wisata Labuan – Tj Lesung							
10	O6-SDA	Pembangunan Pengaman Pantai Perkotaan Panimbang	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Banten	Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	• Merupakan amanat RPJMN 2025-2029 • Mendukung pariwisata nasional KEK Tj Lesung • Pengendalian risiko abrasi serta melindungi kawasan permukiman dan pariwisata akibat pasang air laut • Kab. Pandeglang memiliki indeks risiko gelombang ekstrim dan abrasi dengan luasan 3.498 ha • Pembangunan pengaman pantai Tj Lesung di Kecamatan Panimbang (13,8 km)	Agar dipersiapkan		1,5 Km	32 Miliar	APBN	2027	2029
11	O6-SDA	Pembangunan Bendungan Pasir Kopo	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Kab. Lebak	• Kopo masuk dalam RPJMN 2020-2024 & Renstra PUPR 2024 sebagai <i>major project</i> • Total volume tampungan 165,6 juta m³ dan akan mencapai target kapasitas tampung Indonesia (2020-2024) sebesar 68,11 m³/tahun • Memasok kebutuhan air baku Kota Serang (0,5 m³/detik), Kabupaten Tangerang (2,5 m³/detik) & Daerah Irigasi Ciujung (5,1 m³/detik) • Dapat mereduksi banjir sebesar 288,77 m³/detik • Telah terdapat DED • Kapasitas aliran 200 m³/detik	Agar dipersiapkan		1 unit	2,3 Triliun	KPBU	2030	2034

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12	O6-SDA	Penyediaan Air Baku di Perkotaan Cibadak	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Lebak	- Jaringan perpipaan sudah terlayani PDAM Lebak dengan kapasitas 695 liter/detik dengan <i>idle capacity</i> 482 liter/detik yang apabila dioptimalkan dapat melayani 55 ribu KK - Penyediaan air baku RKI Kab. Lebak berasal dari Bendungan Karian dengan kapasitas total 314,7 juta m³ - Total alokasi air baku dari Bendungan Karian adalah 14,6 m³/detik dan alokasi air baku untuk Kab. Lebak sebesar 0,6 m³/detik - Kecamatan Cibadak memiliki luasan Daerah Irigasi 689,66 ha yang terdiri dari kewenangan provinsi dan kabupaten - Bertambahnya jumlah penduduk tenaga kerja di sekitar kawasan KPI Rangkasbitung sebesar 314.976 jiwa (2029) - Kebutuhan air minum di Kecamatan Cibadak di tahun 2029 sebesar 567,47 liter/detik - Telah dibahas dalam konreg (jaringan air minum Bendungan Karian)	Agar dipersiapkan		10 m ³ /detik	8 Miliar	APBD	2027	2029
13	O6-SDA	Penyediaan Air Baku di Perkotaan Cileles	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Cileles, Kab Lebak	- Jaringan perpipaan sudah terlayani PDAM Lebak dengan kapasitas 695 liter/detik dengan <i>idle capacity</i> 482 liter/detik yang apabila dioptimalkan dapat melayani 55 ribu KK - Penyediaan air baku RKI Kab. Lebak berasal dari Bendungan Karian dengan kapasitas total 314,7 juta m³ - Total alokasi air baku dari Bendungan Karian adalah 14,6 m³/detik, alokasi air baku untuk Kab. Lebak sebesar 0,6 m³/detik - Direncanakan KPI Cileles akan mulai	Agar dipersiapkan		10 m ³ /detik	8 Miliar	APBN	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					beroperasi di tahun 2025 sehingga diproyeksikan di tahun 2029 luasan KPI Cileles sebesar 416,66 ha • Kebutuhan air baku KPI Cileles tahun 2029 sebesar 270,83 liter/detik • Kecamatan Cileles memiliki luasan Daerah Irigasi 366,85 ha yang terdiri dari kewenangan kabupaten • Bertambahnya jumlah penduduk tenaga kerja di sekitar kawasan KPI Rangkasbitung sebesar 314.976 jiwa (2029) • Kebutuhan air minum di Kecamatan Cileles di tahun 2029 sebesar 381,28 liter/detik • Telah dibahas dalam konreg (jaringan air minum Bendungan Karian)							
14	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah (INPRES)	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kota Serang	• Pada Provinsi Banten terdapat 20 DI dengan total panjang jaringan irigasi sepanjang 361,35 Km, dimana 15 DI dalam kondisi kurang baik dan rusak (IKSI > 70), namun dari 15 DI tersebut baru 12 yang diusulkan penanganan melalui Inpres no 2 Tahun 2025. • Kabupaten Serang mempunyai 230 DI, dimana keseluruhan dari DI tersebut telah teridentifikasi IKSI-nya dan hanya 3 DI yang berkategori cukup baik (IKSI > 70), sebanyak 13 DI telah disusun RC-nya dan kesemuanya telah diusulkan dalam Inpres no 2 Tahun 2025. Sementara ada 6 DI yang diusulkan melalui program JIAT. • Pada Kabupaten Lebak terdapat 463 DI dengan total panjang jaringan irigasi sepanjang 755,8 Km, dimana 214 DI dalam kondisi kurang baik dan rusak (IKSI < 70), namun hanya 28 DI yang sudah disusun RC-nya. Dari 28	Agar dipersiapkan		900 Km	1,89 Triliun	APBN	2028	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					DI tersebut sudah diusulkan penanganan melalui Inpres no 2 Tahun 2025 sebanyak 14 DI. Sementara pada Kabupaten Pandeglang terdapat 618 DI dengan panjang saluran irigasi sepanjang 642,67 Km, dimana 608 DI dalam kondisi kurang baik dan rusak (IKSI < 70), namun baru 23 DI yang sudah disusun RConya dan kesemuanya telah dimasukkan dalam usulan penanganan melalui Inpres no 2 Tahun 2025.							
15	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipinang Bulu	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Ujungjaya, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Ujungjaya Kec. Sumur	Agar dipersiapkan		1 Km	857 juta	APBN	2025	2025
16	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibayawak	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Pari, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Pari Kec. Mandalawangi	Agar dipersiapkan		1 Km	807 juta	APBN	2025	2025
17	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciseuseupan	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Pandat, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Pandat Kec. Mandalawangi	Agar dipersiapkan		1 Km	667 juta	APBN	2025	2025
18	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citumenggung	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Karyautama, Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang	Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan	Agar dipersiapkan		2 Km	2,8.Milyar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Lokasi di Desa Karya Utama Kec. Cikedal							
19	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cukang Sadang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Tegalpapak Kec. Pagelaran	Agar dipersiapkan		5 Km	5,2 Milyar	APBN	2025	2025
20	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilembur I	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Kadumerak Kec. Karangtanjung	Agar dipersiapkan		12 Km	2,2 Milyar	APBN	2025	2025
21	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibakul	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Banyuresmi, Kec. Jiput, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Banyuresmi Kec. Jiput	Agar dipersiapkan		1 Km	1,3 Milyar	APBN	2025	2025
22	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cidahu Hulu	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Dahu Kec. Jiput	Agar dipersiapkan		1 Km	753 juta	APBN	2025	2025
23	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipurang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan 25 Lokasi di Desa Cililitan Kec. Picung	Agar dipersiapkan		1.5 Km	1.5 Milyar	APBN	2025	2025
24	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciledah	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Banyuresmi, Kec. Jiput, Kab. Pandeglang	Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan	Agar dipersiapkan		1.5 Km	1.5 Milyar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Air, dan Energi Banten	Kab. Pandeglang	- rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Cililitan Kec. Picung							
25	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilemer	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Dahu, Kec. Jiput, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Pasir Panjang Kec. Picung - Menjaga agar luas persawahan seluas 2.450 Ha tidak beralih fungsi. - Terdapat saluran irigasi yang hilang/terputus karena beralih fungsi karena adanya Pembangunan Tol Serang-Panimbang seksi 3. - Kerusakan pada pintu intake, pembuang, dan sadap, rehabilitasi saluran irigasi sepanjang 3 Km, rehabilitasi saluran pembuang, dan kerusakan bangunan Sipon	Agar dipersiapkan		1.5 Km	1.5 Milyar	APBN	2025	2025
26	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Hajian	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Cililitan, Kec. Picung, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Ganggaeng Kec. Picung	Agar dipersiapkan		1.5 Km	1.5 Milyar	APBN	2025	2025
27	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ranca Haji	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Cililitan, Kec. Picung, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Kolelet Kec. Picung	Agar dipersiapkan		1.5 Km	1.5 Milyar	APBN	2025	2025
28	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilemer	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan	Desa Babakan Keusik, Kec.	Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam	Agar dipersiapkan		1.5 Km	1.5 Milyar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Energi Banten	Patia, Kab. Pandeglang	- rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Babakan Keusik Kec. Patia							
29	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilemer	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Ciawi, Kec. Patia, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Ciawi Kec. Patia	Agar dipersiapkan		1,5 Km	1,5 Milyar	APBN	2025	2025
30	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisurog	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Banyu Biru, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Banyu Biru Kec. Labuan - Luas DI 99 Ha - Karena rusaknya saluran irigasi sebesar 40 Hektar lahan pertanian tidak teraliri, dari produktivitas panen 3x turun menjadi 1x panen. - Pada bendung terdapat potensi peningkatan ekonomi masyarakat lokal berupa wisata, yang saat ini cukup ramai, sehingga berpotensi infrastruktur tersebut memberi multiplier efek yang tidak mengganggu fungsi utama bendung. - Adanya Force Major berupa bencana longsor. - Pembangunan dinding penahan longsor, rehabilitasi bendung dan sayap bendung, rehabilitasi saluran sepanjang 250 m.	Agar dipersiapkan		2,9 Km	2,9 Milyar	APBN	2026	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
31	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigondang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Menes, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Menes Kec. Menes - Luas DI 31,10 Ha - Karena rusaknya saluran irigasi sebesar + 15 Ha lahan pertanian tidak teraliri. - Adanya Force Major berupa bencana longsor. - Rehabilitasi saluran sepanjang 1,3 Km, rehabilitasi 4 bangunan sadap.	Agar dipersiapkan		2,1 Km	2, 1 Milyar	APBN	2026	2026
32	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cijebug	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Bandung, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Bandung Kec. Banjar - Luas DI 23,70 Ha	Agar dipersiapkan		1,6 Km	1,6 Milyar	APBN	2026	2026
33	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citaman	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Pari, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Pari Kec. Mandalawangi - Luas DI 33,60 Ha	Agar dipersiapkan		1,3 Km	1,3 Milyar	APBN	2026	2026
34	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigodes	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Sindangkarya, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Sindangkarya Kec. Menes - Luas DI 21 Ha	Agar dipersiapkan		1 Km	889 juta	APBN	2026	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
35	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigondang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Alaswangi, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Alaswangi Kec. Menes - Luas DI 25 Ha	Agar dipersiapkan		1 Km	889 juta	APBN	2026	2026
36	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigondang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Alaswangi, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Alaswangi Kec. Menes - Luas DI 23,70 Ha	Agar dipersiapkan		1 Km	889 juta	APBN	2026	2026
37	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigondang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Menes, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Menes Kec. Menes - Luas DI 11 Ha	Agar dipersiapkan		0,5 km	445 juta	APBN	2026	2026
38	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisata	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Kubangkondang, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	- Usulan Bupati Pandeglang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Kubangkondang Kec. Cisata - Luas DI 48 Ha	Agar dipersiapkan		1 Km	889 juta	APBN	2026	2026
39	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Demang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Bunihara, Kec. Anyer, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Bunihara Kec. Anyer	Agar dipersiapkan		4,2 Km	4,2 Milyar	APBN	2025	2025
40	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Rancaserang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan	Desa Harundang, Kec. Cikeusal, Kab. Serang	Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam	Agar dipersiapkan		1,2 Km	1,2 Milyar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Energi Banten		- rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Harundang Kec. Cikeusal							
41	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Krajanen	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Petir, Kec. Petir, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Petir Kec. Petir - Rehabilitasi Bangunan Bendung, 6 Bangunan Sadap - Adanya kebocoran di bangunan bendung menyebabkan 3,5Km saluran pertanian tidak berfungsi sehingga + 100 Ha area persawahan telah berubah menjadi tegalan dan sebagian telah beralih fungsi menjadi permukiman penduduk.	Agar dipersiapkan		3,3 Km	3,3 Milyar	APBN	2025	2025
42	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nagara Padang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Nagara Padang Kec. Petir	Agar dipersiapkan		1,6 Km	1,6 Milyar	APBN	2025	2025
43	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibarong/cipariuk	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Sindangsari, Kec. Petir, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Sindangsari Kec. Petir	Agar dipersiapkan		1,04 Km	1,04 Milyar	APBN	2025	2025
44	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citasuk II	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Citasuk, Kec. Padarincang, Kab. Serang	Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan	Agar dipersiapkan		1,61 Km	1,61 Milyar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Lokasi di Desa Citasuk Kec. Padarincang							
45	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipaseh	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Sindang Mandi, Kec. Anyar, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Sindang Mandi Kec. Anyar	Agar dipersiapkan		10 Km	10 Milyar	APBN	2026	2026
46	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibening	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Cipayung, Kec. Padarincang, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Cipayung Kec. Padarincang	Agar dipersiapkan		3,07 Km	3,07 Milyar	APBN	2026	2026
47	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisait/Cibugang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Cisait, Kec. Kragilan, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Cisait Kec. Kragilan	Agar dipersiapkan		3,8 Km	3,8 Milyar	APBN	2026	2026
48	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kali Karad	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Kramatjati, Kec. Kragilan, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Kramatjati Kec. Kragilan - Adanya perubahan geomorfologis sungai (aliran sungai berbelok/berpindah) menyebabkan aliran sungai tidak dapat masuk ke intake, sehingga sama sekali tidak ada air yang masuk ke dalam saluran irigasi. - Status belum masuk ke Kepmen PU no 293/KPTS/M/20014 tentang	Agar dipersiapkan		1,5 Km	1,5 Milyar	APBN	2026	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. • Luasan hanya 51,17 Ha							
49	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Rancasanggal	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Ranca Sanggal, Kec. Cinangka, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Ranca Sanggal Kec. Cinangka	Agar dipersiapkan		1,1 Km	1,1 Milyar	APBN	2026	2026
50	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citasuk I	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Citasuk, Kec. Padarincang, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Citasuk Kec. Padarincang	Agar dipersiapkan		2,02 Km	2,02 Milyar	APBN	2026	2026
51	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citasuk Gayam	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Batukuwung Kec. Padarincang	Agar dipersiapkan		1,3 Km	1,3 Milyar	APBN	2026	2026
52	06-SDA	Pembangunan JIAT Desa Ujung Tebu I	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Ciomas, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Kec. Ciomas	Agar dipersiapkan		1,5 Km	1,5 Milyar	APBN	2026	2026
53	06-SDA	Pembangunan JIAT Desa Umbul Tanjung	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Cinangka, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Kec. Cinangka	Agar dipersiapkan		1,5 Km	1,5 Milyar	APBN	2026	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
54	06-SDA	Pembangunan JIAT Desa Kramat Laban I	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Padarincang, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Kec. Padarincang	Agar dipersiapkan		1,5 Km	1,5 Milyar	APBN	2026	2026
55	06-SDA	Pembangunan JIAT Desa Kramat Laban II	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Padarincang, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Kec. Padarincang	Agar dipersiapkan		1,5 Km	1,5 Milyar	APBN	2026	2026
56	06-SDA	Pembangunan JIAT Desa Cikolelet	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Cinangka, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Kec. Cinangka	Agar dipersiapkan		1,5 Km	1,5 Milyar	APBN	2026	2026
57	06-SDA	Pembangunan JIAT Desa Ujung Tebu II	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Ciomas, Kab. Serang	- Usulan Bupati Serang untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Kec. Ciomas	Agar dipersiapkan		1,5 Km	1,5 Milyar	APBN	2026	2026
58	06-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisangu Atas	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Serang	- Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di saluran Bojongpandan dan Bojong Catang - Luas DI berdasarkan Permen 1.436 Ha. - Target kenaikan IP dari 144 menjadi 260 - Output luasan 330 Ha	Agar dipersiapkan		3,5 km	13 Milyar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
59	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisangu Bawah	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Serang	- Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di saluran Bojongpandan dan Bojong Catang - Luas DI berdasarkan Permen 1.436 Ha. - Target kenaikan IP dari 144 menjadi 260 - Output luasan 1.104,54 Ha	Agar dipersiapkan		23,08 km	51,8 Milyar	APBN	2025	2025
60	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipari Ciwuni	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Serang	- Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di saluran Pematang, Cisait, dan Sentul - Luas DI berdasarkan Permen 1.644 Ha. - Target kenaikan IP dari 69 menjadi 203 - Output luasan 500 Ha	Agar dipersiapkan		16,46 km	37,8 Milyar	APBN	2025	2025
61	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pasir Eurih	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Pandeglang	- Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di saluran Parumasan, Palanyaran, Kaduagung, Cikadeun - Luas DI berdasarkan Permen 1.245 Ha. - Target kenaikan IP dari 143 menjadi 300 - Menjaga agar luas persawahan seluas 1.495 Ha tidak beralih fungsi. 18 pintu untuk rehabilitasi bangunan sadap, pembangunan saluran irigasi	Agar dipersiapkan		0,518 km	14 Milyar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					sepanjang 7,9 Km, rehabilitasi saluran penguras, dan pembangunan bangunan Sipun • Output luasan 629,2 Ha							
62	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikoncang	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Lebak	• Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan • Lokasi di saluran Parung Panjang dan Cisarap • Luas DI berdasarkan Permen 1.805 Ha • Target kenaikan IP dari 125 menjadi 230 • Output luasan 1.824 Ha	Agar dipersiapkan		12 km	64 Milyar	APBN	2025	2025
63	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikalumpang	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Serang	• Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan • Lokasi di saluran Kalumpang • Luas DI berdasarkan Permen 1000 Ha • Target kenaikan IP dari 113 menjadi 270 • Output luasan 333,9 Ha	Agar dipersiapkan		6,5 km	6,6 Milyar	APBN	2025	2025
64	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisihi	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Lebak	• Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan • Lokasi di saluran Sukajadi • Luas DI berdasarkan Permen 1.000 Ha. • Target kenaikan IP dari 143 menjadi 300 • Output luasan 297,4 Ha	Agar dipersiapkan		8,06 km	46 Milyar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
65	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciwaka	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Serang	- Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di saluran Kasemen - Luas DI berdasarkan Permen 1.210 Ha. - Target kenaikan IP dari 144 menjadi 206 - Output luasan 90,4 Ha	Agar dipersiapkan		0,32 km	787 Juta	APBN	2025	2025
66	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Situ Cikedal	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Pandeglang	- Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Output luasan 3.284 Ha	Agar dipersiapkan		3 Km	7,6 Milyar	APBN	2026	2026
67	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibinuangeun	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Lebak	- Usulan Gubernur Banten percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di saluran Pasir Tuhur, Kadang, Beyeh, Kalapa Dua - Luas DI berdasarkan Permen 2.570 Ha. - Target kenaikan IP dari 158 menjadi 207 - Output luasan 1.779 Ha	Agar dipersiapkan		35,126 km	372 Milyer	APBN	2026	2026
68	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisata	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Pandeglang	- Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di saluran Nambo, Surakarta - Luas DI berdasarkan Permen 2.112 Ha. - Target kenaikan IP dari 110 menjadi 202 - Output luasan 2,018 Ha	Agar dipersiapkan		12,670 km	85 Milyar	APBN	2026	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
69	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilemer	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Pandeglang	- Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di saluran Induk Cilemer Kiri dan Kanan, Saluran Sekunder Cijeruk, Rengas Nutug, Umbuleuit, Bera - Luas DI berdasarkan Permen 2.672 Ha. - Target kenaikan IP dari 146 menjadi 217 - Menjaga agar luas persawahan selalu 2.450 Ha tidak beralih fungsi. - Terdapat saluran irigasi yang hilang/terputus karena beralih fungsi karena adanya Pembangunan Tol Serang-Panimbang seksi 3. - Kerusakan pada pintu intake, pembuang, dan sadap, rehabilitasi saluran irigasi sepanjang 3 Km, rehabilitasi saluran pembuang, dan kerusakan bangunan Sipun - Output luasan 2,018 Ha	Agar dipersiapkan		36,77 km	217 Milyar	APBN	2026	2026
70	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibanten	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kota Serang	- Usulan Gubernur Banten untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan pada tahun 2026 - Lokasi DI Primer Cibanten dan Saluran Sekunder Kemang dan Saluran Sekunder Miring - Luas DI berdasarkan Permen 1.289 Ha. Rehabilitasi untuk menyediakan air baku Daerah Irigasi Cibanten seluas 890,18 ha - Target kenaikan IP dari 136 menjadi 260 - Output luasan 540 Ha	Agar dipersiapkan		12,811 km	76 Milyar	APBN	2026	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penyediaan air baku DI Cibanten sebesar 801,16 liter/detik (2029)							
71	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilangkahan II	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Sukaraja, Kec. Malingping, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Sukaraja Kec. Malingping	Agar dipersiapkan		15 Km	15 Milyar	APBN	2026	2026
72	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipanas	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Banjaririgasi, Kec. Lebak, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Banjaririgasi Kec. Lebak Gedong - Adanya Force Major berupa bencana banjir bandang yang menyebabkan kerusakan bendung dan berubahnya geomorfologis sungai menjadi melebar dan mendangkal, serta terdapat sedimen sehingga debit yang masuk intake hanya sedikit. - Pembangunan sabodam di area bendung Cipanas juga terpadu/terkait dengan Bendungan Karian. Dengan adanya pembangunan bangunan sabo dam di hulu sungai Ciujung ini akan mencegah adanya sedimen masuk ke Bendungan Karian, sehingga Bendungan dapat berfungsi lebih optimal sebagai tampungan air baku. - Pembangunan bangunan multifungsi berupa bendung dan sabodam, dan rehabilitasi jaringan irigasi. - Pembangunan bangunan multifungsi berupa bendung dan sabodam, dan rehabilitasi jaringan irigasi.	Agar dipersiapkan		89,8 Km	89,8 Milyar	APBD	2027	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Hasil rakorbangwil 2025, DI Cipanas merupakan kewenangan kabupaten, sehingga RC dan DED dipersiapkan oleh Pemda.							
73	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gunung Gebas	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Banjaririgasi, Kec. Lebak, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Banjaririgasi Kec. Lebak Gedong - Adanya Force Major berupa bencana longsor yang menyebabkan kerusakan bendung dan intake sehingga air tidak dapat masuk sama sekali ke dalam intake. - Saat ini pemerintah daerah (Dinas PUPR Kab Lebak) telah membangun intake sementara dan saluran sementara dengan pipa HDPE namun aliran yang masuk hanya sedikit sehingga terdapat potensi 60 Ha sawah tidak teraliri. - Pembangunan dinding penahan longsor, rehabilitasi, rehabilitasi saluran sepanjang 500 m.	Agar dipersiapkan		50 Km	50 Milyar	APBN	2026	2026
74	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibunut	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Bintangasari, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Bintangasari Kec. Cipanas	Agar dipersiapkan		59,7 Km	59,7 Milyar	APBN	2026	2026
75	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikidang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Cisungsang, Kec. Cibeber, Kab. Lebak	Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan	Agar dipersiapkan		2,5 Km	2,5 Milyar	APBN	2026	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Energi Banten		Lokasi di Desa Cisungsang Kec. Cibeber							
76	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sangiang Tales	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Luhurjaya, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Luhurjaya Kec. Cipanas	Agar dipersiapkan		32 Km	32,5 Milyar	APBN	2026	2026
77	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimangeunteung	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Luhurjaya, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Luhurjaya Kec. Cipanas	Agar dipersiapkan		19 Km	19,3 Milyar	APBN	2026	2026
78	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwiheureung	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Talagahiang, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Talagahiang Kec. Cipanas	Agar dipersiapkan		6 Km	6,4 Milyar	APBN	2026	2026
79	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisentul	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Cimancak, Kec. Bayah, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Cimancak Kec. Bayah	Agar dipersiapkan		0,8 Km	525,9 Juta	APBN	2026	2026
80	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciseureuh	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Cihambali, Kec. Cibeber, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Cihambali Kec. Cibeber	Agar dipersiapkan		0,8 Km	600 juta	APBN	2026	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
81	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cirompang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Cirompang, Kec. Sobang, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Cirompang Kec. Sobang	Agar dipersiapkan		0,5 Km	385,9 juta	APBN	2026	2026
82	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bungbas	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Harumsari, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Harumsari Kec. Cipanas	Agar dipersiapkan		0,5 Km	400 juta	APBN	2026	2026
83	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipangasih	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Cempaka, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Cempaka Kec. Warunggunung	Agar dipersiapkan		0,5 Km	350 juta	APBN	2026	2026
84	O6-SDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikeong	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Desa Cempaka, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	- Usulan Bupati Lebak untuk percepatan penanganan dalam rangka mendukung swasembada pangan - Lokasi di Desa Cempaka Kec. Muncang	Agar dipersiapkan		0,5 Km	300 juta	APBN	2026	2026
85	O6-SDA	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Cimoyan Kab. Pandeglang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Pandeglang	Pembangunan untuk menambah pelayanan Irigasi DI Cimoyan seluas 69,5 Ha	Siap		1,7 km	18,8 Miliar	APBN	2025	2026
86	O6-SDA	Rehabilitasi D.I. Cibaliung	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan	Kab. Pandeglang	Pembangunan untuk menambah pelayanan Irigasi DI Cibaliung seluas 644 Ha	Siap		15 km	96,9 Miliar	APBN	2025	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Energi Banten									
88	O6-SDA	Revitalisasi Situ Cicinta	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Maja, Kab. Lebak	Untuk Konservasi air dan pengendalian banjir	Siap		1 unit	16,5 Miliar	APBN	2025	2025
89	O6-SDA	Sempadan dan Situ - Revitalisasi Situ Cidengdong	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Sajira, Kab. Lebak	Untuk Konservasi air dan pengendalian banjir	Siap		1 unit	14 Miliar	APBN	2025	2025
90	O6-SDA	Bendungan Karian - Pembangunan Bendung Karian (Civil Works)	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	- Bendungan Karian selesai dan beroperasi tahun 2024, dilanjutkan pembangunan jaringan transmisi - Direncanakan untuk penyediaan air baku Kota Serang, Kab. Serang, dan Kota Cilegon 1500 liter/detik - Tingkat pelayanan air minum perpipaan Kota Serang 1,8%, Kab. Serang 9% dan Kota Cilegon 11%	Siap		1 unit	32,44 Miliar	APBN/L oaan	2025	2025
91	O6-SDA	Bendungan Karian - Pembangunan Bendung Karian (Hydromechanical Works)	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	- Bendungan Karian selesai dan beroperasi pada tahun 2024, dilanjutkan pembangunan jaringan transmisi - Direncanakan untuk penyediaan air baku Kota Serang, Kab. Serang, dan Kota Cilegon 1500 liter/detik - Tingkat pelayanan air minum perpipaan Kota Serang 1,8%, Kab. Serang 9% dan Kota Cilegon 11%	Siap		1 unit	44,09 Miliar	APBN/L oaan	2025	2025
92	O6-SDA	Pembangunan Pengaman Pantai Kab. Serang	Kawasan Rawan Bencana	Kec. Kasemen, Kab. Serang	Merupakan amanat RPJMN 2025-2029	Agar dipersiapkan		0,7 km	14,7 miliar	APBN	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Tsunami di Banten		- Pengendalian risiko abrasi serta melindungi kawasan permukiman dari bahaya tsunami - Panjang garis pantai rawan tsunami sepanjang 0,7 km - Kawasan rawan bencana tsunami tinggi seluas 74 Ha							
93	O6-SDA	Pembangunan Pengaman Pantai Kab. Lebak	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Banten	Kec. Panggarangan, Kec. Bayah, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak	- Merupakan amanat RPJMN 2025-2029 - Pengendalian risiko abrasi serta melindungi kawasan permukiman dari bahaya tsunami - Panjang garis pantai rawan tsunami sepanjang 2,2 km - Kawasan rawan bencana tsunami tinggi seluas 222,6 Ha	Agar dipersiapkan		2,2 km	46,2 miliar	APBN	2027	2029
94	O6-SDA	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Cilegon	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Banten	Kec. Ciwandan, Kec. Citangkil, Kec. Gerogol, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon	- Merupakan amanat RPJMN 2025-2029 - Pengendalian risiko abrasi serta melindungi kawasan permukiman dari bahaya tsunami - Panjang garis pantai rawan tsunami sepanjang 2,4 km - Kawasan rawan bencana tsunami tinggi seluas 240 Ha	Agar dipersiapkan		2,4 km	50,4 miliar	APBN	2027	2029
95	O6-SDA	Pembangunan Pengaman Pantai Kab. Pandeglang	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Banten	Kec. Sumur, Kec. Cimanggu, Kec. Cigeulis, Kec. Sukaresmi, Kec. Pagelaran, Kec. Labuan, Kec. Carita, Kab. Pandeglang	- Merupakan amanat RPJMN 2025-2029 - Pengendalian risiko abrasi serta melindungi kawasan permukiman dari bahaya tsunami - Panjang garis pantai rawan tsunami sepanjang 63,2 km - Kawasan rawan bencana tsunami tinggi seluas 6.323 Ha	Agar dipersiapkan		4,5 km	96 miliar	APBN	2027	2029

Sumber: Hasil Analisis BPIW (2025) dan Diskusi Antar Unor, 2025

8.1.2. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor perkotaan, industri, pariwisata, pertanian, kawasan afirmasi, dan rawan bencana. Matriks rencana aksi infrastruktur jalan dan jembatan dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.2 Rencana Aksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Banten

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	04-DJBM	Pelebaran Jalan Merak Batas Kota Cilegon (Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon - Peningkatan Kapasitas Jalan Raya Merak (Cilegon))	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	Kota Cilegon	- Perlu dikoordinasikan terkait kewenangan Kementerian PU dalam PN 05 - Mendukung aksesibilitas Kota Cilegon, KIEC, MIE, dan Pelabuhan Merak - Memiliki tingkat pelayanan LOS C dengan kecepatan rata-rata kendaraan 32,18-40,23 km/jam - Diproyeksikan memiliki bangkitan kendaraan 2029 sebesar 8.551,29/hari dan LOS D di tahun 2029 - Memiliki lebar jalan 38 m dan memiliki 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2) - Panjang jalan yang memerlukan peningkatan kapasitas sebesar 2,7 km	Agar dipersiapk an		2,7 km	50,22 Miliar	APBN	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	O4-DJBM	Pelebaran Jalan Merak Batas Kota Cilegon (Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon - Peningkatan Kapasitas Merak - BTS. Kota Cilegon)	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	Kota Cilegon	- Perlu dikoordinasikan terkait kewenangan Kementerian PU dalam PN 05 - Mendukung aksesibilitas Kota Cilegon, KIEC, MIE dan Pelabuhan Merak - Memiliki tingkat pelayanan LOS C dengan kecepatan rata-rata kendaraan 32,18-40,23 km/jam - Diproyeksikan memiliki bangkitan kendaraan 2029 6,677,77/hari dan LOS F di tahun 2029 - Memiliki lebar jalan 317,50 m dan memiliki 4 lajur 2 arah terbagi (4/2D) - Panjang jalan yang memerlukan peningkatan kapasitas sebesar 9,4 km	Agar dipersiapkan		9,4 km	174,84 Miliar	APBN	2027	2029
3	O4-DJBM	Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Wilmar - Peningkatan Kapasitas BTS. Kota Serang - BTS. Kota Tangerang	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	Kab. Serang	- Perlu dikoordinasikan terkait kewenangan Kementerian PU dalam PN 05 - Mendukung aksesibilitas industri, KI Wilmar MICE dan Kab. Serang - Tingkat pelayanan LOS C dengan kecepatan rata-rata kendaraan 32,18-40,12 km/jam - Diproyeksikan memiliki bangkitan kendaraan	Agar dipersiapkan		53,7 km	998,82 Miliar	APBN	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					2029 8.804,82/hari dan LOS F di tahun 2029 - Memiliki lebar jalan 317,50 m dan memiliki 4 lajur 2 arah terbagi (4/2D) - Panjang jalan yang memerlukan peningkatan kapasitas jalan sebesar 53,7 km							
4	04-DJBM	Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon - Pembangunan Akses Kawasan Industri Petrokimia Cilegon	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	Kota Cilegon	- Perlu dikoordinasikan terkait kewenangan Kementerian PU dalam PN 05 - Akses Industri Petrokimia Cilegon eksisting saat ini melewati Jalan Lingkar Selatan yang terhubung dengan Jalan Nasional BTS. Kota Cilegon – Pasauran - Mendukung aksesibilitas Industri Chandra Asri yang akan beroperasi pada tahun 2027 dan Kota Cilegon - Industri Petrokimia di Koridor Anyer-Cilegon-Merak yang saat ini total produknnya sebesar 6,6 juta ton/tahun (2019), diperkirakan setelah dilakukan ekspansi di tahun 2027 jumlah	Agar dipersiapkan		16 km	2,9 Triliun	APBD	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					produk meningkat sebesar 12,1 juta ton/tahun atau 55% dari peningkatan produk - Guna mendukung pengembangan Kawasan Industri Petrokimia Cilegon maka diperlukan pembangunan jalan baru alternatif dari Jalan Lingkar Selatan- Cilegon ke Pasauran- Anyer - Jalan baru alternatif untuk mendukung Industri Petrokimia Cilegon memiliki panjang jalan 16 km							
5	04-DJBM	Preservasi Dukungan Kawasan Prioritas - Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Citereup – Tj Lesung	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Kab. Pandeglang	- Kondisi jalan eksisting memiliki lebar jalan 7 m dengan panjang 6,1 km - Untuk mendukung pariwisata KSPN Uj Kulon – Tj Lesung - Tol Serang Panimbang akan beroperasi tahun 2024 dengan potensi 6 juta wisatawan tahun 2029 dengan bangkitan kendaraan 1.254 smp/hari atau 8.777 smp/minggu - Hasil pembahasan Rakorbangwil 2025, tidak ada kegiatan	Agar dipersiapk an		6,1 km	113,46 Miliar	APBN	2030	2030

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					preservasi jalan pada tahun 2025 - 2029.							
6	04-DJBM	Preservasi Dukungan Kawasan Prioritas - Peningkatan Kapasitas Jalan Simpang Labuan - Citareup	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Kab. Pandeglang	- Kondisi jalan eksisting memiliki lebar jalan 7m dengan panjang 48,97 km - Untuk mendukung pariwisata KSPN Uj Kulon - Tj Lesung - Tol serang panimbang akan beroperasi tahun 2024 dengan potensi 6 juta wisatawan tahun 2029 dengan bangkitan kendaraan 2.387 smp/hari atau 16.709 smp/minggu - Hasil pembahasan Rakorbangwil 2025, tidak ada kegiatan preservasi jalan pada tahun 2025 - 2029.	Agar dipersiapkan		20 km	371,9 Miliar	APBN	2030	2030
7	04-DJBM	Preservasi Dukungan Kawasan Prioritas - Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Ruas Bts. Kota Pandeglang - Bts. Kota Rangkasbitung	Banten Selatan	Kab. Lebak	- Mendukung aksesibilitas KPI Rangkasbitung - Memiliki tingkat pelayanan LOS C dengan kecepatan rata-rata kendaraan 32,18-40,23 km/jam - Lebar jalan eksisting 310 m dan memiliki 4 lajur 2 arah tak terbagi (4/2) - Diproyeksikan KPI Rangkasbitung di tahun 2029 memiliki luasan 656,20 ha	Agar dipersiapkan		11,7 km	217,62 Miliar	APBN	2030	2030

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					dengan bangkitan kendaraan 3.609 smp/hari dan LOS F di tahun 2029 - Hasil pembahasan Rakorbangwil 2025, tidak ada kegiatan preservasi jalan pada tahun 2025 – 2029.							
8	04-DJBM	Preservasi Dukungan Kawasan Prioritas - Peningkatan Kapasitas Jalan Syekh Nawawi	Banten Selatan	Kab. Lebak	- Merupakan jalan akses menuju KPI Rangkasbitung - Panjang Jalan Syekh Nawawi 1,25 km dan memiliki lebar jalan eksisting 4 m dengan 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2) - Peningkatan konektivitas guna mendukung KPI Rangkasbitung dengan penambahan luasan 656,20 ha serta bangkitan kendaraan 3.609 smp/hari	Agar dipersiapkan		1,25 km	13,75 Miliar	APBD	2027	2028
9	04-DJBM	Preservasi Dukungan Kawasan Prioritas - Peningkatan Kapasitas Jalan Arief Rahman Hakim Kaduagung	Banten Selatan	Kab. Lebak	- Merupakan jalan akses menuju KPI Rangkasbitung - Panjang Jalan Arief Rahman Hakim Kaduagung 2,10 km dan memiliki lebar jalan eksisting 5 m dengan 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2) - Peningkatan konektivitas guna	Agar dipersiapkan		2,1 km	23,1 Miliar	APBD	2027	2028

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					mendukung KPI Rangkasbitung dengan penambahan luasan 656,20 ha (2029) serta bangkitan kendaraan 3.609 smp/hari							
10	04-DJBM	Preservasi Dukungan Kawasan Prioritas - Peningkatan Kapasitas Jalan Raya Kaduagung - Cileles	Banten Selatan	Kab. Lebak	- Mendukung Akses Tol Interchange Cileles - Merupakan jalan akses menuju KPI Cileles - Panjang Jalan Raya Kadungagung - Cileles 11,5 km dan memiliki lebar jalan eksisting 5 m dengan 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2) - Peningkatan konektivitas guna mendukung KPI Cileles dengan penambahan luasan 416,66 ha (2029) serta bangkitan kendaraan 2.292 smp/hari - Termasuk highlight RPJMN Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangun, Muara binuangun-Malingping-Bayah-sawarna-Palabuhanratu, Cikurur-Ciboleger	Agar dipersiapkan		11,5 km	126,5 Miliar	APBD	2027	2028
11	04-DJBM	Preservasi Dukungan Kawasan	Banten Selatan	Kab. Lebak	- Peningkatan konektivitas guna mendukung	Agar dipersiapkan		45,3 km	498,3 Miliar	APBD	2027	2028

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Prioritas - Peningkatan Kapasitas Jalan Raya Cileles - Malingping			pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Provinsi Banten - Merupakan jalan akses sektor unggulan pertanian - Termasuk <i>highlight</i> RPJMN Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangun, Muara binuangun-Malingping-Bayah-sawarna-Palabuhanratu, Cikulur-Ciboleger							
12	04-DJBM	Pembangunan Flyover Sebidang Dengan Kereta Api Jl. Raya Cikande - Rangkasbitung	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang dan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Serang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Diakomodir Rancangan Akhir Renstra 2025-2029	Agar dipersiapkan		400 m	128,25 Miliar	APBN	2027	2028
13	04-DJBM	Pembangunan Flyover Sebidang Dengan Kereta Api Jln. Sudirman (Akses Terminal Poris Plawad) (Perlintasan Ka)	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang	Kab. Tangerang	- Usulan Inpres Jalan Daerah	Agar dipersiapkan		500 m	312,75 Miliar	APBN	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	04-DJBM	Pembangunan Flyover Sebidang Dengan Kereta Api Jl. Raya Cipanas (Rangkasbitung) (Perlintasan KA)	Kawasan Swasembad a Pangan, Air, dan Energi Banten dan Banten Selatan	Kab. Lebak	- Usulan Inpres Jalan Daerah	Agar dipersiapk an		550 m	180 Miliar	APBN	2028	2029
15	04-DJBM	Pembangunan flyover sebidang dengan Kereta Api Bts Kota Cilegon - Pasauran (PERLINTASAN KA)	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang, Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	Kota Cilegon	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Diakomodir Rancangan Akhir Renstra 2025-2029	Agar dipersiapk an		500 m	162,75 Miliar	APBN	2027	2029
16	04-DJBM	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi - Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Raya Anyer	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang; Kawasan Swasembad a Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Serang	- Usulan Inpres Jalan Daerah	Agar dipersiapk an		550 m	180 Miliar	APBN	2030	2030
17	04-DJBM	Pembangunan Flyover Sebidang Dengan Kereta Api Jl. Sudirman (Serang)	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang, Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	Kota Serang	- Disiapkan RCnya pada tahun 2026 sesuai hasil konreg 2025 - Diakomodir dalam Rancangan Akhir Renstra 2025-2029	Agar dipersiapk an		130 m	130 Miliar	APBN	2027	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	04-DJBM	Pelebaran Jalan Menuju Standar Rangkasbitung – Sajir	Banten Selatan	Kab. Lebak	- Jalan kewenangan kabupaten - Lebar eksisting jalan 6 meter - Mendukung peningkatan bangkitan jumlah wisatawan - Termasuk <i>highlight</i> RPJMN Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangeun, Muara binuangeun-Malingping-Bayah-sawarna-Palabuhanratu, Cikulur-Ciboleger - Termasuk <i>highlight</i> RPJMN Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangeun, Muara binuangeun-Malingping-Bayah-sawarna-Palabuhanratu, Cikulur-Ciboleger	Agar dipersiapkan		29,1 km	349,2 miliar	APBD	2030	2030
19	04-DJBM	Pelebaran Jalan Menuju Standar Simpang – Ciboleger	Banten Selatan	Kab. Lebak	- Mendukung akses Kawasan Afirmasi Baduy - Jalan kewenangan kabupaten - Lebar eksisting jalan 4 meter - Mendukung peningkatan bangkitan jumlah wisatawan	Agar dipersiapkan		7,1 km	85,2 miliar	APBD	2030	2030

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Termasuk highlight RPJMN Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangeun, Muara binuangeun-Malingping-Bayah-sawarna-Palabuhanratu, Cikulur-Ciboleger							
20	04-DJBM	Pelebaran Jalan Menuju Standar Cileles - Posko	Banten Selatan	Kab. Lebak	- Mendukung akses Kawasan Afirmasi Baduy - Jalan kewenangan kabupaten - Lebar eksisting jalan 4 meter - Mendukung peningkatan bangkitan jumlah wisatawan - termasuk highlight RPJMN Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangeun, Muara binuangeun-Malingping-Bayah-sawarna-Palabuhanratu, Cikulur-Ciboleger	Agar dipersiapkan		13,55 km	162,6 miliar	APBD	2027	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	04-DJBM	Dukungan Penanganan Jalan Daerah Kewenangan Pemerintah Daerah (IJD)	Banten Selatan	Seluruh KabuPat en di Provinsi Banten	- Mendukung aksesibilitas dan konektivitas regional, dan antar kawasan strategis termasuk dukungan kawasan pertanian, perkotaan, dan pariwisata	Agar dipersiapk an		50 Km	500 miliar	APBN	2025	2029
22	04-DJBM	Pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi III (Cileles - Panimbang)	Kawasan Swasembad a Pangan, Air, Energi; Banten Selatan	Kec. Cileles, Kab. Lebak	- Jalan tol mendukung akses menuju destinasi wisata Kawasan Baduy dan Kawasan Pantai Selatan - Jalan tol mendukung akses logistik pertanian	Siap		7,34 km	1,81 Triliun	APBN	2025	2025
23	04-DJBM	Peningkatan Ruas jalan Cimanying Jiput	Kawasan Swasembad a Pangan, Air, Energi	Kab. Pandegl ang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan provinsi, panjang total 6,6 km, lebar 5 meter - Penanganan berupa pelebaran jalan menuju standa - Jalan akses menuju kawasan pertanian irigasi kewenangan kabupaten	Siap		1,78 km	7,26 Miliar	APBN	2025	2025
24	04-DJBM	Peningkatan Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin	Kawasan Swasembad a Pangan, Air, Energi	Kab. Pandegl ang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan provinsi, panjang total 28,7 km, lebar 5 meter	Siap		2,55 km	7,37 miliar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Penanganan berupa pelebaran jalan menuju standar - Jalan akses menuju kawasan pertanian irigasi kewenangan kabupaten - termasuk highlight RPJMN Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangeun, Muara binuangeun-Malingping-Bayah-sawarna-Palabuhanratu, Cikulur-Ciboleger							
25	04-DJBM	Rekonstruksi Jalan Leuwidamar - Pasarkupa	Banten Selatan	Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 40,15 km, lebar 5,5 meter - Penanganan berupa pelebaran jalan menuju standar - akses jalan menuju Kawasan Afirmasi Baduy - Termasuk highlight RPJMN Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangeun, Muara binuangeun-Malingping-Bayah-	Siap		3,2 km	27,05 miliar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					sawarna-Palabuhanratu, Cikulur-Ciboleger							
26	04-DJBM	Rekonstruksi Jalan Leuwidamar - Pasarkupa	Banten Selatan	Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 40,15 km, lebar 5,5 meter - Penanganan berupa pelebaran jalan menuju standar - akses jalan menuju Kawasan Afirmasi Baduy - termasuk highlight RPJMN - Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangun, Muara binuangun-Malingping-Bayah-sawarna-Palabuhanratu, Cikulur-Ciboleger	Siap		1,74 km	15,14 miliar	APBN	2025	2025
27	04-DJBM	Rekonstruksi Jalan Simpang - Ciboleger	Banten Selatan	Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 7,8 km, lebar 4 meter - Penanganan berupa pelebaran jalan menuju standar	Siap		1,8 km	11,43 miliar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- akses jalan menuju Kawasan Afirmasi Baduy - termasuk highlight RPJMN Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangun, Muara binuangun-Malingping-Bayah-sawarna-Palabuhanratu, Cikur-Ciboleger							
28	04-DJBM	Rekonstruksi Jalan Sampay - Gunungkencana	Banten Selatan	Kec. Cileles, Kab. Lebak	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 45,1 km, lebar 5,5 meter - Penanganan berupa pelebaran jalan menuju standar - termasuk highlight RPJMN Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangun, Muara binuangun-Malingping-Bayah-sawarna-Palabuhanratu, Cikur-Ciboleger - akses jalan menuju Kawasan Afirmasi Pantai Selatan	Siap		2,75 km	19,94 miliar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
29	04-DJBM	Rekonstruksi Jalan Sukahujan - Cigemblong	Banten Selatan	Kec. Cileles, Kab. Lebak	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 19,65 km, lebar 5,5 meter - Penanganan berupa pelebaran jalan menuju standar - akses jalan menuju Kawasan Afirmasi Pantai Selatan - termasuk highlight RPJMN - Peningkatan/Pembangunan jalan ruas Panimbang - Muarabinuangeun, Muara binuangeun-Malingping-Bayah-sawarna-Palabuhanratu, Cikulur-Ciboleger	Siap		3,2 km	19,2 miliar	APBN	2025	2025
30	04-DJBM	Rekonstruksi Ruas Jalan Angsana - Lebak	Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi	Kec. Rangkas bitung, Kab. Pandeglang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 9,89 km, lebar 5,5 meter - Penanganan berupa pembangunan jalan sampai perkerasan - akses jalan menuju petrtanian irigasi kewenangan kabupaten	Agar dipersiapkan		2,75 km	21,18 miliar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
31	04-DJBM	Rekonstruksi Ruas Jalan Sukawaris - Tanjungan	Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi	Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 4,55 km, lebar 6 meter - akses jalan menuju petrtanian irigasi kewenangan pusat	Agar dipersiapkan		4 km	26,90 miliar	APBN	2025	2025
32	04-DJBM	Peningkatan Jalan Teras - Bojong Gadung Kecamatan Carenang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi	Kec. Carenang, Kab. Serang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 6,22 km, lebar 5,5 meter - Penanganan berupa pembangunan jalan sampai perkerasan - akses jalan menuju petrtanian irigasi kewenangan pusat	Siap		2,6 km	18,27 miliar	APBN	2025	2025
33	04-DJBM	Jalan Lingkar Selatan (Jl. Aat - Rusli) - (011) - Segmen III	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	Kab. Cilegon, Kab. Serang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 15,87 km, lebar 10,5 meter - Penanganan berupa rekonstruksi jalan - Jalan akses menuju kawasan industri - Terhubung dengan jalan nasional BTS Kota Cilegon - BTS	Agar dipersiapkan		2,15 km	35,27 miliar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Kota Serang, dan Jalan Raya Serang (Cilegon) - Mendukung akses Tol Cilegon Timur							
34	04-DJBM	Jalan Lingkar Selatan (Jl. Aat - Rusli) - (011) - Segmen IV	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang	Kabupaten Cilegon, Kabupaten Serang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 15,87 km, lebar 7 meter - Penanganan berupa rekonstruksi jalan - Jalan akses menuju kawasan industri - Terhubung dengan jalan nasional BTS Kota Cilegon - BTS Kota Serang, dan Jalan Raya Serang (Cilegon) - Mendukung akses Tol Cilegon Timur	Siap		2,8 km	30,34 miliar	APBN	2025	2025
35	04-DJBM	Rekonstruksi Jalan Terumbu - Sawah Luhur	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	Kec. Kasemen , Kota Serang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 3,4 km, lebar 6 meter - Penanganan berupa pelebaran menuju standar - akses jalan menuju petrtanian irigasi kewenangan provinsi	Siap		3,3 km	21,46 miliar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36	04-DJBM	Rekonstruksi Jalan Priyayi - Terumbu	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	Kec. Kasemen , Kota Serang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 2,3 km, lebar 6 meter - Penanganan berupa pelebaran menuju standar - akses jalan menuju petrtanian irigasi kewenangan provinsi	Siap		2,1 km	13,22 miliar	APBN	2025	2025
37	04-DJBM	Rekonstruksi Jalan Trondol - Priyayi	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	Kec. Kasemen , Kota Serang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 1,72 km, lebar 7 meter - Penanganan berupa pelebaran menuju standar - akses jalan menuju petrtanian irigasi kewenangan provinsi	Siap		1,1 km	8,2 miliar	APBN	2025	2025
38	04-DJBM	Rekonstruksi Jalan Kaligandu - Trondol	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	Kec. Kasemen , Kota Serang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 1,78 km, lebar 6 meter - Penanganan berupa pelebaran menuju standar	Siap		1,7 km	11,3 miliar	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39	04-DJBM	Rekonstruksi Jalan Kalodran - Jengkol	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	Kec. Walantaka, Kota Serang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Ruas jalan kewenangan kabupaten, panjang total 3,54 km, lebar 5,5 meter - Penanganan berupa pelebaran menuju standar - Terhubung dengan Jalan Nasional BTS Kota Serang - BTS Kab. Serang	Siap		2,7 km	16,01 miliar	APBN	2025	2025
40	04-DJBM	Rekonstruksi Jalan Taman - Keganteran	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	Kec. Keganteran, Kota Serang	- Usulan Inpres Jalan Daerah - Jalan kewenangan kabupaten, panjang total 4,3 km, lebar 4,5 meter - Penanganan berupa pelebaran menuju standar - Terhubung dengan Jalan Nasional BTS Kota Cilegon - BTS Kota Serang	Siap		4,3 km	25,8 miliar	APBN	2025	2025
41	04-DJBM	Preservasi jalan ruas Panimbang-labuan	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Kab. Pandeglang	- Kondisi eksisting lebar jalan 7 m, panjang 6,1 km - Tol Serang Panimbang akan beroperasi tahun 2024 dengan potensi 6 juta wisatawan tahun 2029 dengan bangkitan kendaraan 1.254 smp/hari atau 8.777 smp/minggu	Agar Dipersiapkan		6,1 km	113,46 miliar	APBN	2027	2028

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Hasil Rakorbangwil 2025, alokasi kegiatan preservasi mengikuti program IRMS.							
42	04-DJBM	Preservasi jalan ruas Panimbang-Tanjunglesung	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Kab. Pandeglang	- Kondisi eksisting lebar jalan 7 m, panjang 6,1 km - Tol Serang Panimbang akan beroperasi tahun 2024 dengan potensi 6 juta wisatawan tahun 2029 dengan bangkitan kendaraan 1.254 smp/hari atau 8.777 smp/minggu - Hasil Rakorbangwil 2025, alokasi kegiatan preservasi mengikuti program IRMS.	Agar Dipersiapkan		6,1 km	113,46 miliar	APBN	2027	2028
43	04-DJBM	Preservasi jalan ruas Panimbang-Sumur-ujungkulon (via pesisir)	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Kab. Pandeglang	- Kondisi eksisting lebar jalan 7 m, panjang 6,1 km - Tol Serang Panimbang akan beroperasi tahun 2024 dengan potensi 6 juta wisatawan tahun 2029 dengan bangkitan kendaraan 1.254 smp/hari atau 8.777 smp/minggu - Hasil Rakorbangwil 2025, alokasi kegiatan preservasi mengikuti program IRMS.	Agar Dipersiapkan		6,1 km	113,46 miliar	APBN	2027	2028
44	04-DJBM	Pembangunan Jalan Tol Serang-Rangkas	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi	Kab. Pandeglang	- Mendukung highlight RPJMN 2025-2029	Agar Dipersiapkan		21,34 km	1,56 triliun	APBN/KPBU	2028	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bitung-Panimbang	Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung		- Meningkatkan konektivitas menuju kawasan prioritas Kawasan Pariwisata Labuan-Tanjung Lesung							

Sumber: Hasil Analisis BPIW (2025) dan Diskusi Antar Unor, 2025

8.1.3. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Rencana aksi pembangunan infrastruktur Permukiman ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor perkotaan, industri, pariwisata, pertanian, kawasan afirmasi, dan rawan bencana. Matriks rencana aksi infrastruktur permukiman dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana, dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.3 Rencana Aksi Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	05-DJCK	Pembangunan SPAM Regional Sindangheula	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang; Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Pabuaran, Kec. Taktakan, Kab. Serang	- WTP Petir direncanakan melayani Kota Serang (150 liter/detik), Kab. Serang (200 liter/detik), dan Kota Cilegon (1.150 liter/detik) sumber air baku WTP Petir diperoleh dari Bendung Pamarayan. - WTP 1 sebesar 400 lt/dt sudah dibangun	Agar dipersiapkan		400 l/detik	2,42 Triliun	Swasta/ KPBU	2029	2032

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Direncanakan melalui Sungai Ciujung kemudian ke Bendung Pamarayan dengan kapasitas 1.500 liter/detik - Terintegrasi dgn Karian Barat, sudah masuk dalam Rencum KPBU DJPI Batch 2 (2029-2034). Namun apabila ada investor yg berminat bisa lebih cepat.							
2	05-DJCK	Peningkatan Kapasitas TPA Cilowong dengan menerapkan 3R	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang; Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Cilowong, Kota Serang	- Cakupan wilayah pelayanan TPA Cilowong yaitu Kota Serang dan Kabupaten Serang - TPA Cilowong memiliki luas 20 ha dan telah terpakai 10 ha sehingga kapasitas sisa TPA Cilowong 1.226.000 m³ - Timbunan sampah domestik Kawasan Serang - Cilegon mencapai 14.226 m³/hari - Penanganan sampah Kota Serang 50,99% dan Kab. Serang 8,37% - Saat ini timbunan sampah masuk TPA Cilowong melalui <i>landfill</i> sebesar 77%, sehingga timbunan sampah masuk <i>landfill</i> 951.496 m³/tahun (2029) - Diproyeksikan bahwa tahun 2027 kapasitas	Agar dipersiapkan		259.600 KK	6,5 Miliar	APBD	2027	2028

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahkan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					TPA Cilowong <i>over capacity</i> - Dibutuhkan rencana peningkatan kapasitas TPA Cilowong seluas 10 ha - Termasuk highlight intervensi RPJMN Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau							
3	05-DJCK	Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT) Kota Serang	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	Kel. Cilowong, Kec. Taktakan	- Pelayanan sanitasi layak 90,76% - Kota Serang belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (26 jiwa/ha) - Wilayah perkotaan Serang belum terdapat IPLT namun diproyeksikan bahwa timbulan tinja di Kota Serang 2029 sebesar 366,70 m³/hari - Rencana pelayanan untuk 11.000 KK, kapasitas 22 m³/hari - Termasuk Highlight Intervensi RPJMN Pengembangan SPAL Regional Perkotaan	Agar dipersiapkan		11.000 KK	5 Miliar	APBN	2027	2029
4	05-DJCK	Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT) Kab. Serang	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-	Kel. Pagintungan, Kec. Jawilan	- Pelayanan sanitasi layak 80,34% - Kab. Serang belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (9,5 jiwa/ha)	Agar dipersiapkan		11.000 KK	5 Miliar	APBN	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Serang, dan Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten		- Wilayah Kab. Serang belum terdapat IPLT namun diproyeksikan bahwa timbunan tinja di Kab. Serang 2029 sebesar 1.240 m³/hari - Rencana pelayanan untuk 200 KK							
5	05-DJCK	Peningkatan SPAM di Kawasan Wisata Labuan - Tj Lesung	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Kec. Panimbang	- Jaringan perpipaan sudah terlayani PDAM Pandeglang kapasitas 240 liter/detik, <i>idle capacity</i> 20 liter/detik yang apabila dioptimalkan dapat melayani 2.000 KK - Peningkatan jumlah wisatawan KSPN Uj Kulon - Tj Lesung di tahun 2029 sebesar 6 juta dengan kebutuhan air minum 352 liter/detik - Kapasitas SPAM Kecamatan Panimbang sebesar 15 liter/detik - Tahun 2022 penambahan kapasitas IPA sebesar 100 liter/detik bersumber dari <i>intake</i> air baku Sungai Ciliman - Target pelayanan air minum sebanyak 4.000 SR/20.000 jiwa - Pemda menyiapkan dokumen RC pra DED sebagai bagian dari SPAM Karian Timur.	JDU ditargetkan selesai tahun 2023		100 l/detik)	17,6 Miliar	APBD	2027	2028

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	05- DJCK	Peningkatan Kapasitas TPA Bojongcanar	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan- Tanjung Lesung	Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	- Jebolnya tanggul TPA Bojongcanar di Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang - Timbulan sampah eksisting TPA Bojongcanar 18.250 m³/tahun - Luasan 2 ha dan volume kapasitas terpakai 33.000 m³ atau 0,5 ha sehingga sisa volume TPA Bojongcanar sebesar 91.000 m³ - Diproyeksikan tahun 2026 TPA Bojongcanar mengalami <i>overload</i> dengan timbulan sampah masuk 18.916 m³/tahun	Agar dipersiap kan		9.400 KK	6,5 Miliar	APBD	2027	2028
7	05- DJCK	Peningkatan Kapasitas TPA Bangkonol dengan menerapkan 3R	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Sukaesmi, Kec. Panimbang, dan Kec. Sumur, Kab. Pandeglang	- Jebolnya tanggul TPA Bojongcanar sehingga timbulan sampah di Kab. Pandeglang dialihkan ke TPA Bangkonol - Timbulan sampah eksisting masuk TPA Bangkonol 250 m³/hari atau 91.250 m³/tahun - TPA Bangkonol memiliki luasan 10 ha dan volume kapasitas terpakai 202.000 m³ atau 2 ha sehingga sisa volume TPA Bangkonol sebesar 987.000 m³ - Tingkat pelayanan sampah Kabupaten Pandeglang sebesar	Agar dipersiap kan		10.500 KK	6,5 Miliar	APBD	2027	2028

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					9,18% dengan target peningkatan layanan sebesar 29% atau 58,49 m ³ /hari. Sehingga TPA Bangkonol akan mengalami <i>over capacity</i> tahun 2032							
8	05-DJCK	Pembangunan SPALD-T Skala Kawasan Labuan - Tj Lesung	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Kec. Panimbang dan Kec. Sumur, Kab. Pandeglang	- Pelayanan sanitasi aman 1% terendah di Prov. Banten - Kab. Pandeglang belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (3,94 ha) - Meningkatkan pelayanan sanitasi aman Kab. Pandeglang (RPJMN 2020-2024 (15%)) - Potensi produksi air limbah domestik di wilayah pengembangan dan sekitarnya (2029) adalah sebesar 305,19 liter/detik	Agar dipersiapkan		2.000 KK	5 Miliar	APBD	2027	2028
9	05-DJCK	Pembangunan SPAM Regional Karian Barat	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	- Sebagai pemanfaatan Bendungan Karian Menggunakan skema KPBU unsolicited yang diinisiasi oleh konsorsium PT Krakatau Tirta Industri (KTI), PT Adhi Karya, dan PT U Connectivity Services (UCS) dengan PJPB Gubernur Provinsi Banten. - Kapasitas produksi air curah sebesar 1500 liter/detik akan dialirkan	Dokumen Pra-FS (dalam tahap evaluasi)		1.500 liter/detik	1,41 Triliun	KPBU	2029	2032

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					ke Kota Serang (150 liter/detik), Kota Cilegon (1.150 liter/detik), Kabupaten Serang (200 liter/detik). - Perkiraan akan melayani 150.000 SR (asumsi 1 liter/detik untuk 100 SR) - Proyek ini mencakup pembangunan unit air baku dan pembangunan IPA dengan bentuk pengembalian investasi yang digunakan ialah tarif selama masa konsesi 30 Tahun - Terintegrasi dengan Sindangheula, sudah masuk dalam Rencum KPBU DJPI Batch 2 (2029-2034). Namun apabila ada investor yang berminat bisa lebih cepat.							
10	05-DJCK	Peningkatan Kapasitas TPA Dengung dengan menerapkan 3R	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten; Banten Selatan	Kec. Maja, Kab. Lebak	- Timbulan sampah eksisting TPA Dengung sebesar 25.550 ton/tahun - Luas TPA Dengung 10 ha dengan volume 1.268.000 m ³ - Diproyeksikan tahun 2024 TPA mengalami <i>overload</i> menampung timbulan sampah dari kawasan Serang – Panimbang dengan volume sampah masuk <i>landfill</i> sebesar 82.616 m ³	Agar dipersiapkan		1 Paket 75.900 KK	6,5 Miliar	APBD	2027	2028

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Meningkatkan pelayanan persampahan guna mendukung KPI Serang – Panimbang khususnya di Kabupaten Lebak							
11	05-DJCK	Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT) Dengung	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten, Banten Selatan	Kec. Maja, Kab. Lebak	- Pelayanan sanitasi layak Kab. Lebak 56,82% - Dengan keberadaan KPI Rangkasbitung diproyeksikan tahun 2029 KPI memiliki luas sebesar 656,20 ha, penambahan jumlah penduduk sebesar 314.976 jiwa - Proyeksi timbunan tinja di Kab. Lebak 2029 sebesar 458,74 m³/hari - Merupakan program optimalisasi IPLT Dengung	Agar dipersiapkan		11.000 KK	5 Miliar	APBD	2027	2029
12	05-DJCK	Pembangunan SPALD-T (IPAL) Walantaka	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten; Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	Perkotaan Walantaka, Kab. Serang	- Pelayanan sanitasi layak Kota Serang 90,76% - Dengan keberadaan KPI Cikande diproyeksikan tahun 2029 KPI memiliki luas sebesar 4.153 ha dengan penambahan jumlah penduduk sebesar 2 juta jiwa - Kota Serang belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (26 jiwa/ha) - Proyeksi timbunan tinja di Perkotaan Walantaka 2029 sebesar 68,99 m³/hari	Agar dipersiapkan		2.000 KK	5 Miliar	APBD	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	05-DJCK	Pembangunan SPALD-T (IPAL) Skala Kawasan Cibadak	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Perkotaan Cibadak, Kab. Lebak	- Pelayanan sanitasi layak Kab. Lebak 56,82% - Dengan keberadaan KPI Rangkasbitung diproyeksikan tahun 2029 KPI memiliki luas sebesar 656,20 ha dengan penambahan jumlah penduduk sebesar 314.976 jiwa - Kab. Lebak belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (4,26 jiwa/ha) - Proyeksi timbulnya tinja di Perkotaan Cibadak 2029 sebesar 204,29 m³/hr	Agar dipersiapkan		2.000 KK	5 Miliar	APBD	2027	2029
14	05-DJCK	Pembangunan SPALD-T (IPAL) Skala Kawasan Cileles	Banten Selatan	Perkotaan Cileles, Kab. Lebak	- Pelayanan sanitasi layak Kab. Lebak 56,82% - Adanya KPI Cileles diproyeksikan tahun 2029 KPI memiliki luas sebesar 416,66 ha dengan penambahan jumlah penduduk sebesar 199.997 jiwa - Kab. Lebak belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (4,26 jiwa/ha) - Proyeksi timbulnya tinja di Perkotaan Cibadak 2029 sebesar 137,26 m³/hr - Termasuk highlight intervensi RPJMN Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur	Agar dipersiapkan		2.000 KK	5 Miliar	APBD	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					jaringan transportasi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni , serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan							
15	05-DJCK	Pembangunan SPAM Regional - Pembangunan SPAM Maja	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kab. Lebak Kota Tangerang	- Diperkirakan Bendungan Karian selesai dan beroperasi pada tahun 2024 - Pembangunan SPAM Maja dan SPAM Kota Rangkasbitung yang dapat melayani sebesar 0,6 m3/detik - Pembagian kapasitas sebesar 0,4 m3/detik (Kota Satelit Maja) dan 0,2 m3/detik (Kota Rangkasbitung)	Agar dipersiapkan		200 l/detik	1,21 Triliun	APBN/ Swasta/ KPBU	2027	2027
16	05-DJCK	Pembangunan TPST Regional Cileles	Banten Selatan	Kec. Cileles, Kab. Lebak	- Tahap Pra FS - Provinsi Banten belum memiliki TPST Regional sehingga wilayah yang dengan kondisi TPST Overcapacity - Diharapkan TPA Regional Cileles dapat menampung timbulan sampah yang berada di Kab Lebak, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang sebesar 6,07 juta m3/tahun di tahun 2029	Agar dipersiapkan		82.600 KK	68,6 Miliar	APBN	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Termasuk highlight intervensi RPJMN Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transportasi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni , serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan							
17	05-DJCK	SPALD-T Skala Kota (IPAL) Cibadak	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Cimanggu, Kab. Lebak	- Pelayanan sanitasi layak Kab. Lebak 56,82% - Dengan keberadaan KPI Cileles diproyeksikan tahun 2029 luas sebesar 416,66 ha dengan penambahan jumlah penduduk 212.803 jiwa (95.823 Kec. Cileles) (116.980 Kec. Cibadak) - Kab. Lebak belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (4,26 jiwa/ha)	Agar dipersiapkan		2.000 KK	5 Miliar	APBD	2027	2030
18	05-DJCK	Pembangunan SPAM IKK Cibaliung	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten; Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang	- Pembangunan SPAM IKK Cibaliung guna mendukung infrastruktur dasar sektor afirmasi - Wilayah pelayanan SPAM IKK Cibaliung melayani Desa Sudimanik dan Desa Curug	Agar dipersiapkan		20 l/detik	23,5 Miliar	APBD	2027	2030

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Unggulan Labuan- Tanjung Lesung									
19	05- DJCK	Peningkatan SPAM IKK Cikeusik	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten; Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan- Tanjung Lesung	Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang	- Peningkatan SPAM IKK Cikeusik guna mendukung infrastruktur dasar sektor afirmasi - Wilayah pelayanan SPAM IKK Cikeusik melayani Desa Sukamulya	Agar dipersiap kan		18 l/detik	39,8 Miliar	APBD	2027	2030
20	05- DJCK	Pembangunan SPAM IKK Cibitung	Kawasan Swasemba da Pangan, Air, dan Energi Banten; Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan- Tanjung Lesung	Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang	- Pembangunan SPAM IKK Cibitung guna mendukung infrastruktur dasar sektor afirmasi - Wilayah pelayanan SPAM IKK Cibitung melayani Desa Cikiruh	Agar dipersiap kan		20 l/detik	16,5 Miliar	APBD	2027	2030
21	05- DJCK	Peningkatan SPAM IKK Cigemlong	Kawasan Swasembad a Pangan,	Kec. Cigemlong, Kab. Lebak	- Peningkatan SPAM IKK Cigemlong guna	Agar dipersiap kan		18 l/detik	16,1 Miliar	APBD	2027	2030

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Air, dan Energi Banten; Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan- Tanjung Lesung		mendukung infrastruktur dasar sektor afirmasi - Wilayah pelayanan SPAM IKK Cigemblong melayani Desa Cikaret, Desa Cikadongdong, dan Desa Cikate							
22	05- DJCK	Pembangunan SPAM IKK Cimarga	Kawasan Swasembad a Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Cimarga, Kab. Lebak	- Pembangunan SPAM IKK Cimarga guna mendukung infrastruktur dasar sektor afirmasi - Wilayah pelayanan SPAM IKK Cimarga melayani Desa Margaluyu	Agar dipersiap kan		20 l/detik	53,6 Miliar	APBD	2027	2030
23	05- DJCK	Peningkatan SPAM IKK Bojongmanik	Banten Selatan	Kec. Bojongmani k, Kab. Lebak	- Peningkatan SPAM IKK Bojongmanik guna mendukung infrastruktur dasar sektor afirmasi - Wilayah pelayanan SPAM IKK Bojongmanik melayani Desa Pasirbitung, Desa Parakanbeusi, Desa Mekar Rahayu, dan Desa Keboncau - Termasuk highlight intervensi RPJMN Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transportasi, infrastruktur distribusi	Agar dipersiap kan		16 l/detik	18,4 Miliar	APBD	2027	2030

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni , serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan							
24	05- DJCK	Peningkatan SPAM IKK Lebakgedong	Kawasan Swasembad a Pangan, Air, dan Energi Banten	Kec. Lebakgedon g, Kab. Lebak	- Peningkatan SPAM IKK Lebakgedong guna mendukung infrastruktur dasar sektor afirmasi - Wilayah pelayanan SPAM IKK Lebakgedong melayani Desa Ciladaeun	Agar dipersiap kan		16 l/detik	16,3 Miliar	APBD	2027	2030
25	05- DJCK	Peningkatan SPAM IKK Leuwidamar	Banten Selatan	Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	- Peningkatan SPAM IKK Leuwidamar guna mendukung infrastruktur dasar sektor afirmasi - Wilayah pelayanan SPAM IKK Leuwidamar melayani Desa Kanekes - Termasuk highlight intervensi RPJMN Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transportasi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni, serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan	Agar dipersiap kan		18 l/detik	40,8 Miliar	APBD	2027	2030
26	05- DJCK	Perluasan IPA Dalung	Kawasan Perkotaan Cilegon- Serang	Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	- Pemenuhan air minum Kota Serang, capaian air aman 5%	Agar dipersiap kan		1 unit	80 Miliar	APBN	2027	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Sumber air baku berasal dari Sungai Cibanten debit 150 lt/detik - Kapasitas IPA eksisting 25 lt/detik - RC disiapkan oleh Pemda - Hasil Rakorbangwil 2025, pekerjaan difokuskan pada pemanfaatan idle capacity IPA Dalung (potensi kapasitas 25l/detik) dan perluasan jaringan (potensi 2000 SR) - Diperlukan pengecekan neraca air terbaru							
27	05-DJCK	Pembangunan Terintegrasi Rancang Bangun TPST	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	Kec. Bagendung, Kota Cilegon	- Merupakan program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP) - Direncanakan mampu menampung dan mengolah 200 ton sampah per hari - Termasuk highlight intervensi RPJMN : Pembangunan TPST Regional Serang-Cilegon	Siap		5.000 KK	44 Miliar	APBN/Loan	2025	2025
28	05-DJCK	Pembangunan TPS 3R – Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu	Banten Selatan	Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	Termasuk highlight intervensi RPJMN Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transportasi,	Siap		200 KK	600 juta	APBN	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni , serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan							
29	05-DJCK	Urban renewal Kawasan Pariwisata Labuan	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Kab. Pandeglang	- Highlight intervensi RPJMN 2025-2029 - Kondisi kawasan wisata KEK Tanjung Lesung di Labuan mengalami kerusakan	Agar dipersiapkan		1.000 ha	200 miliar	APBN	2028	2029

Sumber: Hasil Analisis BPIW (2025) dan Diskusi Antar Unor, 2022

8.1.4. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Prasarana Strategis

Rencana aksi pembangunan infrastruktur prasarana strategis ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor perkotaan, industri, pariwisata, pertanian, kawasan afirmasi, dan rawan bencana. Matriks rencana aksi infrastruktur prasarana strategis dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana, dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.4 Rencana Aksi Infrastruktur Prasarana Strategis Provinsi Banten

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahannya Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	06 - DJPS	Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah PHTC	Banten Selatan	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang	-	Siap		46 unit	87,78 Miliar	APBN	2025	2025
2	06 - DJPS	Rehabilitasi Dan Renovasi Rumah Sakit	Banten Selatan	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang	<i>Highlight intervensi</i> RPJMN 2025-2029 Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu- anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, terutama di RSUD Malinping (PHTC)	Agar dipersiapk an		3 unit		APBN	2027	2029
3	06 - DJPS	Rehabilitasi Dan Renovasi Rumah Sakit	Kawasan Perkotaan Cilegon- Serang	Kota Serang	<i>Highlight intervensi</i> RPJMN 2025-2029 Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu- anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kota, terutama di RSUD Provinsi Banten (PHTC)	Agar dipersiapk an		3 unit		APBN	2027	2029

Sumber: Hasil Analisis BPIW (2025) dan Diskusi Antar Unor, 2022

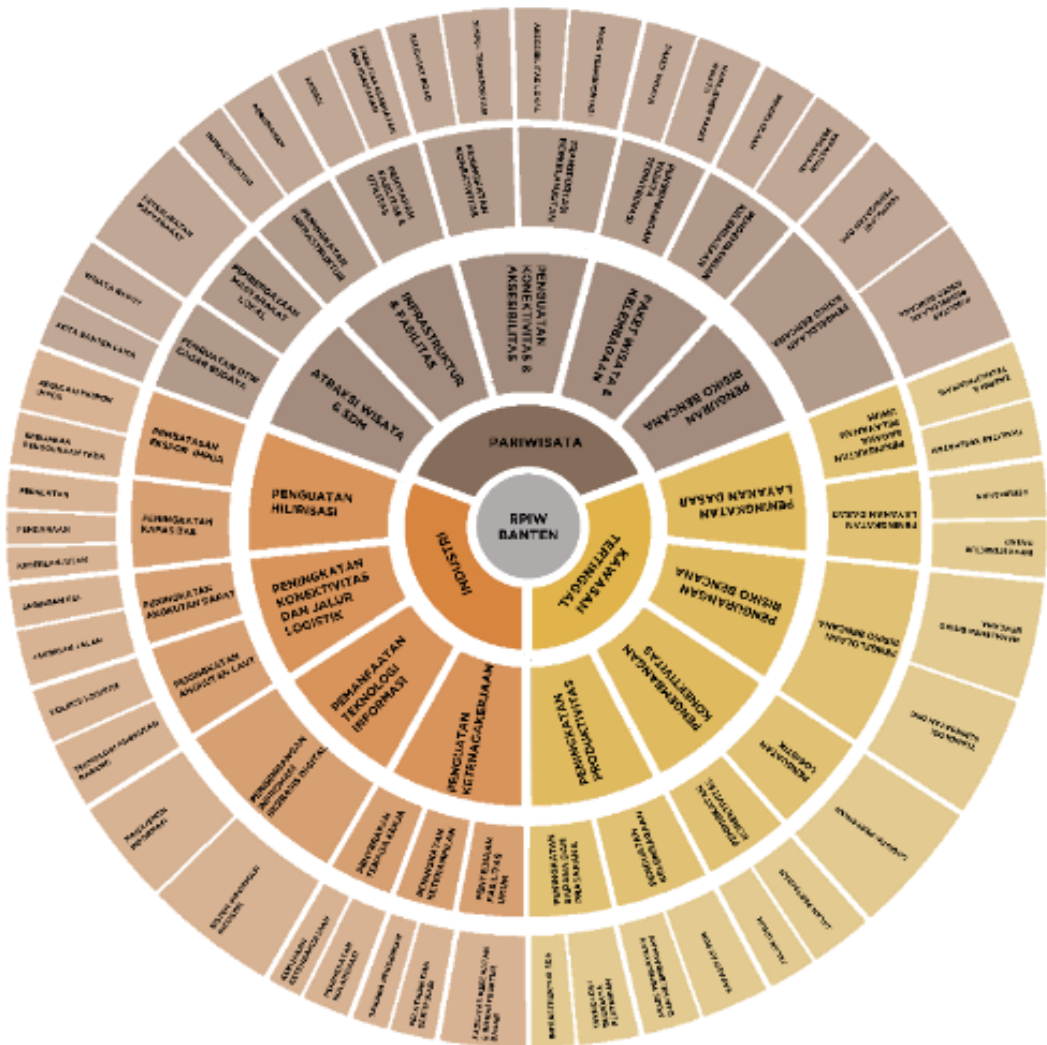
8.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur

Rencana aksi pembangunan infrastruktur merupakan turunan dari *grand strategy* yang dijabarkan ke dalam program pembangunan infrastruktur. Rencana aksi tersebut merupakan pendetailan dari program yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai *stakeholder*, serta dilaksanakan dalam kurun waktu hingga 2034.

Dalam rencana aksi yang telah dirumuskan, terdapat 5 fokus pengembangan yaitu perkotaan, industri, pariwisata, pertanian, dan penanganan kawasan afirmasi, yang dijabarkan dalam 21 *grand strategy*. Dari 21 *grand strategy* tersebut dirinci menjadi 41 program dan 297 rencana aksi (52 sektor PU dan 245 non PU). Ringkasan mengenai *grand strategy*, program, dan rencana aksi masing-masing fokus adalah sebagai berikut:

1. Fokus Perkotaan, terdiri dari 4 *grand strategy*, 8 program, dan 44 rencana aksi (7 kegiatan sektor PU dan 37 non PU);
2. Fokus Industri, terdiri dari 4 *grand strategy*, 8 program, dan 72 rencana aksi (7 kegiatan sektor PU dan 65 non PU);
3. Fokus pariwisata, terdiri dari 5 *grand strategy*, 9 program, dan 88 rencana aksi (14 kegiatan sektor PU dan 74 non PU);
4. Fokus pertanian, terdiri dari 4 *grand strategy*, 7 program, dan 45 rencana aksi (15 kegiatan sektor PU dan 30 non PU); dan
5. Fokus kawasan afirmasi, terdiri dari 4 *grand strategy*, 9 program, dan 48 rencana aksi (9 kegiatan sektor PU dan 39 non PU).

Rencana aksi keterpaduan infrastruktur PU dan Non PU menunjukkan bahwa dalam pengembangan wilayah Provinsi Banten (perkotaan, industri, pariwisata, pertanian, dan kawasan tertinggal) diperlukan keterlibatan dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga lain yaitu sebanyak 14 K/L termasuk pemda di wilayah Banten. Secara lengkap, ringkasan rencana aksi keterpaduan infrastruktur dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8.1 Rangkuman Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur
Sumber: Hasil Analisis, 2025

8.2.1. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PU dan Non PU Fokus Perkotaan

Pengembangan Kawasan Perkotaan dalam rangka meningkatkan daya saing Kawasan Perkotaan Cilegon – Serang untuk menjadi *Engine of Growth* yang kuat bagi pengembangan Wilayah Banten. Adapun rencana yang dirumuskan yaitu: (1) Percepatan pemenuhan layanan perkotaan untuk menciptakan daya saing sebagai kota berbasis logistik; (2) Penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi. (3) Pengembangan kawasan perkotaan yang berketahanan bencana; (4) Pengembangan integrasi antar moda dan sistem angkutan umum massal perkotaan.

Tabel 8.4 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Kawasan Perkotaan

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
(S2 - W3 - O2) Percepatan pemenuhan layanan perkotaan untuk menciptakan daya saing sebagai kota berbasis logistik	Peningkatan Konektivitas antar Pusat Kegiatan	Jalan Lingkar dan Jalan Radial	Jalan Akses Logistik	Pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMEN PU	X	X	X	X	X
				Peningkatan Jalan Akses Logistik Menuju Pelabuhan	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMEN PU	X	X	X	X	X
				Dukungan Penanganan Jalan Daerah Kewenangan Pemerintah Daerah	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X	X	X
	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pengolahan Limbah	Limbah Cair	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMEN PU	X	X	X	X	X
				Pengembangan <i>Command Centre</i> untuk pemantauan kualitas sungai dan drainase	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X		
				Pembentukan Satgas Pengendalian Kualitas Sungai	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X			
			Limbah Padat	Pembangunan Sistem Pengolahan Sampah <i>Waste to Energy</i>	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMEN PU	X	X	X		
				Peningkatan Sistem 3R dengan melibatkan penduduk perkotaan	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA		X	X	X	X
				Peningkatan Kerjasama dengan industri terkait pemanfaatan limbah	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA				X	X
		Perbaikan Kualitas	Penataan Hunian	Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kawasan Padat Penduduk	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I					
							2025	2026	2027	2028	2029	
		Lingkungan Sekitar		Penerapan Konsolidasi Lahan sesuai dengan Rencana Pengembangan	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X			
			Rumah sakit	Rehabilitasi Dan Renovasi Rumah Sakit	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMENPU			X	X	X	
	Penyediaan Air Bersih	Pengolahan Air Minum	Air Minum	Pembangunan SPAM Regional Karian Barat	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMEN PU		X	X	X	X	
				Pembangunan Jaringan Perpipaan terutama pada kawasan kritis air	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X			
				Pengembangan kolam retensi dan embung sebagai sumber air alternatif	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X				
			Kebijakan Pemanfaatan Air	Regulasi Pembatasan Penggunaan Air Tanah	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X			
				Regulasi Pengeboran Sumur	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA		X	X	X	X	X
				Pemanfaatan idle capacity SPAM regional di kawasan perkotaan	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA				X	X	
	(W1 - W2) Pengembangan kawasan perkotaan yang berketahanan bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Infra-struktur Pengendali Banjir	Infrastruktur SDA	Peningkatan Kapasitas Sungai di wilayah WS Cidanau-Ciujung-Cidurian	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMEN PU	X	X	X	X	X
					Penanganan Sempadan Danau	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMEN PU			X	X	
					Peningkatan Kapasitas Drainase Perkotaan	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X		
				Pengendalian DAS Kritis	Peningkatan luasan RTH untuk mengurangi <i>run off</i> dan polusi	Kota Serang dan Kota Cilegon	ATR/BPN/PEMDA	X	X			
					Pengendalian tutupan lahan pada bagian hulu sungai	Kota Serang dan Kota Cilegon	ATR/BPN/PEMDA	X	X	X		
					Penanganan Banjir Rob pada Kawasan Perkotaan di Pesisir	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMEN PU				X	X
		Sistem Peringatan Dini	Teknologi Informasi	Data/ Informasi	Pengembangan Pusat Informasi Kebencanaan	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X	X	X
					Pengembangan Teknologi Untuk Meningkatkan Akurasi Prediksi Bencana	Kota Serang dan Kota Cilegon	KOMDIGI/BNPB	X	X	X		
					Pengembangan Sistem Integrasi Data Iklim <i>Real Time</i>	Kota Serang dan Kota Cilegon	BMKG	X	X			

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Sistem Peringatan Dini	Pengembangan Riset dan Penelitian Terkait Kebencanaan	Kota Serang dan Kota Cilegon	BNPB	X	X	X		
				Pengembangan Sistem Peringatan Dini	Kota Serang dan Kota Cilegon	BNPB		X	X	X	X
				Edukasi Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesadaran Bencana	Kota Serang dan Kota Cilegon	BNPB/PEMDA				X	X
(W4 - T2) Pengembangan integrasi antar moda dan sistem angkutan umum massal perkotaan	Transportasi Publik	Sistem Transportasi Massal	Transportasi Multimoda	Pengembangan transportasi umum perkotaan	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMENHUB				X	X
				Pengembangan <i>Traffic Management System</i>	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMENHUB		X	X	X	
			Simpul Transportasi Antarmoda	Pembangunan Fasilitas <i>Transit</i> Antar Moda Transportasi	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMENHUB		X	X		
				Pembangunan pusat aktivitas ekonomi terintegrasi dengan <i>Transit Hub</i>	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA			X	X	X
				Penerapan Sistem Elektronik dalam Pemanfaatan Transportasi Publik	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA				X	X
(S1 - W5 - O3) Penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi	Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Antar Kab/Kota	Koordinasi dan Pendanaan	Koordinasi	Pembentukan Forum Komunikasi Perkotaan	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X	X	
				Pembentukan Skema sharing pembangunan antarkawasan	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X				
				Pembangunan Infrastruktur Regional secara kolektif	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X	X	X
			Integrasi Anggaran	Pengembangan Skema Pendanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X	X	X
				Pemberian Insentif dan Disisentif dalam mendukung pembangunan antarkawasan	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA				X	X
				Mendorong Pengembangan Infrastruktur Melalui Pendanaan KPBU	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X		
	Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Pemda dan Badan Usaha	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Forum Kolaborasi	Pengembangan Forum Masyarakat	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X	X	
				Pengembangan Sistem Komunikasi online antara masyarakat dan pemerintah	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X				
				Pengembangan Kerjasama lembaga pendidikan	Kota Serang dan Kota Cilegon	KEMDIKTISA INTEK					X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Alternatif Pendanaan	Bantuan CSR Untuk Pengembangan Infrastruktur	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X	X	X	X	X
				Insentif Pengelolaan CBD kepada pengembang swasta	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA		X	X	X	X
				Pengembangan Fasilitas Umum sebagai Syarat Perizinan	Kota Serang dan Kota Cilegon	PEMDA	X				

Sumber: Hasil Analisis, 2025

8.2.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PU dan Non PU Fokus Industri

Pengembangan kawasan prioritas industri dalam rangka memperkuat Struktur Industri Hulu - Hilir Khususnya Industri Petrokimia & Baja serta Industri Turunannya guna Mendorong Nilai Tambah & Manfaat Ekonomi bagi Provinsi Banten, dilaksanakan melalui: (1) Penguatan keterkaitan industri hulu ke hilir melalui kebijakan pembatasan ekspor impor bahan baku industri dan peningkatan kapasitas produksi industri petrokimia dan baja; (2) Peningkatan konektivitas dan jalur logistik untuk mendukung pengembangan kawasan industri baru; (3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan industri khususnya industri petrokimia dan smelter baja; serta (4) Penguatan ketenagakerjaan industri melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia (SDM) industri.

Tabel 8.5 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Sektor Industri

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
(S4 - T4 - T5) Penguatan keterkaitan industri hulu ke hilir melalui kebijakan pembatasan	Kebijakan pembatasan ekspor impor bahan baku industri	Regulasi Ekspor Impor	Pembatasan Ekspor Impor	Pembatasan impor bahan baku petrokimia & baja	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	X	X	X	X	X
				Pembatasan ekspor barang setengah jadi petrokimia & baja	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	X	X	X	X	X
				Peningkatan pajak impor bahan baku industri petrokimia & baja	Kawasan Industri Banten	KEMENDAG	X	X	X	X	X
			Insentif Industri	Subsidi harga produk industri hulu petrokimia dan baja	Kawasan Industri Banten	KEMENDAG	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
ekspor impor bahan baku industri dan peningkatan kapasitas produksi industri petrokimia dan baja				Penetapan ambang tarif produk industri hulu petrokimia & baja	Kawasan Industri Banten	KEMENDAG	x	x	x	x	x
				Kemudahan fiskal produk industri hulu petrokimia & baja	Kawasan Industri Banten	KEMENDAG	x	x	x	x	x
			B to B	Fasilitasi perjanjian kerjasama industri hulu & hilir untuk penggunaan TKDN	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x		
				Fasilitasi forum dan koordinasi industri hulu & hilir petrokimia dan baja	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
		Pengetatan Kebijakan Penggunaan TKDN	Kemudahan	Kemudahan akses pasar bagi produk industri petrokimia & baja yang menggunakan TKDN	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
				Kemudahan perijinan bagi ekspansi industri petrokimia & baja yang menggunakan TKDN	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
				Keringanan pajak industri petrokimia dan baja yang menggunakan TKDN	Kawasan Industri Banten	KEMENDAG	x	x	x	x	x
	Peningkatan kapasitas produksi industri petrokimia & baja	Peralatan	Alat dan Mesin	Revitalisasi alat dan mesin produksi	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	
				Pemanfaatan teknologi mutakhir terkait peralatan dan permesinan	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	
		Pendanaan	Pendanaan	Pengembangan alternatif skema pendanaan untuk ekspansi	Kawasan Industri Banten	KEMENDAG	x	x	x	x	
				Efisiensi pendanaan operasional	Kawasan Industri Banten	KEMENDAG	x	x	x	x	
		Keberlanjutan	Industri Berkelanjutan	Pendefinisian ulang dan klarifikasi target emisi	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
				Penggunaan teknologi ramah lingkungan	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
(S3 - T1 - T3) Peningkatan konektivitas dan jalur logistik untuk mendukung pengembangan kawasan industri baru	Peningkatan kapasitas jalur angkutan darat	Jaringan Transportasi Rel	Jaringan rel	Percepatan pembangunan jaringan rel	Kawasan Industri Banten	KEMENHUB	x	x	x		
				Rehabilitasi persimpangan rel	Kawasan Industri Banten	KEMENHUB	x	x	x		
			Moda	Evaluasi mode <i>share</i> angkutan barang	Kawasan Industri Banten	KEMENHUB	x	x			
				Pembangunan Dry Port yang terhubung dengan jalur kereta api	Kawasan Industri Banten	KEMENHUB	x	x	x		
			Operator	Upaya membuka peluang swasta sebagai operator kereta	Kawasan Industri Banten	KEMENHUB	x	x			
				Penetapan pihak swasta sebagai operator kereta logistik	Kawasan Industri Banten	KEMENHUB	x	x	x		
		Jaringan Jalan	Jalan								
				Peningkatan kapasitas jaringan jalan	Kawasan Industri Banten	KEMEN PU	x	x	x	x	x

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
	Peningkatan kapasitas hub & pelabuhan		Rekayasa	Pembangunan jalan baru	Kawasan Industri Banten	KEMEN PU	x	x	x	x	x
				Penjadwalan lalu lintas logistik	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x			
		Koleksi Logistik	<i>Smallholder Storage</i>	Pembangunan titik koleksi logistik skala lokal	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x	x		
				Pembangunan titik koleksi logistik skala kawasan (Spoke)	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x	x		
			<i>Transshipment</i>	Peningkatan kerjasama optimalisasi pelabuhan	Kawasan Industri Banten	KEMENHUB	x	x	x		
				Peningkatan daya dukung pelabuhan berkala	Kawasan Industri Banten	KEMENHUB	x	x	x	x	
			<i>Inland Distribution Port</i>	Upaya minimalisir pergerakan kontainer kosong	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x	x	x	x
				Upaya pencapaian Throughput Dryport	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x	x	x	x
		Teknologi Angkutan Barang	<i>Online Delivery Order</i>	Realisasi same-day delivery logistik parcel	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x	x	x	
				Otomasi sistem <i>fullfilment</i> dan <i>warehouse</i>	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x	x		
			<i>E-Procurement</i>	Efisiensi kegiatan berdasarkan praktik sosial budaya	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x			
				Mendorong kolaborasi antara organisasi dan <i>supplier</i>	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x	x	x	
			<i>Vehicle Management System</i>	Pemberlakuan kebijakan zero ODOL	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x	x	x	x
				Penerapan RFID pada angkutan barang	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x	x	x	x
(S4 - T5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan industri khususnya industri petrokimia & smelter baja	Pengembangan sistem informasi berbasis digital industri petrokimia & baja	Manajemen Informasi	Kelembagaan	Peningkatan kerjasama antar sektor terkait TI	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x		
				Sinkronisasi sistem informasi	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x		
			Jaminan Keamanan	Perlindungan data konsumen	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
				Penguatan jaringan sekuritas	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
			<i>Tracking</i>	Penerapan <i>real-time tracking system</i>	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
				Penerapan <i>warehouse management system</i>	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
(S2 - S4 - T3) Penguatan ketenagakerjaan industri melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia (SDM) industri	Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal	Sistem Informasi Industri	Database	Database neraca perdagangan industri petrokimia	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
				Database neraca perdagangan industri baja	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
			Integrasi Informasi	Pengembangan akses informasi skala nasional dan global	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
				Maintenance dan Updating	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
	Peningkatan keterampilan tenaga kerja industri	Kebijakan Terkait Ketenagakerjaan	Peraturan Tenaga Kerja	Pemberlakuan kebijakan proporsi tenaga kerja lokal	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x	x	x	
				Pemberian intensif industri yang menyerap tenaga kerja lokal	Kawasan Industri Banten	PEMDA	x	x	x	x	x
		Peningkatan Kolaborasi	Perjanjian Kerjasama	MoU antara sektor industri dengan sektor pendidikan	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x			
				Program internship	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
	Peningkatan keterampilan tenaga kerja industri	Sarana Pendidikan Bidang Industri	Pembangunan - Pengembangan	Pembangunan/Rehabilitasi sekolah menengah kejuruan	Kawasan Industri Banten	KEMENDIKDA SMEN	x	x			
				Pembangunan/Pengembangan politeknik industri	Kawasan Industri Banten	KEMDIKTISAIN TEK	x	x	x		
				Pembangunan/Pengembangan lembaga diklat bidang industri	Kawasan Industri Banten	KEMDIKTISAIN TEK	x	x	x		
				Peningkatan tenaga pendidik yang kompeten	Kawasan Industri Banten	KEMDIKTISAIN TEK	x	x	x		
		Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi	Diklat dan Sertifikasi	Pembangunan/Pengembangan sertifikasi keahlian tenaga kerja industri	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	
				Pelaksanaan diklat tenaga kerja industri	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
				Sertifikasi keahlian tenaga kerja industri	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
				Penyediaan ikatan kerja lulusan sekolah kejuruan	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
				Penyediaan lapangan kerja dari industri terhadap lulusan sekolah kejuruan	Kawasan Industri Banten	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
	Penyediaan fasilitas umum	Fasilitas Kesehatan dan Infrastruktur Dasar	Rumah Sakit	Pembangunan rumah sakit di sekitar kawasan industri	Kawasan Industri Banten	KEMENKES	x	x	x	x	
				Pembangunan pengolahan limbah B3 rumah sakit	Kawasan Industri Banten	KEMENKES	x	x	x		
		Sumber Daya Air		Pengendalian daya rusak air	Kawasan Industri Banten	KEMEN PU	x	x	x	x	x
				Pembangunan Bendungan Cidanau	Kawasan Industri Banten	KEMEN PU/SWASTA		x	x	x	x

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
		Air Bersih		Penyediaan air bersih	Kawasan Industri Banten	KEMEN PU	x	x	x	x	
				Pembuatan intake dan reservoir SPAM	Kawasan Industri Banten	KEMEN PU	x	x	x	x	
				Pembangunan/Pengembangan instalasi pengolahan air bersih	Kawasan Industri Banten	KEMEN PU	x	x	x		
		Sanitasi		Penyediaan pengolahan air limbah	Kawasan Industri Banten	KEMEN PU	x				
				Penyediaan pengolahan persampahan	Kawasan Industri Banten	KEMEN PU	x	x			
				Penanganan limbah B3 industri	Kawasan Industri Banten	KEMEN LH	x	x	x	x	
		Rumah Susun		Pembangunan rumah susun pekerja industri	Kawasan Industri Banten	KEMEN PKP	x	x			
				Pemeliharaan rumah susun eksisting	Kawasan Industri Banten	KEMEN PKP	x	x			

Sumber: Hasil Analisis, 2025

8.2.3. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PU dan Non PU Fokus Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan: (1) Penguatan destinasi cagar budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diversifikasi atraksi pariwisata; (2) Pengembangan infrastruktur pariwisata mendukung peningkatan kualitas destinasi wisat; (3) Penguatan konektivitas dan aksesibilitas menuju destinasi wisata; (4) Integrasi pengembangan destinasi wisata Banten melalui paket wisata terintegrasi dan penguatan kelembagaan; serta (5) Pengembangan pariwisata berbasis pengurangan risiko bencana

Tabel 8.6 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Sektor Pariwisata

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
(S4 - S5 - T1) Penguatan destinasi cagar budaya dan	Penguatan destinasi wisata cagar budaya	Kota Lama Banten	Kota Lama Banten	Revitalisasi Kawasan Banten Lama	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	x				
				Pengembangan museum sejarah Banten Lama	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	x	x			
				Pengembangan wisata berbasis religi	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	x	x			

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
pemberdayaan masyarakat lokal untuk diversifikasi atraksi pariwisata	Pemberdayaan masyarakat lokal	Pariwisata Labuan	Pariwisata Labuan	Urban renewal Kawasan Pariwisata Labuan	Kabupaten Pandeglang	KEMENPU				X	X
		Keterlibatan Masyarakat	Masyarakat Lokal	Pelatihan kelompok wisata untuk pendukung wisata	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X			
				Penyuluhan kepada masyarakat lokal untuk sadar wisata	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X			
			Ekonomi Lokal	Pembangunan fasilitas penunjang ekonomi kreatif	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X	X		
				Pemberian fasilitas penunjang ekonomi kreatif	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X	X		
				Pembangunan IPAL	Kawasan Banten Lama	KEMEN PU	X	X			
(S1 - S2 - S3 - T1) Pengembangan infrastruktur pariwisata mendukung peningkatan kualitas destinasi wisata	Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata	Infrastruktur	Sanitasi	Pembangunnan TPA	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	X
				Pembangunan WTP	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X		
			Air Minum	Pembangunan jaringan perpipaan	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	
				Pembangunan Bendungan	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	
			Air Baku	Pembangunan Intake	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	
				Pembangunan jaringan transmisi	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	
		Perumahan	RTLH	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PKP	X	X	X		
				Program beautifikasi RTLH	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PKP	X	X	X		
			Home Stay	Pembangunan homestay	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X	X		
				Pemberdayaan masyarakat pemilik	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X			
	Penyiapan fasilitas dan utilitas umum	Energi	Listrik	Pembangunan/Pengembangan jaringan listrik di kawasan wisata	Kawasan Banten Lama	ESDM	X	X			
				Pembangunan kawasan solar panel untuk supply listrik	Kawasan Banten Lama	ESDM	X	X			

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Telekomunikasi	Pengembangan fasilitas internet di kawasan wisata	Kawasan Banten Lama	KOMDIGI	X	X			
		Fasilitas Kesehatan dan Keamanan	Rumah Sakit / Puskesmas	Pembangunan Rumah Sakit/Puskesmas	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMENKES	X	X			
			Sertifikasi	Percepatan program sertifikat CHSE pariwisata	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X			
				Melibatkan pelaku usaha dan asosiasi dalam sertifikasi	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X	X	X	X
			Keamanan	Penyediaan fasilitas pengaduan wisatawan real time	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X	X	X	X
				Fasilitas jaminan keamanan data pribadi wisatawan	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X	X	X	X
(S2 - S3 - T5) Penguatan konektivitas dan aksesibilitas menuju destinasi wisata	Peningkatan konektivitas dan simpul transportasi	Relevant Road	Jalan Tol	Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X				
				Penyediaan rest area guna mendukung pariwisata	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X		
			Jalan Nasional	Peningkatan Jalan Nasional menuju DTW	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	
				Penyediaan perlengkapan jalan	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	
				Preservasi Jalan Nasional menuju DTW	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU			X	X	
			Jalan Daerah	Peningkatan jalan daerah menuju DTW	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	PEMDA	X	X	X	X	
				Penyediaan perlengkapan jalan	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	PEMDA	X	X	X	X	
		Simpul Transportasi	Simpul Perairan	Pengembangan pelabuhan penyebrangan Merak	Kota Cilegon	KEMENHUB	X	X	X		
				Pembagian pintu masuk reguler dan pintu masuk wisata Merak-Cigading-Ciwandan	Kota Cilegon	KEMENHUB	X	X	X		
			Bandara	Pembangunan Bandara Panimbang	Kabupaten Pandeglang	KEMENHUB	X	X	X	X	

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Kereta Api	Integrasi Bandara dengan Jalan Tol Serang - Panimbang	Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU		X	X	X	X
				Reaktivasi Rel Kereta Api Rangkasbitung - Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	KEMENHUB	X	X	X	X	X
				Pembangunan Stasiun Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	KEMENHUB		X	X		
	Pilihan transportasi lokal berkelanjutan	Aksesibilitas Lokal	Jalan	Pembangunan Jalan & Jembatan untuk akses destinasi wisata	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X		
				Pembangunan pagar pengaman jalan	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X		
			Wayfinding	Penyediaan fasilitas informasi & perlengkapan jalan	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMENHUB	X	X	X		
				Penyediaan signane destinasi tetap dan/atau temporer	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMENHUB	X	X	X		
			Rest Area	Pembangunan Rest Area di jalan non tol	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	PEMDA	X	X	X		
				Pengembangan keberagaman produk makanan/minuman	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X	X	X	X
		Moda transportasi	Moda	Penentuan moda transportasi umum berbasis ramah lingkungan	Kawasan Banten Lama	KEMENHUB	X	X	X	X	
				Penentuan tarif moda transportasi	Kawasan Banten Lama	KEMENHUB	X	X	X	X	
			Jalur Pedestrian	Penentuan jalur pejalan kaki	Kawasan Banten Lama	PEMDA	X	X	X		
				Pembangunan jalur pejalan kaki dan penyediaan rest point	Kawasan Banten Lama	PEMDA	X	X	X	X	
			Integrasi	Integrasi antar moda pendukung pariwisata	Kawasan Banten Lama	PEMDA	X	X	X	X	
				Pembangunan fasilitas alih moda pendukung pariwisata	Kawasan Banten Lama	PEMDA	X	X	X	X	
		Paket wisata	Destinasi	Pengembangan paket wisata tematik	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X	X	X	
				Pengembangan transfer wisatawan	Kawasan Banten Lama	KEMENPAR	X	X	X	X	
		Manajemen Paket Wisata	Event	Harmonisasi informasi agenda pariwisata di seluruh wilayah	Provinsi Banten	PEMDA	X	X	X	X	X
				Sinkronisasi pelaksanaan event pariwisata	Provinsi Banten	PEMDA	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
(S1 - S5 - T4) Integrasi pengembangan destinasi wisata Banten melalui paket wisata terintegrasi dan penguatan kelembagaan	Pengembangan paket wisata terintegrasi		Atraksi	Inovasi atraksi wisata masing - masing DTW	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x	x	x
				Penataan kawasan sebagai tempat pertunjukan atraksi wisata	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x	x	x
			Produk	Penyediaan produk unggulan masing - masing DTW	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x	x	x
				Penjaminan mutu produk unggulan	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x	x	x
			Promosi	<i>Build Up</i> Brand Filter pemasaran atraksi wisata dan product unggulan	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x	x	x
				<i>Sharing</i> konten media sosial yang relevan dengan Brand	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x	x	x
			Inovasi	Pembangunan <i>tourism online resource centre</i>	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x	x	x
				Sistem informasi pemasaran berbasis data <i>real time</i>	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x	x	x
			Integrasi Layanan	Integrasi layanan, jadwal, dan tarif atraksi masing - masing DTW	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x	x	x
				Integrasi informasi Tour Operator dan Travel Agency	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x	x	x
	Pengembangan kelembagaan wisata terintegrasi	Pengelolaan	Pengelolaan	MoU antar agen wisata	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x		
				Pembentukan wadah komunikasi antar pelaku wisata	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x		
				Pembentukan lembaga pengelolaan	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x		
		Kepastian Pendanaan	Skema Pendanaan	Pengembangan alternatif skema pendanaan wisata terintegrasi	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x		
				Skema sponsor event pariwisata	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x		
				Pemberian intensif dan disinsentif pada agen wisata	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x		
			Investasi	Mekanisme investasi perusahaan pariwisata pada lahan lokal	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x		
				Dorongan investasi Pemerintah dalam dana pemasaran	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x		
			<i>Visitor Experience</i>	Scaling-Up sanggar budaya eksisting	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x		
				Hibah inovasi visit experience berbasis bisnis berkelanjutan	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x		
			Integrasi Sistem Biaya	Standarisasi dan optimalisasi proses keuangan sektor wisata	Kawasan Banten Lama	PEMDA	x	x	x		

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
(S1 - S2 - T3) Pengembangan pariwisata berbasis pengurangan risiko bencana	Peringatan dini dan pengelolaan risiko bencana		<i>Profitability</i>	Liberalisasi layanan pembiayaan sektor pariwisata	Kawasan Banten Lama	PEMDA	X	X	X		
				Fasilitasi dan inisiasi akses pelaku usaha ke sumber funding	Kawasan Banten Lama	PEMDA	X	X	X		
				Pedoman pengadaan tanah dan resettlement	Kawasan Banten Lama	PEMDA	X	X	X		
		Teknologi Peringatan Dini	<i>Early Warning Mechanism</i>	Pengembangan platform penyebaran informasi peringatan bencana	Kawasan Banten Lama	BMKG	X	X	X	X	
				Penentuan assembly point	Kawasan Banten Lama	BMKG	X	X	X		
				Kolaborasi dengan BMKG	Kawasan Banten Lama	BMKG	X	X	X		
		Fasilitas Pengelolaan Risiko Bencana	<i>Remote Sensing</i>	Pengembangan sistem informasi manajemen risiko bencana	Kawasan Banten Lama	BMKG	X	X	X	X	X
				Pengenalan peta elektronik risiko bencana pada masyarakat	Kawasan Banten Lama	BMKG	X	X	X		
				Penerapan sistem konstruksi modular dan Pre-Fabrikasi	Kawasan Banten Lama	BNPB	X	X	X		
		Keamanan	Material Bangunan	Prioritas pemilihan material bangunan berketahanan gempa	Kawasan Banten Lama	BNPB	X	X	X	X	
				Pembangunan pos pengaduan wisatawan	Kawasan Banten Lama	PEMDA	X	X	X	X	
				Penguatan kesadaran publik	Kawasan Banten Lama	PEMDA	X	X	X	X	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

8.2.4. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PU dan Non PU Kawasan Afirmasi

Pengembangan kawasan perdesaan tertinggal dilakukan dengan: (1) Peningkatan layanan dasar permukiman melalui peningkatan infrastruktur air baku, air minum, dan sanitasi; (2) Pengembangan sistem konektivitas dan jalur logistik untuk memperlancar lalu lintas barang dan orang; (3) Peningkatan dukungan terhadap komoditas unggulan untuk mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi; (4) Mempertahankan keunikan sosial dan daya dukung lingkungan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di wilayah Banten Selatan.

Tabel 8.7 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Kawasan Afirmasi

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
(W3 – W4) Peningkatan layanan dasar permukiman melalui peningkatan infrastruktur air baku, air minum, dan sanitasi	Penyediaan infrastruktur dasar.	Sumber Daya Air	Air minum	Optimalisasi jaringan SPAM kabupaten/kota.	Kab. Lebak	KEMEN PU	X	X	X	X	X
			Air Baku	Pembangunan Bendungan Karian	Kab. Lebak	KEMEN PU	X	X	X	X	
				Rehabilitasi irigasi	Kab. Lebak	PEMDA	X	X	X	X	X
		Sanitasi	Air limbah.	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala komunal.	Kab. Lebak	KEMEN PU	X	X	X	X	X
			Sampah	Pembangunan TPST Regional Cileles	Kab. Lebak	KEMENPU			X	X	X
				Pembangunan TPS 3R Leuwidamar	Kab. Lebak	KEMENPU	X				
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan swadaya.	Penyediaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terintegrasi dengan Penanganan Permukiman Kumuh.	Kab. Lebak	KEMEN PKP	X	X	X	X	
			Permukiman kumuh.	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.	Kab. Lebak	KEMEN PKP	X	X	X	X	X
		Energi dan Tele-komunikasi	Telekomunikasi	Pembangunan <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> .	Kab. Lebak	KEMENKOMDIGI	X	X	X	X	X
				Pembangunan jaringan internet melalui pembangunan Jaringan <i>Fiber Optic</i> .	Kab. Lebak	KEMENKOMDIGI	X	X	X	X	X
	Pengelolaan pembangunan dan peningkatan kemampuan kelembagaan daerah	Kelembagaan Daerah	Kelembagaan Pemerintah Desa	Peningkatan kompetensi aparat pemerintah dan pengurus kelembagaan desa	Kab. Lebak	KEMENDAGRI	X	X	X	X	X
			Kerjasama antar daerah	Pengadaan kerjasama dalam pengembangan <i>Governance</i> dan SDM bersama daerah yang menjadi mitra	Kab. Lebak	KEMENDAGRI	X	X	X	X	X
(W5 – O3 – T2) Pengembangan sistem konektivitas	Pengembangan simpul dan moda transportasi	Simpul transportasi	Simpul darat	Peningkatan pelayanan terminal	Kab. Lebak	PEMDA	X	X	X	X	X
		Moda transportasi	Moda transportasi darat	Penyediaan angkutan umum dalam kota	Kab. Lebak	KEMENHUB	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
dan jalur logistik untuk memperlancar lalu lintas barang dan orang	Penyediaan akses dan preservasi jaringan jalan	Konektivitas	Jaringan jalan	Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang	Kab. Lebak	KEMEN PU	X	X	X	X	X
				Penyelesaian pembangunan simpang susun Cikulur	Kab. Lebak	KEMEN PU	X	X	X	X	X
				Peningkatan akses jalan dari dan menuju jalan tol Serang - Panimbang	Kab. Lebak	PEMDA	X	X	X	X	X
				Preservasi jalan kabupaten (<i>relevant road</i>)	Kab. Lebak	KEMEN PU	X	X	X	X	X
				Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis.	Kab. Lebak	PEMDA	X	X	X	X	X
				Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Ruas Bts. Kota Pandeglang – Bts. Kota Rangkasbitung	Kab. Lebak	KEMENPU		X	X		
			Drainase Jalan	Revitalisasi drainase jalan nasional.	Kab. Lebak	KEMEN PU	X	X	X	X	X
(S1 – O1 – O2 – T1) Peningkatan dukungan terhadap komoditas unggulan untuk mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi	Penciptaan nilai tambah ekonomi sektor pariwisata	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan SDM pariwisata	Pelatihan kelompok wisata untuk pendukung wisata	Kawasan Pansela Kawasan Baduy	KEMENPAR EKRAF	X	X	X	X	X
				Penyuluhan kepada masyarakat lokal untuk sadar wisata	Kawasan Pansela Kawasan Baduy	KEMENPAR EKRAF	X	X	X	X	X
		Infrastruktur Pariwisata	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata	Pembangunan fasilitas penunjang ekonomi kreatif	Kawasan Pansela Kawasan Baduy	KEMENPAR EKRAF	X	X	X	X	X
				Pemberian fasilitas penunjang ekonomi kreatif	Kawasan Pansela Kawasan Baduy	KEMENPAR EKRAF	X	X	X	X	X
				Pengembangan destinasi pendukung wisata	Kawasan Pansela Kawasan Baduy	KEMENPAR EKRAF	X	X	X	X	X
				Peningkatan 6A pariwisata	Kawasan Pansela	KEMENPAR EKRAF	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
(S4 - T5) Mempertahankan keunikan sosial dan					Kawasan Baduy						
				Pengembangan pusat informasi dan fasilitas UMKM	Kawasan Pansela Kawasan Baduy	KEMENPAR EKRAF	X	X	X	X	X
	Penyediaan sarana-prasarana kesehatan dan pendidikan	Kesehatan	Fasilitas kesehatan	Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana kesehatan.	Kab. Lebak	KEMEN PU	X	X	X	X	
				Rehabilitasi Dan Renovasi Rumah Sakit	Kab. Lebak	KEMEN PU			X	X	X
				Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan.	Kab. Lebak	KEMENKES	X	X	X		
		Pendidikan	Fasilitas pendidikan	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan.	Kab. Lebak	KEMEN PU	X	X	X	X	
				Penyediaan sarana dan bahan pembelajaran berbasis elektronik.	Kab. Lebak	KEMENDIKBUD	X	X	X	X	X
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kesehatan	Stunting	Penyuluhan dan pelatihan masyarakat terkait pertumbuhan bayi dan anak.	Kab. Lebak	KEMENKES	X	X	X	X	X
				Pelatihan dan pembinaan gizi masyarakat.	Kab. Lebak	KEMENKES	X	X	X	X	X
		Pendidikan	Tingkat Pendidikan Lanjutan	Penyediaan pendidikan dan pelatihan kejuruan hingga vokasi.	Kab. Lebak	KEMENDIKBUD	X	X	X	X	X
		Ekonomi Daerah	Pemasaran produk	Penyelenggaraan bantuan tunai bagi keluarga miskin.	Kab. Lebak	KEMENSOS	X	X	X	X	X
				Pengembangan literasi digital untuk masyarakat.	Kab. Lebak	KEMENKOMDIGI	X	X	X	X	X
				Pelatihan dan pengembangan pemasaran produk ekonomi berbasis digital.	Kab. Lebak	KEMENKOMDIGI, KEMEN KOPUKM	X	X	X	X	X
(S4 - T5) Mempertahankan keunikan sosial dan	Peningkatan perekonomian masyarakat	Sektor Unggulan Lokal	Perikanan	Penyelenggaraan bantuan benih ikan.	Kab. Lebak	KEMEN KP	X	X	X	X	
				Penyelenggaraan bantuan benih rumput laut.	Kab. Lebak	KEMEN KP	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
daya dukung lingkungan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di wilayah Banten Selatan		Komunitas dan kerjasama		Penyediaan sarana-dan prasarana kelautan perikanan.	Kab. Lebak	KEMEN KP	X	X	X	X	X
			Koperasi	Pemberian fasilitas pinjaman pengembangan usaha.	Kab. Lebak	KEMEN KOPUKM	X	X			
			Kerjasama	Pengembangan usaha ekonomi yang terintegrasi BUM Desa.	Kab. Lebak	KDPDTT	X	X			
			Pemasaran	Penguatan kapasitas usaha melalui perluasan jangkauan pemasaran (E-Commerce/Online).	Kab. Lebak	KEMEN KOPUKM	X	X			

Sumber: Hasil Analisis, 2025

8.2.5. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PU dan Non PU Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan perdesaan tertinggal dilakukan dengan: (1) Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan penguatan kelembagaan; (2) Pengembangan sistem konektivitas dan jalur logistik untuk memperlancar lalu lintas barang dan orang; (3) Pengurangan risiko bencana untuk menjaga ketahanan wilayah Banten Selatan; serta (4) Peningkatan layanan dasar permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 8.8 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Kawasan Pertanian

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
(S1 - S5 - T2) Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian melalui peningkatan	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Infrastruktur Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi	Pembangunan Daerah Irigasi	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	X
				Rehabilitasi Daerah Irigasi	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	X
				Peningkatan Jaringan Irigasi	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	X
				Peningkatan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA				X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
sarana & prasarana pertanian dan penguatan kelembagaan	Penguatan kelembagaan	Teknologi Budidaya Pertanian	Tampung Air	Pembangunan Bendungan	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	X
			Alat dan mesin pertanian	Pengembangan alat dan mesin untuk pembenihan, penanaman, pemupukan, pemanenan, dan penggilingan	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	X	X	X	X	
				Penerapan teknologi SDA untuk teknik penyiraman tanaman	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	X	X	X	X	
				Optimalisasi penggunaan perangkat teknologi informasi	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	X	X	X	X	X
			Pembenihan dan Pemupukan	Peningkatan produksi benih unggul bersertifikat	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMENTAN	X	X	X	X	X
				Pemberdayaan penangkar benih	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMENTAN	X	X	X	X	X
				Penerapan inovasi pestisida secara efektif dan efisien	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMENTAN	X	X	X	X	X
			Akses Pembiayaan dan Kelembagaan Pertanian	Pemberian kredit mikro	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMENTAN	X	X	X	X	X
				Peningkatan akses perlindungan usaha pertanian	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMENTAN	X	X	X	X	X
				Pembentukan lembaga berbasis masyarakat petani	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMENTAN	X	X	X	X	X
		Kapasitas SDM	Edukasi	Bimbingan dan penyuluhan SDM Pertanian	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMENTAN	X	X	X	X	X
(S1 - S4 - T1 - T3) Pengembangan sistem konektivitas dan jalur logistik untuk memperlancar arus lalu lintas barang dan orang	Peningkatan konektivitas	Jalan Umum	Jalan Tol	Percepatan penyelesaian Jalan Tol Serang - Panimbang	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	X				
				Integrasi Jalan Tol dengan Jalan Nasional / Jalan Kabupaten	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	
			Jalan Non Tol	Pembangunan jalan radial menuju Pansela Banten	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	
				Penigkatan/Rehabilitasi Jalan Provinsi/Kabupaten	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	
				Peningkatan jalur logistik dan orang	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	
		Jalan Pertanian	Jalan Desa	Peningkatan jalan dari pusat produksi menuju tempat pengumpulan	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	X	X	X	X	
				Peningkatan jalur distribusi hasil pertanian menuju pasar	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	X	X	X		
			Jalan Usaha Tani	Peningkatan kualitas jalan usaha tani	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	X	X	X		

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
	Penguatan logistik pertanian	Logistik Pertanian	Pengumpul an Hasil Pertanian	Pembangunan area kumpul angkutan barang	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMNHUB	x	x	x		
				Pembangunan pergudangan hasil pertanian	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMENTAN	x	x	x		
			Distribusi Hasil Pertanian	Penyediaan angkutan hasil pertanian	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMENTAN	x	x	x		
(S4 - T4 - T5) Pengurangan risiko bencana untuk menjaga ketahanan wilayah Banten Selatan	Peringatan dini dan pengelolaan risiko bencana	Teknologi Peringatan Dini	Early Warning Mechanism	Pengembangan platform penyebaran informasi peringatan bencana	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BMKG	x	x	x	x	
				Penentuan assembly point	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BMKG	x	x	x		
				Kolaborasi dengan BMKG	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BMKG	x	x	x		
			Remote Sensing	Pengembangan sistem informasi manajemen risiko bencana	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BMKG	x	x	x	x	x
				Pengenalan peta elektronik risiko bencana pada masyarakat	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BMKG	x	x	x		
		Manajemen Risiko Bencana	Kerentanan Lokasi	Pembangunan bangunan penahan longsor tanah	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BNPB	x	x	x	x	
				Refokusing pelarangan bangunan di zona rawan bencana	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BNPB	x	x	x	x	x
			Pengurangan Risiko	Penanaman pohon di lokasi rawan longsor	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	x	x	x		
				Penguatan masyarakat terkait pengurangan risiko bencana	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	x	x	x	x	x
			Pengendalian Daya Rusak Air	Pengendali Banjir Sungai	Kab. Serang	KEMENPU	x	x	x	x	x
				Penanganan Sempadan Danau	Kab. Serang	KEMENPU			x	x	
(S3 - T1) Peningkatan layanan dasar permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan layanan infrastruktur dasar permukiman	Infrastruktur Dasar	Sanitasi	Pembangunan IPAL	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	x	x	x	x	
				Pembangunan TPA	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	x	x	x	x	x
			Air Minum	Pembangunan Pamsimas	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	x	x	x	x	
				Pembangunan SPAM dan Jaringan Perpipaan	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU			x	x	x
			Air Baku	Pembangunan Bendungan Karian	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	x	x	x	x	
				Pembangunan Intake	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	x	x	x		

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
				Pembangunan Jaringan Transmisi	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PU	X	X	X	X	
		Perumahan	RTLH	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PKP	X	X			
	Peningkatan sarana pelayanan umum	Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit / Puskesmas	Pembangunan Rumah Sakit/Puskesmas	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMENKES	X	X			
		Energi & Telekomunikasi	Listrik	Pembangunan/Pengembangan Jaringan Listrik di wilayah desa sangat tertinggal	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	ESDM	X	X	X		
			Telekomunikasi	Pengembangan fasilitas internet di kawasan desa sangat tertinggal	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KOMDIGI	X	X	X		
				Pembangunan/Pengembangan jaringan BTS	Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KOMDIGI	X	X	X		

Sumber: Hasil Analisis, 2025

8.2.6. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PU dan Non PU Kawasan Rawan Bencana

Pengembangan kawasan rawan bencana dilaksanakan melalui pembangunan *gray infrastructure*, dalam rangka mitigasi ancaman *megathrust* di Pesisir Barat Banten atau Selat Sunda, serta tsunami, di pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang.

Tabel 8.9 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Kawasan Rawan Bencana

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
Penyediaan infrastruktur dalam rangka mitigasi ancaman <i>megathrust</i> dan tsunami	Pembangunan <i>gray infrastructure</i>	Infrastruktur Sumber Daya Air	Pengaman pantai	Pembangunan Pengaman Pantai Perkotaan	Perkotaan Cilegon, Perkotaan Panimbang, Kab. Serang, Kab. Lebak	KEMEN PU			X	X	X
				Pembangunan Pengaman Pantai Kawasan Pariwisata	Kab. Pandeglang	KEMEN PU			X	X	X
	Peningkatan upaya	Pencegahan Bencana	Mitigasi bencana	Penyediaan infrastruktur mitigasi bencana	Kawasan Rawan Bencana Banten	PEMDA	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	pencegahan dan mitigasi bencana		Refokusing pelarangan bangunan di sempadan pantai	Kawasan Rawan Bencana Banten	ATR/BPN	X	X	X	X	
			Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya	Kawasan Rawan Bencana Banten	BNPB	X	X	X	X	X
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya	Kawasan Rawan Bencana Banten	BNPB	X	X	X	X	X
			Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya	Kawasan Rawan Bencana Banten	BNPB	X	X	X	X	X
			Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Kawasan Rawan Bencana Banten	BNPB	X	X	X	X	X
			Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya untuk Penanganan Darurat bencana Tsunami berdasarkan Perencanaan Kontijensi	Kawasan Rawan Bencana Banten	BNPB	X	X	X	X	X
			Pembentukan desa/kelurahan Tangguh Bencana.	Kawasan Rawan Bencana Banten	BNPB/BPBD	X	X	X	X	X
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.	Kawasan Rawan Bencana Banten	BNPB/BPBD	X	X	X	X	X
			Penguatan kelembagaan bencana daerah.	Kawasan Rawan Bencana Banten	BNPB/BPBD	X	X	X	X	X

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW

Bab ini berisikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW, antara lain dengan melakukan pengamatan terkait perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW digunakan sebagai klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW selanjutnya.

9.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang - Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam menyiapkan dokumen RPIW, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan RPIW.

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (*living document*).

9.2. Tujuan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW bertujuan:

1. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Evaluasi merupakan tindakan untuk mengetahui pencapaian/ implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari dokumen RPIW berdasarkan *output* (infrastruktur terbangun), *outcome* (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun), *benefit* (manfaat dari berfungsinya infrastruktur), *impact* (dampak dari terimplementasikannya dokumen RPIW), dan rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

9.3. Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RPIW
 - a. Pemantauan tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW (Rencana Aksi Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Wilayah per tahun).
 - b. Pemantauan lima (5) tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW (Rencana Aksi Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Wilayah per 5 tahun).
2. Evaluasi Pelaksanaan RPIW
 - a. Evaluasi tahunan (*output dan outcome*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.
 - b. Evaluasi lima (5) tahunan (*benefit, impact, dan keberlanjutan*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.



www.pu.go.id